

E-ISSN: 2987-5439
P-ISSN: 2987-3649

Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series

Vol. 2, No. 2 (2024)



**Published by:
Universitas Sebelas Maret**

Analisis Potensi Peternak Sapi Potong di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Yesi Rahmawati¹, Sutrisno Hadi Purnomo², Minar Ferichani³

^{1,2,3}Program Studi S2 Agribisnis, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutami no 36 Ketingan Surakarta

Email : yesirahmawati05@student.uns.ac.id, sutrisnohadi@staff.uns.ac.id,
minarferichani@staff.uns.ac.id

Abstract: *The potential of beef cattle farming in Sumberrejo District, Bojonegoro Regency, has a significant impact on the local economy and community welfare. Through the use of Artificial Insemination (AI), the reproductive success rate of beef cattle has increased, reflected in a high population of crossbred cattle. Data analysis showed a varied distribution in the number and age of Ongole (PO) and IB-produced beef cattle in different villages, emphasizing the need for an active role of the Regional Implementation Unit (UPTD) in raising awareness and skills of farmers. Training and counseling on feed processing techniques also need to be improved to increase beef cattle productivity. By understanding and utilizing the potential of beef cattle farming, it can open up wider economic opportunities for rural communities and support local economic growth in a sustainable manner.*

Keywords: *Beef Cattle, Potential Areas, Artificial Insemination*

Abstrak: Potensi peternakan sapi potong di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penggunaan Inseminasi Buatan (IB), tingkat keberhasilan reproduksi sapi potong meningkat, tercermin dari populasi sapi cross yang tinggi. Analisis data menunjukkan distribusi yang bervariasi dalam jumlah dan usia sapi potong peranakan Ongole (PO) dan hasil IB di berbagai desa, menekankan perlunya peran aktif Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan peternak. Pelatihan dan penyuluhan teknik pengolahan pakan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas sapi potong. Dengan memahami dan memanfaatkan potensi peternakan sapi potong, dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sapi Potong, Daerah Potensial, Inseminasi Buatan

1. PENDAHULUAN

Sektor peternakan penting bagi Indonesia karena berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat (Soleh, 2014). Beberapa alasan mengapa sektor peternakan penting salah satunya adalah dikarenakan peternakan memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peternakan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di negara ini. Dengan memiliki sektor peternakan yang kuat, Indonesia pun dapat memproduksi kebutuhan pokok sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor produk peternakan dari negara lain.

Menurut Ramadan (2016) pembangunan pada sub sektor peternakan merupakan sektor yang memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Dalam konteks ini lah peternakan dapat menjadi peluang bagi masyarakat pedesaan yang notabene masih seringkali dicap terbelakang untuk meningkatkan perekonomian mereka. Perhatikan pada hal ini perlu diperhatikan oleh semua elemen stakeholder demi stabilitas bangsa. Sebab jika hanya ada kelas-kelas tertentu yang menikmati perkembangan ekonomi ini, maka yang terjadi adalah sebuah ketidakadilan yang mengganggu stabilitas sebuah bangsa. Pertumbuhan dengan hasil produksi yang hanya dinikmati oleh lapisan masyarakat yang terbatas

menimbulkan ketidakadilan dan keresahan yang dengan sendirinya mengganggu stabilitas nasional (Sutawi, 2007).

Peternakan sendiri merupakan salah satu bidang bisnis yang sangat menonjol bagi masyarakat daerah pedesaan. Peternakan mampu menopang roda perekonomian dalam proses supply and demand. Peternakan dalam sektor tertentu mampu dipergunakan sebagai pengoptimalan potensi suatu daerah. Suatu daerah yang secara alami baik dalam segi sosial, lingkungan, dan sumberdaya dapat memiliki potensi peternakan yang tinggi dalam suatu bidang. Usaha peternakan yang secara umum memiliki beberapa kelebihan seperti, pemanfaatan dagingnya sebagai sumber protein, susunya sebagai sumber pemenuhan vitamin, dan kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk kimia bagi tanaman pertanian. Salah satu yang sering dijalankan adalah pada sektor sapi potong. Pada banyak negara seperti Indonesia, sapi potong sering dipelihara oleh masyarakat pedesaan (Rusdiana et al., 2016).

Sapi potong atau sapi yang biasanya ditenakkan untuk tujuan produksi daging adalah salah satu jenis ternak yang umum di pedesaan. Masyarakat pedesaan sering mengandalkan sapi potong untuk memenuhi kebutuhan daging mereka sendiri atau untuk dijual sebagai sumber pendapatan tambahan. Hidayat et al., (2019) menjelaskan bahwa usaha ternak sapi di Indonesia sebagian besar masih merupakan usaha peternakan rakyat yang di pelihara secara tradisional bersama tanaman pangan dan perkebunan. Tujuan pemeliharaan sapi juga terkesan berbeda-beda, mulai dari sapi potong yang ditemukan hingga sebagai sapi pembibitan. Sistem pemeliharaan secara tradisional biasanya dilakukan dengan skala yang cukup kecil, bahkan letak kandang pun tidak jauh dari perumahan bahkan menyatu dengan area perumahan.

Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi untuk beternak sapi potong. Kecamatan ini secara geografis merupakan tanah sawah irigasi tadah hujan. Dengan kondisi geografis kecamatan ini, maka sangat berpeluang menjadikannya untuk mengembangkan ternak potong sapi. Dikutip dari data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro 2022, jumlah populasi sapi potong di kecamatan ini berjumlah sebanyak 6.241 ekor. Jumlah ini meningkat jika dibanding tahun 2021 yang berjumlah sebanyak 6.092 ekor. Dengan adanya kenaikan populasi ini, maka ada peluang bagi masyarakat Kecamatan Sumberrejo untuk lebih masif dalam melakukan ternak sapi potong. Beternak sapi potong pun juga memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Berdasarkan hal diatas, penting untuk memahami usaha ternak sapi potong sebagai potensi ekonomi local yang dapat ditingkatkan kedepannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja karena kecamatan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai peternakan sapi potong. Penelitian dilaksanakan sepanjang bulan-bulan di tahun 2023. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) metode ini merupakan bagian dari metode penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual, dan akurat dari pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian. Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data ini akan dianalisis dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro memiliki dua jenis sapi potong yang diusahakan, yaitu sapi peranakan ongole dan sapi cross. Sapi PO merupakan sapi persilangan antara sapi ongole dengan sapi lokal. Sapi peranakan ongole memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan tropis dengan suhu dan kelembapan tinggi dengan pakan terbatas. Menurut Monintja (2015), Sapi PO mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, selain sebagai penghasil daging, petani kecil juga memanfaatkannya sebagai ternak kerja, penghasil pupuk dan tabung. Sedangkan jenis sapi satunya yaitu Inseminasi Buatan (IB), yaitu sapi yang dikembangkan melalui inseminasi buatan. Menurut Monintja (2015), perbedaan kawin alam dan IB dilihat dari segi pemeliharaan, ternak IB

dapat menekan biaya karena meminimalisir biaya pemeliharaan ternak jantan dimana proses pemeliharaan pejantan memerlukan biaya yang tinggi.

Tabel 1. Jumlah Sapi Potong Peranakan Ongole di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2022

NO	NAMA DESA	SAPI PERANAKAN ONGOLE (PO)					
		JANTAN (ekor)			BETINA (ekor)		
		< 12 bln	12 bln - 24 bln	> 24 bln	< 12 bln	12 bln - 24 bln	> 24 bln
1	TLOGOHAJI	1	0	0	3	12	18
2	NGAMPAL	0	0	0	2	2	18
3	KEDONGREJO	0	0	0	4	2	8
4	MLINJENG	0	0	0	0	2	9
5	SUMBERHARJO	0	0	0	4	9	23
6	BANJARREJO	0	0	0	0	0	3
7	KAYULEMAH	0	0	0	0	0	0
8	TELENG	0	0	0	0	0	4
9	WOTAN	0	0	0	0	0	0
10	SAMBONGREJO	0	0	0	0	0	1
11	SENDANGAGUNG	0	0	0	0	0	0
12	DERU	2	1	0	0	0	0
13	PEKUWON	0	0	0	0	0	0
14	KARANGDOWO	0	0	0	0	14	0
15	PEJAMBON	0	0	0	0	1	4
16	TULUNGREJO	0	0	0	0	0	3
17	KARANGDINOYO	0	0	0	0	0	3
18	BUTOH	0	0	0	0	0	0
19	MARGOAGUNG	0	0	0	0	0	6
20	JATIGEDE	0	0	0	0	9	1
21	BOGANGIN	0	0	0	0	0	0
22	SUMURAGUNG	0	0	0	4	0	0
23	SUMBERREJO	0	0	0	0	0	0
24	TALUN	1	0	0	0	0	0
25	PRAYUNGAN	0	0	0	0	0	0
26	MEJUWET	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		4	1	-	17	51	101

Sumber: Dinas Peternakan Bojonegoro 2022

Tabel 1 menampilkan data jumlah sapi Peranakan Ongole (PO) berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia di berbagai desa di Kecamatan Sumberrejo Kecamatan Bojonegoro. Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah sapi potong peranakan ongole jenis kelamin jantan yang diusahakan lebih sedikit dibanding betina. Desa Tlogohaji memiliki 1 ekor sapi jantan di bawah 12 bulan, sedangkan desa Mlinjeng tidak memiliki sapi betina di bawah 12 bulan. Desa Karangdowo memiliki jumlah sapi betina di rentang usia 12 bulan hingga 24 bulan yang paling tinggi, yaitu 14 ekor. Secara keseluruhan, terdapat 4 ekor sapi jantan di bawah 12 bulan, 1 ekor sapi jantan dalam rentang usia 12 bulan hingga 24 bulan, dan jumlah tidak tersedia untuk sapi jantan di atas 24 bulan. Sedangkan untuk

sapi betina, terdapat 17 ekor di bawah 12 bulan, 51 ekor dalam rentang usia 12 bulan hingga 24 bulan, dan 101 ekor di atas 24 bulan.

Tabel 2. Jumlah Sapi Potong Cross di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2022

NO	NAMA DESA	SAPI CROSS (Hasil IB)					
		JANTAN (ekor)			BETINA (ekor)		
		< 12 bln	12 bln - 24 bln	> 24 bln	< 12 bln	12 bln - 24 bln	> 24 bln
1	TLOGOHAJI	123	163	69	35	42	113
2	NGAMPAL	56	87	84	56	20	24
3	KEDONGREJO	48	91	63	65	15	47
4	MLINJENG	80	98	97	77	22	77
5	SUMBERHARJO	100	71	29	34	34	146
6	BANJARREJO	63	106	55	16	11	41
7	KAYULEMAH	20	48	14	29	15	20
8	TELENG	25	45	28	50	7	13
9	WOTAN	75	82	67	26	5	13
10	SAMBONGREJO	90	23	105	65	25	42
11	SENDANGAGUNG	42	79	55	32	9	6
12	DERU	41	48	19	12	10	28
13	PEKUWON	27	43	17	65	12	7
14	KARANGDOWO	29	84	74	67	8	8
15	PEJAMBON	20	59	68	43	32	6
16	TULUNGREJO	62	100	50	5	22	15
17	KARANGDINOYO	51	101	110	9	13	24
18	BUTOH	32	68	58	7	8	10
19	MARGOAGUNG	23	45	31	3	25	12
20	JATIGEDE	46	83	55	3	5	30
21	BOGANGIN	22	31	14	7	6	1
22	SUMURAGUNG	24	67	51	5	5	13
23	SUMBERREJO	17	21	2	2	3	23
24	TALUN	18	36	28	2	3	4
25	PRAYUNGAN	27	45	35	4	4	6
26	MEJUWET	19	30	12	2	3	7
JUMLAH TOTAL		1.180	1.754	1.290	721	364	736

Sumber: Dinas Peternakan Bojonegoro 2022

Tabel 2 menyajikan data jumlah sapi cross hasil IB (Inseminasi Buatan) berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia di berbagai desa Kecamatan Sumberrejo Kecamatan Bojonegoro. Desa Tlogohaji memiliki jumlah sapi jantan dalam rentang usia kurang dari 12 bulan yang paling tinggi, yaitu 123 ekor, sedangkan desa Sumberharjo memiliki jumlah sapi jantan di atas 24 bulan yang paling tinggi, yaitu 146 ekor. Desa Ngampal memiliki jumlah sapi betina di rentang usia 12 bulan hingga 24 bulan yang paling tinggi, yaitu 84 ekor, sementara desa Sumberharjo memiliki jumlah sapi betina di bawah 12 bulan yang paling tinggi, yaitu 34 ekor. Terdapat variasi yang signifikan dalam distribusi sapi cross berdasarkan usia dan jenis kelamin di setiap desa. Secara keseluruhan, terdapat 1.180 ekor sapi jantan di bawah 12 bulan, 1.754 ekor dalam rentang usia 12 bulan hingga 24 bulan, dan 1.290 ekor di atas 24 bulan. Sedangkan untuk sapi betina, terdapat 721 ekor di bawah 12 bulan, 364 ekor dalam rentang usia 12 bulan hingga 24 bulan, dan 736 ekor di atas 24 bulan. IB merupakan program dari pemerintah sebagai upaya meningkatkan populasi ternak sapi. Menurut Sugoro (2009), implementasi IB

mendorong hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan perkawinan alam. Tingkat keberhasilan IB di Kecamatan Sumberrejo sangat tinggi ditinjau dari jumlah populasi yang tinggi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sumberrejo memiliki potensi pengembangan sapi potong yang tinggi. Dimana hal tersebut didukung dengan tingginya kesadaran dalam penggunaan Inseminasi Buatan (IB) yang tergambar dari tingginya populasi IB.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk memperkuat peran Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) dalam mengedukasi serta mendorong peternak agar mengembangkan usaha peternakan sapi potong menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan secara ekonomis. Diperlukan peningkatan dalam penyuluhan dan pelatihan mengenai penerapan teknik pengolahan pakan guna meningkatkan produktivitas sapi potong.

DAFTAR PUSTAKA

- Monintja, M.Y., Oley, F.S., Sondakh, B.F., Oroh, F.N.S. (2015). Analisis Keuntungan Peternak Sapi Peranakan Ongole (Po) Yang Menggunakan Inseminasi Buatan (Ib) Di Kecamatan Tompaso Barat. *Jurnal Zooteh*, vol 35 No 2, 201-209
- Sugoro, I. (2009). Kajian Bioetika: Pemanfaatan Inseminasi Buatan (IB) Untuk Peningkatan Produktivitas Sapi. Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati Institute Teknologi Bandung. Bandung.
- Soleh, A. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Ramadan, M. (2016). Analisis Usaha Budidaya Ternak Sapi Potong (Studi Kasus Desa Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai) [Skripsi]. Universitas Medan Area.
- Sutawi. (2007). *Kapita Selekta Agribisnis Peternakan*. Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rusdiana, S., Adiati, U., & Hutasoit, R. (2016). Analisis Ekonomi Usaha Ternak Sapi Potong Berbasis Agroekosistem Di Indonesia. *Agriekonomika*, 5(2), 137–149.
- Hidayat, Z., Priyanto, R., Nuraini, H., & Abdullah, L. (2021). Status nutrisi dan kinerja reproduksi indukan sapi Bali pada peternakan rakyat dengan sistem integrasi sawitsapi. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 24(2), 247–261.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Analisis Usahatani Cabai Merah Keriting pada Lahan Berpasir (Studi Kasus Kelompok Tani Tanisari di Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo)

Annisaa Widyaningrum¹, Sugiharti Mulya Handayani², Evi Irawan³

*Program Studi S1 Agribisnis, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami no 36 Ketingan Surakarta*

Email : annisaawidyaningrum069a@student.uns.ac.id

Abstract: Farming, whether it involves crops or livestock, is a business venture with the goals of generating profit, income, or meeting the needs for food and fiber. This study aims to determine the costs, revenues, income, and efficiency of farming curly red chili in the Tanisari Farming Group using the R/C and B/C ratio. The research methods used in this study are descriptive and analytical. The study was conducted in the Tanisari Karangsewu Farmers Group located in Galur, Kulon Progo. The results of the analysis show that the average total cost of farming curly red chili in the Tanisari Farming Group is IDR 27,274,070; the average receipt is IDR 34,333,330; and the average income is IDR 21,730,440 each planting season for each farm (average land area 2.544 m²). The R/C values for explicit costs and total costs are 2.76 and 1.19, respectively, indicating that the farming business is feasible to carry out. The B/C value for explicit costs is 1.76, which means that the farming business is feasible to carry out, but the B/C value for total costs shows a result of 0.75, indicating that the farming business is not feasible because in the B/C ratio analysis of total costs, the implicit costs in farming are taken into account. Based on research, farmers in the Tanisari Farming Group need to increase farming efficiency by reducing the costs of external production facilities and maximizing the use of internal production facilities.

Keywords: curly red chilies, farming, farming costs, income, revenue

Abstrak: Usahatani adalah usaha bercocok tanam atau beternak yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan, atau memenuhi kebutuhan pangan dan serat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya, penerimaan, pendapatan serta efisiensi usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari menggunakan R/C ratio dan B/C ratio. Metode dasar penelitian adalah deskriptif dan analitis. Lokasi penelitian yaitu di Kelompok Tani Tanisari Karangsewu, Galur, Kulon Progo. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata total biaya usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari sebesar Rp 27.274.070; rata-rata penerimaannya sebesar Rp 34.333.330; dan rata-rata pendapatannya sebesar Rp 21.730.440 per musim tanam per usahatani (rata-rata luas lahan 2.544 m²). Nilai R/C ratio atas biaya eksplisit dan biaya total secara berturut-turut sebesar 2,76 dan 1,19 sehingga usahatani tersebut layak untuk dilaksanakan. Nilai B/C ratio atas biaya eksplisit sebesar 1,76 artinya usahatani tersebut layak untuk dilaksanakan tetapi nilai B/C ratio atas biaya total sebesar 0,75 yang artinya usahatani tersebut tidak layak dilaksanakan karena dalam analisis B/C ratio atas biaya total memperhitungkan biaya implisit dalam usahatani. Berdasarkan penelitian, petani di Kelompok Tani Tanisari perlu meningkatkan efisiensi usahatani dengan mengurangi biaya sarana produksi luar dan memaksimalkan penggunaan sarana produksi dalam.

Kata kunci: biaya usahatani, cabai merah keriting, pendapatan, penerimaan, usahatani

1. PENDAHULUAN

Permintaan bahan pangan di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kontras dengan hal tersebut, luas lahan pertanian di Indonesia semakin menyusut yang salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian yang dijadikan sebagai permukiman atau prasarana transportasi. Menurut Ragil & Eris (2018), lahan yang sempit cenderung menghasilkan output yang sedikit. Salah satu solusi untuk memenuhi jumlah kebutuhan pangan di Indonesia adalah dengan memanfaatkan lahan marjinal yang berpotensi dijadikan sebagai lahan pertanian seperti lahan berpasir di pesisir pantai. Menurut Hasibuan (2015), lahan berpasir sangat

berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena luas lahan berpasir di Indonesia yang luas dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Pemanfaatan lahan berpasir pantai menjadi lahan pertanian telah dikembangkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (2019), luas lahan berpasir di Kulon Progo yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian 59,74 ha dan Kecamatan Galur merupakan kecamatan yang paling luas memanfaatkan lahan berpasir untuk lahan pertanian dengan luas 28,85 ha. Komoditas yang paling banyak dibudidayakan di Kecamatan Galur adalah cabai merah keriting (*Capsicum annum* L.). Terdapat empat kelompok tani di Kecamatan Galur yang mayoritas membudidayakan cabai merah keriting. Salah satunya adalah Kelompok Tani Tanisari di Pedukuhan V Siliran, Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur.

Cabai merah keriting merupakan tanaman hortikultura yang memiliki nilai secara ekonomi. Menurut Tsurayya & Kartika (2015), cabai (termasuk cabai merah keriting) berpotensi untuk dibudidayakan karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi cabai hampir setiap harinya. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan cabai merah keriting perlu memperhatikan aspek produksi. Menurut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo (2023), produksi cabai merah keriting di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016-2021 cenderung mengalami peningkatan. Produksi cabai merah keriting di Kulon Progo dengan luas panen 2.243 ha pada tahun 2016 sebesar 18.420,80 ton sedangkan pada tahun 2021 dengan luas panen 2.729,80 ha mencapai 30.840,16 ton. Begitu pula dengan produktivitasnya, pada periode yang sama senantiasa mengalami peningkatan. Produktivitas cabai merah keriting pada tahun 2016 sebesar 8,21 ton/ha dan senantiasa mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 produktivitas cabai merah keriting sebesar 11,30 ton/ha. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo (2019), salah satu penyumbang terbesar cabai merah (terdiri dari cabai merah besar dan cabai merah keriting) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Kulon Progo.

Usahatani cabai merah keriting pada lahan berpasir pantai memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan usahatani lahan sawah. Usahatani cabai merah di lahan berpasir menurut Nugroho et al. (2018), memiliki penerimaan dan pendapatan yang lebih tinggi daripada di lahan sawah. Hal ini disebabkan oleh efisiensi teknis dan tingkat produksi usahatani cabai merah di lahan berpasir yang lebih tinggi. Terlebih lagi strategi pemasaran cabai merah keriting di lahan berpasir dilakukan melalui pasar lelang sehingga harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan harga ketika cabainya dijual ke pedagang pengepul. Begitu juga dengan petani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari yang menjual hasil panen cabainya ke pasar lelang Kelompok Tani Tanisari.

Cabai merah keriting yang dibudidayakan di lahan berpasir memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan budidaya cabai merah di lahan sawah. Budidaya cabai merah keriting di lahan berpasir menurut Nugroho et al., (2018), memerlukan perawatan yang lebih intensif. Hal ini disebabkan oleh karakteristik lahan berpasir yang suhu udaranya tinggi saat siang dan sore hari, rendahnya kandungan unsur hara, serta adanya angin laut yang dapat merusak daun tanaman karena mengandung garam. Menurut Ragil & Eris (2018), lahan berpasir memiliki daya meloloskan air yang tinggi sehingga memerlukan penyiraman yang lebih intensif terhadap tanaman cabai merah keriting.

Berbagai kendala yang muncul ketika tanaman cabai dibudidayakan di lahan pasir pantai menyebabkan petani harus berhati-hati dalam mengelola usahatannya agar usahatani tersebut dapat menguntungkan. Pengelolaan usahatani tanaman cabai oleh petani berhubungan dengan biaya usahatani yang akan dikeluarkan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya, penerimaan dan pendapatan serta efisiensi usahatani pada Kelompok Tani Tanisari di Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian analisis usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari adalah sebagai berikut.

2.1. Metode Dasar Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif analitis yaitu metode yang menjelaskan suatu kejadian berdasarkan fakta saat ini yang telah dikumpulkan dan diteliti. Pendekatan kuantitatif menurut Mukhid (2021), menggunakan angka untuk dapat meramalkan kondisi populasi sehingga cenderung lebih aktual, akurat dan sistematis yang akan mampu menjawab masalah secara lebih detail.

2.2. Metode Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian ini dipilih dengan metode *purposive*. Menurut Karim (2021), metode *purposive* didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel yang paling bermanfaat dan paling representatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kelompok Tani Tanisari yang terletak di Pedukuhan V Siliran, Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena anggotanya memiliki rata-rata luas lahan kepemilikan yang paling besar diantara kelompok tani lain di Kecamatan Galur seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Anggota, Luas Lahan Pertanian dan Rata-rata Luas Lahan Kepemilikan di Kelompok Tani Kecamatan Galur 2022

No	Kelompok Tani	Jumlah Anggota (Petani)	Luas Lahan (ha)	Rata-rata Luas Lahan Kepemilikan (ha/petani)
1	Sidodadi	115	130	1,13
2	Wahatani	100	95	0,95
3	Tanisari	50	135	2,70
4	Sewurejo	156	65	0,42

Sumber: Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Galur (2022)

2.3. Metode Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian dipilih dengan metode sensus karena populasi Kelompok Tani Tanisari relatif sedikit. Menurut Ketty et al., (2020), sampel yang dipilih dengan metode sensus merupakan semua anggota atau populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah populasi anggota Kelompok Tani Tanisari di Pedukuhan V Siliran, Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur. Jumlah respondennya sebanyak 50 petani.

2.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari petani cabai merah keriting pada lahan berpasir yang merupakan anggota dari Kelompok Tani Tanisari. Menurut Wahyudi (2017), dalam penelitian perlu menggunakan data sekunder yang berfungsi untuk mendukung informasi dari data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Galur dan instansi lain yang relevan dengan penelitian ini.

2.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi ke Kelompok Tani Tanisari. Menurut Anggito & Setiawan (2018), mengungkapkan bahwa observasi termasuk metode yang sangat efektif untuk mengumpulkan data dan menggali informasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode wawancara terhadap responden dengan bantuan kuesioner. Peneliti juga menggunakan metode pencatatan hasil wawancara serta dokumentasi.

2.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan 2 metode analisis data yaitu analisis usahatani dan analisis efisiensi usahatani.

2.6.1. Analisis Usahatani

2.6.1.1 Analisis Biaya Usahatani

Biaya usahatani merupakan total pengeluaran petani yang digunakan untuk keperluan memperoleh *output* dari hasil usahatani. Biaya usahatani dapat dirumuskan menjadi:

$$TC = IC + EC \quad (1)$$

Keterangan TC merupakan biaya total (Rp/MT), IC merupakan biaya implisit (Rp/MT) dan EC merupakan biaya eksplisit (Rp/MT).

2.6.1.2. Analisis Penerimaan Usahatani

Penerimaan usahatani merupakan nilai produksi usahatani sebelum dikurangi dengan biaya bersih usahatani. Menurut Rizaldi et al., (2022), penerimaan usahatani dihitung dari perkalian antara harga jual dengan produksi. Penerimaan dapat dirumuskan:

$$TR = P \times Q \quad (2)$$

Keterangan TR merupakan total penerimaan (Rp/MT), P merupakan harga produk (Rp/Kg) dan Q merupakan kuantitas produksi (Kg/MT).

2.6.1.3 Analisis Pendapatan Usahatani

Pendapatan usahatani merupakan selisih antara total penerimaan dengan biaya eksplisit. Pendapatan petani menurut Wulandari et al., (2019), dipengaruhi oleh jumlah penerimaan dan biaya eksplisit yang dikeluarkan petani. Rumus dari pendapatan adalah:

$$I = TR - TEC \quad (3)$$

Keterangan I merupakan pendapatan (Rp/MT), TC merupakan total biaya eksplisit (Rp/MT) dan TR merupakan penerimaan (Rp/MT).

2.6.2. Analisis Efisiensi Usahatani

2.6.2.1. R/C Ratio

R/C *ratio* merupakan alat analisis dengan membandingkan total penerimaan dengan total biaya untuk mengetahui efisiensi usahatani. Perumusannya adalah:

$$R/C \text{ ratio} = \frac{TR}{TC} \quad (4)$$

Keterangan TC merupakan biaya total (Rp/MT) dan TR merupakan total penerimaan (Rp/MT). Indikator kelayakannya menurut Mardani et al., (2017), adalah jika nilai $R/C < 1$ maka usaha tidak layak dilaksanakan, $R/C = 1$ maka usaha impas dan $R/C > 1$ maka usaha layak dilaksanakan.

2.6.2.2. B/C Ratio

B/C *ratio* adalah alat analisis untuk menentukan kelayakan dari usahatani. Rumus dari B/C *ratio* adalah:

$$B/C \text{ ratio} = \frac{FI}{TC} \quad (5)$$

Keterangan FI merupakan pendapatan usahatani (rupiah) dan TC merupakan total biaya (rupiah). Kriteria penilaiannya menurut Putri et al., (2020) jika nilai B/C kurang dari satu maka usahatani tersebut tidak layak untuk dijalankan. Namun jika nilai B/C lebih dari sama dengan satu maka usahatani layak untuk dijalankan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Umum Kelompok Tani Tanisari

3.1.1. Keadaan Geografis

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Galur tepatnya di Kelompok Tani Tanisari, Pedukuhan V Siliran, Kelurahan Karangsewu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Galur (2022), Kecamatan Galur memiliki batas-batas: Timur-Kabupaten Bantul; Barat-Kecamatan Panjatan; Selatan-Samudera Indonesia; dan Utara-Kecamatan Lendah., Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.

Lokasi penelitian ini terletak di kawasan tepi pantai dengan kondisi topografi yang landai dan datar. Permukaan lahan berupa lahan berpasir dan berwarna hitam.

3.1.2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Galur menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Galur (2022), sebanyak 32.754 jiwa dengan penduduk perempuan sebanyak 16.572 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 16.182 jiwa. Mayoritas penduduknya berada pada kelompok umur produktif sebanyak 22.412 jiwa. Artinya Kecamatan Galur memiliki tenaga kerja yang melimpah sehingga peluang masyarakat untuk hidup sejahtera itu tinggi.

3.1.3. Kondisi Pertanian

Komoditas sayuran yang paling banyak dibudidayakan di Kecamatan Galur pada tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Galur (2022) adalah cabai besar yang terdiri dari cabai rawit dan cabai merah keriting. Cabai merah keriting memiliki nilai ekonomi dan berpotensi untuk dibudidayakan. Oleh karena itu, seluruh anggota Kelompok Tani Tanisari membudidayakan cabai merah keriting di lahan berpasir mereka 2 musim dalam setahun. Bulan Maret sampai Agustus merupakan Musim Tanam I sedangkan Musim Tanam II dari bulan Agustus sampai Maret. Pada musim tanam II yaitu bulan Agustus 2022 sampai Maret 2023 banyak petani yang mengalami gagal panen karena serangan penyakit *Fusarium Sp.* Berbeda dengan musim tanam II yang gagal panen, hasil produksi cabai merah keriting pada musim tanam I mencapai 675,42 kg dengan luas lahan yang digunakan adalah 127.200 m².

3.2. Hasil dan Pembahasan

3.2.1. Budidaya Cabai Merah Keriting

Budidaya cabai merah keriting diawali dengan pembersihan lahan dari sampah atau kotoran. Selanjutnya tahap pembajakan yang dilakukan dengan bantuan mesin. Setelah itu pembuatan bedengan sekaligus pemberian pupuk dasar dan setiap bedengan tersebut dipasang mulsa. Selanjutnya, tahap penyemaian benih. Menurut Saputro & Kruniasih (2013), bibit sangat berpengaruh terhadap hasil produksi sehingga pemilihan benih harus baik. Bibit yang berumur sekitar 20-25 hari sudah siap untuk ditanam. Penanaman dilakukan pada bedengan yang telah dilubangi dengan cara memasukkan bibit pada lubang mulsa lalu tanah di sekitarnya dipadatkan. Setelah itu, bibit perlu disiram. Jika terdapat bibit yang rusak atau mati maka perlu dilakukan penyulaman. Jika tanaman sudah tumbuh perlu dilakukan perawatan seperti pemupukan, penyiangan gulma, pengendalian hama dan penyakit, serta pengairan. Jika tanaman berumur 30-40 HST perlu diikat dengan ajir untuk menopang tumbuhnya tanaman mengingat angin di pesisir pantai itu kuat. Tanaman cabai merah keriting yang sudah berumur 70-75 HST sudah dapat dipanen dengan interval panen 3–7 hari.

3.2.2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari sebanyak 50 petani. Sebanyak 43 responden menjadikan petani sebagai pekerjaan utama sedangkan sebanyak 7 responden menjadikan petani sebagai pekerjaan sampingan. Rata-rata pendidikan responden adalah 10 tahun. Rata-rata umur petani cabai merah keriting berada pada kelompok usia produktif yaitu 43 tahun, artinya petani dimungkinkan masih mampu mengembangkan keterampilan dalam hal usahatani untuk meningkatkan pendapatan. Pengalaman responden petani yang rata-ratanya mencapai 23 tahun juga membuktikan bahwa petani di Kelompok Tani Tanisari merupakan petani yang telah memiliki keterampilan tinggi dalam usahatani cabai merah keriting. Lamanya pengalaman berusahatani menurut Baru et al., (2015), menunjukkan bahwa petani merupakan pekerjaan turun temurun. Rata-rata jumlah anggota keluarga responden sebanyak 4 orang. Jumlah anggota keluarga yang aktif dalam usahatani adalah 2 orang.

3.2.3. Pasar Lelang Kelompok Tani Tanisari

Pasar lelang Kelompok Tani Tanisari merupakan tempat untuk menyalurkan hasil produksi cabai merah keriting dari seluruh petani Kelompok Tani Tanisari kepada tengkulak melalui sistem lelang. Pasar lelang yang dikelola Kelompok Tani Tanisari ini dibentuk pada tahun 2014 untuk memudahkan petani dalam melakukan penjualan cabai merah keriting dan menghindari permainan harga dari para tengkulak. Tidak hanya cabai merah keriting yang dijual di pasar lelang ini tetapi juga terdapat cabai rawit dalam jumlah kecil. Petani di Kelompok Tani Tanisari dari dulu menanam cabai merah keriting sehingga cabai merah keriting mendominasi pasar lelang Kelompok Tani Tanisari sedangkan budidaya cabai rawit biasanya dilakukan dalam jumlah kecil karena memanfaatkan pekarangan rumah dan penjualan cabai rawit dalam pasar lelang baru mulai pada tahun 2022.

Sebelum adanya pasar lelang, petani di Kelompok Tani Tanisari menjual hasil panen cabai merah keriting langsung ke pedagang pengepul sehingga terdapat selisih yang lumayan banyak antara harga jual petani dengan harga di pasaran. Setelah adanya pasar lelang di Kelompok Tani Tanisari, petani menjual hasil panen cabai merah keriting ke pasar lelang. Hal ini dikarenakan harga jual cabai merah keriting lebih tinggi sehingga selisih antara harga jual petani dengan harga di pasaran tidak terlalu tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Nugroho et al., (2018), bahwa harga jual di pasar lelang lebih tinggi daripada harga jual petani ke pedagang pengepul.

Pasar lelang Kelompok Tani Tanisari biasanya dimulai pukul 16.00 WIB. Alur pelelangan di pasar lelang diawali dengan penjualan cabai merah keriting oleh petani di gedung pasar lelang lalu ditimbang dan dicatat. Setelah itu, cabai merah keriting disortir agar tidak ada cabai merah keriting yang busuk. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 19.00 WIB, pengurus pasar lelang mengakumulasi jumlah cabai merah keriting. Penjualan cabai merah keriting di pasar lelang tiap malam rata-rata sebesar 2-2,5 ton. Setelah itu, pengurus pasar lelang menawarkannya ke tengkulak-tengkulak besar yang berasal dari Bantul, Sentolo, Purworejo, Temon, Panjatan dan Wates melalui *Whatsapp*. Penawaran harga dari tengkulak dicatat lalu dicari harga tertinggi yang memenangkan pelelangan cabai merah keriting. Setelah itu, tengkulak akan datang ke pasar lelang untuk mengambil cabai merah keriting. Tengkulak lalu mengemas cabai merah keriting menggunakan kardus (30 kg cabai merah keriting per kardus). Pembayaran oleh tengkulak biasanya dilakukan 3-4 hari setelah cabai merah keriting laku dijual sehingga pembayaran ke petani juga menunggu pembayaran dari tengkulak.

3.2.4. Analisis Usahatani Cabai Merah Keriting di Kelompok Tani Tanisari

3.2.4.1. Penggunaan Sarana Produksi

Penggunaan sarana produksi pada usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari meliputi benih/bibit, pupuk dan pestisida. Rata-rata penggunaan sarana produksi usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari pada Musim Tanam I tahun 2022 sebesar Rp 6.635.340 per musim tanam per usahatani (luas lahan 2.544 m²) sedangkan biaya sarana produksi per hektar sebesar Rp 26.082.311 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata Biaya Sarana Produksi Usahatani Cabai Merah Keriting di Kelompok Tani Tanisari Musim Tanam I Tahun 2022

No	Uraian	Rata-rata Biaya Saprodu		Persentase
		Rp/MT/UT	Rp/MT/ha	
1	Benih/bibit	843.200	3.314.465,41	12,71%
2	Pupuk	3.997.640	15.713.993,70	63,04%
3	Pestisida	1.609.300	6.325.864,78	24,25%
Jumlah		6.635.340	26.082.311	100,00%

Sumber: Analisis Data Primer (2023)

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata penggunaan sarana produksi yang biayanya paling besar adalah biaya pupuk. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nugroho et al., (2018) bahwa lahan berpasir membutuhkan pemupukan yang lebih banyak karena kandungan unsur haranya sedikit. Rata-rata biaya sarana produksi terbesar kedua adalah biaya pestisida sebesar 24,25% karena tanaman cabai merah keriting di Kelompok

Tani Tanisari rentan terkena penyakit layu *Fusarium sp.* Rata-rata biaya sarana produksi terendah adalah biaya benih/bibit sebesar 12,71%.

Rata-rata biaya sarana produksi usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari sebesar Rp 26.082.311 per hektar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saputro & Kruniasih (2013), biaya sarana produksi pada usahatani cabai merah di lahan sawah sebesar Rp 12.041.263 per hektar. Biaya sarana produksi usahatani cabai merah keriting pada lahan berpasir di Kelompok Tani Tanisari lebih tinggi daripada biaya sarana produksi cabai merah di lahan sawah karena usahatani di lahan berpasir membutuhkan biaya pupuk yang lebih banyak.

3.2.4.2. Biaya Usahatani

Biaya usahatani meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai usahatani. Penelitian ini menggunakan konsep biaya eksplisit dan biaya implisit. Rata-rata penggunaan biaya pada usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari Musim Tanam I Tahun 2022 sebesar Rp 27.274.070 sedangkan biaya total per hektar sebesar Rp 107.209.395 yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata Biaya Usahatani Cabai Merah Keriting di Kelompok Tani Tanisari Musim Tanam I Tahun 2022

Uraian	Rata-rata Biaya		Persentase
	Rp/MT/UT	Rp/MT/ha	
Biaya Eksplisit	12.602.890	49.539.662	46,21%
Biaya Implisit	14.671.180	57.669.733	53,79%
Biaya Total	27.274.070	107.209.395	100%

Sumber: Analisis Data Primer (2022)

Biaya eksplisit untuk usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari lebih kecil daripada biaya implisit artinya biaya yang benar-benar dikeluarkan petani lebih sedikit daripada biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan petani. Biaya implisit meliputi biaya saprodi dalam, biaya penyusutan dan biaya tenaga kerja keluarga. Secara keseluruhan, biaya yang paling besar terdapat biaya tenaga kerja dalam keluarga, artinya usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari lebih memanfaatkan tenaga kerja dalam keluarga daripada luar keluarga atau buruh tani. Biaya terbesar kedua setelah tenaga kerja dalam keluarga adalah biaya saprodi luar untuk membeli benih/bibit, pupuk dan pestisida. Sedangkan biaya yang paling sedikit adalah biaya saprodi dalam yang artinya rata-rata petani tidak memiliki saprodi dari dalam sehingga membeli dari luar (toko saprodi).

Biaya total usahatani cabai merah keriting pada lahan berpasir di Kelompok Tani Tanisari lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya usahatani di lahan sawah. Penelitian Nuha et al., (2023), mengungkapkan bahwa biaya total usahatani cabai merah di lahan sawah mencapai Rp 48.448.430 per hektar. Usahatani di lahan berpasir membutuhkan perawatan yang lebih intensif daripada lahan sawah sehingga biayanya lebih tinggi karena lahan berpasir memiliki kandungan unsur hara yang rendah serta daya meluluskan air yang tinggi.

3.2.4.3. Produksi, Produktivitas dan Harga Jual

Produksi merupakan hasil panen yang diperoleh dari usahatani. Berikut merupakan data rata-rata produksi dan produktivitas cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari.

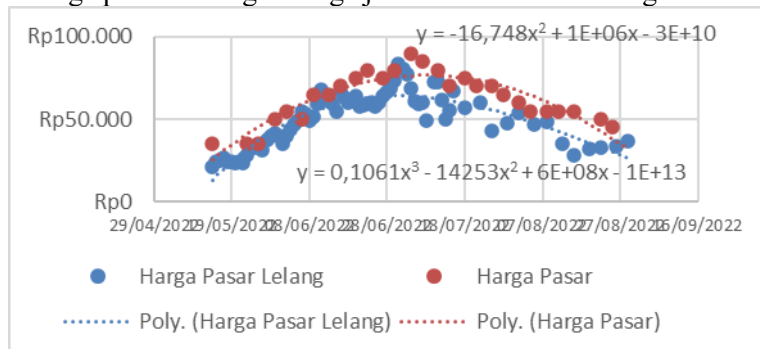
Tabel 4. Rata-rata Produksi dan Produktivitas Cabai Merah Keriting di Kelompok Tani Tanisari Musim Tanam I Tahun 2022

No	Uraian	Kg/MT/UT	Ton/MT/ha
1	Produksi	675,42	2,6
2	Produktivitas	0,26	2,6

Sumber: Analisis Data Primer (2022)

Berdasarkan Tabel 4, Kelompok Tani Tanisari pada musim tanam I tahun 2022 memiliki rata-rata produksi cabai merah keriting sebanyak 675,42 kg dengan rata-rata luas lahan 2.544 m² sehingga produktivitas cabai merah keriting sebesar 0,25 kg/m². Artinya setiap meter lahan yang ditanami cabai merah keriting akan menghasilkan 0,25 kg cabai merah keriting dalam satu musim tanam. Rata-rata produksi cabai merah keriting per hektar sebesar 2,6 ton/ha dengan rata-rata produktivitas sebesar 2,6 ton/ha. Penelitian sejenis oleh Nugroho et al., (2018), menunjukkan bahwa produksi cabai pada lahan pasir pantai di Panjatan mencapai 6.624,18 kg/ha dan produktivitas mencapai 6,6 ton/ha. Jika dibandingkan, produksi dan produktivitas cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari lebih rendah daripada produksi dan produktivitas cabai pada lahan pasir pantai di Panjatan.

Cabai merah keriting merupakan komoditas hortikultura fluktuasi harganya tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya penawaran dan permintaan cabai merah keriting di pasar. Berikut merupakan grafik perbandingan harga pasaran dengan harga jual cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Harga Pasar dan Harga Jual Cabai Merah Keriting di Kelompok Tani Tanisari

Harga jual cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari berdasarkan Gambar 3, lebih rendah dibandingkan dengan harga cabai merah keriting di pasaran. Hal ini disebabkan oleh panjangnya rantai pemasaran, semakin panjang rantainya maka semakin tinggi harganya. Harga jual cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari lebih rendah karena berada di tingkat produsen sedangkan harga di pasar lebih tinggi karena berada di tingkat konsumen artinya memiliki rantai pemasaran yang lebih panjang.

Harga cabai merah keriting yang fluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pasokan cabai merah keriting, musim/kondisi alam, permintaan masyarakat dan lain sebagainya. Harga pasar cabai merah keriting pada pertengahan bulan Mei tahun 2022 sebesar Rp 35.000 sedangkan harga di pasar lelang sebesar Rp 21.500. Harga cabai merah keriting pada awal panen tergolong rendah karena kondisi panen raya yang mengakibatkan tingginya pasokan cabai merah keriting. Penelitian sejenis tentang usahatani cabai merah yang dilakukan oleh Wulandari (2020) juga mengungkapkan bahwa harga cabai merah menurun ketika panen raya.

Harga jual cabai merah keriting tertinggi di pasar lelang mencapai Rp 83.300 pada tanggal 1 Juli 2022 sedangkan harga tertinggi cabai merah keriting di pasaran mencapai Rp 90.000 pada 4 Juli 2022. Permintaan cabai merah keriting yang tinggi menjelang Idul Adha tanggal 9-10 Juli 2022 menyebabkan meningkatnya harga cabai merah keriting pada awal bulan Juli. Hal ini didukung oleh Wulandari (2020) bahwa saat menjelang lebaran, harga cabai merah keriting akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan masyarakat. Setelah lebaran, harga cabai merah keriting cenderung mengalami penurunan sampai akhir panen musim tanam I pada bulan Agustus. Penurunan harga cabai merah keriting pada bulan Agustus tahun 2022 disebabkan oleh melimpahnya pasokan cabai merah keriting akibat panen raya.

3.2.4.4. Penerimaan dan Pendapatan

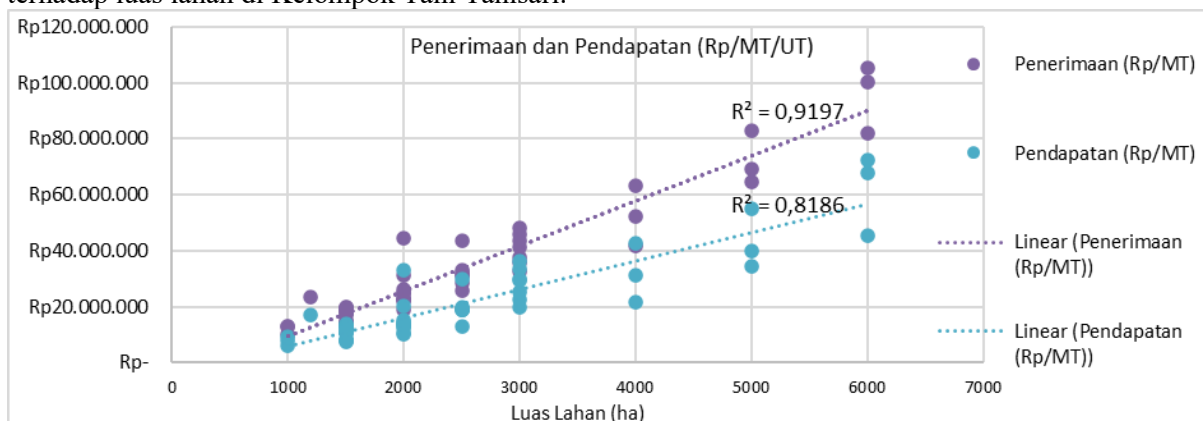
Penerimaan usahatani adalah nilai dari hasil usahatani. Perhitungan penerimaan usahatani menurut Susanti (2021), didapat dari hasil kali harga jual dengan produksi. Pendapatan usahatani didapat dari penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit. Berikut merupakan tabel penerimaan dan pendapatan usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari.

Tabel 5. Rata-rata Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Cabai Merah Keriting di Kelompok Tani Tanisari Musim Tanam I Tahun 2022

Uraian	Rp/MT/UT	Rp/MT/ha
Rata-rata Penerimaan	34.333.330	134.958.058
Rata-rata Pendapatan	21.730.440	85.418.396

Sumber: Analisis Data Primer (2022)

Rata-rata penerimaan per usahatani berdasarkan Tabel 5, sebesar Rp 34.333.330 pada musim tanam I. Jika dihitung per hektar, rata-rata penerimaannya sebesar Rp 134.958.058. Rata-rata pendapatan per usahatani sebesar Rp 21.730.440. Jika dihitung per hektar, rata-rata pendapatan sebesar Rp 85.418.396. Besarnya penerimaan dan pendapatan dipengaruhi oleh banyak faktor, satu diantaranya adalah luas lahan. Berikut merupakan grafik persebaran penerimaan dan pendapatan usahatani cabai merah keriting terhadap luas lahan di Kelompok Tani Tanisari.



Gambar 2. Grafik Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Cabai Merah Keriting di Kelompok Tani Tanisari

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa penerimaan dan pendapatan usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari memiliki *trend linear* atau sejalan lurus dengan penggunaan luas lahan. Nilai *R square* (R^2) dari penerimaan usahatani sebesar 0,9197. Hasil *R square* (R^2) yang mendekati angka 1 semakin baik sehingga menunjukkan bahwa data independen dapat menjelaskan data dependen. Nilai *R square* sebesar 0,9197 menunjukkan bahwa variabel luas lahan dapat menjelaskan 91,97% sebaran penerimaan usahatani sedangkan 0,03% dijelaskan oleh variabel independen lain (komponen error) seperti penggunaan pupuk, tenaga kerja, benih dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh penelitian Effran et al., (2021) bahwa peningkatan lahan usahatani cabai merah keriting di lahan sawah sebesar 10% akan meningkatkan penerimaan sebesar 6,99% sehingga penggunaan luas lahan memiliki pengaruh nyata terhadap jumlah penerimaan usahatani.

Nilai *R square* dari pendapatan usahatani sebesar 0,8186. Menurut Zamili et al., (2020) semakin dekat hasil *R square* dengan angka 1 maka variabel independen semakin dapat menjelaskan variabel dependen. Artinya nilai *R square* dari pendapatan usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari menunjukkan bahwa sebesar 0,8186 atau 81,86% sebaran pendapatan usahatani dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan sedangkan 18,14% dijelaskan oleh variabel independen lain (komponen error) seperti penggunaan pupuk, benih, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Penelitian oleh Rahmadanti et al., (2021) tentang usahatani cabai merah juga menjelaskan pengaruh nyata penggunaan luas lahan terhadap pendapatan usahatani.

3.2.5. Analisis Efisiensi Usahatani Cabai Merah Keriting di Kelompok Tani Tanisari

3.2.5.1. R/C Ratio

R/C ratio adalah alat analisis untuk mengetahui efisiensi usahatani. Perhitungan R/C diperoleh dari hasil bagi antara penerimaan dengan biaya. Berikut merupakan tabel rata-rata R/C pada usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari.

Tabel 6. Rata-rata R/C pada Usahatani Cabai Merah Keriting di Kelompok Tani Tanisari pada Musim Tanam I Tahun 2022

No	Uraian	Nilai	Kelayakan
1	R/C atas biaya eksplisit	2,76	Layak
2	R/C atas biaya total	1,19	Layak

Sumber: Analisis Data Primer (2022)

Berdasarkan perhitungan usahatani di atas, nilai R/C atas biaya eksplisit atau biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 2,76. Menurut Susanti (2021), usahatani layak dilaksanakan jika nilai R/C lebih dari sehingga usahatani cabai merah keriting pada Kelompok Tani Tanisari terbilang layak untuk dilaksanakan. Nilai R/C atas biaya total sebesar 1,19 sehingga usahatani yang dilakukan juga terbilang layak. Kesimpulan dari hasil perhitungan R/C dapat dinyatakan bahwa usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari menguntungkan karena memiliki $R/C > 1$.

3.2.5.2. B/C Ratio

B/C ratio adalah analisis yang dihitung dari perbandingan pendapatan dengan biaya. Tujuan dari analisis B/C adalah untuk mengetahui *benefit* usahatani. Berikut merupakan tabel rata-rata B/C dari usahatani cabai merah keriting pada lahan berpasir di Kelompok Tani Tanisari.

Tabel 7. Rata-rata B/C dari Usahatani Cabai Merah Keriting di Kelompok Tani Tanisari pada Musim Tanam I Tahun 2022

No	Uraian	Nilai	Kelayakan
1	B/C atas biaya eksplisit	1,76	Layak
2	B/C atas biaya total	0,75	Tidak layak

Sumber: Analisis Data Primer (2022)

Berdasarkan Tabel 7, nilai B/C atas biaya eksplisit sebesar 1,76 artinya setiap pengeluaran sebesar Rp 1 menghasilkan manfaat sebesar Rp 1,76. Usahatani dianggap layak ketika nilai $B/C > 1$. Berdasarkan Tabel 7, usahatani cabai merah keriting pada Kelompok Tani Tanisari termasuk layak untuk dilaksanakan jika dianalisis dengan B/C atas biaya eksplisit.

Namun jika dihitung dengan B/C atas biaya total menunjukkan bahwa usahatani yang dilakukan termasuk tidak layak untuk diusahakan karena memiliki nilai sebesar 0,75. Artinya manfaat yang diperoleh dari setiap pengeluaran sebesar Rp 1 adalah Rp 0,75 yang mana manfaat lebih rendah daripada pengeluaran sehingga termasuk tidak layak. Hal ini juga didukung penelitian Mutmainnah et al., (2023) tentang usahatani pertanian di pesisir pantai yang nilai B/C sebesar 0,87 artinya usahatani tidak layak dilaksanakan.

Nilai B/C atas biaya total menunjukkan hasil tidak layak karena dihitung atas biaya total yang terdiri dari biaya implisit dan biaya eksplisit. Jika biaya implisit diikuti sertakan dalam perhitungan analisis B/C maka usahatani dinilai tidak layak karena tidak mampu mengembalikan modal yang diinvestasikan. Walaupun nilai B/C atas biaya total menunjukkan bahwa usahatani tidak layak diusahakan, tetapi hal ini tidak diperhatikan oleh petani. Petani tidak terlalu memperhitungkan biaya implisit seperti biaya penyusutan alat-alat, biaya saprodi milik sendiri ataupun biaya tenaga kerja keluarga. Petani menganggap bahwa usahatani layak untuk dilaksanakan selama usahatani menghasilkan penerimaan melebihi biaya eksplisit.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian usahatani cabai merah keriting di Kelompok Tani Tanisari pada musim tanam I tahun 2022 adalah total biaya usahatani adalah Rp 27.274.070/MT/UT yang terdiri dari 46,21% biaya eksplisit dan 53,79% biaya implisit. Rata-rata penerimaan yang diperoleh petani sebesar Rp 34.333.330/MT/UT sedangkan rata-rata pendapatan petani sebesar Rp 21.730.440/MT/UT. Analisis efisiensi usahatani dengan R/C *ratio* atas biaya eksplisit sebesar 2,76 sedangkan R/C *ratio* atas biaya total sebesar 1,19 sehingga usahatani layak dilaksanakan. Nilai B/C *ratio* atas biaya eksplisit sebesar

1,76 sehingga usahatani layak dilaksanakan sedangkan nilai B/C *ratio* atas biaya total sebesar 0,75 sehingga usahatani tidak layak dilaksanakan.

5. SARAN

Saran dari hasil penelitian ini adalah efisiensi usahatani perlu ditingkatkan sehingga pendapatan meningkat, misalnya dengan cara mengurangi biaya sarana produksi luar seperti pupuk, pestisida dan mulsa serta dapat memaksimalkan penggunaan saprodi dalam seperti pupuk kandang milik sendiri dan pupuk kompos milik sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. (2019). *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Galur. (2022). Kapanewon Galur dalam Angka 2022. In *BPS Kecamatan Galur*.
- Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Galur. (2022). *Daftar Kelompok Tani Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022*.
- Baru, H. G., Tariningsih, D., & Tamba, I. M. (2015). Analisis Pendapatan Usahatani Cabai di Desa Antapan (Studi Kasus di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem*, 5(10), 14–20.
- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. (9 Desember 2019). *Panen Cabe Trisik*. Dipertapa Kabupaten Kulon Progo. Diakses dari <https://pertanian.kulonprogokab.go.id/detil/426/panen-cabe-trisik>
- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. (2023). *Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Cabai Merah Keriting Tahun 2016-2021*.
- Effran, E., Kurniasih, S., & Zakiah. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Usahatani Cabai Merah Keriting di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 24(02), 22–26.
- Hasibuan, A. S. Z. (2015). Pemanfaatan Bahan Organik dalam Perbaikan Beberapa Sifat Tanah Pasir Pantai Selatan Kulon Progo. *Journal of Agro Science*, 3(1), 31–40.
- Karim, A. (2021). *Statistika Bidang Teknologi Informasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ketty, P. M. G., Sirma, I. N., & Bernadina, L. (2020). Manajemen Usahatani Terung Ungu di Kelurahan Tuatuka Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. *Jurnal Excellencia*, 9(1), 50–57.
- Mardani, Nur, T. M., & Satriawan, H. (2017). Analisis Usahatani Tanaman Pangan Jagung di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. *Jurnal S. Pertanian*, 1(3), 203–204.
- Mukhid, A. (2021). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Jakad Media Publishing.
- Mutmainnah, E., Feryady, A., & Rani, F. N. A. (2023). Karakteristik Usahatani Pertanian di Pesisir Pantai Kota Bengkulu. *Jurnal Agribis*, 16(2), 2235–2243.
- Nugroho, A. D., Prasada, I. M. Y., Kirana, S., Anggrasari, H., & Sari, P. N. (2018). Komparasi Usahatani Cabai Lahan Sawah Lereng Gunung Merapi dengan Lahan Pasir Pantai. *Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 4(1), 19–27.
- Nuha, M. R., Putri, T. A., & Utami, A. D. (2023). Pendapatan Usahatani Cabai Merah Berdasarkan Musim di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28(2), 323–334.
- Putri, S. K., Prajanti, S. D. W., & Rusdarti. (2020). Business Improvement Strategy and Benefit Cost

- Ratio of Bogares Peanut SMEs in Tegal Regency. *Journal of Economic Education*, 9(21), 3–9.
- Ragil, C., & Eris, V. A. (2018). Strategi Penghidupan Berkelanjutan Petani Lahan Pasir Berbasis Aset Natural dan Aset Fisikal di Pesisir Desa Bugel Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo. *Reka Ruang*, 1(1), 39–44.
- Rahmadanti, I. S., Zakaria, W. A., & Marlina, L. (2021). Analisis Pendapatan Usahatani dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Cabai Merah di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, 9(2), 183–190.
- Rizaldi, M., Christoporus, & Wirahatm. (2022). Analisis Pendapatan Usahatani Kakao dengan Teknik Sambung Samping di Desa Sidole Barat Kecamatan Ampibado Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Pembangunan Agribisnis*, 1(1), 80–86.
- Saputro, J., & Kruniasih, I. (2013). Analisis Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Cabai Merah di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. *Agros*, 15(1), 111–122.
- Susanti, E. (2021). Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Cabai Merah Keriting di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 10(2), 21–25.
- Tsurayya, S., & Kartika, L. (2015). Kelembagaaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing Komoditas Cabai Kabupaten Garut. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 12(1), 1–12.
- Wahyudi, S. T. (2017). *Statistika Ekonomi; Konsep, Teori, dan Penerapan*. Malang: UB Press.
- Wulandari, F., Saediman, & Zani, M. (2019). Analisis Pendapatan Usahatani Tomat di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 4(3), 61–65.
- Wulandari, S. (2020). Fluktuasi Harga Cabai Merah di Masa Pandemi Covid 19 di Kota Jambi. *Jurnal MeA (Media Agribisnis)*, 5(2), 112.
- Zamili, N., Harahap, G., & Siregar, R. S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Cabe Merah di Pasar Raya MMTC Medan. *Jurnal Ilmiah Pertanian (JIPERTA)*, 2(1), 77–86.

Analisis Kondisi Perkerasan Jalan Desa Menggunakan Metode PCI (Pavement Condition Index) di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Heri Cahyono Putra¹, Budi Yulianto², Ary Setyawan³

*^{1,2,3}Program Studi S2 Teknik Sipil, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No.36A Surakarta 57126*

Email: hericahyonoputra@student.uns.ac.id , budi.yulianto@ft.uns.ac.id, arysetyawan@staff.uns.ac.id

Abstract: *Kapas District has quite a large population density in the Bojonegoro area. The increase in population has implications for increasing traffic volume, which in turn affects the strength and lifespan of the pavement structure. Therefore, effective maintenance and repair is required to prevent serious damage. The Pavement Conditions Index (PCI) method provides a detailed evaluation of the condition of pavement damage, allowing more detailed measurements for each type of damage that occurs. The results of the village road survey in Cotton District showed that the condition of Jalan Sukowati had a PCI score of 60, the condition of Jalan Mojodeso had a PCI score of 56, the condition of Jalan Klampok had a PCI score of 58, the condition of Jalan Wedi had a PCI score of 54, while the condition of Jalan Kalianyar had a PCI score of 58. Although the overall PCI score Klampok Village shows very good conditions with a score of 58, however there are several sample units that show less than satisfactory conditions. Sample unit 3 at STA 200–300 shows moderate conditions, while sample unit 4 at STA 300–400 shows poor conditions. Therefore, treatment is needed such as re-paving to improve this condition and the planned budget required is IDR 70,130,000.*

Keywords: *Village road, PCI, Road Maintenance*

Abstrak: Kecamatan Kapas memiliki kepadatan penduduk cukup banyak di wilayah Bojonegoro. Kenaikan jumlah penduduk memiliki implikasi pada peningkatan volume lalu lintas, yang pada saatnya mempengaruhi kemampuan dan umur perkerasan. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan yang efektif untuk mencegah kerusakan yang parah. Metode *Pavement Conditions Index* (PCI) memberikan evaluasi mendetail terhadap kondisi kerusakan perkerasan, memungkinkan perhitungan yang lebih detail untuk setiap jenis kerusakan. Hasil survei jalan desa di Kecamatan kapas mendapatkan hasil Jalan Sukowati nilai PCI 60, kondisi Jalan Mojodeso nilai PCI 56, kondisi Jalan Klampok nilai PCI 58, kondisi Jalan Wedi nilai PCI 54, sedangkan kondisi Jalan Kalianyar nilai PCI 58. Meskipun secara keseluruhan nilai PCI Desa Klampok menunjukkan kondisi yang sangat baik dengan skor 58, namun terdapat beberapa unit sampel yang menunjukkan kondisi yang kurang memuaskan. Unit sampel 3 pada STA 200–300 menunjukkan kondisi sedang, sementara unit sampel 4 pada STA 300–400 menunjukkan kondisi yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan penanganan seperti pengaspalan kembali untuk memperbaiki kondisi tersebut dan rencana anggaran biaya yang diperlukan adalah Rp.70.130.000

Kata kunci: Jalan Desa, PCI, Pemeliharaan Jalan

1. PENDAHULUAN

Dampak peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Kapas, terutama di desa Sukowati, Desa Mojodeso, Desa Kelampok, Desa Wedi, dan Desa Kalianyar, akan tercermin dalam peningkatan volume lalu lintas di jalan-jalan setempat. Situasi ini akan berpengaruh pada kekuatan dan masa pakai perencanaan dari struktur perkerasan, serta dapat menyebabkan kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga parah. Kerusakan ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mengganggu kenyamanan. Selain itu, perkerasan yang mengalami kerusakan sebelum waktunya akan memerlukan pengeluaran tambahan daerah untuk perencanaan ulang yang lebih sering.

Oleh karena itu, perawatan dan pemeliharaan kondisi jalan menjadi sangat dibutuhkan. Mengingat Infrastruktur Jalan yang selesai dikerjakan, jika tidak mendapat perawatan dan perbaikan yang memadai, dapat mengalami kerusakan yang serius, bahkan memerlukan rekonstruksi perkerasan.

Perawatan serta pemeliharaan merupakan rangkaian tindakan yang diperlukan untuk menjaga kondisi struktur jalan untuk mencapai layanan sesuai rencana.

Menurut Panduan Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013, ada sejumlah syarat yang harus dipertimbangkan untuk menyusun perencanaan serta perawatan jalan secara konsisten. Di antaranya adalah umur rencana, volume lalu lintas, dan kondisi jalan jika terjadi kerusakan. Pengelolaan rencana dalam pemeliharaan kondisi struktur jalan menjadi sangat penting karena terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam menetapkan prioritas.

Ada beberapa metode yang digunakan mengevaluasi kondisi kerusakan yang terjadi pada perkerasan adalah dengan menggunakan *Pavement Condition Index* (PCI). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi yang lebih terperinci terhadap setiap kerusakan yang telah terjadi. Keunggulan dari metode PCI apabila diperbandingkan dengan *International Roughness Index* (IRI) atau *Surface Distress Index* (SDI) adalah kemudahannya dalam pelaksanaan, tidak memerlukan peralatan berat, tidak menyebabkan gangguan pada lalu lintas, dan dapat dilakukan dengan waktu pengambilan yang lebih dinamis. Metode ini juga memungkinkan pencatatan yang lebih rinci terkait jenis dan tingkat keparahan kerusakan, serta satuan pengukuran yang lebih spesifik.

Perkerasan lentur (*flexible pavement*) merupakan jenis salah satu perkerasan yang menjadikan aspal sebagai bahan pengikat utama (Sukirman, 1999). Dalam konteks memastikan kenyamanan penggunaan sarana transportasi bagi masyarakat, pentingnya melakukan analisis kerusakan dengan metode yang sesuai (Hidayat, Ir H Muhammad Nursahid, & Senja Rum Harnaeni, 2015) telah menjadi sebuah konsensus yang luas. Hal ini bertujuan untuk efisiensi biaya konstruksi (Waluyo, Nuswantoro, & Lendra, 2008). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kerusakan yang efektif, terutama dalam konteks perkerasan fleksibel, untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menganalisis jenis setiap kerusakan yang telah terjadi pada struktur perkerasan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan jenis kerusakan, melakukan estimasi biaya yang diperlukan untuk perbaikan jalan, serta menganalisis data penelitian yang diperoleh dari lapangan pada jalan desa di Kecamatan Kapas ketika melaksanakan survei. Data ini didapatkan dari unit sampel melalui observasi dan pengukuran pada saat disurvei dilaksanakan.

Dalam proses pengumpulan data primer, dilakukan evaluasi visual terhadap permukaan perkerasan pada Jalan desa di Kecamatan Kapas. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi, menilai tingkat kerusakan, dan mengukur dimensi kerusakan yang ada. Hasil dari evaluasi ini menjadi landasan untuk menetapkan jenis studi evaluasi prioritas dan program pemeliharaan yang dibutuhkan. Evaluasi kondisi dilakukan secara berkala pada segmen tertentu yang dianggap representatif, yang disebut sebagai unit sampel. Metode yang digunakan adalah *Pavement Condition Index* (PCI), yang melibatkan penetapan nilai deduct value, penentuan batas nilai deduct, dan pengidentifikasian corrected deduct value maksimum.

Metode *Pavement Condition Index* atau PCI adalah suatu sistem evaluasi yang menilai kondisi dan dimensi kerusakan pada permukaan perkerasan dengan mengacu pada fungsi daya guna (Hardiyatmo, 2007). Kondisi kerusakan dikelompokkan menjadi tiga tingkatan: L (*low*), M (*medium*), dan H (*high*), menggunakan rating kondisi jalan dengan angka dari 0 hingga 100. Nilai 0 mengindikasikan kondisi yang gagal (*failed*), sementara nilai 100 menunjukkan kondisi sangat baik. Perhitungan *Pavement Condition Index* (PCI) didasarkan pada evaluasi visual kondisi jalan, yang mengenali jenis kerusakan, tingkat kerusakan (*severity*), dan jumlah kerusakan yang tercatat.

2.1. Kerapatan (*Density*)

Kerapatan adalah rasio persentase antara luas kerusakan atau panjang kerusakan total berdasarkan jenisnya terhadap luas total pada sampel jalan yang digunakan.

$$\text{Kerapatan (density, \%)} = \text{Ad/As} \times 100 \quad (1)$$

$$\text{Kerapatan (density, \%)} = \text{Ld/As} \times 100 \quad (2)$$

Dimana :

Ad = Luas Kerusakan

Ld = Panjang Kerusakan

As = Luas total sampel (ft² atau m²)

2.2. Nilai Pengurangan (Deduct Value)

Deduct Value adalah nilai yang dikurangkan untuk satu jenis kerusakan, dapat diperoleh melalui sebuah kurva yang menghubungkan kerapatan dan tingkat kerusakan. Nilai deduct value diperoleh dengan menentukan presentase kerapatan pada grafik untuk setiap jenis kerusakan, kemudian dilanjutkan penarikan garis vertikal hingga mencapai tingkat keparahan kerusakannya. Garis horizontal kemudian ditarik untuk menentukan nilai DV. Berikut grafik yang digunakan untuk mencari nilai deduct value.

2.3. Nilai TDV

Nilai Total Deduct Value (TDV) merujuk pada jumlah keseluruhan nilai pengurangan dari masing-masing sampel, atau total nilai yang dihasilkan dari setiap nilai pengurangan individu untuk setiap jenis kerusakan dan tingkat keparahan yang teridentifikasi pada satu unit sampel.

2.4. Nilai CDV

Nilai CDV atau pengurangan terkoreksi adalah hasil yang didapat dari hubungan kurva antara nilai pengurangan individual dan total nilai pengurangan.

$$CDV = TDV - DV \quad (3)$$

Dimana:

CDV = Corected Deduct Value

TDV = Total Deduc Value

DV = Deduc Value

2.5. Menentukan Nilai PCI

Apabila nilai CDV sudah diketahui, maka nilai PCI bisa dihitung dengan persamaan dibawah ini:

$$PCI(s) = 100 - CDV \quad (4)$$

Untuk mendapatkan hasil PCI perkerasan secara menyeluruh untuk ruas jalan dapat dicari secara rata-rata menggunakan persamaan dibawah ini:

$$PCIf = \Sigma PCI_s / N \quad (5)$$

Dengan :

PCIf = Hasil PCI rata-rata seluruh area penelitian

PCI_s = Hasil PCI unit sampel

N = Total sampel

Kondisi jalan dapat diketahui melalui tabel 2.1 tentang nilai kondisi berikut ini:

Tabel 1. Nilai PCI dan Kondisi Jalan

No	Nilai PCI	Kondisi
1	0-10	Gagal (<i>Failed</i>)
2	11-25	Sangat Buruk (<i>Very Poor</i>)
3	26-40	Buruk (<i>Poor</i>)
4	42-55	Sedang (<i>Fair</i>)
5	56-70	Baik (<i>Good</i>)
6	71-85	Sangat Baik (<i>Very Good</i>)
7	86-100	Sempurna (<i>Excelent</i>)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang terkumpul dari survei lapangan pada jalan desa di Kecamatan Kapas melibatkan pengecekan dan penilaian unit sampel dari lima desa yang telah dilakukan survei.

Tabel 2. Data jalan sampel

Lokasi Jalan	Panjang
Jalan Desa Sukowati	0,75 km
Jalan Desa Mojodeso	0,50 km
Jalan Desa Klampok	0,60 km
Jalan Desa Wedi	1,10 km
Jalan Desa Kalianyar	1,10 km

3.1. Hasil Survei Unit Sampel

Pengamatan lapangan dilaksanakan untuk visualisasi jenis kerusakan serta pengukuran luasan kerusakan yang terjadi pada struktur perkerasan. Pengamatan ini dijadwalkan pada pagi hari sebelum terjadi aktivitas lalu lintas yang signifikan. Hasil pengamatan tersebut kemudian diproses untuk memperoleh nilai DV, TDV, CDV, dan nilai PCI. Proses perhitungan ini akan diilustrasikan melalui contoh penggunaan unit sampel 4 STA 0+135-0+180 pada segmen Jalan Desa Klampok.

Panjang total sampel = 600 m

Lebar sampel = 5 m

Panjang STA sampel = 100 m

Berikut data yang didapatkan dari kerusakan jalan yang dijadikan sampel:

Tabel 3. Data Survei Kerusakan

No	Tipe Kerusakan.	Luas Kerusakan	Tingkat Kerusakan.	
1.	<i>Aligator cracking</i>	p = 4 m l = 1,2 m	<10 mm	Low
		p = 4 m l = 2 m	<10 mm	
		p = 2,3 m l = 1 m	<10 mm	
2.	<i>patching and utility cut patching</i>	p = 1,3 m l = 1 m		Medium
		p = 2 m l = 1 m		
3.	<i>polished aggregate</i>	p = 3 m l = 2 m		Low

3.2. Menghitung Kerapatan Density

Densitas didapatkan dari rumus :

$$\text{Densitas/density (\%)} = \sum \frac{\text{Luas satu jenis kerusakan}}{\text{Luas total unit sampel}} \times 100 \dots$$

a. *Aligator cracking*

$$\frac{Ad}{As} \times 100$$

$$\frac{(4 \times 1,2) + (4 \times 2) + (2,3 \times 1)}{100} \times 100$$

$$= 15,1 \%$$

b. *Patching and utility cut patching*

$$\frac{Ad}{As} \times 100$$

$$\frac{(1,3 \times 1) + (2 \times 1)}{100} \times 100$$

$$= 3,3 \%$$

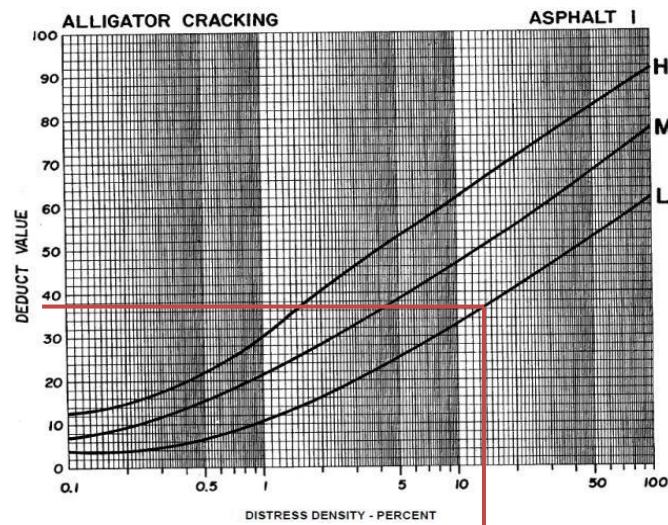
c. Polishd Agregat

$$\frac{Ad}{As} \times 100$$

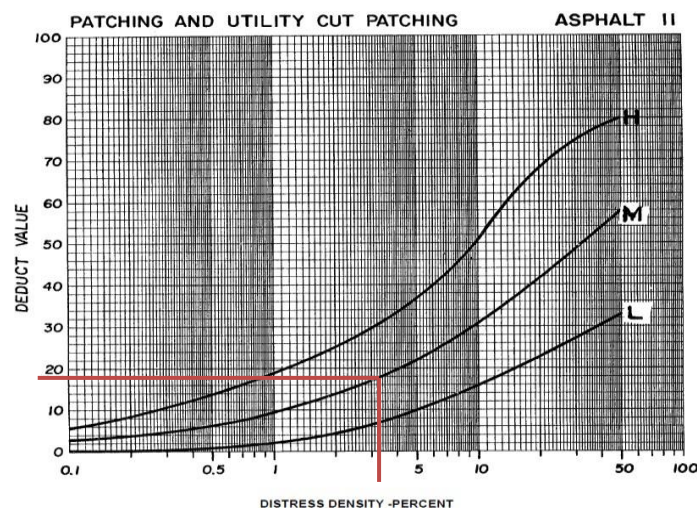
$$\frac{(3 \times 2)}{100} \times 100$$

$$= 6 \%$$

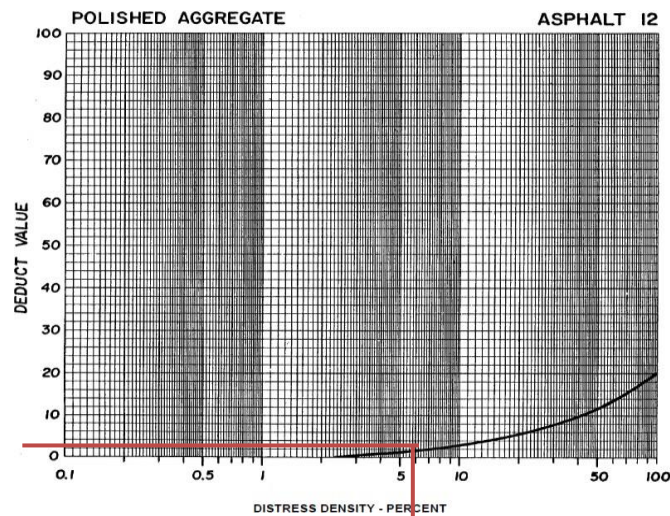
3.3. Nilai Deduct Value



Gambar 3.1. $DV = 38$



Gambar 3.2. $DV = 18$



Gambar 3.3. $DV = 3$

3.4. Menentukan angka Ijin Maksimum (m)

$$\begin{aligned} m &= 1 + (9/98) \times (100 - HDVi) \\ &= 1 + (9/98) \times (100 - 38) \\ &= 6,694 > 3 \text{ (jumlah deduct value)} \end{aligned}$$

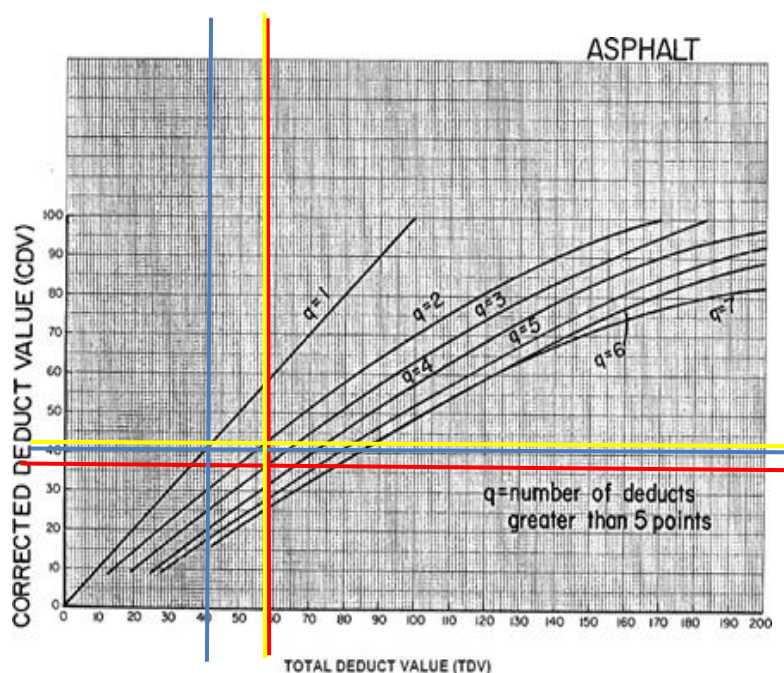
3.5. Nilai Pengurangan Terkoreksi Maksimum (CDV)

Dalam perhitungan, digunakan nilai pengurangan (DV) yang melebihi angka 2 untuk perkerasan lentur.

Hasil ke-1	= nilai DV	= 38,18,3
	TDV	= 38 + 18 + 3 = 59
	Nilai q	= 3
	Nilai CDV	= 36

Hasil ke-2	= nilai DV	= 38,18,2
	TDV	= 38 + 18 + 2 = 58
	Nilai q	= 2
	Nilai CDV	= 42

Hasil ke-3	= nilai DV	= 38,2,2
	TDV	= 38 + 2 + 2 = 42
	Nilai q	= 1
	Nilai CDV	= 40



Gambar 4. Nilai CDV

Tabel 4. Rekap Hasil Perhitungan

NO	Deduc value			TDV	q	CDV
1	38	18	3	59	3	36
2	38	18	2	58	2	42
3	38	2	2	42	1	40

3.6. Menentukan Hasil PCI

$$\begin{aligned}
 \text{PCI} &= 100 - \text{CDV}_{\text{max}} \\
 &= 100 - 42 \\
 &= 58 \text{ (Baik / Good)}
 \end{aligned}$$

Melalui proses perhitungan seragam untuk semua area penelitian, hasil akhir direkapitulasi seperti yang tercantum dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Rekap Nilai dan Kondisi Jalan

Jalan	Nilai	Kondisi
Jalan Desa Sukowati	60	Baik
Jalan Desa Mojodeso	56	Baik
Jalan Desa Klampok	58	Baik
Jalan Desa Wedi	54	Sedang
Jalan Desa Kalianyar	58	Baik

Dari data yang terdokumentasi dalam Tabel 5, terlihat bahwa kondisi perkerasan pada sebagian besar jalan masih tergolong baik dan sedang. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa contoh sampel di jalan Desa Klampok yang menunjukkan kondisi sedang hingga buruk, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Rekap Perhitungan Jalan Desa Klampok

No.	STASIONING	CDV	Nilai	Kondisi
1.	STA 0-100	38	62	BAIK
2.	STA 100 - 200	42	58	BAIK
3.	STA 200 - 300	46	54	SEDANG
4.	STA 300 - 400	62	38	BURUK
5.	STA 400 - 500	36	66	BAIK
6.	STA 500 - 600	23	58	BAIK
		Rata-Rata	56	BAIK

Terdapat beberapa segmen dimana kondisi perkerasan menunjukkan tingkat kerusakan yang berbeda. Meskipun rata-rata kondisinya masih tergolong baik, segmen 3 menunjukkan kondisi sedang, sementara segmen 4 mengalami kondisi yang lebih buruk.

3.7. Rekomendasi Perbaikan

Rekomendasi tindakan perbaikan bisa diajukan setelah kerusakan diidentifikasi. Dari hasil rekapitulasi kondisi jalan di Desa Klampok, rekomendasi penanganan kerusakan berikut dapat diberikan:

Tabel 7. Sampel STA 0+200 – 0+300

Jenis Kerusakan	Penanganan
<i>Aligator cracking</i>	Mengaspal Ulang
<i>Longitudinal/transverse cracking</i>	Mengaspal Ulang
<i>Patcing and utility cut patcing</i>	Mengaspal Ulang

Tabel 8. Sampel STA 0+300 – 0+400

Jenis Kerusakan	Penanganan
<i>Block craking</i>	Mengaspal Ulang
<i>Patcing and utility cut patcing</i>	Mengaspal Ulang
<i>Polishd Agregat</i>	Mengaspal Ulang

Berdasar data yang terdapat dalam tabel 7 dan 8, terlihat bahwa penanganan yang paling dominan guna menangani kerusakan yang membutuhkan perbaikan adalah mengaspal ulang.

3.8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan

Setelah unit sampel yang akan dilaksanakan perbaikan ditentukan, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan perkiraan biaya untuk menentukan estimasi anggaran perbaikan, seperti yang terperinci dalam tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Rincian RAB

No.	Uraian	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
1	Mobilisasi Mob Demob	1.00 Ls	7.250.000	7.250.000
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan Pembersihan Lokasi	600 m ²	23.000	13.800.000
3	Pekerjaan Aspal Penyemprotan Aspal Emulsi	300 Liter	13.600	4.080.000
4	Pekerjaan Struktur Pengaspalan T = 5 Cm	30 Ton	1.500.000	45.000.000
Jumlah				Rp. 70.130.000

Dari tabel 9 dapat disimpulkan perkiraan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki dua unit sampel jalan di Desa Klampok adalah Rp.70.130.000,-.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan lapangan dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan di bawah ini:

1. Nilai *Pavement Condition Index* (PCI) Desa Sukowati adalah 60 (Baik)
2. Nilai *Pavement Condition Index* (PCI) Desa Mojodeso adalah 56 (Baik)
3. Nilai *Pavement Condition Index* (PCI) Desa Klampok adalah 58 (Baik)
4. Nilai *Pavement Condition Index* (PCI) Desa Wedi adalah 54 (Sedang)
5. Nilai *Pavement Condition Index* (PCI) Desa Kalianyar adalah 58 (Baik)
6. Biaya perbaikan perkerasan berdasarkan hasil analisa kerusakan Desa Klampok adalah Rp. 70.130.000,-

5. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dihasilkan beberapa saran seperti yang tercantum dibawah ini:

- 1) Perlu dilaksanakan pemeliharaan secara rutin dan berkala pada setiap jalan.
- 2) Segera dilaksanakan perbaikan bagi jalan yang mengalami tanda tanda kerusakan agar kerusakan tidak semakin meluas.
- 3) Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui sisa umur layan pada jalan desa di Kecamatan Kapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. (1995). *Manual Pemeliharaan Rutin Untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Jilid II, Metode Standar No. 002/T/Bt/1995*. Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU. Jakarta.
- ASTM International. *Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys. Designation: D 6433-07*.
- Direktorat Pembinaan Jalan Kota. (1990). *Tata Cara Penyusunan Pemeliharaan Jalan Kota (No. 018/T/BNKT/1990)*. Direktorat Jendral Bina Marga Departemen PU. Jakarta.
- Hapsari, Putri. (2017). *Prioritas Pemeliharaan Jalan Menggunakan Metode Analytic Network Procces (ANP)*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Hardiyatmo, H.C. (2005). *Pemeliharaan Jalan Raya*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kamaliyah, Ana. (2017). *Evaluasi Perkerasan Jalan Dengan Metode Pavement Condition Index dan Metode Perbaikan Jalan Aspal Menggunakan Pendekatan Nilai PCI dan Bina Marga 2013*.

Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Zain, Daka Rizki. (2019). *Perbandingan Biaya Pelaksanaan Konstruksi Pada Pekerjaan Jalan Perkerasan Lentur Dengan Perkerasan Kaku (Studi Kasus: Jalan Jalur Lintas Selatan Desa Arjosari Kabupaten Pacitan)*.
- Gama, A. W. O., Putri, D., & Prathama, G. H. (2022). Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Jenis Kerusakan Jalan: Studi Kasus pada Perkerasan Lentur. *Techno*.
- Kartika, A. F. (2018). *Analisa Kondisi Perkerasan Jalan Menggunakan Metode PCI Pada Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur*.
- Sukma Ariyanto, A. (n.d.). *Perbandingan Perencanaan Tebal Lapisan Perkerasan Lentur Dengan Metode Aashto Dan Mdp*.
- Thamrin, A. H. (2018). *Langkah Mengatasi Konstruksi Perkerasan Jalan yang Kuat dan Awet dengan Memanfaatkan Sumber Material Lokal*. Jurnal Infrastruktur.

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kabupaten Wonogiri

Okky Lusiawati¹, Joko Sutrisno², Erlyna Wida Riptanti³

^{1,2,3} Program Studi SI Agribisnis Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutami no 36 Ketingan Surakarta 57126 Telp/Fax (0271)637457

Email : okky.lusiawati@student.uns.ac.id

Abstract: The problem of food price fluctuations due to the length of the distribution chain is a problem that the government and society must face in meeting consumption needs. The PUPM program is the government's effort to control the stability of supplies and prices of staple foods since 2016 by cutting the supply chain from 7-8 parties to 3-4 parties collaborating with Gapoktan/LUPM and Toko Tani Indonesia (TTI) as marketing partners. This research aims to determine the evaluation of the implementation of the Community Food Enterprise Development (PUPM) program in Wonogiri Regency in terms of context, input, process, and product. Data collection instruments are in the form of questionnaires and documentation using observation, interview, note-taking, and literature study techniques. The subjects in this research were Gapoktan/LUPM and TTI members who took part in the PUPM program with a total of 32 respondents. Data were analyzed using descriptive data analysis with interactive models (reduction, display, and conclusion drawing/verification) and analytical data analysis with tabulation and scoring methods. From the data analysis, the results obtained from each component are that context obtained 65.63% including the high category, input obtained 43.75% including the medium/sufficient category, process obtained 56.25% including the high category, and product obtained 50% including the category high, then overall the implementation of the PUPM program is included in the high category and is quite effective in its implementation.

Keywords: CIPP model, program evaluation, PUPM program, TTI

Abstrak: Permasalahan gejala harga pangan akibat panjangnya rantai distribusi menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Program PUPM adalah upaya pemerintah dalam mengendalikan dan menstabilkan pasokan pangan dan harga pangan pokok sejak tahun 2016 dengan cara memotong rantai pasok (*supply chain*) yang semula 7-8 pihak menjadi 3-4 pihak dengan menggandeng gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai mitra pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kabupaten Wonogiri yang ditinjau dari segi *context*, *input*, *process*, dan *product*. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dan dokumentasi dengan teknik observasi, wawancara, pencatatan, dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini yaitu anggota gapoktan/LUPM dan TTI yang ikut dalam program PUPM dengan jumlah 32 responden. Data dianalisis menggunakan analisis data deskriptif dengan model interaktif (*reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification*) dan analisis data analitik dengan tabulasi dan metode *skoring*. Dari analisis data diperoleh hasil dari masing-masing komponen yaitu *context* memperoleh 65,63% termasuk kategori tinggi, *input* memperoleh 43,75% termasuk kategori sedang/cukup, *process* memperoleh 56,25% termasuk kategori tinggi, dan *product* memperoleh 50% termasuk kategori tinggi, maka secara keseluruhan pelaksanaan program PUPM termasuk dalam kategori tinggi dan cukup efektif dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: evaluasi program, model CIPP, program PUPM, TTI

1. PENDAHULUAN

Beras adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kandungan gizi dan sumber karbohidrat yang dibutuhkan tubuh. Kebutuhan beras di Indonesia memegang peranan penting dalam menunjang pemenuhan gizi pangan masyarakat demi mencapai ketahanan pangan. Konsumsi beras di Indonesia yang tinggi mengakibatkan produksi beras menjadi tinggi, dimana Indonesia berkontribusi hingga 10,28% atas total produksi padi dunia (Wibawa *et al.*, 2023). Produksi padi di

Indonesia mencapai 55.670.218,65 ton dan produksi beras mencapai 32.074.045,46 ton (BPS, 2022). Tingginya jumlah penduduk mengakibatkan semakin tinggi pula konsumsi pangan, namun terkadang penawaran bahan pangan tidak mencukupi permintaan yang ada sehingga berdampak pada peningkatan harga bahan pangan yang akhirnya mampu menyumbang gerakan inflasi di Indonesia (Putri *et al.*, 2022). Permasalahan gejala harga pangan yang berfluktuasi juga disebabkan panjangnya rantai pasok yang menjadi permasalahan utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program, salah satunya adalah Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Sejak tahun 2016, program ini telah diterapkan di 32 provinsi dengan tujuan utama menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis. PUPM bertujuan untuk menciptakan rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi, dengan cara memperpendek rantai distribusi. Hal ini juga memungkinkan aliran informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (dimana pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya dipasok oleh pelaku usaha tertentu), serta mencegah penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha tertentu. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 06/KPTS/RC.110/J/01/2017 menjadi landasan hukum yang mengatur pelaksanaan program ini. Selain itu, Program PUPM juga menjadi wadah untuk memberdayakan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), yang terdiri dari gabungan kelompok tani, kelompok usaha, dan lembaga masyarakat di bidang pertanian. Tugas utama LUPM adalah melayani mitra pemasaran, yaitu Toko Tani Indonesia (TTI), sehingga membantu dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi daerah pelaksana program PUPM melalui Toko Tani Indonesia (TTI) sejak tahun 2016. Dilansir dari laman berita harian Sinartani.co.id, pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri karena memiliki potensi bidang pertanian berupa lahan pertanian mencapai 98.082 ha atau 53.82% dari luas wilayah secara keseluruhan dengan didukung sarana irigasi sebanyak 3.970 unit yang panjangnya sekitar 1.560 km. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri, program PUPM di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016-2022 sebanyak 18 kegiatan yang dipasarkan melalui 121 unit TTI dengan kecamatan terbanyak yaitu Kecamatan Jatisrono, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Puhpelem.

Program PUPM dilaksanakan dengan dukungan dana APBN melalui dana alokasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam bentuk dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketahanan pangan provinsi (Kurniawan, 2021). Pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri terhenti tahun 2021 dikarenakan perubahan wewenang yang awalnya berada di bawah Badan Ketahanan Pangan berubah menjadi Badan Pangan Nasional. Hal ini mengakibatkan munculnya beberapa masalah seperti kekosongan penyaluran APBN sehingga ada beberapa gapoktan dan TTI yang tidak dapat berjalan atau tetap berjalan dengan menggunakan anggaran daerah. Permasalahan lainnya yaitu berkaitan dengan pengelolaan keuangan, administrasi, dan manajemen atau kepengurusan. Bantuan modal dari pemerintah kepada gapoktan masih belum dimanfaatkan secara maksimal yang ditandai dengan membengkaknya biaya transportasi, sistem pembayaran dari TTI kepada gapoktan berada di akhir kegiatan dan beras yang tidak terjual di TTI akan dikembalikan kepada gapoktan sehingga gapoktan banyak mengalami kerugian.

Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kabupaten Wonogiri sangat bergantung pada kerjasama dan komitmen semua pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Evaluasi program menjadi salah satu cara penting untuk menilai sejauh mana efektivitas suatu program, dengan mempertimbangkan semua komponen pendukungnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Arikunto & Jabar, 2014). Evaluasi program PUPM dapat memberikan informasi dan rekomendasi keputusan bagi badan pengambil kebijakan, baik untuk memutuskan kelanjutan, perbaikan, atau bahkan pemberhentian pelaksanaan program tersebut. Hal inilah yang mendorong penelitian mengenai "Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kabupaten Wonogiri" menggunakan model CIPP (*context, input, process, product*).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi program pemerintah berupa program PUPM yang akan dilihat tingkat keberhasilannya ditinjau dari sisi *context*, *input*, *process*, dan *product*. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri pada bulan Oktober 2023 - Februari 2024. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* (sengaja) di Kabupaten Wonogiri dengan penentuan sampel menggunakan cara *purposive sampling* yang terdiri dari anggota gapoktan/LUPM dan TTI. *Purposive sampling* menjadi metode *sampling non random* dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset, sehingga dapat menanggapi kasus riset (Lenaini, 2021).

Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif dan sumber data terdiri dari data primer yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang didapatkan tidak secara langsung (internet, buku, artikel, instansi pemerintah/ swasta dan lain-lain). Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dan dokumentasi dengan teknik observasi, wawancara, pencatatan, dan studi pustaka. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian ini yaitu anggota gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan TTI yang ikut dalam program PUPM dengan jumlah 32 responden. Opsi jawaban dalam kuesioner menggunakan skala likert 1-3, dengan alternatif jawaban sesuai/setuju (S) diberi skor 3, netral/cukup (N) diberi skor 2, dan tidak sesuai/tidak setuju (TS) diberi skor 1 (Nazir, 2003). Kuesioner yang akan digunakan diuji tingkat validitas dan reabilitas agar pertanyaan dalam kuesioner valid dan mengurangi kesalahan pengukuran.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif model interaktif (*reduction*, *display*, dan *conclusion drawing /verification*) untuk mengetahui pelaksanaan program. Pelaksanaan program PUPM dalam rangka melihat tingkat keberhasilannya dari sisi *context*, *input*, *process*, dan *product* dianalisis menggunakan cara tabulasi dan metode analisis berupa metode *scoring*. Penggunaan model CIPP ini karena memiliki kelebihan yaitu lebih komprehensif karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses dan hasil (Darodjat dan Wahyudhiana, 2015). Hasil akhir dari masing-masing komponen evaluasi CIPP dihitung dengan melihat dominasi 32 responden dari ketiga kategori (tinggi, sedang, dan rendah).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Umum Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang juga dikenal dengan sebutan Kota Gaplek. Secara astronomis, Kabupaten Wonogiri berada diantara 7°32' - 8°15' Lintang Selatan (LS) serta antara 110°41' - 111°18' Bujur Timur (BT). Kabupaten Wonogiri memiliki luas 1.904,32 km² yang secara administratif terbagi menjadi 25 kecamatan yang terdiri 25 desa dan 43 kelurahan. Kecamatan yang wilayahnya paling sempit yaitu Kecamatan Puhpelem sekitar 32,31 km², sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu Kecamatan Pracimantoro yang mencapai luas 7,8% dari total luas Kabupaten Wonogiri sekitar 144,40 km². Jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 tergolong cukup banyak yaitu sebesar 1.057.087 jiwa yang didominasi usia produktif.

Kondisi perekonomian di Kabupaten Wonogiri menunjukkan pertumbuhan yang positif dan juga ditunjang oleh beberapa program antara lain yaitu program PUPM. Sebanyak 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri terdapat 16 kecamatan yang pernah menjalankan program PUPM yaitu Kecamatan Wonogiri, Jatisrono, Girimarto, Manyaran, Wuryantoro, Jatipurno, Tirtomoyo, Baturetno, Slogohimo, Selogiri, Purwantoro, Ngadirojo, Pracimantoro, Giriwoyo, Puhpelem, dan Sidoharjo. Kecamatan yang memiliki jumlah mitra TTI dalam program PUPM terbanyak di Kabupaten Wonogiri yaitu Jatisrono, Ngadirojo, dan Puhpelem. Program PUPM mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai tahun 2021.

3.2. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah anggota gapoktan/LUPM dan TTI pelaksana program PUPM. Jumlah responden yaitu sebanyak 32 orang berasal dari tiga kecamatan (Jatisrono, Ngadirojo, dan Puhpelem). Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan berjumlah 19 orang atau sebesar 59,37%. Perempuan mengambil porsi lebih besar daripada laki-laki dalam kegiatan jual-beli di pasar karena perempuan memiliki kelebihan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi di pasar tradisional (Bimono, 2017). Karakteristik responden berdasarkan umur dalam penelitian ini tergolong cukup dewasa dan dianggap sudah memiliki kemampuan menilai dan memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yaitu didominasi umur 46-55 tahun berjumlah 16 orang atau 50%. Responden dalam penelitian ini juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu didominasi oleh pendidikan SLTA/SMA berjumlah 19 orang atau sebesar 59%, dan berdasarkan lama usaha didominasi oleh usaha yang tidak lebih dari 10 tahun sebanyak 22 orang atau sebesar 68,75%.

3.3. Program PUPM di Kabupaten Wonogiri

Program PUPM mulai dilaksanakan tahun 2016 yang merupakan wujud dari pelaksanaan NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja dalam upaya untuk menjaga harga pangan yang wajar di tingkat produsen dan mempermudah akses pasokan serta harga pangan yang terjangkau di tingkat konsumen. Bentuk fasilitas PUPM ini menitikberatkan pada penyerapan produksi nasional dari petani dengan harga layak dan mengolahnya secara langsung melalui peralatan pengolahan dari bantuan pemerintah kepada gapoktan/LUPM. Jumlah penerima bantuan dana dan alat pengolahan padi/beras program PUPM di Kabupaten Wonogiri ini sebanyak 18 gapoktan/LUPM. Untuk menjadi penerima bantuan, gapoktan harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk memiliki legalitas, berorientasi bisnis, berpengalaman dalam perdagangan pangan minimal tiga tahun, memiliki struktur organisasi yang jelas, serta memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang memadai, sudah memiliki AD/ART, memiliki penggilingan (*rice milling unit*) milik gapoktan, diutamakan memiliki mesin pengering/*dryer*, dan memiliki gudang penyimpanan atau aset pendukung lainnya (Kurniawan dan Aini, 2022). Gapoktan/LUPM penerima bantuan bekerja sama dengan toko, kios atau warung untuk memasarkan produk beras kepada masyarakat. Jumlah toko yang menjadi mitra TTI di Kabupaten Wonogiri sebanyak 121 unit. Kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra TTI antara lain yaitu pedagang tetap, memiliki tempat usaha milik pribadi atau menyewa, lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau, memiliki SIUP/NPWP/UD (minimal surat izin usaha dari desa), berpengalaman minimal satu tahun, dan tidak sedang bermasalah dalam keuangan seperti hutang/piutang yang belum terselesaikan.

Pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri didukung dengan dana APBN dalam berupa dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang ketahanan pangan di provinsi. Dana tersebut disalurkan kepada gapoktan/LUPM yang bergerak di bidang pangan dalam bentuk dana bantuan pemerintah. Penggunaan dana negara hanya dilakukan pada tahun berjalan saja. Jika subsidi tidak digunakan, maka harus disetor ke Departemen Keuangan pada akhir tahun tersebut. Dana hibah yang diberikan kepada gapoktan/LUPM berjumlah sama sebesar Rp 100.000.000,00 dengan 60% bagiannya digunakan untuk operasional sebesar Rp 60.000.000,00. Dana operasional ini mencakup semua pengeluaran yang langsung terkait dengan produksi atau pembelian barang dan jasa yang diperdagangkan oleh gapoktan/LUPM. Dengan demikian, dana ini memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan usaha pangan mereka, termasuk dalam aspek produksi dan distribusi (Jumirin dan Lubis, 2018). Biaya operasional digunakan untuk sortasi, pengemasan, jasa angkut, dan bongkar muat padi/beras kemasan siap jual. Tahun pertama program PUPM dijalankan di Kabupaten Wonogiri terjadi perubahan beberapa kebijakan dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang berubah yaitu pada tahun 2016 setiap gapoktan/LUPM harus mengirimkan beras TTI ke Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan permintaan yang tinggi dan sedikitnya pasokan beras. Pada awal tahun 2017 kebijakan tersebut berubah menjadi setiap gapoktan/LUPM harus mengirimkan beras ke pusat (Jakarta) sampai pertengahan tahun 2017. Selama pengiriman beras TTI ke pusat, terdapat kendala salah satunya yaitu tingginya BOP (Biaya Operasional dan Pemeliharaan). Biaya distribusi menuju Jakarta lebih besar sehingga merugikan gapoktan/LUPM.

Akhirnya pada bulan Juli tahun 2017 kebijakan pengiriman ke pusat dievaluasi dan berubah ke kabupaten masing-masing.

Beras yang dijual di TTI memiliki kualitas medium. Beras medium yaitu kualitas beras yang terdapat butir patah di dalamnya maksimal hanya 25% dan menjadi beras dengan persentase paling banyak dikonsumsi oleh penduduk di Indonesia dibandingkan dengan kualitas lainnya seperti beras premium atau beras khusus (Putri *et al.*, 2020). Harga jual beras ke TTI memiliki rentang sekitar Rp7.000,00–Rp 8.000,00/kg pada tahun 2016-2019. Padi yang dikumpulkan gapoktan/LUPM diolah dan dikemas kemudian dijual dengan hanya mengambil margin keuntungan kecil yaitu sebesar Rp 300,00/kg. TTI menjual beras kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah yaitu sesuai acuan provinsi sekitar Rp 10.500,00 dan sesuai acuan nasional sekitar Rp 8.800,00. Penentuan harga jual ini berada di bawah harga pasar umumnya yaitu sekitar Rp 9.000,00 – Rp 10.000,00. Pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap penumbuhan, pengembangan, pembinaan, dan kemandirian.

3.4. Evaluasi dan Tingkat Keberhasilan Program PUPM dari Komponen Context

Evaluasi program PUPM pada komponen context melibatkan deskripsi yang mendetail tentang karakteristik khusus lokasi daerah, lingkungan, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ini mencakup upaya untuk menggambarkan secara rinci kondisi lingkungan, kebutuhan, populasi, sampel, serta tujuan program, dengan tujuan untuk menentukan ketepatan sasaran program (Ibrahim, 2018). Penilaian pelaksanaan PUPM dari komponen *context* dapat dilihat dari beberapa aspek meliputi kondisi lingkungan (ekonomi dan sosial budaya), kebutuhan yang belum terpenuhi (permasalahan dan faktor penghambat), dan tujuan program (sasaran dan prioritas). Tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri dari komponen *context*, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Indikator *Context*

Indikator <i>Contexts</i>	Persentase Jumlah Responden (%)		
	Tidak Setuju	Netral	Setuju
Kondisi Lingkungan			
1. Kondisi Ekonomi	-	15,6	84,4
2. Kondisi Sosial Budaya	14,1	34,4	51,6
Kebutuhan yang Belum Terpenuhi			
1. Permasalahan	9,4	42,2	48,4
2. Faktor Penghambat	30,2	40,6	29,2
Tujuan Program			
1. Sasaran	-	20,3	79,7
2. Prioritas	1,6	20,3	78,1

Sumber : Analisis Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 1. pada aspek kondisi lingkungan (kondisi ekonomi dan kondisi sosial budaya) selama pelaksanaan program PUPM dinyatakan sangat berpengaruh oleh sebagian besar responden. Menurut Rhaki *et al.*, (2020), kajian yang dilakukan terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar maupun dalam kawasan tertentu menjadi komponen yang turut menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Rata-rata jawaban responden menunjukkan bahwa responden sangat setuju program PUPM berpengaruh positif sebesar 84,4% terhadap indikator kondisi ekonomi dan 51,6% terhadap indikator kondisi sosial budaya. Jawaban responden terkait dengan indikator permasalahan yang dihadapi menunjukkan bahwa responden sangat setuju sangat setuju sebesar 48,4% dan cukup netral terhadap indikator faktor penghambat sebesar 40,6%. Tujuan program seperti sasaran program dan prioritas program selama pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri dinyatakan sudah sesuai oleh sebagian besar responden dengan rata-rata jawaban sangat setuju program PUPM berpengaruh positif sebesar 79,7% terhadap indikator sasaran dan terkait indikator prioritas program berpengaruh positif sebesar 78,1%.

Tingkat keberhasilan program PUPM dari indikator *context* di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Tingkat Keberhasilan Program PUPM Indikator *Context* di Kabupaten Wonogiri

No.	Kriteria	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Tinggi	21	65,63
2.	Sedang	11	34,38
3.	Rendah	0	0
Jumlah		32	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2024

Secara garis besar, tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUPM dari segi komponen *context* di Kabupaten Wonogiri termasuk ke dalam kategori tinggi. Evaluasi *context* sangat berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan objek tertentu yang akan mau atau yang sedang berjalan (Muryadi, 2017). Hal ini diperoleh dari total skor yang diperoleh setiap responden dari semua pertanyaan sesuai dengan indikator komponen *context*. Total skor yang didapatkan digolongkan berdasarkan interval yang telah ditentukan terdiri dari tiga kategori. Interval skor kategori tinggi berkisar 30,4 sampai 39. Dari 32 responden terdapat 21 responden atau 65,63% memperoleh kategori tinggi. Hal ini berarti setiap indikator sudah sesuai dengan sasaran yang seharusnya menerima bantuan dan masyarakat sebagai konsumen sasaran program.

3.5. Evaluasi dan Tingkat Keberhasilan Program PUPM dari Komponen Input

Evaluasi input ini memberikan informasi mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan (Mufid, 2020). Evaluasi program PUPM komponen *input* terdiri dari sarana dan peralatan pendukung (ketersediaan alat dan bahan, gudang penyimpanan beras), dan sumber daya materi (kecukupan biaya, kemampuan SDM) untuk mengelola bantuan dari pemerintah. Tingkat keberhasilan program PUPM di Kabupaten Wonogiri dari komponen *input* sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Indikator *Input*

Indikator Input	Persentase Jumlah Responden (%)		
	Tidak Setuju	Netral	Setuju
Sarana dan Peralatan Pendukung			
1. Ketersediaan Bahan dan Alat	53,1	23,9	22,9
2. Gudang Penyimpanan	27,1	22,1	54,2
Sumber Daya Materi			
1. Kecukupan Biaya	45,8	37,5	16,7
2. Kemampuan SDM	45,8	71,8	30,2

Sumber : Analisis Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan sarana dan peralatan pendukung seperti bahan dan alat pengolahan serta gudang penyimpanan dinyatakan tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan program PUPM oleh sebagian besar responden dengan rata-rata sebesar 53,12%. Hal ini dikarenakan bantuan alsintan atau bantuan berupa dana tidak diberikan kepada mitra TTI tetapi hanya diberikan kepada gapoktan atau LUPM sehingga TTI tidak mendapatkan dana bantuan maupun alat pengolahan. Rata-rata jawaban responden terkait adanya bantuan dana, kecukupan biaya pengolahan dan distribusi menunjukkan bahwa responden tidak setuju mengenai kecukupan dana bantuan yang diberikan sebesar 45,8% dan tingkat kemampuan SDM menunjukkan bahwa responden tidak setuju dengan hal tersebut sebesar 45,8%. Kemampuan manajerial yang baik dapat mendukung berbagai aktivitas berkaitan dengan aktivitas pokok organisasi dalam mencapai tujuan usahanya (Widarti dan Kurniawan, 2023).

Tingkat keberhasilan program PUPM dari indikator *input* di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. berikut:

Tabel 4. Tingkat Keberhasilan Program PUPM Indikator *Input* di Kabupaten Wonogiri

No.	Kriteria	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Tinggi	5	15,63
2.	Sedang	14	43,75
3.	Rendah	13	40,63
Jumlah		32	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2024

Secara garis besar Tabel 4. menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUPM dari segi komponen *input* di Kabupaten Wonogiri termasuk ke dalam kategori sedang. Fokus evaluasi input mengkasi mengenai SDM, alat pendukung dan sarana, pembiayaan/dana, dan prosedur/aturan yang dibutuhkan dalam mengatur keputusan berkaitan rencana dan strategi mencapai tujuan program (Nurhayani *et al.*, 2022). Kategori sedang ini diperoleh dari total skor oleh setiap responden dari setiap pertanyaan berkaitan dengan *input*. Kemudian skor dikelompokkan berdasarkan interval yang telah ditentukan yaitu tiga kategori. Adapun interval untuk kategori sedang berkisar antara skor 20,1 sampai 28. Berdasarkan total skor responden, dari 32 responden ada 14 responden atau sebesar 43,75% yang memperoleh skor kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang termasuk dalam usaha untuk menyajikan beragam hal fisik (sarana dan peralatan) maupun non fisik (biaya dan SDM) sebagai kelengkapan proses pelaksanaan PUPM cukup sesuai dengan ketentuan.

3.6. Evaluasi dan Tingkat Keberhasilan Program PUPM dari Komponen Process

Evaluasi proses merupakan tahapan dalam pelaksanaan rumusan strategi dan penggunaan berbagai jenis saran atau model, bahan dalam kegiatan di lapangan untuk membantu implementasi keputusan. Manfaat evaluasi proses dapat memberikan beberapa informasi mengenai kekuatan dan kelemahan dalam program (Mufid, 2020). Pencapaian tingkat keberhasilan program PUPM dari segi proses dapat dilihat dari kegiatan persiapan (sosialisasi dan penyaluran bantuan), perumusan strategi program (jadwal dan alokasi waktu, aliran informasi dan keuangan), serta implementasi (monitoring pemanfaatan dan hambatan) pelaksanaan program PUPM. Tingkat keberhasilan PUPM di Kabupaten Wonogiri dari komponen *input* sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai Indikator *Process*

Indikator Process	Persentase Jumlah Responden (%)		
	Tidak Setuju	Netral	Setuju
Persiapan			
1. Pelaksanaan Sosialisasi	8,3	14,6	77,1
2. Proses Penyaluran Bantuan	38,5	12,5	38,5
Perumusan Strategi Program			
1. Jadwal dan Alokasi Waktu Kegiatan	26	16,7	57,3
2. Aliran Informasi dan Keuangan	16,4	28,1	55,5
Implementasi Program			
1. Monitoring Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	18,7	17,2	4,1
2. Hambatan Pelaksanaan	37,5	25	37,5

Sumber : Analisis Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 5. rata-rata jawaban responden terkait indikator pelaksanaan sosialisasi persiapan menunjukkan bahwa responden setuju sebesar 77,1% karena sudah dilaksanakan sosialisasi perencanaan dan evaluasi program serta saling berbagi informasi dengan mitra terkait kebutuhan dan jadwal yang akan dilakukan pengiriman, sedangkan rata-rata kelancaran penyaluran bantuan dan sistem pembayaran sebesar 48,9% responden yang tidak setuju dengan adanya penyaluran bantuan dari pemerintah karena bantuan yang diberikan hanya ditujukan kepada gapoktan/LUPM. Menurut penelitian Hariani (2019), pemanfaatan subsidi berupa dana maupun alat/mesin bantuan pemerintah dilakukan oleh gapoktan atau LUPM dalam pengadaan pangan, operasional, kegiatan pengolahan dan penyaluran, serta kegiatan memasok bahan pokok kepada pihak TTI. Responden setuju mengenai kesesuaian jadwal dan alokasi waktu kegiatan sebesar 57,3%, dan dari rata-rata tersebut juga

menunjukkan bahwa responden setuju mengenai kesesuaian aliran informasi dan keuangan yang terjalin selama pelaksanaan program PUPM sebesar 55,5%. Selama pelaksanaan program, jadwal distribusi beras sudah sesuai kepada mitra TTI dengan tingkat keterlambatan pengiriman yang rendah. Rata-rata jawaban responden terkait adanya monitoring menunjukkan bahwa sebesar 4,1% responden setuju dengan adanya monitoring setiap bulan oleh dinas dan sosialisasi pemanfaatan, serta berimbang antara setuju dan tidak setuju sebesar 37,5% pada hambatan pelaksanaan.

Tingkat keberhasilan program PUPM dari indikator *process* di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat melalui Tabel 6. berikut:

Tabel 6. Tingkat Keberhasilan Program PUPM Indikator *Process* di Kabupaten Wonogiri

No.	Kriteria	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Tinggi	18	56,25
2.	Sedang	14	43,75
3.	Rendah	0	0
Jumlah		32	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2024

Tingkat keberhasilan dari segi *process* program PUPM pada Tabel 6. secara garis besar termasuk ke dalam kategori tinggi. Evaluasi *process* ini mampu melakukan identifikasi suatu hambatan dan masalah dengan tujuan atau *product* akhir untuk mengetahui sudah sampai mana rancangan rencana pelaksanaan program ini telah dilaksanakan dan bagian mana dari komponen program yang masih perlu dibenahi selama program berjalan (Rama *et al.*, 2023). Hasil dari tingginya tingkat keberhasilan ini didapat dari jumlah skor setiap responden dengan cara menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan. Total skor dikelompokkan menjadi tiga interval yang berbeda. Interval untuk kategori tinggi berkisar antara 39,8 sampai 51. Hasil analisis, dari 32 responden terdapat 18 responden atau 56,25% memperoleh kategori tinggi. Pelaksanaan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya tujuan PUPM meliputi persiapan sampai monitoring secara keseluruhan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan..

3.7. Evaluasi dan Tingkat Keberhasilan Program PUPM dari Komponen *Product*

Evaluasi produk dibagi menjadi empat aspek yaitu *impact*, *effectiveness*/efektivitas, *sustainability*/ keberlanjutan dan *transportability* (Ibrahim, 2018). Penilaian terhadap evaluasi dan tingkat keberhasilan dari sisi komponen *product* dapat dilihat dari adanya *impact* (perubahan sikap dan perspektif), *effectiveness* (kualitas produk, kerja, dan lingkungan), *sustainability* (pertimbangan kelanjutan program, dan rencana program baru), serta *transportability* (adaptasi program dan potensi penerapan kembali). Tingkat keberhasilan PUPM di Kabupaten Wonogiri komponen *product* sebagai berikut:

Tabel 7. Nilai Indikator *Product*

Indikator <i>Product</i>	Persentase Jumlah Responden (%)		
	Tidak Setuju	Netral	Setuju
<i>Impact</i>			
1. Adanya Perubahan Sikap	6,3	32,8	60,9
2. Adanya Perubahan Perspektif	18,8	40,6	40,6
<i>Effectiveness</i>			
1. Produk/Luaran Berkualitas	-	18,8	81,25
2. Meningkatkan Kualitas Kerja dan Lingkungan	20,3	17,2	62,5
<i>Sustainability</i>			
1. Pertimbangan Kelanjutan Program	-	31,25	68,7
2. Rencana Program Baru	48,4	39,1	12,5
<i>Transportability</i>			
1. Adaptasi Program	31,25	23,9	44,8
2. Potensi Program Diterapkan Kembali	9,4	31,25	59,4

Sumber : Analisis Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 7. *impact* terdiri dari perubahan sikap dan perubahan perspektif akibat dilaksanakannya program. Rata-rata jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden sekitar 60,9% menyatakan sangat setuju terkait adanya dampak program terhadap perubahan sikap dan sekitar 40,6% setuju terkait adanya perubahan perspektif pelaku. Pelaksanaan program PUPM dapat mengubah sikap petani dalam proses produksi melalui gapoktan dan kelompok tani yang terdapat banyak kegiatan pendampingan untuk merubah perilaku petani meliputi sikap, pengetahuan, perspektif, dan keterampilan petani (Iwan *et al.*, 2023). *Effectiveness* terdiri dari produk atau luaran yang berkualitas dan peningkatan kualitas kerja serta lingkungan sasaran dimana sebesar 81,25% responden setuju bahwa pelaksanaan program PUPM berdampak positif dan berdampak positif terhadap kinerja petani untuk meningkatkan kualitas beras dan meningkatkan kesejahteraan pelaku program yang berasal dari keuntungan penjualan beras melalui TTI sebesar 62,5%. Rata-rata jawaban responden dalam indikator *product* berupa peningkatan kualitas lingkungan dan kerjasama menunjukkan bahwa responden sangat setuju sebesar 68,75% mengenai pertimbangan kelanjutan program PUPM dan menyatakan tidak setuju mengenai rencana penyelenggaraan program baru atau program pengganti sebesar 48,4%. *Transportability* terdiri dari adaptasi program dan potensi penerapan program kembali dimana rata-rata jawaban responden terkait mengenai adaptasi dari adanya program PUPM menunjukkan responden setuju sebesar 44,8%, sedangkan mengenai penerapan kembali program PUPM sebesar 59,4% responden setuju. Hal ini karena program memberikan dampak positif yang berpotensi untuk diterapkan kembali.

Tingkat keberhasilan program PUPM dari indikator *product* di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 8. berikut:

Tabel 8. Tingkat Keberhasilan Program PUPM Indikator *Product* di Kabupaten Wonogiri

No.	Kriteria	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Tinggi	16	50
2.	Sedang	15	46,87
3.	Rendah	1	3,13
Jumlah		32	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2024

Secara garis besar dalam Tabel 8. tingkat keberhasilan dari program PUPM dari segi *product* di Kabupaten Wonogiri termasuk dalam kategori tinggi. Evaluasi dengan komponen *product* ini dapat melihat dampak dari suatu program, ketercapaian program, dan kestabilan program dalam kurun waktu tertentu (Dalmia dan Alam, 2021). Kategori ini diperoleh dari total skor setiap responden dari pertanyaan dalam kuisioner. Kemudian total skor dimasukkan sesuai dengan interval yang telah ditentukan yaitu tiga kategori. Interval kategori tinggi berkisar antara 37,4 sampai dengan 48. Dari 32 responden penelitian ini, terdapat 16 responden atau sebanyak 50% memperoleh kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil/*product* dari proses kegiatan program PUPM ini cukup ada peningkatan bagi pelaku dan sasaran program.

Penilaian silang secara keseluruhan antara setiap komponen dalam midel evaluasi CIPP yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product* untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri. Tingkat keberhasilan dilihat dari keseluruhan komponen CIPP yaitu sebagai berikut :

Tabel 9. Tingkat Keberhasilan Program PUPM Keseluruhan

Komponen	Kategori
<i>Context</i>	Tinggi
<i>Input</i>	Sedang
<i>Process</i>	Tinggi
<i>Product</i>	Tinggi

Sumber : Analisis Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan tingkat keberhasilan program PUPM di Kabupaten Wonogiri, secara keseluruhan pelaksanaan program PUPM sangat baik dan sesuai

ketentuan pelaksanaan sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan program PUPM dapat tercapai dan layak diteruskan. Hasil evaluasi ini dapat mengukur ketercapaian setiap program yang sudah dilaksanakan apakah layak diteruskan, direvisi, atau diberhentikan (Munthe, 2015). Hal ini dapat dilihat dari dominasi total skor jawaban responden dari empat komponen CIPP. Komponen CIPP terdiri dari *context* dengan kategori tinggi, *input* dengan kategori sedang, *process* dengan kategori tinggi, dan *product* dengan kategori tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian beserta pembahasan berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi program PUPM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Proses pelaksanaan program PUPM melalui TTI di Kabupaten Wonogiri didukung dengan bantuan pemerintah dari dana APBN. Dana tersebut selanjutnya disalurkan ke gapoktan/LUPM sebesar Rp 100.000.000,00 dengan 60% bagiannya digunakan untuk biaya operasional (pengemasan, jasa angkut, bongkar muat dan lainnya) sebesar Rp 60.000.000,00. Pemasaran berkerjasama dengan TTI untuk menjual beras medium kemasan 5 kg kepada konsumen dengan harga acuan provinsi Rp 10.500,00 dan acuan nasional Rp 8.800,00 di bawah harga pasar umumnya.
- b. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri dari sisi komponen *context* termasuk ke dalam kategori tinggi yaitu sebesar 65,63%, dilihat dari indikator kondisi lingkungan (kondisi ekonomi 84,4% termasuk kategori tinggi, kondisi sosial budaya 51,56% termasuk kategori tinggi), indikator kebutuhan yang belum terpenuhi (permasalahan 48,44% termasuk kategori tinggi, faktor penghambat 40,62% termasuk kategori sedang), indikator tujuan program (sasaran 79,69% termasuk kategori tinggi, prioritas program 78,12% termasuk kategori tinggi).
- c. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri dari sisi komponen *input* termasuk ke dalam kategori sedang yaitu sebesar 43,45%, dilihat dari indikator sarana dan peralatan pendukung (ketersediaan alat dan bahan 53,12% termasuk kategori rendah, gudang penyimpanan 54,17% termasuk kategori tinggi), dan indikator sumber daya materi (kecukupan biaya 45,83% termasuk kategori rendah, kemampuan SDM sebesar 45,83% termasuk kategori rendah).
- d. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri dilihat dari komponen *process* termasuk ke dalam kategori tinggi yaitu sebesar 56,25%, dilihat dari indikator persiapan (pelaksanaan sosialisasi 77,08% tergolong tinggi, proses penyaluran bantuan 48,96% tergolong rendah), indikator perumusan strategi program (jadwal dan alokasi waktu kegiatan 57,29% termasuk kategori tinggi, aliran informasi dan keuangan 55,47% termasuk kategori tinggi), dan indikator implementasi program (monitoring pemanfaatan sarana dan prasarana 64,06% termasuk kategori tinggi, hambatan pelaksanaan 37,5% sama untuk kategori tinggi dan rendah).
- e. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program PUPM di Kabupaten Wonogiri dari sisi komponen *product* termasuk kategori tinggi yaitu sebesar 50%, dilihat dari indikator *impact* (adanya perubahan sikap 60,94% dan adanya perubahan perspektif 40,62% termasuk kategori tinggi), indikator *effectiveness* (produk/luaran berkualitas 81,25%, dan peningkatan kualitas kerja dan lingkungan 62,5% termasuk kategori tinggi), indikator *sustainability* (pertimbangan kelanjutan program 68,75% termasuk kategori tinggi, rencana program baru 48,44% termasuk kategori rendah), indikator *transportability* (adaptasi program 44,79% dan potensi program diterapkan kembali 59,37% termasuk dalam kategori tinggi).

5. IMPLIKASI

Hasil penelitian evaluasi ini digunakan sebagai bahan masukan untuk pemerintah dan gapoktan/LUPM maupun TTI, berkenaan dengan pelaksanaan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kabupaten Wonogiri. Evaluasi *context* menunjukkan persentase dari komponen pada ketiga indikator diperoleh adalah 59,4% dengan kriteria tinggi/setuju. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan gapoktan/LUPM/konsumen, tujuan program dan kebutuhan yang hendak dicapai. Evaluasi *input* menunjukkan kesiapan pelaku program dan fasilitas pendukung untuk memenuhi pelaksanaan

program PUPM. Evaluasi *input* menunjukkan persentase dari komponen pada kedua indikator diperoleh adalah 42,82% dengan kriteria rendah/tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa belum sesuai pelaksanaan dengan pedoman pelaksanaan program berkaitan dengan ketersediaan alat dan bahan, kecukupan biaya, dan kemampuan SDM.

Hasil evaluasi *process* masuk kategori tinggi/setuju dengan persentase 55,6% yang ditujukan untuk mengembangkan pelaksanaan program selanjutnya, menilai dan mengarahkan agar tujuan program tercapai. Hal ini dibuktikan dengan didominasi sudah sesuai dengan pedoman berkaitan dengan sosialisasi, jadwal dan alokasi waktu, aliran informasi dan keuangan, monitoring dan hambatan pelaksanaan. Hasil evaluasi *product* masuk kategori tinggi/setuju dengan persentase 52,8%, dibuktikan dengan didominasi yang sudah sesuai tentang perubahan sikap dan perspektif pelaku, kualitas luaran dan lingkungan kerja, adaptasi, kelanjutan dan potensi penerapan program kembali. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari komponen *context* yang ada dalam kategori tinggi, *input* dalam kategori sedang, *process* dalam kategori tinggi, dan *product* dalam kategori tinggi. Berdasarkan ketercapaiannya, keefektifan program PUPM secara keseluruhan dinilai sudah cukup efektif.

6. SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai pihak yang mendampingi dan mengawasi keberjalanan program PUPM disarankan untuk lebih memberikan pembinaan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pengelolaan bantuan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap program sehingga tujuan dapat tercapai.
- b. Perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai harga beli dari petani dan harga jual kepada TTI maupun konsumen agar dalam operasionalnya gapoktan/ LUPM tidak mengalami kerugian dengan tingkat keuntungan sangat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., & Jabar, C.S.A. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Akasara.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Wonogiri 2020*. <https://wonogirikab.bps.go.id/publication/2021/12/29/b4b1d14c3e1d0cd143aada69/luas-panen-dan-produksi-padi-2020-hasil-pendataan-statistik-pertanian-tanaman-pangan-terintegrasi-dengan-metode-kerangka-sampel-area.html#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20Survei%20KSA%20pada,pada%202020%20menapai%20198.977%20ton> diakses pada 25 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Wonogiri (ha) 2018*. <https://wonogirikab.bps.go.id/statistable/2019/11/22/409/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-wonogiri-ha-2018.html> diakses pada 24 Mei 2023.
- Bimono, A. (2017). Peran ganda perempuan pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan*, 6(6), 1-14. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/9125>
- Dalmia., & Alam, F.A. (2021). Evaluasi program model context dan input dalam bimbingan konseling. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 1(2), 111-124. <https://jurnal.stkipmb.ac.id/index.php/jubikops/article/view/158>
- Darodjat., & Wahyudhiana, M. (2015). Model evaluasi program pendidikan. *Jurnal ISLAMADINA*, 14(1), 1-28. <https://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1665>
- Hariani, M. (2019). *Peranan pengurus kelompok tani dalam program pengembangan usaha pangan masyarakat (pupm) di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung*. (Skripsi, Universitas Lampung). <https://digilib.unila.ac.id/55147/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

- Ibrahim, M.M. (2018). *Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*. Alauddin University Press. Makasar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/22440>
- Iwan, M., Marina, I., Sulaksana, J. (2023). Alternatif program pengembangan usaha pangan masyarakat untuk keberlanjutan usaha kelompok tani. *Juornal of Sustainable Agribusiness*, 02(02), 29-36. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jsa/article/view/6766/4524>
- Jumirin., & Lubis, Y. (2018). Pengaruh biaya operasional terhadap peningkatan pendapatan operasional pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Belawan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 162-177. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3310>
- Kurniawan, H.M., & Aini, F. (2022). Aplikasi akuntansi sederhana ETAP dalam pengembangan usaha pangan masyarakat pada Gapoktan Sari Agung di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen*, 2(1), 18-26. <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jipkmm/article/view/288>
- Kurniawan, M.H. (2021). Strategi pengembangan usaha Gapoktan Sari Agung di Desa Sedahayan Jaya Kecamatan Sukadana. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 4(1), 9-22. <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/equa;ilibrium/article/view/150>
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel *purposive* dan *snowball sampling*. *Jurnal Kajian, Peneliti & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>
- Mufid, M. (2020). Evaluasi model *context, input, process and produst* (CIPP) program baca tulis Al-Quran di Institusi Agama Islam Negeri Pekalongan. *Jurnal QUALITY*, 8(1), 1-14. <http://dx.doi.org/10.21043/quality.v8i1.6908>
- Munthe, A.P. (2015). Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2) 1-14. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>
- Muryadi, A.D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas*, 3(1), 1-16. <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/538>
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhayani., Yaswinda., Movitaria, M.A. (2022). Model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi program pendidikan karakter sebagai fungsi pendidikan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2353-2362. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i8.1116>
- Putri, M.A., Afrizal, R., Arnayulis., & Alfikri. (2022). Fluktuasi harga pangan dan pengaruhnya terhadap inflasi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. *Agropross National Conference Proceedings of Agriculture*, 404-415. <https://doi.org/10.25047/agropross.2022.311>
- Putri, N., Ismono, R.H., Murniati, K. (2020). Efektivitas kebijakan harg eceran tertinggi (HET) dan rantai pasok beras medium di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 8(2), 318-325. <http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v8i2.4071>
- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., Wulansari, R.E. (2023). Konsep model evaluasi *context, input, process, dan product* (CIPP) di sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 8(1), 82-86. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>
- Rhaki, M., Kaho, L.M. R., Konradus, B. (2020). Kajian terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dalam mendukung pengelolaan Cagar Alam Ndeta Kelikoma di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(3), 424-435. <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.424-435>
- Subekti, S., & Sariningrum, N.N. (2021). Partisipasi anggota gapoktan pada program pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) melalui toko tani Indonesia (TTI) di Kabupaten Tulung Agung. *Journal of Extension and Development*, 3(1), 17-27.

<https://doi.org/10.23960/jsp.Vol3.no1.2021.64>

- Wibawa, N.C., Ardini, H., Hermawati, G., Firdausa, R.N., Anggoro, K.B., & Wikansari, R. (2023). Analisis Impor Beras di Indonesia dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Impor Beras. *Jurnal Economina*, 2(5), 574-585. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.337>
- Widarti, S., & Kurniawan, M. (2023). Penguatan kemampuan manajerial gabungan kelompok tani melalui pelatihan laporan keuangan di Sungai Raya Dalam. *Jurnal Bhakti Masyarakat*, 1(1), 7-12. <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/bhaktimasfpst/article/view/396>

Efektivitas Bantuan Keuangan Desa (BKD) Untuk Rehabilitasi Jalan di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Tegar Ady Luhung¹, Ary Setyawan², Dewi Handayani³

^{1,2,3}Program Studi S2 Teknik Sipil, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Jln. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126

Email : tegaradyluhung@student.uns.ac.id , arysetyawan@staff.uns.ac.id ,
dewi.handayani@staff.uns.ac.id

Abstract: Village Financial Assistance can be interpreted as a form of financial support provided by the government to villages or village governments to improve public services, village development and empower village communities. Village financial assistance usually comes from the central government budget, regional budget, or through special programs aimed at village development. One of the aims of this activity is to increase the development of existing infrastructure in the village, namely improving roads in the form of building asphalt roads or rigid roads. . The aim of this research is to analyze the value of road pavement conditions in Kanor District using the Pavement condition index (PCI) method, analyze the relationship between PCI values and village financial assistance budgets for road rehabilitation and analyze the effectiveness of using village financial assistance at the planning, implementation and evaluation stages in the District Bojonegoro Regency Office. This research uses the PCI assessment as a basis for calculating road pavement conditions and the PCI decision matrix to determine road conditions. The research results show that the rehabilitation of roads in Pesen Village, Simbatan Village and Sumberwangi Village has been said to be effective based on planning, implementation and evaluation indicators. Road rehabilitation has been carried out well, the road condition is very adequate and functioning very well. It is hoped that the village government will maximize the management of village financial assistance provided by the central government and immediately carry out maintenance if minor damage occurs to the road.

Keywords: Effectiveness, Village Financial Assistance, Road Rehabilitation

Abstrak: Bantuan Keuangan Desa dapat diartikan sebagai bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa atau pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan keuangan desa biasanya bersumber dari anggaran pemerintah pusat, anggaran daerah, atau melalui program-program khusus yang ditujukan untuk pembangunan desa. Kegiatan tersebut salah satu tujuannya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di desa, yakni peningkatan jalan berupa pembangunan jalan aspal atau jalan rigid. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis nilai kondisi perkerasan jalan di Kecamatan Kanor menggunakan metode Pavement condition index (PCI), menganalisis keterkaitan nilai PCI dan anggaran bantuan keuangan desa untuk rehabilitasi jalan dan menganalisis efektivitas penggunaan bantuan keuangan desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan penilaian PCI sebagai dasar perhitungan kondisi perkerasan jalan dan matriks keputusan PCI untuk menentukan kondisi jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi jalan yang ada di Desa Pesen, Desa Simbatan dan Desa Sumberwangi telah dikatakan efektif berdasarkan indikator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Rehabilitasi jalan telah dilaksanakan dengan baik, kondisi jalan sangat memadai dan berfungsi dengan sangat baik. Diharapkan pemerintah desa lebih memaksimalkan pengelolaan bantuan keuangan desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan segera melakukan pemeliharaan jika terjadi kerusakan-kerusakan ringan di jalan tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Keuangan Desa, Rehabilitasi Jalan

1. PENDAHULUAN

Jalan raya merupakan salah satu sarana transportasi darat yang mempunyai peranan penting terhadap kehidupan manusia terutama bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, untuk menunjang pembangunan nasional, serta untuk memudahkan mobilitas masyarakat sehingga dapat

memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Jika terjadi kerusakan jalan maka kegiatan masyarakat akan terganggu. Karena kebutuhan tingkat pelayanan jalan semakin tinggi, maka perlunya peningkatan kualitas jalan dan prasarana jalan, diantaranya adalah kebutuhan jalan yang aman dan nyaman. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menganggarkan kegiatan berupa Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang dananya bersumber dari APBD Kab. Bojonegoro, kegiatan tersebut salah satu tujuannya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa yakni peningkatan jalan berupa pembangunan jalan aspal ataupun jalan rigid. Semua pengerjaannya diserahkan kepada Desa yang mendapat bantuan keuangan tersebut, mulai dari pendanaan yang bersumber dari APBD Kab. Bojonegoro yang langsung ditransfer ke rekening kas desa, perencanaan serta pelaksanaannya juga diserahkan langsung kepada desa tersebut. Kecamatan Kanor adalah salah satu kecamatan yang letaknya berada di ujung sebelah utara wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang mana 3 dari 25 desa di kecamatan tersebut mendapat Bantuan Keuangan Desa (BKD) berupa pembangunan jalan aspal, yaitu Desa Pesen, Desa Simbatan dan Desa Sumberwangi. Bantuan yang didanai oleh APBD Kab. Bojonegoro tahun 2021 dengan jumlah Rp. 1.079.454.090,00 untuk Desa Pesen diperoleh panjang 660 meter dan lebar 4 meter. Rp 1.079.454.090,00 untuk Desa Simbatan dengan panjang 716 meter lebar 3,5 meter dan Rp 1.416.763.493,00 untuk Desa Sumberwangi dengan panjang 900 meter dan lebar 3,5 meter.

Efektivitas pembangunan bisa sukses bila dalam pelaksanaannya dilandasi 3 indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sembel, et. all (2017) dalam penelitiannya berkata jika keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan jadi nilai penting dalam proses pembangunan yang baik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berarti untuk mendapatkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pertumbuhan desa dan Kabupaten/Kota semakin seimbang.

Dengan penelitian ini dapat diketahui jika Bantuan Keuangan Desa (BKD) efektif untuk rehabilitasi jalan khususnya peningkatan jalan aspal di 3 desa yakni Desa Pesen, Desa Simbatan dan Desa Sumberwangi. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengetahui keefektifan penggunaan bantuan yang telah diterimakan ataupun yang baru akan diterimakan pemerintah desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix method. Penelitian mix method adalah metode penelitian campuran yang merupakan perpaduan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sampel yang dipakai dalam riset ini berjumlah 95 responden yang diambil dari aparatur desa dan masyarakat. Untuk memperoleh data dalam kegiatan penelitian perlu menggunakan alat bantu untuk memperoleh informasi dari subjek yang diteliti, yaitu angket/kuesioner dan petunjuk untuk melakukan wawancara. Seluruh komponen kuesioner seputar efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa yang diukur dalam skala likert. Dengan skala likert ini, akan dihasilkan jawaban atas pernyataan yang diajukan, akan dihitung angkanya, dan akan disajikan hasil seberapa efektif penggunaan dana desa dalam rehabilitasi jalan. Ketika mengirimkan skala likert untuk pernyataan dalam kuesioner, itu diklasifikasikan sebagai berikut: SE = sangat efektif dengan skor 4; E = efektif dengan skor 3; TE = tidak efektif dengan skor 2; STE = sangat tidak efektif dengan skor 1.

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah diatas menggunakan analisis kuantitatif dengan metode analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah teknik analisis yang melibatkan pengumpulan dan penyajian sekelompok data untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, penulis menggunakan alat analisis deskriptif dengan model distribusi frekuensi dengan rumus sebagai berikut: $P = F/N \times 100\%$. Keterangan: P = presentase, F = frekuensi jawaban, N = jumlah sampel

Dari formula diatas dapat penulis substitusi dengan persamaan berikut:

$$e = \frac{\sum x}{\sum X_{\max}} \times 100$$

atau

$$e = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100$$

Keterangan :

e = efektivitas

$\sum x$ = total jawaban responden

$\sum x_{\max}$ = jumlah maksimal jawaban responden

Adapun untuk memperoleh nilai $X_{\max}$ diperoleh dari :

$$\sum X_{\max} = \frac{\text{jumlah responden} \times \text{jumlah butir pertanyaan} \times \text{nilai maksimal setiap pertanyaan}}{\text{maksimal setiap pertanyaan}}$$

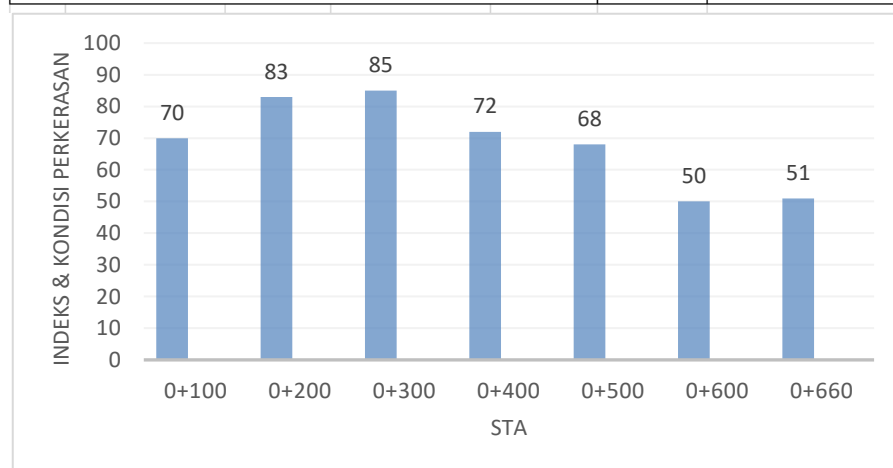
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Nilai Perkerasan Jalan

Hasil perhitungan nilai kondisi perkerasan jalan di Desa Pesen sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan PCI satu ruas jalan Desa Pesen

No	Sta/KM	Luas Segmen (m ²)	m	CDV Max	PCI	Tingkatan
1	0+000 - 0+100	400	7,979591837	30	70	Baik
2	0+100 - 0+200	400	9,081632653	17	83	Sangat Baik
3	0+200 - 0+300	400	9,265306122	15	85	Sangat Baik
4	0+300 - 0+400	400	7,979591837	28	72	Sangat Baik
5	0+400 - 0+500	400	7,612244898	32	68	Baik
6	0+500 - 0+600	400	7,06122449	50	50	Sedang
7	0+600 - 0+660	240	6,510204082	49	51	Sedang
Total					479	



Gambar 1. Grafik perhitungan PCI Desa Pesen

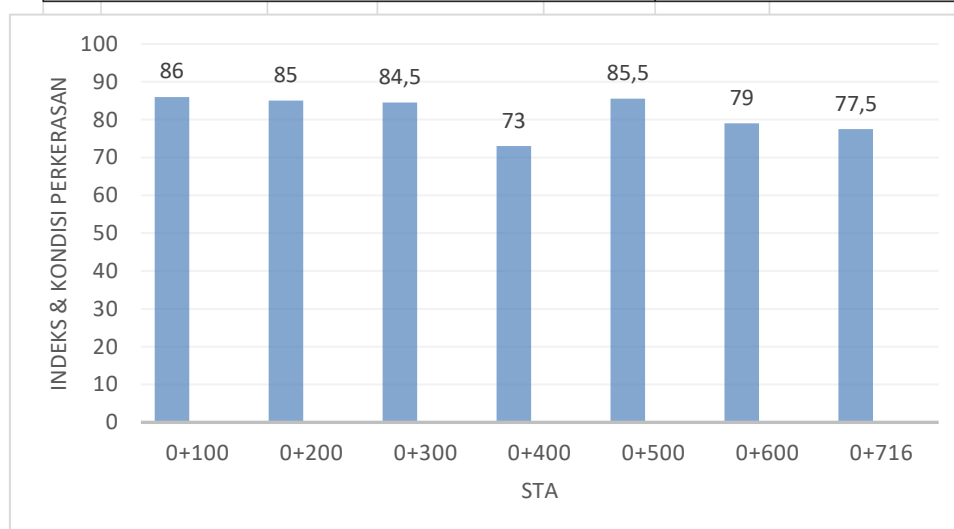
Nilai PCI keseluruhan dapat ditentukan dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{PCI} &= \sum \text{PCI}(s) / N \\ &= 479 / 7 \\ &= \mathbf{68,4 \text{ (Good)}} \end{aligned}$$

Hasil perhitungan nilai kondisi perkerasan jalan di Desa Simbatan sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan PCI satu ruas jalan Desa Simbatan

No	Sta/KM	Luas Segmen (m ²)	m	CDV Max	PCI	Tingkatan
1	0+000 - 0+100	350	9,219387755	14	86	Sempurna
2	0+100 - 0+200	350	9,12755102	15	85	Sangat Baik
3	0+200 - 0+300	350	9,081632653	15,5	84,5	Sangat Baik
4	0+300 - 0+400	350	8,943877551	27	73	Sangat Baik
5	0+400 - 0+500	350	9,12755102	14,5	85,5	Sangat Baik
6	0+500 - 0+600	350	8,530612245	21	79	Sangat Baik
7	0+600 - 0+716	406	8,806122449	22,5	77,5	Sangat Baik
Total					570,5	



Gambar 2. Grafik perhitungan PCI Desa Simbatan

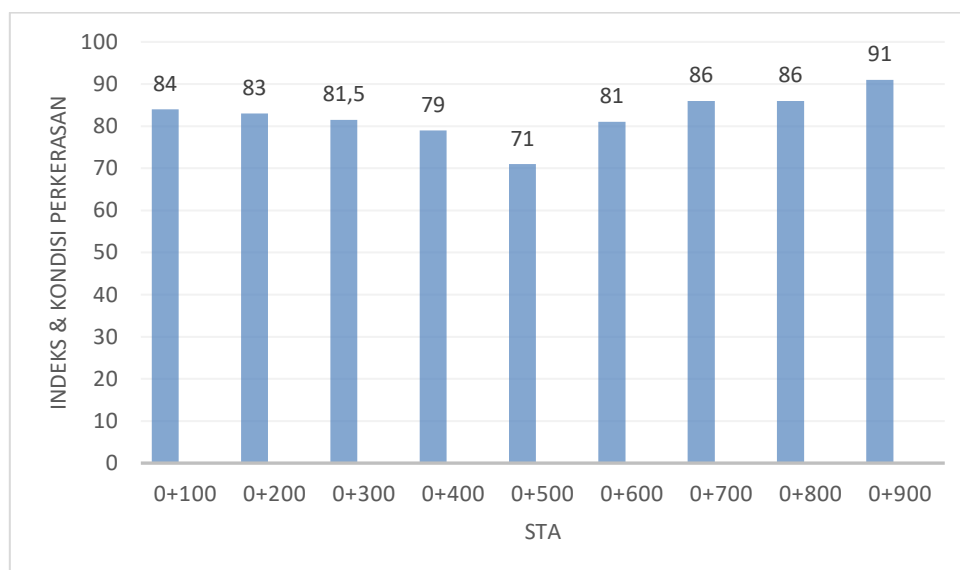
Nilai PCI keseluruhan dapat ditentukan dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{PCI} &= \sum \text{PCI}(s) / N \\
 &= 570 / 7 \\
 &= \mathbf{81,5 \text{ (Very Good)}}
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan nilai kondisi perkerasan jalan di Desa Sumberwangi sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan PCI satu ruas jalan Desa Sumberwangi

No	Sta/KM	Luas Segmen (m ²)	m	CDV Max	PCI	Tingkatan
1	0+000 - 0+100	350	8,989795918	16	84	Sangat Baik
2	0+100 - 0+200	350	8,852040816	17	83	Sangat Baik
3	0+200 - 0+300	350	8,916326531	18,5	81,5	Sangat Baik
4	0+300 - 0+400	350	8,530612245	21	79	Sangat Baik
5	0+400 - 0+500	350	8,392857143	29	71	Sangat Baik
6	0+500 - 0+600	350	7,795918367	19	81	Sangat Baik
7	0+600 - 0+700	350	9,246938776	14	86	Sempurna
8	0+700 - 0+800	350	8,530612245	14	86	Sempurna
9	0+800 - 0+900	350	9,678571429	9	91	Sempurna
Total					742,5	



Gambar 3. Grafik perhitungan PCI Desa Sumberwangi

Nilai PCI keseluruhan dapat ditentukan dengan rumus:

$$PCI = \sum PCI(s) / N$$

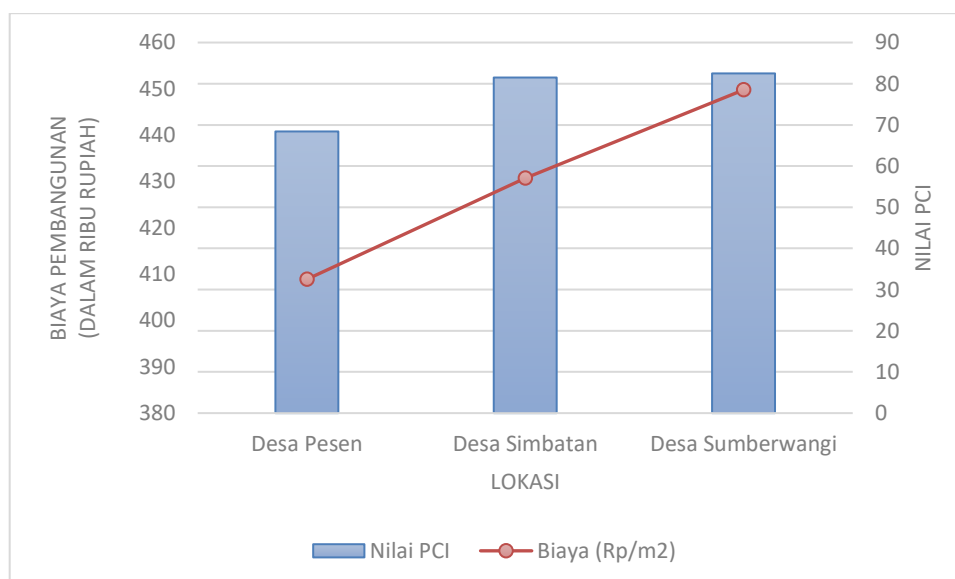
$$= 742,5 / 9$$

$$= 82,5 \text{ (Very Good)}$$

3.2. Keterkaitan nilai PCI dan anggaran Bantuan Keuangan Desa (BKD)

Tabel 4. Perbandingan perhitungan PCI dengan biaya pembangunan

No.	Lokasi	Nilai PCI	Biaya (Rp/m ²)
1	Desa Pesen	68,4	408.884
2	Desa Simbatan	81,5	430.748
3	Desa Sumberwangi	82,5	449.772



Gambar 4. Grafik Perbandingan nilai PCI dengan biaya pembangunan

Dari gambar 4 dapat dilihat nilai PCI di Desa Pesen berbeda cukup banyak dibandingkan 2 desa lainnya. Selisih nilai PCI Desa Pesen dan Desa Simbatan $81,5 - 68,4 = 13,1$ atau sekitar 19,1%. Selisih nilai PCI Desa Pesen dan Desa Sumberwangi ialah $82,5 - 68,4 = 14,1$ atau sekitar 20,6%. Sedangkan selisih nilai PCI Desa Sumberwangi dengan Desa Simbatan hanya sebesar $82,5 - 81,5 = 1$ atau sekitar 1,22%.

Dari gambar 4 juga tampak perbedaan biaya pembangunan jalan per m². Selisih anggaran Desa Pesen dengan Desa Simbatan ialah Rp 430.748,00 – Rp 408.884,00 = Rp 21.864,00 atau sebesar 5,34%. Selisih anggaran Desa Pesen dengan Desa Sumberwangi sebesar 9,99% (Rp 449.772,00 – Rp 408.884,00 = Rp 40.888,00). Dan selisih anggaran Desa Simbatan dengan Desa Sumberwangi hanya sebesar 4,41% (Rp 449.772,00 – Rp 430.748,00 = Rp 17.024,00).

Hasil analisis lapangan memperlihatkan fungsi ketiga jalan yang ditinjau berpengaruh terhadap umur layan jalan yang diwakili oleh nilai PCI. Fungsi jalan Desa Pesen adalah jalan poros desa, jadi setelah 3 tahun pembangunan nilai PCI menjadi 68,4. Sedangkan 2 desa lainnya yaitu Desa Sumberwangi dan Desa Simbatan yang status jalannya sebagai jalan lingkungan nilai PCI nya masih diatas 80, menunjukkan kondisi jalan tersebut lebih memadai dibandingkan dengan jalan Desa Pesen.

Kondisi ini menunjukan bahwa implementasi anggaran untuk jalan perlu memperhatikan fungsi jalan yang dibangun. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian ini bahwa anggaran yang relatif sama untuk fungsi jalan yg berbeda akan berpengaruh terhadap umur layan yang diwakili oleh nilai PCI. Seperti diketahui dari matriks PCI, umur layan berhubungan positif dengan nilai PCI. Semakin tinggi nilai PCI semakin baik kondisi jalannya juga semakin panjang umur layannya.

3.3. Efektivitas Penggunaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) melalui Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Keefektifan pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila dalam pengelolaannya didasari atas tiga indikator yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Rehabilitasi jalan dapat dikatakan efektif jika nilai presentasinya lebih dari 64% atau dapat dilihat dari tabel kriteria efektivitas berikut ini:

Tabel 4.5 Tabel Kriteria Efektivitas

Kriteria	Skala Persen
Sangat efektif	82%-100%
Efektif	64%-81%
Tidak efektif	45%-63%
Sangat tidak efektif	≤44%

a. Perencanaan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari indikator perencanaan dapat dilakukan dengan perhitungan dibawah ini:

$\sum X_{max}$ = jumlah responden × jumlah butir pertanyaan × nilai maximal setiap butir pertanyaan.

$$\sum X_{max} = 95 \times 7 \times 4$$

$$\sum X_{max} = 2,660$$

Dari hasil perhitungan diatas telah diketahui bahwa nilai dari $\sum X_{max} = 2,660$

$$E = \frac{\sum x}{\sum X_{max}} \times 100$$

$$E = \frac{2,149}{2,660} \times 100$$

$$2. E = 0,8078 \times 100$$

$$E = 80,78 \text{ (efektif)}$$

b. Pelaksanaan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari indikator pelaksanaan dapat dilakukan dengan perhitungan dibawah ini:

$\sum X_{\max}$ = jumlah responden $\times$ jumlah butir pertanyaan $\times$ nilai maximal setiap butir pertanyaan.

$$\sum X_{\max} = 95 \times 12 \times 4$$

$$\sum X_{\max} = 4,560$$

Dari hasil perhitungan diatas telah diketahui bahwa nilai dari $\sum X_{\max} = 4,560$

$$E = \frac{\sum x}{\sum X_{\max}} \times 100$$

$$E = \frac{3,638}{4,560} \times 100$$

a) $E = 0,7978 \times 100$

$$E = 79,78 \text{ (Efektif)}$$

c. Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari indikator pengawasan dan transparansi dapat dilakukan dengan perhitungan dibawah ini:

$\sum X_{\max}$ = jumlah responden $\times$ jumlah butir pertanyaan $\times$ nilai maximal setiap butir pertanyaan.

$$\sum X_{\max} = 95 \times 7 \times 4$$

$$\sum X_{\max} = 2,660$$

Dari hasil perhitungan diatas telah diketahui bahwa nilai dari $\sum X_{\max} = 2,660$

$$E = \frac{\sum x}{\sum X_{\max}} \times 100$$

$$E = \frac{2,151}{2,660} \times 100$$

$$E = 0,8086 \times 100$$

$$E = 80,86 \text{ (Efektif)}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan keuangan desa untuk rehabilitasi jalan telah terbukti efektif, sejalan dengan presentasi nilai yang melebihi batas minimal 64%. Keseluruhan, temuan ini memberikan gambaran komprehensif tentang kesuksesan dan keefektifan program pembangunan di tingkat desa.

4. KESIMPULAN

Nilai Kondisi perkerasan jalan di Desa Pesen adalah 68,4 masuk dalam kategori baik (*good*) Desa Simbatan 81,5 masuk kategori sangat baik (*very good*) dan Desa Sumberwangi 82,5 masuk kategori sangat baik (*very good*). Keterkaitan PCI dan implementasi anggaran Bantuan Keuangan Desa (BKD) untuk rehabilitasi jalan dipengaruhi oleh fungsi jalan yang diwakili jumlah dan beban kendaraan yang melewati jalan tersebut. Bantuan keuangan desa untuk rehabilitasi jalan di Desa Pesen, Desa Simbatan, dan Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dinyatakan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar dan Jatmiko. 2012. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Transparan dan Akuntabel. Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Arikunto. 2018. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Campbell, J.P 1989, *Teori Efektivitas*, dalam Richard M:Efektivitas Organisasi 2005. Bandung: Erlangga
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, 2001. *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, AAA. 2017. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Salemba Medika.
- Jonatan Mingkid, Gary dkk. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*. Universitas Sam Ratulangi.
- Lubherty Dewi Amelia, Sudati Nur Safiah, Gentur Jalunggono. 2018. *Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Greges, Kecamatan Tembaka, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018*. *Directory Jurnal Of Economic* Vol 1 No 1.
- Makmur. 2011. *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Notoatmodjo, S. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga.
- Permana A.F. 2018. *Pendapatan Asli Desa dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa*. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*.
- Priyatna, Surya Eka. 2020. *Analisis Statistik Sosial Rangkaian Penelitian Kuantitatif Menggunakan PSS*. Banjarmasin: Yayasan Kita Menulis.
- Prastiyan, A. E., & Solikin, A. 2022. *Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Purworejo*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18*.
- Romli, Ombi., & Nurlia, Elly. 2017. *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*. *Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, (No.1).
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah*.
- Santoso, Singgih. 2019. *Mahir Statistik Parametrik: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang *Desa*
- Widyantoro, B. A. 2016. *Analisis Tingkat Risiko Bencana Kebakaran di Kecamatan Mariso Kota Makassar Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 5 (1): 94-102. Makassar: UIN Alauddin.

Penilaian Kinerja Embung Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Sudarmanto ¹, Sobriyah ², Cahyono Ikhsan ³,

^{1,2,3}Fakultas Teknik Magister Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan, Surakarta 57126

E-mail: darm44rman@student.uns.ac.id

Abstract: Reservoirs act as reservoirs that store excess water for use when needed, thus enabling effective water management for irrigation needs. The water that is managed generally comes from rainwater or river water stored in reservoirs, ensuring water availability at the right time and needs. This study was conducted to evaluate the performance of various components of the reservoir. Primary data collection was carried out through the use of drones and direct surveys at the location. Evaluation of embung performance is carried out based on PK-AKNOP technical guidelines. The results of the analysis show that the performance of the embung is not satisfactory.

Keywords: reservoir, irrigation, performance evaluation.

Abstrak: Embung berperan sebagai reservoir yang menyimpan air berlebih untuk digunakan ketika diperlukan, sehingga memungkinkan pengelolaan air yang efektif untuk kebutuhan irigasi. Air yang dikelola umumnya bersumber dari air hujan atau air sungai yang ditampung dalam embung, memastikan ketersediaan air sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang tepat. Studi ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja berbagai komponen dari embung. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penggunaan drone serta survei langsung di lokasi. Evaluasi kinerja embung dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis PK-AKNOP. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja embung tidak memuaskan.

Kata kunci: embung, irigasi, evaluasi kinerja.

1. PENDAHULUAN

Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru adalah salah satu Desa yang terletak di wilayah timur Kabupaten Bojonegoro dengan jarak ± 25 Km dari pusat Kota Kabupaten. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Baureno, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberejo dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedungadem. Desa Sidomukti sebagian besar wilayahnya adalah lahan persawahan seluas 241,5 Ha. Pola tanamnya adalah padi saat musim hujan, sedangkan tembakau dan palawija ditanam saat musim kemarau. Namun kegiatan pertanian sering kali mengalami masalah terkait dengan ketersediaan air untuk tanaman padi. Pada umumnya, hal ini disebabkan karena sistem pertanian masih menggunakan sistem semi teknis dan belum menggunakan sistem irigasi teknis. Banyak upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Salah satunya program pembangunan embung desa. Hampir tiap Desa dapat dibangun 1-2 buah embung tergantung dari ketersediaan lahan oleh desa. Namun sampai saat ini walaupun sudah banyak embung yang terbangun ternyata belum juga bisa memenuhi kebutuhan air irigasi. Penilaian kinerja embung dilakukan pada semua komponen embung yang berpengaruh terhadap kinerja embung, tidak terbatas pada komponen fisik tetapi juga kondisi non fisik.

Pengukuran kinerja fisik embung dilakukan melalui evaluasi kondisi fisik embung serta struktur-struktur pendukungnya. Empat komponen utama yang menentukan indikator fisik embung adalah: bangunan utama, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan air, dan bangunan pelengkap. Kinerja fisik setiap komponen ini secara keseluruhan menentukan efektivitas fungsi embung dalam menyimpan dan mengelola air.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Embung Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Waktu pelaksanaan selama tiga bulan di mulai dari bulan Agustus 2024 sampai bulan Oktober 2024, sedangkan data primer di ambil dengan menggunakan drone dan hasil Survey langsung dilapangan. Metodologi yang diadopsi untuk Penilaian Kinerja Embung mencakup serangkaian tahapan yang sistematis, seperti berikut:

- a. Inventarisasi elemen, sub-komponen, dan komponen yang terlibat dalam penilaian kinerja embung.
- b. Analisis tingkat kondisi fisik dan operasional.
- c. Evaluasi kinerja setiap elemen dari sub-komponen yang relevan dengan embung.
- d. Pengisian formulir penilaian kinerja embung.
- e. Penyusunan laporan hasil penilaian kinerja embung.

Inventarisasi untuk penilaian kinerja embung meliputi empat aspek utama, yaitu:

1. Aspek fisik embung, yang mengevaluasi kondisi struktur fisik dan infrastruktur pendukung.
2. Aspek operasi dan layanan, yang menilai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan embung.
3. Aspek keamanan bangunan dan lingkungan, yang memeriksa sistem pengamanan dan pengelolaan risiko.
4. Aspek kelembagaan, yang mengkaji struktur dan fungsi kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan embung.

1. Aspek fisik embung

Evaluasi kinerja fisik embung secara umum terfokus pada bangunan utama, yang merupakan elemen kritical dalam struktur embung. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan pada seluruh komponen struktural embung termasuk puncak, lereng hulu (upstream), dan lereng hilir (downstream).

Bangunan pelimpah diukur berdasarkan kondisi beberapa elemen konstruktif seperti mercu, saluran peluncur, peredam energi, dinding atau sayap, serta jembatan layanan yang berperan dalam pengelolaan aliran berlebih.

Fungsi bangunan pengambilan (intake) adalah untuk mengontrol pengambilan air dari embung, dan posisinya yang strategis di hulu tubuh embung mempengaruhi penilaian kinerjanya. Evaluasi bangunan pengambilan bergantung pada kondisi struktural dan kelengkapan serta jenis peralatan hidromekanikal yang terinstal, yang bervariasi di setiap embung.

Selanjutnya, bangunan pelengkap diperiksa berdasarkan kondisi infrastruktur pendukung seperti pintu penguras, pagar pengaman, sistem penerangan, patok benchmark, papan informasi, dan jalan inspeksi. Keseluruhan penilaian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana setiap komponen mendukung fungsi dan keamanan embung secara keseluruhan.

2. Aspek operasi dan layanan embung

Operasi dan layanan embung atau situ merupakan manifestasi dari upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya air embung atau situ, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh berbagai pihak untuk menghasilkan output dari setiap unit kerja. Pengaturan penggunaan air dari embung atau situ harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila kondisi fisik embung atau situ tidak stabil, hal ini akan menghambat operasi dan pemanfaatan sehingga tidak ada manfaat yang dapat diperoleh. Evaluasi kinerja operasi dan layanan embung atau situ meliputi dua komponen utama, yaitu evaluasi layanan dan evaluasi operasi.

3. Aspek keamanan bangunan dan lingkungan

Indikator keamanan bangunan dan lingkungan diidentifikasi melalui evaluasi dari beberapa sub komponen. Dalam konteks keamanan bangunan, faktor yang berpengaruh meliputi kondisi instrumentasi dan observasi visual. Adapun dalam penilaian keamanan lingkungan, faktor-faktor yang relevan mencakup kondisi lingkungan di sekitar area genangan situ atau embung serta di lingkungan sekitarnya, serta tingkat partisipasi masyarakat. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa aspek keamanan dari bangunan dan lingkungan situ atau embung terjaga dengan baik.

4. Aspek kelembagaan

Aspek kelembagaan dalam pengelolaan embung memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keseluruhan embung. Kelembagaan yang kurang efektif dapat mempengaruhi operasi dan layanan embung, serta berpotensi memengaruhi kondisi fisik dan keamanan embung dalam jangka panjang. Kinerja kelembagaan ditentukan berdasarkan efektivitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan embung. Komponen-komponen yang dievaluasi dalam penilaian kinerja kelembagaan meliputi pengelola, sumber daya manusia, dokumen operasional, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, pengelolaan data dan informasi mengenai embung, termasuk data desain, perubahan pada bangunan dan struktur pelengkap, pelaksanaan konstruksi, serta perilaku embung selama dan setelah konstruksi termasuk kejadian yang berpengaruh terhadap keamanan, merupakan aspek kritis yang harus diarsipkan dan didokumentasikan secara sistematis selama operasi embung berlangsung.

3. HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Pedoman Penilaian Kinerja Fisik

Aspek	Komponen	Sub Komponen	Elemen Penilaian	Kriteria Penilaian				
				Baik	Cukup	Buruk		
				80 - 100 %	55 - <80 %	<55 %		
1	2	3	4	5	6	7		
Fisik	Bangunan Utama	1	Puncak	1 Lapis Perkerasan Jalan	Terdapat lapis Perkerasan berfungsi 80 s.d 100 %	Terdapat lapis Perkerasan berfungsi 55 s.d <80 %	Tidak terdapat lapis perkerasan atau ada lapis perkerasan kondisinya buruk <55 %	
					Retakan pada bagian permukaan < 1 mm	Retakan pada bagian permukaan < 3 mm dan kedalamannya < 1 mm	Retakan pada bagian permukaan >3 mm dan kedalamannya > 1 mm	
		2	Lereng Hulu	1 Lapis Pelindung	Terdapat lapis Pelindung berfungsi 80 s.d 100 %	Terdapat lapis Pelindung berfungsi 55 s.d <80 %	Tidak terdapat lapis pelindung atau ada lapis pelindung kondisinya buruk <55 %	
				2 Pembersihan Tumbuhan	Pembersihan dilakukan 4 kali atau lebih dalam 1 tahun	Pembersihan dilakukan 3 kali atau lebih dalam 1 tahun	Pembersihan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun	
		3	Lereng Hilir	1 Lapis Pelindung	Terdapat lapis Pelindung berfungsi 80 s.d 100 %	Terdapat lapis Pelindung berfungsi 55 s.d <80 %	Tidak terdapat lapis pelindung atau ada lapis pelindung kondisinya buruk <55 %	
				2 Pembersihan Tumbuhan	Pembersihan dilakukan 4 kali atau lebih dalam 1 tahun	Pembersihan dilakukan 3 kali atau lebih dalam 1 tahun	Tidak Ada	
				3 Saluran Drainase Kaki	Terdapat saluran drainase di kaki lereng hilir embung dan berfungsi 80 s.d 100 %	Terdapat saluran drainase di kaki lereng hilir embung dan berfungsi 55 s.d < 80 %	Tidak terdapat atau ada saluran drainase di kaki lereng hilir embung dan berfungsi < 55 %	
		Bangunan Pelimpah	1	Meru	1 Tubuh Meru	Berfungsi 80 s.d 100 %	Berfungsi 55 s.d <80 %	Berfungsi <55 %
					2 Lapis Lindung Meru	Terkikis < 10 %	Terkikis 10 s.d 20 %	Terkikis >20 %
			2	Peredam Energi	1 Kolam Olak	Berfungsi 80 s.d 100 %	60 %	Tidak Ada
					2 Ambang Ujung (Sill)	Berfungsi 80 s.d 100 %	Berfungsi 55 s.d <80 %	Tidak Ada
			3	Dinding / Sayap	1 Dinding Beton	Berfungsi 80 s.d 100 %	Berfungsi 55 s.d <80 %	Tidak Ada
				2 Sambungan Beton	Berfungsi 80 s.d 100 %	Berfungsi 55 s.d <80 %	Berfungsi <55 %	
	Jembatan Pelayanan	4		1 Abutment	Berfungsi 80 s.d 100 %	Berfungsi 55 s.d <80 %	Berfungsi <55 %	
				2 Pelat Jembatan	Berfungsi 80 s.d 100 %	Berfungsi 55 s.d <80 %	Berfungsi <55 %	
				3 Gelagar	Berfungsi 80 s.d 100 %	Berfungsi 55 s.d <80 %	Berfungsi <55 %	
				4 Kolom/ tiang	Berfungsi 80 s.d 100 %	Berfungsi 55 s.d <80 %	Berfungsi <55 %	
				5 Handrail	Berfungsi 80 s.d 100 %	Berfungsi 55 s.d <80 %	Berfungsi <55 %	

Sumber AKNOP

Tabel 1 Pedoman Penilaian Kinerja Fisik(Lanjutan)

Aspek	Komponen	Sub Komponen	Elemen Penilaian	Kriteria Penilaian		
				Baik	Cukup	Buruk
				80 - 100%	55 - <80%	<55%
1	3	4	5	6	7	8
Fisik	Bangunan Pengambilan	1 Struktur Intake	1 Saluran Intake	Berfungsi 80 s.d 100%	Berfungsi 55 s.d <80%	Berfungsi <55%
			2 Pipa Intake	Berfungsi 80 s.d 100%	Berfungsi 55 s.d <80%	Berfungsi <55%
			3 Menara Intake	Berfungsi 80 s.d 100%	Berfungsi 55 s.d <80%	Berfungsi <55%
		2 Peralatan Hidromekanikal	1 Pintu	Berfungsi 80 s.d 100%	Berfungsi 55 s.d <80%	Berfungsi <55%
			2 Pompa	Berfungsi 80 s.d 100%	Berfungsi 55 s.d <80%	Berfungsi <55%
			3 Alat Penggerak Pintu	Berfungsi 80 s.d 100%	Berfungsi 55 s.d <80%	Berfungsi <55%
			4 Trashrack	Berfungsi 80 s.d 100%	Berfungsi 55 s.d <80%	Berfungsi <55%
	Bangunan Pelengkap	1 Pintu Penguras	1 Pintu	Berfungsi 80 s.d 100%	Berfungsi 55 s.d <80%	Berfungsi <55%
			2 Alat Penggerak Pintu	Berfungsi 80 s.d 100%	Berfungsi 55 s.d <80%	Berfungsi <55%
		2 Pagar Pengaman	1 Ketersediaan dan kondisi	Terdapat pagar pengaman dan masih berfungsi 80 s.d 100 %	Terdapat pagar pengaman dan masih berfungsi 55 s.d < 80 %	Tidak terdapat pagar pengaman atau terdapat pagar dan masih berfungsi <55%
			2 Drainase Jalan	Terdapat Drainase Jalan dan masih berfungsi 80 s.d 100 %	Terdapat Drainase Jalan dan masih berfungsi 55 s.d <80 %	Tidak terdapat Drainase Jalan atau terdapat dan masih berfungsi <55%
		3 Jalan Inspeksi	1 Lapis Perkerasan Jalan	Terdapat Lapis Perkerasan Jalan dan masih berfungsi 80 s.d 100 %	Terdapat Lapis Perkerasan Jalan dan masih berfungsi 55 s.d < 80 %	Tidak terdapat Lapis Perkerasan Jalan atau terdapat dan masih berfungsi < 55%
			2 Drainase Jalan	Terdapat Drainase Jalan dan masih berfungsi 80 s.d 100 %	Terdapat Drainase Jalan dan masih berfungsi 55 s.d <80 %	Tidak terdapat Drainase Jalan atau terdapat dan masih berfungsi <55%
		4 Penerangan	1 Kecukupan jumlah	80-100% menerangi lokasi 2 vital	55- <80% menerangi lokasi 2 vital	<55% menerangi lokasi 2 vital
		5 Patok BM	1 Kecukupan jumlah	100 % memenuhi kebutuhan informasi	55-<80 % memenuhi kebutuhan informasi	<55% memenuhi kebutuhan informasi
		6 Papan Informasi	2 Kecukupan jumlah	80-100% memenuhi kebutuhan informasi	60 % memenuhi kebutuhan informasi	0 % memenuhi kebutuhan informasi
				ttnng embung (dapat terbaca, kondisi fisik baik)	ttnng embung (dapat terbaca, kondisi fisik baik)	ttnng embung (dapat terbaca, kondisi fisik baik)

Sumber AKNOP

Tabel 2. Pedoman Penilaian Kinerja Operasi dan Layanan

Aspek	Sub Komponen	Elemen Penilaian	Kriteria Penilaian			
			Baik	Cukup	Buruk	
			80 - 100 %	55 - <80 %	<55%	
1	2	3	4	5	6	7
Operasi dan Layanan	Operasi	1 Manual/Pedoman Operasi	1 Kesesuaian	Kesesuaian antara manual operasi dengan pelaksanaan di lapangan baik (100%)	Kesesuaian antara manual operasi dengan pelaksanaan di lapangan cukup baik	Kesesuaian antara manual operasi dengan pelaksanaan di lapangan kurang baik
			2 Pelaksanaan	Sesuai prosedur dalam manual operasi (100%) - > sesuai dengan cek list dalam manual operasi	Cukup sesuai prosedur (75%)	Tidak sesuai prosedur (50%)
			1 Kecukupan Jumlah	Jumlah personil terpenuhi (100%)	Jumlah personil cukup terpenuhi (75%)	Jumlah personil tidak terpenuhi (50%)
	Layanan	2 Petugas Operasi	2 Kompetensi	Sesuai yang disyaratkan (100%)	Cukup sesuai dengan yang disyaratkan (75%)	Tidak sesuai dengan yang disyaratkan (50%)
		1 Air Baku RKI	1 Kecukupan	80 - 100% memenuhi kebutuhan sesuai target layanan	50-70% memenuhi kebutuhan target layanan	Tidak memenuhi kebutuhan sesuai target layanan (<50%)
			2 Kualitas Air	Memenuhi baku mutu (100%)		Tidak memenuhi baku mutu (0%)
	2 Pertanian/Peternakan	1 Kecukupan	80 - 100% memenuhi kebutuhan sesuai target layanan	50-70% memenuhi kebutuhan target layanan	Tidak memenuhi kebutuhan sesuai target layanan (<50%)	

Sumber AKNOP

Tabel 3.3. Pedoman Penilaian Kinerja Keamanan Bangunan dan Lingkungan

Aspek	Komponen	Sub Komponen	Elemen	Kriteria Penilaian		
				Baik	Cukup	Buruk
				80 - 100 %	55 - <80 %	<55 %
1	2	3	4	5	6	7
Keamanan Bangunan dan Lingkungan	1. Keamanan Bangunan	1. Pengamatan Visual	1. Hasil Pengamatan	Menunjukkan indikasi yang mengganggu fungsi keamanan embung sebesar 0 - 20 %	Menunjukkan indikasi yang mengganggu fungsi keamanan embung sebesar 30 - 50 %	Menunjukkan indikasi yang mengganggu fungsi keamanan embung sebesar >50 %
			2. Pelaporan	Hasil pengamatan visual di lapangan dilaporkan sekali dalam 1- 3 bulan	Hasil pengamatan visual di lapangan dilaporkan sekali dalam 4 - 6 bulan	Hasil pengamatan visual di lapangan dilaporkan sekali dalam >6 bulan atau tidak dilaporkan sama sekali
		2. Pemantauan Instrumentasi	1. Kecukupan jenis dan jumlah	Ada 2 jenis instrumentasi (Patok geser dan V - notch) dengan jumlah yang memenuhi untuk kebutuhan analisa (100 %)		Ada 2 jenis instrumentasi (Patok geser dan V - notch), namun jumlahnya tidak memenuhi untuk kebutuhan analisa (50 %)
			2. Kondisi alat	Baik dan berfungsi		Tidak berfungsi
			3. Hasil Pengamatan	Memenuhi syarat keamanan (tidak ada rembesan dan tidak ada pergerakan horisontal permukaan)		Tidak memenuhi syarat keamanan (tidak memenuhi syarat keamanan embung/situ)
			4. Pelaporan	Kegiatan pelaporan atas hasil pengamatan instrumen di lapangan secara rutin dan tertulis, serta ada tindak lanjut	Kegiatan pelaporan atas hasil pengamatan instrumen di lapangan secara rutin dan tertulis, tetapi tidak	Kegiatan pelaporan atas hasil pengamatan instrumen di lapangan tidak dilakukan (0 %)
	2. Lingkungan	1. Kawasan Genangan	1. Vegetasi Air/Gulma	Bersih (100 %)	Terdapat vegetasi	Terdapat vegetasi air/gulma
			2. Sampah	Bersih (100 %)	Cemara Ringan (75 %)	Cemara Berat (50 %)
			3. Sedimentasi	Bersih (100 %)	Terjadi sedimentasi namun tidak mengganggu fungsi operasi embung/situ (75 %)	Sedimentasi menghambat fungsi operasi embung/situ (50 %)
		2. Kawasan Lingkungan	1. Kondisi Sempadan	Kondisi sempadan masih terjaga dan sesuai dengan peruntukannya (100 %)	Kondisi sempadan kurang terjaga namun masih sesuai dengan peruntukannya (75 %)	Kondisi sempadan kurang terjaga dan tidak sesuai dengan peruntukannya (50 %)
			2. Upaya Konservasi	Pengelola memiliki program konservasi kawasan lingkungan (100 %)	Pengelola melakukan upaya konservasi namun belum terprogram (75 %)	Pengelola tidak memiliki program konservasi kawasan lingkungan (50 %)
		3. Peran Serta Masyarakat	1. Aktivitas Masyarakat Sekitar Embung	Tidak ada aktivitas masyarakat yang mengganggu fungsi layanan dan keamanan embung (100 %)	Ada aktivitas masyarakat namun tidak mengganggu kinerja embung (75 %)	Ada aktivitas masyarakat yang mengganggu kinerja embung (50 %)
			2. Pelibatan Masyarakat	Masyarakat dilibatkan oleh pengelola embung/situ dalam menjaga fungsi layanan dan keamanan embung (100 %)		Masyarakat tidak dilibatkan oleh pengelola embung/situ dalam kegiatan menjaga lingkungan embung (0 %)

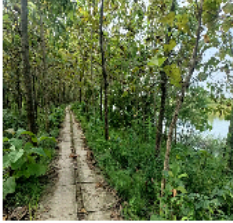
Sumber AKNOP

Tabel 3.4 Pedoman Penilaian Kinerja Kelembagaan

Aspek	Komponen	Sub Komponen	Elemen	Kriteria Penilaian		
				Baik 80 - 100%	Cukup 55 - <80%	Buruk <55%
1	2	3	4	5	6	7
Kelembagaan	1 Pengelola Embung/Situ	1 Struktur Organisasi	1 Unit pengelola embung/situ	Unit pengelola embung/situ memiliki susunan organisasi serta memiliki SK dan legalitas (100%)		Tidak ada (50%)
			2 Personil	Personil memiliki tugas dan tanggung jawab yang terumuskan dengan jelas (100%)		Personil belum memiliki tugas dan tanggung jawab yang terumuskan dengan jelas (50%)
	2 Sumber Daya Manusia	Petugas Pemeliharaan dan Pemantauan	1 Kecukupan Jumlah	Melebihi persyaratan minimum jumlah petugas yang dibutuhkan (100%)	Memenuhi syarat minimum jumlah petugas yang dibutuhkan (75%)	Tidak memenuhi syarat minimum jumlah petugas yang dibutuhkan (50%)
			2 Kompetensi	Melebihi kompetensi minimum yang dibutuhkan (100%)	Memenuhi kompetensi minimum yang dibutuhkan (75%)	Tidak memenuhi kompetensi minimum yang dibutuhkan (50%)
	3 Dokumen OP	1 Dokumen Perencanaan	1 Ketersediaan	Dokumen perencanaan ada dan lengkap		Dokumen perencanaan tidak tersedia (0%)
			2 Lokasi Penyimpanan	Tersimpan di kantor Balai/Unit Pengelola Embung/Situ dan media penyimpanan baik (100%)		Tidak ada sama sekali (0%)
		2 Dokumen Pelaksanaan Konstruksi dan As Built drawing	1 Ketersediaan	Dokumen pelaksanaan konstruksi dan As Built Drawing ada dan lengkap (100%)	Hanya ada salah satu dokumen yang tersedia (60%)	Tidak ada dokumen pelaksanaan konstruksi dan As Built drawing (0%)
			2 Lokasi Penyimpanan	Tersimpan di kantor Balai/Unit Pengelola Embung/Situ dan media penyimpanan baik (100%)		Tidak ada sama sekali (0%)
		3 Kesesuaian	3 Kesesuaian	Kesesuaian antara As Built drawing dengan kondisi terkini di lapangan 80 - 100%	Kesesuaian antara As Built drawing dengan kondisi terkini di lapangan 55% - <80%	Kesesuaian antara As Built drawing dengan kondisi terkini di lapangan <55%
			3 Dokumen Riwayat OP	1 Ketersediaan	Dokumen perencanaan ada dan lengkap	Dokumen perencanaan tidak tersedia (0%)
		2 Lokasi Penyimpanan	2 Lokasi Penyimpanan	Tersimpan di kantor Balai/Unit Pengelola Embung/Situ dan media penyimpanan baik (100%)		Tidak ada sama sekali (0%)
	4 Sarana dan Prasarana Pen	1 Peralatan Pemeliharaan dan Pemantauan	1 Ketersediaan dan Kondisi	Peralatan pemeliharaan dan pemantauan tersedia dan dalam kondisi baik (100%)	Peralatan pemeliharaan dan pemantauan tersedia dan dalam kondisi kurang baik (60%)	Tidak ada peralatan pemeliharaan dan pemantauan (0%)
			2 Ruang Kantor Operasional	Ruang kantor operasional tersedia. Memiliki fasilitas lengkap dan mendukung kegiatan operasional (100%)	Ruang kantor operasional tersedia, namun tidak cukup dan/atau memiliki fasilitas namun tidak lengkap (60%)	Tidak ada ruang kantor operasional (0%)
		3 Kendaraan Operasional	1 Ketersediaan dan Kondisi	Kendaraan operasional tersedia. Kondisi kendaraan baik dan mendukung kegiatan operasional (100%)	Kendaraan operasional tersedia, namun kondisinya masih cukup baik untuk operasional (60%)	Tidak ada kendaraan operasional (0%)

Sumber AKNOP

Tabel 3.5 Penilaian Kinerja Fisik

No	Komponen	Gambar	Bobot Komponen	Sub Komponen	Bobot Sub Komponen	Elemen Penilaian	Bobot Elemen	Ada / Tidak	Analisa	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bangunan Utama		40%	Puncak	40%	Lapis Perkerasan	100%		Lapis perkerasan pada puncak embung berupa block beton masih berfungsi cukup baik memanjang ataupun melintang pada permukaan	80	80.00
				Lereng Hulu	30%	Lapis Pelindung	60%	Ada	Tidak ada lapis pelindung, exciting tanah timbunan yang di tumbuh rumput	50	
						Pembersihan Tumbuhan	40%	Ada	Pembersihan tumbuhan pada lereng hulu dilakukan 1kali dalam 1tahun. Informasi ini didapatkan dari petugas OP embung yang bersangkutan.	55	52.00
				Lereng Hilir	30%	Lapis Pelindung	40%	Ada	Tidak ada lapis pelindung, exciting tanah timbunan yang di tumbuh rumput	50	
						Pembersihan Tumbuhan	30%	Ada	Pembersihan tumbuhan pada lereng hilir dilakukan 1 kali dalam 1tahun. Informasi ini didapatkan dari petugas OP embung yang bersangkutan.	55	60.50
						Saluran Drainase Kaki	30%	Ada	Saluran drainase kaki cukup baik terbuat dari udiot beton	80	
			Nilai Komponen Total								65.75
			25%	Mercu	35%	Tubuh Mercu	60%	Tidak Ada		0	0.00
						Lapis Lindung Mercu	40%	Tidak Ada		0	
				Peredam Energi	25%	Kolam Olak	60%	Tidak Ada		0	0.00
2	Bangunan Pelimpah					Ambang Ujung (Sill)	40%	Tidak Ada		0	
				Dinding / Sayap	25%	Dinding Beton	60%	Tidak Ada		0	
						Sambungan Beton	40%	Tidak Ada		0	0.00
				Jembatan Pelayanan	15%	Abutment	25%	Tidak Ada		0	
						Pelat Jembatan	25%	Tidak Ada		0	
						Gelagar	20%	Tidak Ada		0	0.00
						Kolom/ tiang	20%	Tidak Ada		0	
						Handrail	10%	Tidak Ada		0	
			Nilai Komponen Total								0.00

Sumber hasil perhitungan

Tabel 3.5 Penilaian Kinerja Fisik(Lanjutan)

No	Komponen	Gambar	Bobot Komponen	Sub Komponen	Bobot Sub Komponen	Elemen Penilaian	Bobot Elemen	Ada / Tidak	Analisa	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Bangunan Pengambilan		25%	Struktur Intake	50%	Saluran Intake	33%	Tidak Ada		0	
						Pipa Intake	33%	Tidak Ada		0	0.00
						Menara Intake	33%	Tidak Ada		0	
				Peralatan Hidromekanikal	50%	Pintu	30%	Tidak Ada		0	0.00
						Pompa	30%	Tidak Ada		0	
						Alat Penggerak Pintu	30%	Tidak Ada		0	
						Trashrack	10%	Tidak Ada		0	
Nilai Komponen Total										0.00	
4	Bangunan Pelengkap		10%	Pintu Penguras	40%	Pintu	50%	Tidak Ada	Belum ada pintu penguras	0	
						Alat Penggerak Pintu	50%	Tidak Ada		0	0.00
				Pagar Pengaman	30%	Ketersediaan dan kondisi	100%	Tidak Ada	Tidak terdapat pagar pengaman di area Situ.	0	0.00
				Jalan Inspeksi	15%	Lapis Perkerasan Jalan	60%	Ada	Jalan Inspeksi sudah ada perkerasan block beton	80	
						Drainase Jalan	40%	Ada	Jalan inspeksi belum dilengkapi dengan drainase	55	70.00
				Penerangan	5%	Kecukupan jumlah	100%	Ada	Embung dilengkapi titik-titik penerangan pada bagian yang vital	55	55.00
				Patok B M	5%	Kecukupan jumlah	100%	Tidak Ada	Belum ada patok BM	0	0.00
				Papan Informasi	5%	Kecukupan jumlah	100%	Ada	Embung telah dilengkapi dengan papan informasi yang cukup jelas dalam memberikan informasi mengenai embung maupun peringatan akan bahaya.	85	85.00
Nilai Komponen Total										17.50	

Penilaian Kinerja Fisik

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Baru Komponen	Nilai Komponen	Nilai Kinerja Fisik Embung
1	Bangunan Utama	40%	80%	32.60	
2	Bangunan Pelimpah	25%	0%	0.00	
3	Bangunan Pengambilan	25%	0%	0.00	56.10
4	Bangunan Pelengkap	10%	20%	3.50	

Rekomendasi

Sumber hasil perhitungan

Tabel 3.6 Penilaian Kinerja Operasi dan Layanan

No	Komponen	Bobot Komponen	Sub Komponen	Bobot Sub Komponen	Elemen Penilaian	Bobot Elemen	Ada / Tidak	Analisa	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Operasi Embung/Situ	50%	Manual/Pedoman Operasi Petugas Operasi	60%	Kesesuaian Pelaksanaan Keukupan Jumlah Kompetensi	70% 30% 70% 30%	Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada	Belum ada Manual/Pedoman Operasi Embung Saat ini hanya ada 1 petugas dengan tingkat kompetensi yang belum memadai.	0 0 60 60	0.00 60.00
Nilai Komponen Total										24.00
2	Layanan Embung/Situ	50%	Air Baku R KI Pertanian/Peternakan	50% 50%	Keukupan Kualitas Air Keukupan	50% 50% 100%	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada	Suplai air irigasi masih kurang karena hanya dapat terairi pada saat elevasi tampungan di atas elev MAN.	0 0 60	0.00 60.00
Nilai Komponen Total										30.00

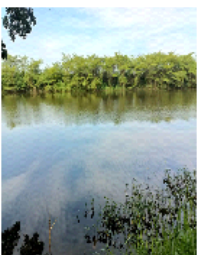
No	Komponen	Bobot Komponen	Sub Komponen	Bobot Sub	Bobot Baru Sub	Elemen Penilaian	Bobot	Ada / Tidak	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Operasi Embung/Situ	50%	Manual/Pedoman Operasi Petugas Operasi	60% 40%	60% 40%	Kesesuaian Pelaksanaan Keukupan Kompetensi	70% 30% 70% 30%	Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada	0 0 60 60	0.00 60.00
Nilai Komponen Total										24.00
2	Layanan Embung/Situ	50%	Air Baku R KI Pertanian/Peternakan	0% 50%	0% 100%	Keukupan Kualitas Air Keukupan	50% 50% 100%	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada	0 0 60	0.00 60.00
Nilai Komponen Total										60.00

Penyesuaian Penilaian Kinerja Operasi dan Layanan

No	Komponen	Bobot Komponen	Nilai Komponen	Nilai Kinerja Operasi	Keterangan
1	Operasi Embung/Situ	50%	24.00	42	
2	Layanan Embung/Situ	50%	60.00		

Sumber hasil perhitungan

Tabel 3.7 Penilaian Kinerja Keamanan Bangunan dan Lingkungan Sumber hasil perhitungan

No	Komponen	Gambar	Bobot Komponen	Sub Komponen	Bobot Sub	Elemen Penilaian	Bobot Elemen	Ada / Tidak	Analisa	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Keamanan Bangunan		60 %	Pengamatan Visual	70%				Berdasarkan pengamatan visual tidak ada hal-hal yang mengganggu keamanan struktur maupun fungsi layanan Situ.	90		
						Hasil Pengamatan	70 %	Tidak Ada				
						Pelaporan	30 %	Ada	Petugas melaporkan kepada Pihak Pengelola saat ada hal-hal yang berpotensi untuk mengganggu layanan Situ sekitar 6 bulan sekali.	55	79.50	
				Pemantauan Instrumentasi	30 %	Kecukupan Jumlah Kondisi Alat Hasil Pengamatan Pelaporan	20 % 30 % 10 % 40 %	Tidak Tidak Tidak Tidak	Tidak ada alat instrumentasi yang terpasang.	0 0 0 0	0.00	
Nilai Komponen Total										55.65		
2	Lingkungan			40 %	Kawasan Genangan	40 %	Vegetasi Air/Gulma Sampah	40 % 30 %	Ada Ada	Genangan Situ agak terganggu vegetasi air/gulma ataupun sampah. Tingkat sedimentasi secara visual cukup rendah, namun perlu dilakukan pengukuran sedimentasi secara berkala.	75 75	
							Sedimentasi	30 %	Ada		75	75.00
					Kawasan Lingkungan	30 %	Kondisi Sempadan	70 %	Ada	Kondisi sempadan masih cukup terjaga	75	
							Upaya Konservasi	30 %	Ada	Pengelola belum melakukan upaya konservasi	50	67.50
					Peran Serta Masyarakat	30 %	Aktivitas Masyarakat Sekitar Embung/Situ	60 %	Ada	Masyarakat sekitar menanam Umbi di bangunan utama embung yang mengganggu	50	50.00
							Pelibatan Masyarakat	40 %	Ada	Masyarakat belum dilibatkan oleh Pengelola dalam pemeliharaan Situ.	50	
Nilai Komponen Total										65.25		

No	Komponen	Bobot Komponen	Nilai Komponen	Nilai Kinerja Keamanan dan	Keterangan
1	Keamanan Bangunan	60 %	55.65	59.49	
2	Lingkungan	40 %	65.25		

Tabel 3.8 Penilaian Kinerja Kelembagaan

No	Komponen	Bobot Komponen	Sub Komponen	Bobot Sub Komponen	Elemen Penilaian	Bobot Elemen	Ada / Tidak	Analisa	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengelola Embung/Situ	25%	Struktur Organisasi	100%	Unit pengelola embung/situ	50%	Tidak Ada	Personil sudah memiliki tanggung jawab yang jelas dalam kegiatan pemeliharaan embung.	50	
					Personil	50%	Ada		100	75.00
Nilai Komponen Total										75.00
2	Sumber Daya Manusia	25%	Petugas Pemeliharaan dan Pemertauan	100%	Kecukupan Jumlah	50%	Ada	Jumlah dan kompetensi petugas pemeliharaan masih minimum	50	50.00
					Kompetensi	50%	Ada		50	
Nilai Komponen Total										50.00
3	Dokumen OP	25%	Dokumen Perencanaan	40%	Ketersediaan	60%	Tidak Ada	Tidak ada dokumen perencanaan pelaksanaan/ABD dan riwayat OP.	0	0.00
					Lokasi Penyimpanan	40%	Tidak Ada		0	
			Dokumen Pelaksanaan Konstruksi dan As Built drawing	30%	Ketersediaan	40%	Tidak Ada		0	0.00
					Lokasi Penyimpanan	20%	Tidak Ada		0	
					Kesesuaian	40%	Tidak Ada		0	
			Dokumen Riwayat OP	30%	Ketersediaan	60%	Tidak Ada		0	
					Lokasi Penyimpanan	40%	Tidak Ada		0	0.00
Nilai Komponen Total										0.00
4	Sarana dan Prasarana	25%	Peralatan Pemeliharaan dan Pemertauan	40%	Ketersediaan dan Kondisi	100%	Tidak Ada	Belum memiliki alat pemeliharaan	50	50.00
			Ruang Kantor Operasional	30%	Ketersediaan dan Kondisi	100%	Tidak Ada		0	0.00
			Kendaraan Operasional	30%	Ketersediaan dan Kondisi	100%	Tidak Ada		0	0.00
Nilai Komponen Total										20.00

Penilaian Kinerja Kelembagaan

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Penyesuaian	Nilai Komponen	Nilai Kinerja Kelembagaan	Keterangan
1	Pengelola Embung/Situ	25%	33%	75.00	47.85	
2	Sumber Daya Manusia	25%	33%	50.00		
3	Dokumen OP	25%	0.00	0.00		
4	Sarana dan Prasarana	25%	33%	20.00		

Sumber hasil perhitungan

4. SIMPULAN

Dari hasil penilaian di bab sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa aspek fisik embung dengan nilai sebesar 56,10 masuk kriteria cukup, aspek operasi dan layanan embung dengan nilai 42 kriteria kurang, aspek keamanan bangunan dan lingkungan dengan nilai 59,49 kriteria cukup dan aspek kelembagaan dengan nilai 47,85 kriteria kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Petunjuk Teknis (AKNOP) Penilaian Kinerja Embung.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Krisnayanti, D. S., Hangge, E. E., Sir, T. M. W., Mbauth, E. N., & ... (2020). Perencanaan Embung Wae Lerong untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi di Daerah Irigasi Wae Lerong Ruteng Provinsi NTT. Jurnal Irigasi.

Ramadhan, A. (2022). *PERENCANAAN EMBUNG MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN*. repository.upnjatim.ac.id. <http://repository.upnjatim.ac.id/4967/>

Analisis Risiko Produksi Agribisnis Sistem Inti-Plasma pada Komoditas Pisang Cavendish PT Vinda Abadi Sejahtera Kabupaten Bojonegoro

Zainur Rofiah¹, Mohammad Harisudin², Erlyna Wida Riptanti³

^{1,2,3} Program Studi Magister Agribisnis, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami no 36 Kentingan Surakarta

Email : zainurrofiah@student.uns.id

Abstract: The research is aimed at testing the risk factors of cavendish banana production in Vinda Abadi Sejahtera LLM Bojonegoro Regency. It's based on a field finding that PT Vinda's cavendish banana production fluctuates every month. Therefore, a production risk analysis is carried out to test the factors that influence it. Methodologically, this study uses a quantitative approach with linear binary regression analysis techniques. The research data consists of 60 observations with monthly time series data. The variables tested are the quality and quantity of seedlings, fertilizer, HR quality, climate, and soil/land quality. These independent variables are tested against production variables with binary and nominal approaches. The results of the analysis indicate that seed filling, fertilizer, and quality SDM of a partner farmer that are below the standard may be at risk of reducing cavendish banana production. Instead, these three variables could be a strategy to boost cavendish banana production. Meanwhile, climate variables and soil quality have no impact as they can interfere with irrigation.

Keywords: Production Risk, Cavendish Banana, Binary Regression

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor risiko produksi agribisnis pisang cavendish pada PT Vinda Abadi Sejahtera Kabupaten Bojonegoro. Hal ini didasarkan pada temuan lapang bahwa produksi pisang cavendish PT Vinda mengalami fluktuasi tiap bulannya. Oleh karena itu, analisis risiko produksi dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi binary linear. Data penelitian ini sebanyak 60 observasi dengan data time series bulanan. Variabel yang diuji adalah kualitas dan jumlah bibit, pupuk, kualitas SDM, iklim, dan kualitas lahan/tanah. Variabel independen tersebut diuji terhadap variabel produksi dengan pendekatan binary dan nominal. Hasil analisis menyebutkan bahwa pemenuhan bibit, pupuk, dan kualitas SDM petani mitra yang di bawah standar dapat berisiko menurunkan produksi pisang cavendish. Sebaliknya, ketiga variabel tersebut dapat menjadi strategi untuk meningkatkan produksi pisang cavendish. Sedangkan, variabel iklim dan kualitas tanah tidak berpengaruh karena dapat diintervensi dengan irigasi.

Kata kunci: Risiko Produksi, Pisang Cavendish, Regresi Binary

1. PENDAHULUAN

Sistem inti-plasma telah menjadi bagian integral dari sejarah pertanian di Indonesia, terutama dalam konteks produksi pisang Cavendish yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama negara ini. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20, terutama sebagai respons terhadap peningkatan permintaan pasar dan untuk meningkatkan efisiensi produksi (Purnawati et al., 2022). Pada awalnya, sistem inti-plasma di Indonesia banyak diterapkan dalam industri perkebunan kelapa sawit, di mana kebun inti dipelihara sebagai pusat produksi bibit unggul dan kemudian bibit ini ditanam di kebun plasma yang lebih luas (Fauziah et al., 2023). Pendekatan ini kemudian diadopsi dan disesuaikan untuk digunakan dalam budidaya pisang Cavendish, yang menjadi salah satu tanaman ekspor utama Indonesia.

Pada tahun-tahun awal implementasinya, sistem inti-plasma di Indonesia terbukti berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi pisang Cavendish. Bibit unggul dipelihara di kebun inti yang terkendali secara ketat, memastikan kualitas dan keandalan bibit yang dihasilkan. Kemudian, bibit ini didistribusikan ke berbagai kebun plasma di seluruh wilayah, memungkinkan

peningkatan produksi secara signifikan (Meiliana & Sardjanti, 2023). Meskipun berhasil dalam meningkatkan produksi dan ekspor pisang Cavendish, sistem inti-plasma di Indonesia juga menghadapi tantangan dan risiko. Salah satu tantangan utama adalah rentannya terhadap penyebaran penyakit dan kerugian keragaman genetik dalam populasi pisang, yang mengakibatkan kerentanan terhadap serangan penyakit yang merusak. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada satu varietas tanaman seperti Cavendish meningkatkan risiko ekonomi jika varietas tersebut terkena penyakit atau kondisi lingkungan yang merugikan (Hakim et al., 2022).

Meskipun tantangan tersebut, sistem inti-plasma tetap menjadi bagian penting dari strategi pertanian Indonesia untuk menghasilkan pisang Cavendish secara massal. Namun, para pemangku kepentingan terus mencari inovasi dan solusi untuk mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan sistem ini, termasuk diversifikasi varietas, praktik pertanian yang lebih berkelanjutan, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan genetika tanaman (Fatmawati et al., 2018). Dengan demikian, sistem inti-plasma di Indonesia tetap menjadi subjek penting dalam konteks pertanian dan keberlanjutan ekonomi negara ini. PT. Vinda Abadi Sejahtera merupakan salah satu perusahaan agribisnis pisang cavendish yang menerapkan sistem inti-plasma bersama 23 petani mitra. Luas lahan yang disediakan oleh setiap petani mitra rata-rata 1/2 bahu (0,35 ha) untuk ditanami pisang. Lahan seluruh petani yang bermitra sekarang totalnya sekitar 7,5 ha. Masa panen pertama setelah memasuki bulan ke 8 tanam, 1 petani rata-rata bisa menghasilkan 325 kg/minggu atau 1,3 ton/bulan. Tabel 1 merupakan produksi pisang cavendish grade A1 di PT. Vinda Abadi Sejahtera dalam kurun waktu Juli 2022 - Juni 2023 (PT Vinda Abadi Sejahtera, 2023).

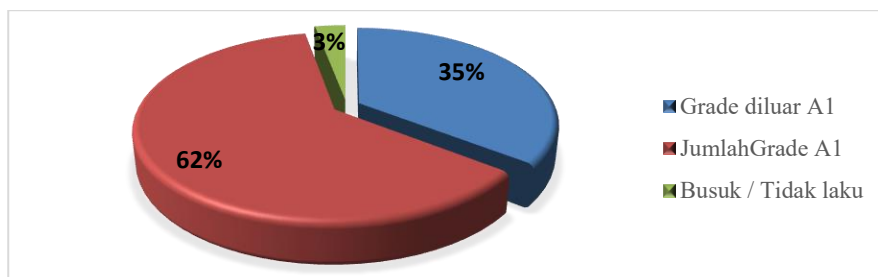
Tabel 1. Produksi Pisang Cavendish di PT. Vinda Abadi Sejahtera dalam Kurun Waktu Juli 2022 - Juni 2023

Bulan	Total Hasil Panen (kg)	Grade diluar A1 (kg)	Jumlah Grade A1 (kg)	Busuk / Tidak laku (kg)
Juli 2022	13.146	3.786	9.100	260
Agustus 2022	15.737	5.038	10.400	299
September 2022	17.414	4.918	11.700	796
Oktober 2022	24.788	11.275	13.005	508
November 2022	30.822	10.087	19.508	1.227
Desember 2022	29.302	10.260	18.200	842
Januari 2023	27.168	11.199	15.265	704
Februari 2023	27.219	10.073	16.573	573
Maret 2023	30.456	11.796	17.830	830
April 2023	30.088	10.008	19.105	975
Mei 2023	29.620	9.180	19.400	1.040
Juni 2023	31.107	11.275	18.753	1.079
TOTAL	306.867	108.895	188.839	9.133

Sumber: PT. Vinda Abadi Sejahtera (2023)

Dalam melakukan produksi pisang cavendish, perusahaan berhadapan dengan berbagai risiko sebagaimana karakteristik produk pertanian. Harwood et al (1999) mendefinisikan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan terjadinya peluang kerugian terhadap pengambilan suatu keputusan, karena resiko adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Secara umum, dalam sebuah bisnis pertanian terdapat lima sumber utama yang menyebabkan risiko yaitu risiko Produksi, Pemasaran, Keuangan, Legal / hukum dan Manusia (Santi et al., 2023a).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti sebelum dilakukannya penelitian risiko-risiko yang dihadapi pada PT. Vinda Abadi Sejahtera adalah pada produksi, manusia dan pemasaran. Risiko produksi yang terjadi adalah kematangan buah yang tidak sesuai dengan permintaan dikarenakan kesalahan dalam penanganan seperti waktu penyimpanan yang terlalu lama.



Gambar 3. Presentase Hasil Panen Pisang Cavendish PT. Vinda Sejahtera dalam Kurun Waktu Juli 2022 - Juni 2023

PT. Vinda Abadi Sejahtera harus memastikan produk yang diambil dari petani dalam keadaan baik sebelum dilakukan penyimpanan ke gudang penyimpanan. Produk yang diambil dari petani akan dilakukan pengambilan sampel untuk melihat kondisi buah dan diangkut untuk dimasukkan dalam gudang penyimpanan. Buah diangkut dalam kondisi masih bertandan, biasanya beberapa buah bergesekan dengan buah lainnya sehingga permukaan kulitnya sebagian lecet (PT Vinda Abadi Sejahtera, 2023). Buah yang lecet tidak dapat dimasukkan ke dalam grade A1 sehingga mengurangi nilai buah tersebut. Buah kemudian dimasukkan ke dalam ruang rapening selama 3-5 hari. Perusahaan belum memiliki ruang rapening terbatas dan terpaksa harus menyewa/menitipkan di tempat rapening lainnya (PT Vinda Abadi Sejahtera, 2023). Banyaknya perusahaan pendistribusian pisang Cavendish menjadikan proses rapening kadang antri menunggu giliran, sehingga mengakibatkan beberapa buah rusak.

Permasalahan risiko pada produksi lainnya adalah kerusakan yang terjadi akibat cara peletakan dengan cara yang tidak baik. Selanjutnya pada risiko pemasaran yang terjadi diantaranya yaitu tidak adanya alat pendingin pada kendaraan yang digunakan, armada distribusi tidak sesuai standar sehingga pisang yang dibawa kualitasnya berkurang (PT Vinda Abadi Sejahtera, 2023). Risiko manusia yang terjadi pada lokasi adalah seperti kesalahan dalam pengangkutan pisang dari kendaraan (truk) ke tempat penyimpanan sehingga menyebabkan kerusakan pada pisang, selain itu juga keterlambatan dalam pengantaran pisang ke konsumen yang menyebabkan penurunan kualitas pada pisang (PT Vinda Abadi Sejahtera, 2023). Oleh karena itu, risiko-risiko produksi perlu dianalisis untuk menentukan determinan risiko produksi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Vinda Abadi Sejahtera yang berada di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pada bulan Oktober – Desember 2023. PT. Vinda Abadi Sejahtera merupakan perusahaan pendistribusi dan pemasaran buah, yang menjalin kemitraan dengan beberapa anggota kelompok tani di kecamatan Sumberrejo dan sekitarnya. PT. Vinda Abadi Sejahtera memasarkan beberapa varian buah pisang cavendish, namun fokus dalam penelitian ini hanya pada produk pisang cavendish A1. Sedangkan untuk wilayah pemasaran dalam penelitian ini hanya pada wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada PT. Vinda Abadi Sejahtera sehingga sampel dan populasi penelitian hanya 1 tersebut sebagai unit analisis. Observasi data dilakukan selama 5 tahun dengan tipe data bulanan (*monthly*) sehingga total observasi sebanyak 60 observasi. Data dengan satu sampel dalam series waktu yang panjang atau lebih dari 1 disebut sebagai data time series. Analisis data time series selama 60 bulan (t) ini dimaksudkan untuk mengetahui risiko-risiko produksi.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator Pengukur	Satuan	Notasi
Variabel Dependen				
1	Produksi	Jumlah Produksi Pisang Cavendish	Ton	X
Variabel Independen				
2	Dummy Standar Bibit	0 memenuhi standar, 1 tidak memenuhi standar (Standar 80% skor total)	Dummy	$dummyF$
3	Dummy Standar Input Produksi	0 memenuhi standar, 1 tidak memenuhi standar (Standar 80% skor total)	Dummy	$dummyG$
4	Dummy Standar Sumber Daya Manusia	0 memenuhi standar, 1 tidak memenuhi standar (Standar 85% skor total)	Dummy	$dummyH$
5	Dummy Standar Iklim	0 memenuhi standar, 1 tidak memenuhi standar (Standar 1500 sampai 2500 mm per tahun dengan temperatur 15-35°C)	Dummy	$dummyI$
6	Dummy Standar Kualitas Tanah	0 memenuhi standar, 1 tidak memenuhi standar (Standar ph 4,5-7,5)	Dummy	$dummyJ$
7	Bibit	$\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n (A_i \cdot Q_j)$ Dimana: A_i = Jumlah Bibit ke i Q_j = Kualitas Bibit ke j	Skor	F
8	Input Produksi	$\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n (B_i \cdot R_j)$ Dimana: B_i = Jumlah Pupuk ke i R_j = Kualitas Pupuk ke j	Skor	G
9	Sumber Daya Manusia	Persentase Jumlah Petani berkualitas atau yang telah diberi pelatihan atau penyuluhan	%	H
10	Iklim	Curah Hujan	mm	I
11	Kualitas Tanah	Tingkat Keasaman	ph	J

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi binary linear yaitu pendekatan regresi yang menggunakan variabel dummy sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen berupa produksi pisang cavendish. Dengan variabel independen berupa standar bibit, input produksi, sumber daya manusia, iklim/cuaca, dan kualitas tanah. Persamaan regresi dalam pendekatan regresi binary linear ini terbagi menjadi dua formula variabel yaitu binar dan nominal (Wooldridge et al., 2016). Variabel binar (dummy) bertujuan untuk mengukur risiko sedangkan variabel nominal bertujuan untuk menelusuri pengaruh riil dan sebagai variabel kontrol untuk menyatakan R-Square yang sesungguhnya (*robust approach*) (Wooldridge et al., 2016). Berikut ini merupakan persamaan regresi binary simultan:

$$X_t = \alpha + \beta_1 dummyF_t + \beta_2 dummyG_t + \beta_3 dummyH_t + \beta_4 dummyI_t + \beta_5 dummyJ_t + \beta_6 F_t + \beta_7 G_t + \beta_8 H_t + \beta_9 I_t + \beta_{10} J_t + \varepsilon$$

(1)

Dimana:

X = Produksi Pisang Cavendish Kualitas A1

$dummyF$ = Dummy Standar Bibit

$dummyG$ = Dummy Standar Input Produksi

$dummyH$ = Dummy Standar Sumber Daya Manusia

$dummyI$ = Dummy Standar Iklim

$dummyJ$ = Dummy Standar Kualitas Tanah

F = Bibit

G = Input Produksi

H = Sumber Daya Manusia

I = Iklim

J = Kualitas Tanah

$\beta_1, \beta_2, \beta_n$ = Koefisien regresi

α = Konstanta regresi

t = simbol *time series*

ε = standard error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis ini bertujuan untuk menguji besaran risiko jika tidak terpenuhi beberapa faktor produksi sesuai standar. Risiko-risiko produksi ini berdasarkan hipotesis faktor produksi yang mempengaruhi produksi. Faktor-faktor produksi yang diduga berisiko terhadap produksi antara lain bibit, input produksi (pupuk), kualitas SDM, iklim, dan kualitas lahan. Kelima risiko ini diinterpretasikan dengan 2 jenis variabel yaitu dummy dan nominal. Variabel dummy untuk mengungkap besaran risiko sedangkan variabel nominal untuk mengungkap pengaruh riil (Wooldridge et al., 2016; Sahir, 2021). Pada tabel berikut ini merupakan hasil analisis regresi binary linear pada risiko produksi agribisnis pisang cavendish di PT Vinda Abadi Sejahtera.

Tabel 3. Hasil Regresi Binary Linear

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8069,723	2008,506		-4,018	,000
	Dummy Bibit	-174,771	410,899	-,024	-2,413	,037
	Dummy Input Produksi	-184,481	395,455	-,025	-2,367	,043
	Dummy SDM	-935,050	386,277	-,132	-2,421	,019
	Dummy Iklim	278,914	462,307	,039	,603	,549
	Dummy Qty Lahan	11,712	453,823	,002	,026	,980
	Bibit	,817	,066	,485	12,410	,000
	Input Produksi	,712	,127	,372	5,595	,000
	SDM	983,769	761,639	,049	2,916	,020
	Iklim	,038	,236	,007	,160	,874
	Qty Lahan	-11,848	109,880	-,006	-,108	,915

a. Dependent Variable: Produksi

Dari hasil regresi tersebut diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap produksi pisang cavendish adalah penggunaan bibit, input produksi (pupuk), dan kualitas SDM. Hasil regresi variabel dummy semestinya linear dengan hasil regresi variabel nominal, karena kedua hanya mentransformasi nilai variabel pada *cut-off* tertentu.

3.1. Faktor Rendahnya Kualitas dan Jumlah Bibit Berisiko Terhadap Produksi Pisang Cavendish

Pemilihan kualitas bibit dan jumlahnya menjadi risiko produksi pisang cavendish (sig. 0,037 < α 0,05). Pemenuhan standar mutu bibit yang kurang dari 80% dari total bibit yang disemai menyebabkan risiko produksi turun 174,771 kg/bulan (β -174,771). Faktor rendahnya kualitas bibit dan jumlah yang kurang memadai dapat menjadi resiko serius dalam produksi pisang cavendish. Bibit yang berasal dari tanaman induk yang tidak berkualitas atau memiliki keturunan yang lemah dapat menghasilkan tanaman yang rentan terhadap penyakit, hama, dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan (Norazmira, 2021). Bibit yang terinfeksi penyakit tanaman seperti penyakit layu Fusarium atau penyakit bercak hitam dapat menyebarkan penyakit ke tanaman baru setelah ditanam, menyebabkan penurunan produksi dan kualitas buah (Dennistian, 2019).

Proses pembibitan yang tidak dilakukan dengan benar atau kondisi lingkungan yang tidak optimal selama masa pembibitan dapat menghasilkan bibit yang lemah dan rentan terhadap stres. Bibit yang ditanam dalam kondisi tanah yang miskin unsur hara atau tidak mendapatkan pemupukan yang cukup dapat mengalami pertumbuhan yang terhambat dan tidak optimal (Elwany et al., 2022). Bibit yang tidak ditangani dengan hati-hati selama proses pengangkutan dan penyimpanan dapat mengalami kerusakan fisik atau kelembaban yang tidak tepat, menyebabkan penurunan viabilitas dan kualitas bibit. Dampak dari rendahnya kualitas bibit dapat menyebabkan penurunan hasil panen, peningkatan biaya produksi, dan bahkan kehilangan tanaman secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi produsen pisang Cavendish untuk memilih bibit yang berkualitas tinggi dan menjaga standar produksi yang ketat untuk memastikan keberhasilan produksi yang optimal. Ini dapat dilakukan dengan memilih penyedia bibit yang terpercaya, melakukan pemantauan yang cermat selama pembibitan, dan memperhatikan praktik pengelolaan tanaman yang baik (Misqi & Karyani, 2020).

3.2. Faktor Rendahnya Kualitas dan Jumlah Pupuk Berisiko Terhadap Produksi Pisang Cavendish

Input produksi berupa pupuk yang berkualitas dalam jumlah cukup juga menjadi faktor risiko produksi jika tidak dipenuhi minimal 80% (sig. 0,043 < α 0,05). Pemberian pupuk yang berkualitas dalam jumlah yang cukup bisa meningkatkan produksi, sebaliknya jika pemberian pupuk tidak mencapai standar 80% dapat berisiko menurunkan produksi sebesar 184,481 kg/bulan (β -184,481). Faktor rendahnya kualitas pupuk dan penggunaan jumlah yang kurang memadai dapat secara signifikan mempengaruhi produksi pisang Cavendish. Pupuk yang rendah kualitasnya atau penggunaan jumlah yang kurang memadai dapat menyebabkan kekurangan nutrisi pada tanaman pisang Cavendish. Kekurangan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi produksi buah (Adetya & Suprapti, 2021).

Tanaman yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup akan mengalami pertumbuhan yang terhambat. Hal ini dapat memperpanjang waktu yang diperlukan untuk tanaman mencapai fase panen, serta menghasilkan buah yang lebih kecil dan kurang berkualitas (Baroroh & Fauziyah, 2021). Tanaman pisang Cavendish yang lemah akibat kekurangan nutrisi lebih rentan terhadap serangan penyakit dan hama. Tanaman yang sehat memiliki kemampuan alami untuk melawan infeksi, namun tanaman yang kekurangan nutrisi akan lebih rentan terhadap serangan patogen. Kekurangan nutrisi dapat mengakibatkan penurunan kualitas buah, baik dari segi ukuran, rasa, tekstur, maupun warna (Suhendra, 2020). Buah yang kurang berkualitas akan sulit dijual atau memiliki harga jual yang lebih rendah, mengurangi pendapatan bagi petani. Penggunaan pupuk berkualitas rendah atau jumlah yang tidak memadai secara berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman pisang Cavendish dalam jangka panjang (Setiawan & Hendrarini, 2024).

Tanah yang kehilangan kesuburannya akibat kurangnya nutrisi dapat memerlukan upaya pemulihan yang intensif. Untuk menghindari dampak negatif ini, penting bagi petani pisang Cavendish untuk menggunakan pupuk berkualitas tinggi dan memastikan pemberian nutrisi yang cukup sesuai dengan kebutuhan tanaman (Santi et al., 2023b). Monitoring secara rutin terhadap kondisi tanaman dan tanah juga penting untuk mengidentifikasi potensi kekurangan nutrisi atau masalah lainnya yang mungkin timbul selama masa pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, produksi pisang Cavendish dapat

dipertahankan pada tingkat yang optimal untuk memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan keberhasilan bisnis petani (Setiawan & Hendrarini, 2024).

3.3. Faktor Lemahnya Pengendalian dan Tata Kelola Kualitas SDM Petani mitra Berisiko Terhadap Produksi Pisang Cavendish

Pengendalian dan tata kelola kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap produksi, sedangkan kualitas SDM yang kurang dari 85% dari total petani mitra berisiko terhadap penurunan produksi (sig. 0,043 < α 0,05). Petani mitra berkualitas yang kurang dari 85% berisiko terhadap penurunan produksi pisang cavendish sebesar 935,050 kg/bulan (β -935,050). Faktor rendahnya pengendalian dan tata kelola kualitas petani mitra dapat memiliki dampak serius terhadap produksi pisang Cavendish. Petani mitra yang tidak menjalankan praktik pengendalian kualitas dengan baik dapat menggunakan bibit yang buruk atau tidak sehat, menghasilkan tanaman yang rentan terhadap penyakit dan hama (Aurelia et al., 2022). Tanaman yang lemah ini kemudian dapat mengalami pertumbuhan terhambat dan menghasilkan buah yang kurang berkualitas.

Kurangnya pengendalian kualitas di antara petani mitra dapat memfasilitasi penyebaran penyakit dan hama. Tanaman yang terinfeksi dapat menyebarkan patogen ke tanaman sehat di sekitarnya, menyebabkan penurunan produksi dan kualitas buah secara keseluruhan. Petani mitra yang tidak memiliki pengendalian kualitas yang baik mungkin tidak dapat menghasilkan hasil panen yang konsisten dan dapat diandalkan (Lawolo & Waruwu, 2022). Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan bagi pengusaha dan pembeli, serta meningkatkan risiko kehilangan pasar atau pelanggan. Kurangnya tata kelola kualitas di antara petani mitra dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan dari pihak lain dalam rantai pasokan, termasuk pengusaha dan konsumen. Ini dapat merusak reputasi merek dan mengurangi daya tarik produk pisang Cavendish di pasar (Aurelia et al., 2022).

Petani mitra yang tidak mengikuti standar kualitas yang ditetapkan oleh pengusaha atau badan pengatur dapat menghadapi konsekuensi hukum dan perdagangan. Penolakan produk oleh pihak berwenang atau pelanggan internasional dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat (Karim et al., 2022). Untuk mengurangi risiko yang terkait dengan faktor ini, penting bagi pengusaha untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas secara teratur terhadap petani mitra mereka. Ini bisa termasuk pelatihan, pendampingan, dan audit reguler untuk memastikan bahwa praktik pertanian yang baik dan standar kualitas diikuti dengan ketat (Suhendra, 2020). Membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan petani mitra juga dapat membantu memperkuat pengendalian kualitas dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Dengan demikian, risiko terhadap produksi pisang Cavendish dapat dikelola dengan lebih efektif, menjaga kualitas dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Putra et al., 2020).

3.4. Mitigasi Risiko Produksi Pisang Cavendish dan Strategi Peningkatan Produksi

Risiko produksi pisang cavendish PT Vinda Abadi Sejahtera perlu dimitigasi dengan memperhatikan ketiga determinan utama tersebut. Hal ini ditegaskan oleh variabel bebas dengan kualitas dan jumlah yang memadai yaitu 1 bibit berkualitas akan meningkatkan produksi pisang cavendish 0,817 kg/bulan (α 0,000 dan β 0,817). Kerjasama dengan penyedia bibit yang terpercaya dan terlatih dalam pembibitan pisang Cavendish. Hal ini perlu dipastikan bahwa bibit yang dipilih berasal dari tanaman induk yang sehat, bebas dari penyakit, dan memiliki ketahanan yang baik terhadap kondisi lingkungan setempat (Adetya & Suprapti, 2021).

Berikutnya, pemberian pupuk berkualitas 1 kg dapat meningkatkan produksi pisang cavendish 0,712 kg/ bulan (α 0,000 dan β 0,712). Proses pemupukan ini harus menganalisis dan memperhatikan kondisi tanah dan tanaman secara teratur untuk menentukan kebutuhan nutrisi yang tepat. Berikutnya, penggunaan pupuk berkualitas tinggi perlu dilakukan terutama yang mengandung keseimbangan nutrisi yang sesuai untuk pertumbuhan optimal tanaman pisang Cavendish. Juga, pemupukan perlu memperhatikan dosis dan jadwal aplikasi pupuk agar sesuai dengan kebutuhan tanaman (Hakim et al., 2022).

Sedangkan, kualitas sumber daya manusia juga dapat meningkatkan produksi pisang cavendish, yaitu setiap 10% kenaikan jumlah petani mitra berkualitas dapat meningkatkan produksi sebesar 983,769 kg/bulan (α 0,020 dan β 983,769). Pengendalian dan tata kelola SDM petani mitra ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pendidikan rutin kepada petani tentang praktik pertanian yang baik, termasuk pengelolaan tanaman, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama dan penyakit (Lestari et al., 2020). Selain itu, pengembangan kualitas SDM dilakukan dengan memperkenalkan teknologi pertanian modern dan inovasi terbaru kepada petani untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian (Yoesdiarti & Miftah, 2023). Sebagai sasaran akhir, perusahaan sebagai inti dan petani mitra sebagai plasma perlu membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan penyedia bibit, produsen pupuk, dan lembaga pendidikan atau penelitian pertanian. Maka, kedua pihak dapat berkolaborasi dengan melibatkan mitra dalam proses perencanaan dan pengembangan strategi produksi pisang Cavendish untuk mencapai tujuan bersama (Dennistian, 2019).

Dengan menerapkan strategi ini secara holistik, diharapkan produksi pisang Cavendish dapat ditingkatkan secara signifikan sambil memastikan penggunaan bibit, pupuk, dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Risiko produksi pisang cavendish di PT Vinda Abadi Sejahtera terjadi pada 3 faktor produksi utama yaitu bibit, pupuk, dan kualitas SDM petani mitra. Ketiganya beresiko menurunkan produksi pisang cavendish jika tidak dipenuhi sesuai standar. Sebaliknya, sebagai langkah mitigasi, bibit, pupuk, dan kualitas SDM dapat diintervensi agar meningkat sehingga berpotensi meningkatkan produksi pisang cavendish.

Faktor yang tidak berpengaruh adalah iklim dan kualitas lahan. Kedua faktor ini seringkali dapat diintervensi dengan pengairan irigasi dan pengolahan tanah sehingga tidak berpengaruh secara alamiah.

5. SARAN

Penelitian ini memberikan saran sebagai implikasi analisis yaitu mengoptimalkan ketiga faktor produksi yaitu bibit, pupuk, dan kualitas SDM petani mitra untuk meningkatkan produksi pisang cavendish. Selain itu, infiltrasi teknologi dan inovasi perlu diterapkan guna mendorong efisiensi produksi.

REFERENSI

- Adetya, A., & Suprpti, I. (2021). Analisis Produksi, Pendapatan, dan Risiko Usahatani Bawang Merah di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. *Agriscience*, 2 (1).
- Aurelia, R., Kurniati, D., & Hutajulu, J. P. (2022). Daya Saing Ekspor Pisang Indonesia Di Negara Tujuan Ekspor Periode 2000-2019. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 10(2), 335–349.
- Baroroh, S. Q., & Fauziyah, E. (2021). Manajemen Risiko Usahatani Jeruk Nipis di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(2), 494–509.
- Dennistian, R. (2019). Manajemen Risiko Usaha Pembibitan Tanaman Buah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Sukahati (Studi Kasus Di Kelompok Tani Tunas Hijau. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 52–65.
- Elwany, T. F., Widodo, S., & Fauziyah, E. (2022). Analisis Risiko Usahatani Garam Rakyat di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. *AGRISCIENCE*, 2(3), 701–715.
- Fatmawati, I., Fatmawati, F., & Lestari, S. (2018). Kelayakan Finansial Agroindustri Kopi Lengkuas di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. *Agriekonomika*, 7(2), 176–187.
- Fauziah, S. W., Dawud, M. Y., & Djohar, N. (2023). Efisiensi Teknis Usahatani Pisang Cavendish

- Menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA) Di Kabupaten Bojonegoro. VIABEL: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian, 17(1), 33–41.
- Hakim, M. W., Jati, D. P., Indrayanto, A., & Suparjito, S. (2022). Analisis Strategi Pemasaran dan Studi Kelayakan Bisnis pada Produk Pisang Cavendish (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Kartika Mandiri Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas). Midyear International Conference, 1(01).
- Karim, S. H., Kaddas, F., Fatmawati, M., Basuki, N., & Suhardi, S. (2022). Analisis Risiko Usahatani Padi Sawah (*Oryza Sativa* L)(Studi Kasus di Desa Aha Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai). PROCURATIO: Jurnal Manajemen & Bisnis, 1(1), 12–26.
- Lawolo, O., & Waruwu, B. A. (2022). Analisis Risiko Dan Manajemen Risiko Usahatani Padi Di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. JURNAL AGRIBISNIS, 11(2), 19–26.
- Lestari, K. K., Sumarji, S., & Daroini, A. (2020). Strategi Manajemen Risiko Petani Tebu Di Kabupaten Tuban. Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis, 19(1), 31–39.
- Meiliana, R., & Sardjanti, E. (2023). Kajian Geospasial Strategi Pengembangan BUMDes pada Usahatani Pisang Cavendish di Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2), 369–379.
- Misqi, R. H., & Karyani, T. (2020). Analisis Risiko Usahatani Cabai Merah Besar (*Capsicum annum* L.) di Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 6(1), 65–76.
- Norazmira, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah Di Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan. Skripsi: Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan.
- PT Vinda Abadi Sejahtera. (2023). Produksi Pisang Cavendish PT Vinda Abadi Sejahtera 2022-2023.
- Purnawati, E., Sari, F. D., & Purwanto, D. (2022). Pemanfaatan Teknologi Media Digital untuk Pengembangan Agrobisnis Pisang Cavendish BUMDES Maju Bersama. Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS, 1(4), 148–157.
- Putra, Y. H., Susilowati, D., & Syakir, F. (2020). Analisis Risiko Usahatani Bawang Merah di Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 8(2).
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. KBM Indonesia.
- Santi, K., Nurgiyanti, T., Nuswantoro, B. S., & Subandi, Y. (2023a). Implementasi Perdagangan Ekspor Pisang Cavendish PT. Great Giant Pineapple (GGP) dengan Jepang pada Tahun 2022. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2), 155–164.
- Santi, K., Nurgiyanti, T., Nuswantoro, B. S., & Subandi, Y. (2023b). Implementasi Perdagangan Ekspor Pisang Cavendish PT. Great Giant Pineapple (GGP) dengan Jepang pada Tahun 2022. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2), 155–164.
- Setiawan, R. F., & Hendrarini, H. (2024). Analisis Uji Beda Tingkat Efisiensi Usahatani Tebu Rakyat Kredit Dan Usahatani Rakyat Mandiri Di Kota Kediri. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, 23(2), 94–100.
- Suhendra, A. S. (2020). Analisis risiko usahatani jagung di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Agribisnis, 9(2), 112–119.
- Wooldridge, J. M., Wadud, M., & Lye, J. (2016). Introductory econometrics: Asia pacific edition with online study tools 12 months. Cengage AU.

Yoesdiarti, A., & Miftah, H. (2023). Strategi Pengembangan Dan Perluasan Wilayah Pasar Petani Pisang Uli (*Musa paradisiaca sapientum*). JURNAL AGRIBISAINS, 9(1), 77–87.

Konflik Sosial Kelompok Semu yang Terjadi di Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi Empiris di Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)

Yoga Pratama Hardiniawan¹ Drajat Tri Kartono² Ahmad Zuber³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret (UNS)

Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

¹yogasetiawan123@gmail.com

Abstract: The objectives of this research are 1). to find out the background of social conflict after the Village Head Election in Balongdowo Village, Kepohbaru District, Bojonegoro Regency, 1). Knowing the steps to resolve conflicts taken after the village elections in Balongdowo Village, Kepohbaru District, Bojonegoro Regency. This study utilized qualitative research methods. Data sources were categorized into two main types: primary data and secondary data. Primary data refers to information gathered directly by researchers, often termed as first-hand data. Secondary data, on the other hand, encompasses information obtained from existing sources. The sampling technique employed in this study involved research informants, individuals utilized to offer insights into the situation and background conditions of the research. The data utilized in this research comprise both primary data and secondary data from diverse origins. The results of this research are that the background to the conflict in Balongdowo Village after the election of village head basically occurred because the people who nominated themselves to become village head did not get full support from the residents where the candidate for village head came from. The head of RT 01 explained that the conflict that occurred after the village head election in Balongdowo Village was that the village head candidate who won at the time of the election had previously served in the Village Consultative Body. With this conflict, it had an impact on the people of Balongdowo Village who split into two camps. Where the trigger for this conflict is the residents of one of the candidates who do not fully support the candidate from that village and choose to support the candidate from another village. In the post-village head election social conflict that occurred in Balongdowo Village, this resolution was through mediation.

Keywords: Social Conflict, Village Election

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik sosial pasca Pilkades di Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, 1). Mengetahui langkah-langkah penyelesaian konflik yang dilakukan pasca Pilkades di Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, dari sumber aslinya, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan informan penelitian, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini bahwa yang melatarbelakangi terjadinya konflik di Desa Balongdowo pasca pemilihan kepala desa ini pada dasarnya terjadi karena masyarakat yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak mendapatkan dukungan penuh dari warga di mana calon kepala desa itu berasal. Ketua RT 01 menjelaskan bahwa konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo ini adalah calon kepala desa yang menang pada saat pemilihan pernah menjabat di Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya konflik tersebut, berdampak bagi masyarakat Desa Balongdowo yang pecah menjadi dua kubu. Di mana pemicu dari konflik ini adalah warga asal dari salah satu calon yang tidak mendukung penuh terhadap calon dari kampung tersebut dan memilih untuk mendukung calon dari kampung lain. Dalam konflik sosial pasca pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Balongdowo, resolusi ini melalui jalur mediasi.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Pilkades

1. PENDAHULUAN

Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena mereka tidak bisa terlepas dari interaksi dengan sesama manusia. Ini disebabkan oleh dorongan alami manusia untuk berhubungan dengan orang lain, yang mendorong mereka untuk hidup dalam kelompok. Kehidupan berkelompok ini didasarkan pada kesamaan ciri atau kepentingan, seperti contohnya orang kaya cenderung bersosialisasi dengan orang kaya lainnya (Eni, 2016).

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain dan lingkungannya sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Bersosialisasi merupakan bagian penting dari habitat manusia, di mana setiap individu memerlukan satu sama lain untuk berinteraksi dan saling mendukung. Manusia berperan sebagai makhluk sosial yang terhubung dengan lingkungan dan komunitas tempat tinggalnya (Jelamu Ardu Marius, 2006).

Dalam berinteraksi sosial, manusia menggunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan kelangsungan hidup kelompoknya. Kemampuan manusia untuk berkembang hanya dapat terwujud ketika mereka hidup dan belajar di tengah-tengah sesama manusia. Bahkan untuk hal-hal sepele seperti berjalan, manusia perlu belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari interaksi dengan manusia lainnya.

Dalam kehidupannya, manusia tidak bisa hidup secara terpisah. Mereka memiliki dorongan alami untuk berinteraksi dengan sesama manusia, mencerminkan kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia dipenuhi dengan ketergantungan satu sama lain. Manusia selalu hidup sebagai bagian dari sebuah kesatuan, baik sebagai anggota masyarakat maupun negara. Hidup dalam hubungan saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain ini membawa konsekuensi sosial, baik positif maupun negatif. Kondisi positif dan negatif ini merupakan hasil dari nilai-nilai dan karakter manusia, bahkan bisa menyebabkan pertentangan antarindividu. Setiap individu harus bersedia mengorbankan hak-hak pribadi demi kepentingan bersama. Dalam konteks ini, ditekankan perlunya perilaku yang mulia yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong-royong (Lating et al., 2017).

Manusia juga memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan perasaan emosional kepada orang lain dan menerima respon emosional dari mereka. Mereka menginginkan pengertian, kasih sayang, pengakuan, dan berbagai macam perasaan emosional lainnya. Namun, respon emosional tersebut hanya dapat diperoleh melalui interaksi dengan orang lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Umumnya, manusia terlibat dalam hubungan dan interaksi dengan sesama manusia, yang sering kali menyertai konflik sosial yang timbul akibat pertentangan antarindividu atau antarmasyarakat.

Menurut Robert A. Dahl (1978), ilmu politik dapat dianggap sebagai kajian tentang strategi, atau lebih tepatnya, sebagai analisis terperinci dari berbagai metode yang digunakan untuk mencari solusi teratur terhadap kekacauan dalam pengertian yang lebih luas. Secara historis, lembaga politik berkembang sebagai hasil dari interaksi dan konflik antara berbagai kekuatan sosial, serta karena evolusi bertahap dari berbagai prosedur dan alat yang diperlukan untuk menangani konflik tersebut. Selain itu, politik juga dapat menjadi penyebab konflik, seperti yang terjadi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades), yang bahkan dapat memicu konflik pasca-pemilihan. Meskipun hasil pemilihan kepala desa sudah ditentukan dan pemenangnya sudah jelas, konflik masih dapat terjadi..

Selain menjadi awal yang menjanjikan bagi perkembangan demokrasi di tingkat desa, pemilihan kepala desa secara langsung juga memiliki potensi konflik. Media elektronik seringkali menyoroti insiden konflik yang terjadi selama proses pemilihan kepala desa maupun kepala daerah. Salah satu sengketa yang sering muncul dalam pemilihan kepala desa adalah dugaan manipulasi hasil rekapitulasi perhitungan suara. Selain itu, masalah perilaku pemilih, termasuk pemilih yang tidak terdaftar namun diklaim sebagai pemilih potensial, serta tuduhan politik uang, menjadi isu yang sering dibahas oleh tim sukses yang kalah dalam kontes politik (Putri, 2018).

Pemilihan Kepala Desa, yang biasa disingkat sebagai Pilkades, kini menjadi istilah yang umum dikenal. Ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka serta sebagai proses pergantian atau kelanjutan kepemimpinan di tingkat desa. Pilkades diharapkan dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa dengan mengangkat calon kepala desa yang layak. Proses ini menjadi instrumen penting dalam pembentukan pemerintahan yang modern dan demokratis.

Meskipun diatur oleh perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan Pilkades, proses ini seringkali terganggu oleh faktor-faktor politik dan kepentingan pribadi. Namun, harapannya adalah agar proses pemilihan kepala desa dapat berjalan lancar tanpa mengganggu keharmonisan masyarakat. Masyarakat berharap kepala desa yang terpilih akan mampu memimpin pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkades seringkali sulit untuk dilakukan dengan lancar dan berkualitas karena campurnya faktor-faktor politik dan kepentingan yang terlibat. Dalam hal ini, yang diinginkan masyarakat adalah adanya pemerintahan desa yang sah dan legitim .

Saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, tidak terlepas dari budaya yang khas bagi desa tersebut. Desa Balongdowo dikenal sebagai desa yang homogen, dengan hanya satu dominasi agama, yaitu Islam, dan satu etnis, yaitu Sunda. Namun, meskipun terdapat keseragaman dalam hal agama dan etnis, masalah sosial seringkali muncul, dan dalam konteks pemilihan kepala desa, hal ini bisa menyebabkan konflik serius. Dalam pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo, terjadi keributan yang mengakibatkan konflik serius. Penyelenggaraan pesta demokrasi ini dipenuhi dengan berbagai masalah dan persoalan yang menjadi gejala awal konflik, termasuk keributan dan kekerasan, yang berpotensi merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya.

Dalam kasus ini, calon kandidat kepala desa tidak terlibat dalam tindakan yang berlebihan. Sebaliknya, anggota tim sukses dari kedua belah pihak atau calon kandidatlah yang seringkali melakukan pelanggaran dalam proses demokrasi Pilkades. Kondisi ini sering terjadi karena anggota tim sukses berasal dari wilayah lain yang terafiliasi dengan calon kandidat. Setelah Pilkades berlangsung, calon kandidat yang kalah mungkin merasa kecewa dengan tindakan anggota tim sukses dan warga yang memilih. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara pendukung kedua calon, serta meningkatkan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan.

Pasca pemilihan kepala desa, tindakan dari tim sukses kandidat menghasilkan dampak serius pada kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Balongdowo. Sebagai contoh, saat pelaksanaan shalat Jum'at, warga memilih untuk melaksanakan ibadah di tempat lain daripada di daerah mereka sendiri. Selain itu, selama bulan Ramadhan, pengumpulan zakat fitrah dilakukan secara terpisah dari warga lainnya, dan bahkan kegiatan qurban saat Idul Adha juga dipisahkan. Dampak dari konflik pasca-pemilihan kepala desa ini membuat terjadi pembagian dan pemisahan di antara warga, mengganggu keseharian dan kebersamaan dalam ibadah serta kegiatan keagamaan.

Saat pembangunan sebuah masjid agung sedang berlangsung sebelum pemilihan kepala desa, masyarakat setempat bekerja sama dan bergotong royong untuk membangun masjid tersebut. Namun, setelah terjadi konflik pasca-pemilihan kepala desa, pembangunan menjadi terhambat karena masyarakat saling bertentangan. Dampak lain dari konflik ini adalah adanya penggugatan terkait tanah wakaf dari salah seorang saudara calon kandidat. Jika saudaranya tidak menang dalam pemilihan, maka tanah wakaf tersebut harus dikembalikan menjadi milik pribadinya. Contoh lain yang lebih serius adalah terputusnya silaturahmi antar masyarakat pasca-pemilihan kepala desa. Warga cenderung menjadi acuh karena terafiliasi dengan tim sukses yang berbeda.

Penyelesaian konflik pemilihan kepala desa dapat dilakukan dengan cara persuasif, yaitu melalui perundingan atau musyawarah untuk mencari titik tengah antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pendekatan persuasif ini dapat diwujudkan melalui mediasi, di mana mediator yang netral terhadap konflik tersebut diperlukan untuk memfasilitasi perundingan antara kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi ketidakadilan atau keberatannya pada salah satu pihak yang terlibat.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena, dalam hal ini konflik antar kelompok sosial dan cara pengelolaannya, berdasarkan metodologi tertentu. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, atau disebut juga sebagai data dari tangan pertama, berupa data permasalahan konflik kelompok semu antara pendukung kepala desa terpilih dengan pendukung kepala desa tidak terpilih (Murdianto, 2020). Sementara data sekunder adalah data

yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada berupa hasil wawancara dari beberapa yang terlibat, data mediasi dan dokumen-dokumen lainnya sebagai pendukung (Patel, 2012). Teknik pengambilan sampel dengan cara menggunakan Informan penelitian yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Teknik pengambilan data menggunakan Triangulasi yaitu Wawancara, observasi dan studi lapangan).

3. HASIL

3.1. Kondisi Pelaksanaan Pilkades di Desa Balongdowo

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan instrumen penting dalam pembentukan pemerintahan yang modern dan demokratis. Proses demokrasi ini, yang dilakukan di tingkat wilayah terkecil, telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, yang mengatur tata cara penyelenggaraan Pilkades. Dengan demikian, diharapkan bahwa seluruh tahapan proses Pilkades, mulai dari pembentukan panitia Pilkades hingga pelantikan kepala desa terpilih, akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Harapan masyarakat adalah agar proses Pilkades dapat berlangsung dengan lancar tanpa mengganggu ketuhanan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengharapkan terpilihnya kepala desa yang layak dan kompeten untuk memimpin serta mengelola pemerintahan desa. Hal ini menjadi dambaan setiap masyarakat desa demi terciptanya suasana yang kondusif.

Pelaksanaan Pilkades diatur oleh pemerintah daerah di masing-masing kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 18 Pasal 5 Tahun 2014, yang menguraikan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pilkades.:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

3.2. Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa (Pilkades) Balongdowo ternyata menimbulkan sebuah konflik, konflik yang terjadi di Desa Balongdowo ini tidak seperti yang terjadi di desa-desa lainnya. Konflik yang terjadi di Desa Balongdowo ini terjadi pasca pemilihan kepala desa. Setidaknya ada dua model konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa. Konflik yang pertama konflik antara calon dengan calon lain, yang kedua, konflik antara calon dengan tim sukses, dan yang ketiga konflik antara tim sukses dengan keluarga. Keterlibatan konflik ini ternyata juga malah pelik dan menimbulkan keregangangan antara keluarga, karena hubungannya bukan hanya bersifat formal tetapi juga bersifat informal, bahkan lebih jauh pada tingkat keluarga ini semakin menyulitkan hubungan antar individu dengan individu lainnya.

3.3. Latar konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa

Dalam suatu pemilihan kepala desa (Pilkades) pasti ada yang berlangsung harmonis ataupun sedikit terjadi konflik. Pilkades di Desa Balongdowo ini berlangsung dengan sedikit ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan adalah sebuah konsep yang ada dalam sosiologi. Ketidak harmonisan juga merupakan ketidakrukunan, atau kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan disintegrasi terhadap masyarakat. Ketidakharmonisan ini adalah salah satu ciri dari disintegrasi sosial. Terjadinya ketidakharmonisan di Desa Balongdowo disebabkan oleh perbedaan persepsi atau pandangan antara anggota masyarakat mengenai norma yang sebelumnya dijadikan sebagai pedoman. Norma-norma masyarakat yang seharusnya mengatur perilaku dan interaksi menjadi tidak berfungsi dengan baik, dan timbul pertentangan antara norma-norma tersebut dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan kebingungan bagi anggota masyarakat sendiri dalam menentukan sikap dan tindakan yang tepat

Konflik di Balongdowo pada dasarnya terjadi karena masyarakat yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak mendapatkan dukungan penuh dari warga di mana calon kepala desa itu berasal. Menurut Daud sebagai Ketua RT 01 yang telah menjabat selama kurang lebih 12 tahun menjelaskan bahwa konflik yang terjadi pasca Pilkades di Desa Balongdowo ini adalah usaha calon kepala desa yang tidak terpilih dan pendukungnya melemahkan kebijakan-kebijakan kepala desa terpilih.

Berdasarkan hasil wawancara bersama mantan Kepala Desa Balongdowo, Yoga Pratama, latar belakang terjadinya konflik di Desa Balongdowo Pilkades adalah pada dasarnya terjadi karena adanya ego kampung. Merasa pemimpin dari daerah mereka lebih baik daripada yang lainnya. Menurut Alit Iskandar, suka tidak suka, masyarakat saat ini menganut demokrasi, dan tidak melihat benar atau salah.

Konflik tersebut terjadi karena masyarakat belum mengerti mengenai demokrasi. Namun, dipaksa untuk mengerti mengenai demokrasi. Ketika didata menjadi daftar pemilih dan ditanya mengenai apakah mereka mengerti demokrasi atau tidak. Pada akhirnya, setelah Pemilihan Kepala Desa berlangsung, mereka tidak menerima dengan hasil akhir pemilihan, yang mana mereka memaksakan kehendak sendiri.

3.4. Dampak yang Ditimbulkan dari Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Balongdowo

Dampak dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Balongdowo pecah menjadi dua kubu. Di mana pemicu dari konflik ini adalah warga asal dari salah satu calon yang tidak mendukung penuh terhadap calon dari kampung tersebut dan memilih untuk mendukung calon dari kampung lain. Hal itu menjadi anggapan yang serius oleh tim sukses dari calon-calon tersebut. Di mana mereka merasa tidak diakui oleh warga yang notabene-nya adalah satu kampung dengan calon.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik sosial pasca pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dari hasil yang telah didapat dari proses wawancara dari beberapa narasumber adalah sebagian besar mengacu kepada pembangunan infrastruktur keagamaan seperti masjid besar di Balongdowo. Masyarakat menuding bahwa kepala desa terpilih akan membawa dampak tidak baik bagi masyarakat desa yang menyebabkan proses pembangunan masjid menjadi tidak terurus. Masyarakat tidak ingin melanjutkan pembangunan karena kepala desa terpilih tersebut. Hampir selama satu tahun (sampai wawancara ini dilakukan) menurut Daud pembangunan tidak dilanjutkan, yang mengakibatkan banyak kegiatan seperti kerja bakti dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Sholat Jum'at, Idul Adha, dan Idul Fitri bahkan kegiatan yang sifatnya harian seperti mengaji di masjid pun turut dipisah.

Daud juga menambahkan orang yang menjadi provokator dalam penyebab kegiatan keagamaan itu dipisah adalah dari salah satu calon yang tidak terpilih. Untuk tokoh ulama saja dalam hal ini tidak mau ikut campur dan tetap menjalankan kegiatan keagamaan seperti biasanya, namun tim sukses dari calon yang kalah tersebut tetap memaksa agar kegiatan keagamaan harus dipisah. Hal tersebut berpengaruh banyak terhadap kegiatan sehari-hari.

Masyarakat menjadi kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Masyarakat membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai masjid karena tempat ibadah yang dipisah oleh masyarakat dari tim sukses yang kalah. Masyarakat mengira bahwasanya kepala desa terpilih tersebut ada garis keturunan dari mantan lurah yang dahulu, sehingga menyebabkan adanya balas jasa dari pemerintahan kepala desa dahulunya. Menurut salah satu informan sempat akan terjadi konflik kerusuhan, sudah ramai di kalangan masyarakat, namun entah bagaimana kerusuhan tersebut tidak terjadi.

Konflik yang terjadi selalu mempunyai dua sisi berbeda, baik yang bermanfaat maupun yang sifatnya buruk dan merugikan masyarakat yang berkonflik. Terlepas dari teori konflik yang menganggap konflik juga bernilai positif. Sejarah dan kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa konflik selalu mendatangkan akibat negatif. Pemisahan tempat ibadahpun menjadi penderitaan tersendiri bagi masyarakat. Mereka lebih banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk sampai ke tempat ibadah (masjid) yang sesuai dengan pilihan tim sukses yang kalah tersebut.

Akibat dari konflik tersebut, yang menjadi dampak utama seperti yang telah dijelaskan di atas adalah masalah pemisahan rumah ibadah antara warga dari pendukung kepala desa yang kalah dan warga dari pendukung masyarakat yang menang. Hal ini perlu ditinjau secara serius, karena hal tersebut dikarenakan, tanah yang di atasnya sedang dibangun masjid tersebut merupakan tanah wakaf dari almarhum ayahanda calon kepala desa yang kalah.

3.5. Resolusi Konflik

Menurut Daud, pemerintah setingkat kelurahan atau kabupaten dalam hal ini tidak bisa ikut andil untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ditambahkan oleh Daud, sebelum mengadakan kesatuan untuk perkumpulan RT-RT, sempat diadakan RT percontohan, seperti masyarakat RT 01 yang melakukan

gotong royong sesama warga agar dapat dicontoh oleh warga Rt lain. Solusi-solusi dari tokoh masyarakat pun tidak dapat diterima karena masyarakat yang satu sama lain belum dapat bersatu. Kunci utama dalam penyelesaian konflik ini adalah ada di setiap RT. Menurut Daud, jika dari setiap RT saja tidak dapat bersatu, maka akan sulit untuk mendamaikan satu sama lainnya. Tidak ada yang bisa memecahkan dalam permasalahan ini, dari pemerintah sekalipun. Hanya inisiatif saya untuk mengadakan kesatuan tiap-tiap RT. Sosialisasi yang dilakukan Daud berbicara bukan masalah tentang pemerintahan melainkan berbicara tentang keislaman.

Solusi lain juga ditawarkan oleh Alit Iskandar, dengan berdialog dengan para tokoh agama atau Ustadz, karena ustadzlah yang mengerti tentang hukum. Para tokoh agama agar bisa menjelaskan tentang hukum-hukum yang sedang dialami oleh masyarakat. Namun dengan cara itu belum bisa meredakan konflik tersebut.

Dari kedua solusi yang ditawarkan oleh Daud dan Alit, solusi yang mendekati terhadap pengertian katup penyelamat adalah solusi yang ditawarkan oleh Daud. Katup penyelamat yang dijelaskan oleh Raft Dahrendorf dalam konflik sosial pasca pemilihan kepala desa yang terjadi pada konflik di Desa Balongdowo ini melalui jalur mediasi, dan Daud dalam hal ini bertindak menjadi orang ketiga yang menengahi warga-warga yang berkonflik tersebut.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang “Konflik Sosial Pasca Pemilihan Kepala Desa”, melihat dari rumusan masalah yang telah diteliti mengenai latar belakang terjadinya konflik, dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik tersebut, dan solusi yang dilakukan untuk meredakan konflik tersebut, serta penilaian dari analisis teori konflik yang telah dilakukan.

- a. Penelitian ini menemukan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya konflik di Desa Balongdowo pasca pemilihan kepala desa ini pada dasarnya terjadi karena masyarakat yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak mendapatkan dukungan penuh dari warga di mana calon kepala desa itu berasal. Ketua RT 01 menjelaskan bahwa konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo ini adalah calon kepala desa yang menang pada saat pemilihan pernah menjabat di Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun sudah dijelaskan kepada masyarakat, mereka tidak ingin menerima penjelasan tersebut. Konflik pasca pemilihan kepala desa ini terjadi hanya di Kampung Karikil di mana calon terpilih tinggal. Dari hasil perhitungan suara yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya sekitar 30% saja yang tidak mendukung calon tersebut. Masyarakat menuding bahwa dalang dari semua konflik ini adalah tokoh masyarakat yang ada di Kampung Karikil. Hal itu menyebabkan selama satu tahun setengah kegiatan yang ada di Kampung tersebut tidak dilanjutkan. Seperti kegiatan membangun masjid yang terganggu pembangunannya karena warga yang berkonflik tersebut.
- b. Dengan adanya konflik tersebut, berdampak bagi masyarakat Desa Balongdowo yang pecah menjadi dua kubu. Di mana pemicu dari konflik ini adalah warga asal dari salah satu calon yang tidak mendukung penuh terhadap calon dari kampung tersebut dan memilih untuk mendukung calon dari kampung lain. Dampak sebagian besar mengacu kepada pembangunan infrastruktur keagamaan seperti masjid besar di Balongdowo. Masyarakat menuding bahwa kepala desa terpilih akan membawa dampak tidak baik bagi masyarakat desa yang menyebabkan proses pembangunan masjid menjadi tidak terurus. Masyarakat tidak ingin melanjutkan pembangunan karena kepala desa terpilih tersebut. Hampir selama satu tahun pembangunan tidak dilanjutkan, yang mengakibatkan banyak kegiatan seperti kerja bakti dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Sholat Jum'at, Idul Adha, dan Idul Fitri bahkan kegiatan yang sifatnya harian seperti mengaji di masjid pun turut dipisah.
- c. Dalam konflik sosial pasca pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Balongdowo, resolusi ini melalui jalur mediasi. Solusi yang ditawarkan oleh Daud adalah membicarakan masalah-masalah yang sedang terjadi. Penyampaian informasi yang disampaikan disesuaikan dengan keadaan masyarakat di setiap RT atau terlebih lagi dengan RT-RT yang terlibat langsung dengan konflik yang terjadi. Berita-berita yang sifatnya krusial terhadap konflik ini diusahakan tidak disinggung beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama pun dalam hal ini tidak dikutsertakan,

karena dikhawatirkan ketika proses mediasi adakan akan muncul masalah baru. Para tim sukses-tim sukses dari calon yang bertikai pun tidak dikutsertakan.

5. SARAN

Dalam penelitian mengenai konflik sosial yang terjadi pada pasca pemilihan kepala desa di Desa Balongdowo yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

- a. Pemilihan kepala desa harus tetap terjaga, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa, supaya tidak terjadi sesuatu pelanggaran yang dapat mengganggu
- b. Penerapan pemilihan kepala desa harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, agar proses pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar, tidak ada pelanggaran sedikitpun.
- c. Perlu adanya kesadaran dan pengetahuan mengenai makna demokrasi. Agar masyarakat bisa menerima apapun hasil yang didapatkan dari keputusan pengumuman dari pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Eni, H. (2016). *Perubahan Perilaku Masyarakat di Lingkungan Kawasan Industri (Studi Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32928/3/ENI HARYATI-FITK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32928/3/ENI%20HARYATI-FITK.pdf)
- Jelamu Ardu Marius. (2006). Perubahan Sosial. *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), 125–132.
- Lating, A., Suaib, R., & Suhu, B. La. (2017). Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan). *Kawasa*, 7(1), 31–40.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Patel. (2012). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Putri, R. R. (2018). Konflik Sosial Dalam Novel Dawuk : Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf) Rany Rizkyah Putri Abstrak. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 01, 1–7.

Analisis Keikutsertaan Petani dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Ika Farihatunnisa^{1,2}, Rahmawati^{1,2}, Heru Irianto^{1,2}, Sri Marwanti^{1,2}

¹Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutami no 36 Ketingan Surakarta

²Pusat Studi Pendampingan Koperasi Dan UMKM LPPM UNS

Email: ikafari21@student.uns.ac.id

Abstract: The objective of this study is to analyze the implementation of the Rice Farming Insurance Program (AUTP) in Kapas District and the participation of farmers in the program. The research was conducted in January 2024 using both primary and secondary data. The sampling technique used was simple random sampling, with a sample size of 50 farmers. A deep and comprehensive understanding of farmers' participation in the AUTP program was analyzed using qualitative descriptive analysis methods. Based on the analysis, the implementation of the Rice Farming Insurance Program (AUTP) in Kapas District has adhered to the guidelines set by the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. Aspects such as organization, registration requirements, covered risks, compensation, premium determination, and the duration of coverage have been implemented according to the guidelines. However, most farmers in Kapas District are still not fully aware of the steps involved in the AUTP program. They also feel burdened by the requirement that they must wait until the damage to their land reaches 75% per plot before they can file a claim.

Keywords: participation, AUTP, insurance, farming, rice farmers

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas serta keikutsertaan petani dalam program tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2024 menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 50 petani. Pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang keikutsertaan petani dalam program AUTP dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh. Berdasarkan analisis, implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas telah sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Aspek-aspek seperti pengorganisasian, persyaratan pendaftaran, risiko apa saja yang dijamin, kompensasi, penetapan besaran premi, dan berapa lama waktu untuk pertanggungan telah diterapkan sesuai pedoman. Namun sebagian besar petani di Kecamatan Kapas masih belum sepenuhnya mengetahui tahapan program AUTP. Mereka juga merasa keberatan dengan persyaratan yang mengharuskan mereka menunggu hingga kerusakan pada lahan mereka mencapai 75% per petakan sebelum dapat mengajukan klaim.

Kata kunci: keikutsertaan, AUTP, asuransi, usaha tani, petani padi

1. PENDAHULUAN

Salah satu strategi yang dapat digunakan petani untuk mengurangi risiko terkait kegiatan usaha tani padi adalah manajemen risiko pertanian. Sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, usaha tani memerlukan sistem yang dapat membagi risiko, dan asuransi pertanian menjadi salah satu solusinya. Sebuah konsep yang relatif lama, asuransi pertanian telah lama digunakan sebagai alat untuk melindungi petani dan mempertahankan hasil pertanian, khususnya di negara-negara maju. Penggunaan asuransi pertanian membantu menjaga proses produksi agar tetap sesuai dengan praktik pertanian yang baik. Meskipun beberapa modifikasi masih diperlukan, pengalaman asuransi di negara-negara maju dapat menjadi panduan yang berguna untuk penerapan di Indonesia (Elhusna *et al.*, 2019).

Berlandaskan UU Nomor 19 Tahun 2013, pemerintah telah mengimplementasikan AUTP untuk mengatasi kerugian dan dampak negatif dari ketidakpastian dalam usaha tani padi. Melalui program ini, jaminan diberikan terhadap kerusakan tanaman padi akibat bencana kekeringan, banjir, gangguan hama, sakit pada tanaman, atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Dengan Asuransi Usaha Tani Padi

(AUTP), petani memiliki kesempatan untuk melakukan pengajuan klaim dan menerima kompensasi, memungkinkannya untuk tetap melaksanakan atau meneruskan kegiatan pertanian karena telah memperoleh modal usaha tani dari kompensasi yang diterimanya dari risiko usaha tani yang dihadapi (Dirjen PSP Kementan Republik Indonesia, 2023).

Program AUTP di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sejak tahun 2015, namun baru mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten mulai tahun 2019. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan program AUTP yang didanai oleh APBD Kabupaten untuk pemilik Kartu Petani Mandiri (KPM) dengan luas total 17.930 hektar. Pada tahun 2023, program AUTP yang didanai oleh APBD Kabupaten Bojonegoro disiapkan untuk luas total 17.500 hektar. Program ini bersifat stimulan atau hanya berlaku untuk satu masa tanam (MT). Pendaftaran untuk MT periode April-September dan Oktober-Maret dilakukan secara bergantian. Petani yang tidak mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mendaftarkan AUTP secara independen melalui bantuan dari Petugas Penyuluh Pertanian (PPL). Tujuan dari program AUTP ini adalah untuk menolong petani untuk menghadapi risiko gagal panen serta kerugian akibat bencana alam (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023)

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, berikut adalah jumlah petani yang menjadi peserta program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari tahun 2019 hingga tahun 2022:

Tabel 1. Data Jumlah Petani Peserta AUTP di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 s/d 2022

Tahun	Jumlah Peserta (Orang)	Luas Lahan (Ha)
2019	124.159	59.018,31
2020	84.361	41.199,76
2021	48.087	20.839,80
2022	51.299	26.426,97

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 2023

Kecamatan Kapas, Pada tahun 2022 merupakan kecamatan dengan jumlah peserta AUTP tertinggi di Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan iebesar 1.581 peserta. Sedangkan jumlah petani di Kecamatan Kapas pada tahun 2022 adalah sebesar 7.392 petani.

Tabel 2. Data Kecamatan dengan Peserta AUTP 3 urutan tertinggi di Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	Jumlah (petani)
1	Kapas	1.581
2	Kanor	1.445
3	Sugihwaras	1.396

Sumber: Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, 2023

Pada tahun 2022, jumlah peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas hanya mencapai 21% dari total petani di wilayah tersebut. Angka partisipasi yang rendah ini menunjukkan bahwa keterlibatan petani dalam program AUTP masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai tingkat keikutsertaan petani dalam program ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami sejauh mana pemahaman petani terhadap AUTP, alasan mereka bergabung dengan program tersebut, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin mereka hadapi selama mengikuti program. Pemahaman tentang alasan dan kendala yang dihadapi petani dalam mengikuti AUTP akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap program ini, serta akan memengaruhi pengembangan dan kesuksesan program AUTP di masa depan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perumusan masalah pada penelitian adalah:

1. Bagaimanakah implementasi AUTP di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimanakah tingkat keikutsertaan petani padi pada program AUTP di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi secara sengaja (*purposive*) dilakukan karena daerah ini memiliki jumlah peserta program AUTP tertinggi di Kabupaten Bojonegoro. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam dan komprehensif tentang keikutsertaan petani pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Diharapkan, keadaan dan permasalahan yang dialami petani pada program AUTP dapat dijelaskan dengan pendekatan kualitatif. *Simple random sampling* adalah teknik *sampling* yang dipakai untuk menjelaskan keadaan dan permasalahan yang dialami petani yang ikut serta dalam program AUTP, di mana setiap petani peserta AUTP di Kecamatan Kapas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 50 petani, yang ditentukan menggunakan Rumus Slovin. Petani responden diambil dari dua desa dengan jumlah peserta AUTP tertinggi di Kecamatan Kapas, yaitu Desa Bendo dan Desa Tanjungharjo (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Kapas berada di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah mencapai 46,38 km² menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023. Wilayah Kecamatan Kapas terbagi menjadi 21 desa, di mana 10 desa berada di bagian utara dan 11 desa berada di bagian selatan, sepanjang rel kereta api. Secara administratif, Kecamatan Kapas berbatasan dengan Kecamatan Sukosewu dan Dander di bagian selatan, Kecamatan Bojonegoro di bagian utara, Kecamatan Bojonegoro di bagian barat, dan Kecamatan Balen di bagian timur. Jumlah penduduk Kecamatan Kapas pada tahun 2023 mencapai 57.750 jiwa, berdasarkan data dari Satu Data Bojonegoro. Secara keseluruhan, penduduk laki-laki di Kecamatan Kapas lebih banyak daripada penduduk perempuan, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.154 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 28.596 jiwa.

3.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian

3.2.1. Implementasi Program AUTP di Wilayah Kecamatan Kapas

Usaha di bidang pertanian, khususnya usaha tani padi, sering kali menghadapi beberapa risiko dan ketidakpastian yang disebabkan oleh dampak buruk dari perubahan cuaca, yang berdampak merugikan bagi para petani. Guna mengatasi kerugian-kerugian yang dialami oleh petani karena kondisi tersebut, pemerintah turut berupaya memberikan tempat berlindung terhadap usaha tani melalui program Asuransi Pertanian. Langkah ini selaras dengan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dilaksanakan melalui Permentan No. 40 Tahun 2015 mengenai Fasilitas Asuransi Pertanian. (Ditjen PSP Kementan Republik Indonesia, 2023).

Program AUTP memberikan perlindungan terhadap kerugian-kerugian yang disebabkan oleh rusaknya tanaman padi akibat berbagai risiko, seperti bencana kekeringan, banjir, dan gangguan hama serta penyakit yang dialami tanaman maupun organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Melalui AUTP, para petani dapat melakukan pengajuan klaim guna mendapatkan kompensasi, sehingga mereka dapat meneruskan kegiatan pertanian dengan modal usaha tani yang diperoleh dari klaim atas risiko-risiko usaha tani yang mereka alami.

AUTP merupakan kesepakatan diantara petani dengan perusahaan asuransi guna melindungi petani dari risiko-risiko yang berhubungan dengan pertanian padi. Tujuan utama AUTP yaitu memberikan kompensasi kepada para petani atas kerugian yang mereka alami karena kerusakan pada padi, kemudian petani dapat menerima lagi biaya usaha tani yang sudah dikeluarkan. Pelaksanaan AUTP memiliki tujuan khusus, meliputi: (a) Melindungi petani dari kerugian akibat rusaknya tanaman padi yang diasuransikan, disebabkan oleh beberapa risiko seperti bencana kekeringan, banjir, dan gangguan

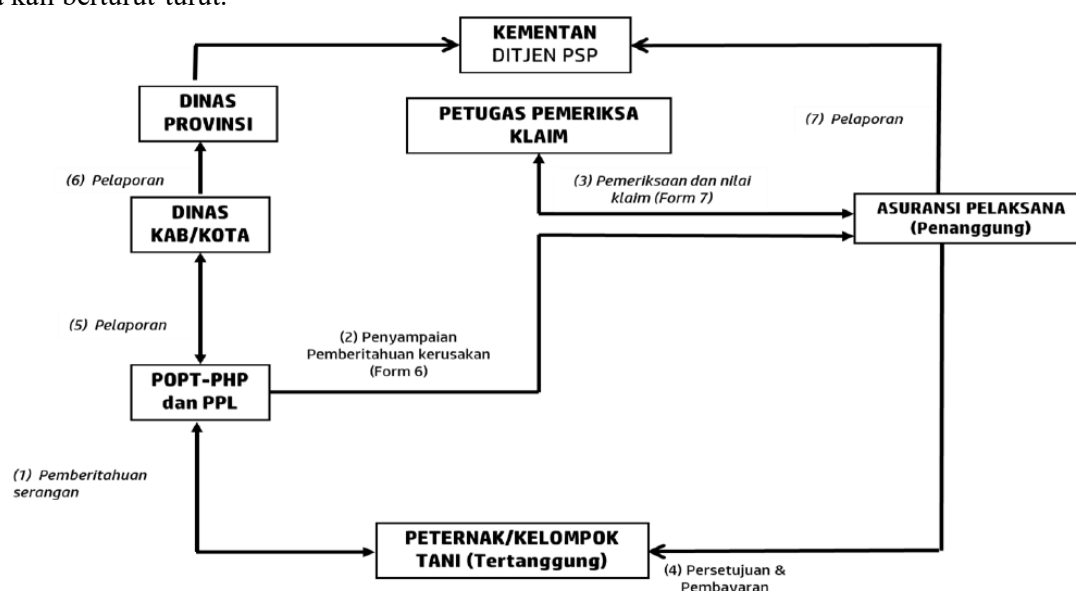
organisme pengganggu tumbuhan (OPT). (b) Mengambil alih risiko kerugian akibat bencana kekeringan, banjir dan gangguan OPT dari petani kepada perusahaan asuransi melalui mekanisme klaim asuransi.

Ini berarti bahwa dengan AOTP, petani memiliki perlindungan finansial jika terjadi kerusakan pada tanaman mereka karena faktor risiko tertentu yang dicakup oleh polis asuransi, seperti banjir, kekeringan, atau serangan OPT.

Pelaksanaan program AOTP, mulai pendaftaran sampai dengan klaim, melibatkan banyak pihak serta instansi. Tumbuhan padi yang ingin didaftarkan sebagai peserta AOTP harus memiliki usia maksimal tiga puluh hari setelah tanam (HST), dan penentuan kelayakan peserta AOTP dilakukan oleh perusahaan dari pihak Asuransi Pelaksana. Alur pendaftaran antara lain (Kementan, 2023):

- Petugas pertanian membantu bertanggung mengisi formulir registrasi digital pada aplikasi SIAP di akun PPL dengan menggunakan format (Form AOTP-1) yang telah disediakan.
- Untuk menetapkan Daftar Peserta Definitif (Formulir AOTP-3), Koordinator BPP/UPTD membikin rekap peserta asuransi (Formulir AOTP-2) serta menyampaikannya kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota beserta dokumentasi lengkapnya (Formulir AOTP asli -1).
- Premi swadaya yang harus dibayar bertanggung dibayarkan ke rekening penanggung.
- Program SIAP langsung menghasilkan polis asuransi yang mencantumkan nama petani peserta dan nama Kelompok Tani. SMS blasting digunakan untuk memberitahukan aktivasi polis ke nomor telepon kelompok tani yang terdaftar.
- Surat ketetapan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AOTP disusun dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota *upload* penetapan DPD menggunakan aplikasi SIAP (yang dilengkapi konsideran dan Lampiran Form AOTP-3).
- ringkasan DPD dari setiap Kabupaten/Kota (Form AOTP-4) disusun oleh Dinas Pertanian Provinsi.

Pada saat tanam atau pada musim tanam berikutnya, petani yang sebelumnya telah mendapat perlindungan atau mengajukan klaim dapat mendaftar kembali jadi peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP). Namun, pengecualian berlaku bagi tempat yang sudah mengalami klaim sebanyak tiga kali berturut-turut.



Gambar 1: Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi

Sumber: Kementerian Pertanian, 2023

Jika terdapat risiko pada tanaman padi yang diasuransikan, kerusakan-kerusakan tanaman ataupun gagal panen bisa diajukan klaimnya. Klaim AOTP akan ditindaklanjuti apabila memenuhi syarat antara lain (Kementerian Pertanian, 2023):

- a. Tertanggung dan petugas dinas pertanian setempat bekerja sama untuk mengambil tindakan pengendalian guna mencegah kerusakan tanaman yang semakin luas yang disebabkan oleh OPT.
 - b. Pihak tertanggung ditemani oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau POPT dalam mengajukan klaim ke pihak perusahaan asuransi. Laporan klaim pertama dapat dilaporkan secara langsung, melalui telepon, dengan mengirimkan pesan instan seperti WhatsApp (WA), atau melalui pemberitahuan formal lainnya. Dokumen-dokumen syarat pengajuan klaim kemudian dilengkapi melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP.
 - c. Pelaporan kejadian untuk pengajuan klaim secara real-time dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau POPT. Namun, jika daerah tersebut akses internet tidak mencukupi, pelaporan klaim bisa dilakukan melalui aplikasi lain, yaitu SIAP.
 - d. PPL atau POPT diwajibkan untuk menyampaikan laporan klaim dengan cara formal dengan melengkapi Formulir AUTP-6 selengkap-lengkapnyanya dan menyertakan berkas pendukung pengajuan klaim melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP tidak lebih dari 7 hari kerja semenjak terjadinya kerusakan-kerusakan yang sesuai dengan kriteria kompensasi.
 - e. Dokumen-dokumen pendukung pengajuan klaim termasuk foto-foto kerusakan serta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari tertanggung. Jika kerusakan disebabkan oleh pemusnahan (*eradiksi*), maka foto akibat kerusakan dengan *open camera* atau aplikasi lain yang menunjukkan titik koordinat juga dilampirkan.
 - f. Untuk wilayah yang tidak memiliki akses internet, foto hasil aplikasi *open camera* yang menunjukkan titik koordinat bisa digantikan dengan membuat surat keterangan dari desa telah ditandatangani Kepala Desa atau petugas lain yang memiliki wewenang, serta dilengkapi dengan foto.
 - g. Apabila kerusakan-kerusakan tanaman padi memenuhi persyaratan kompensasi dan tak bisa dikendalikan lebih lanjut, petugas asuransi bekerja sama dengan PPL atau POPT untuk melaksanakan penilaian kerusakannya serta pentaksiran kerusakan.
 - h. Hasil pemantauan beserta perhitungan terjadinya kerusakan ditulis dalam BA Pemeriksaan Kerusakan (Formulir AUTP-7) melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP.
 - i. Tertanggung dilarang menghilangkan bukti-bukti kerusakan yang terjadi pada tanaman hingga petugas asuransi dan pentaksir kerugian melakukan pemantauan. Pihak tertanggung juga dapat menanam kembali dengan menyertakan bukti foto-foto kerusakan dengan *open camera* yang menunjukkan titik koordinat jika kerusakan disebabkan oleh pemusnahan (*eradiksi*).
 - j. Formulir AUTP-7 dilengkapi dan ditandatangani oleh tertanggung, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), penanggung, dan petugas dari dinas Kabupaten atau Kota selengkap-lengkapnyanya.
 - k. Tertanggung harus memberikan nomor rekening dari kelompok tani yang sesuai dan aktif lewat aplikasi yang tersedia, yaitu PROTAN atau SIAP, serta tidak boleh dikuasakan.
 - l. Apabila setelah empat belas hari kerja semenjak pelaporan kejadian pada kerusakan tanaman, BA Hasil Pemeriksaan Kerusakan masih belum diterbitkan atau dari asuransi belum juga melakukan verifikasi lapangan, besaran klaim yang telah diajukan dari pihak tertanggung akan dianggap telah disetujui oleh Asuransi Pelaksana.
 - m. Pihak Penanggung mengeluarkan Surat *Discharge Form* yang secara otomatis keluar melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP setelah Formulir AUTP-7 ditandatangani secara lengkap.
 - n. Penanggung wajib melaksanakan pembayaran klaim paling lambat 14 hari kerja dihitung sejak terbitnya Surat *Discharge Form* melalui aplikasi yang disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP.
 - o. Pihak Asuransi Pelaksana memberitahuKlan pembayaran klaim melalui SMS *blasting* menggunakan nomor telepon dari kelompok tani yang terdaftar.
- Apabila permohonan klaim dilakukan per satuan luas dan intensitas kerusakan sudah mencapai atau melebihi 75% per petak, pembayaran kompensasi wajib disesuaikan dengan berapa luas total petak yang

mengalami kerusakan, yang kemudian dikalikan dengan nilai pertanggungan per hektar, yaitu Rp. 6.000.000.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, asuransi pertanian adalah kesepakatan antara petani dan perusahaan asuransi untuk menanggung risiko dalam kegiatan pertanian. Dalam Program AUTP, nilai pertanggungan adalah sebesar Rp 6.000.000 per hektar per MT, yang menjadi patokan untuk perhitungan nilai premi dan batas paling besar untuk ganti rugi. Berdasarkan regulasi tersebut, premi asuransi usaha tani padi ditetapkan sebesar 3% dari harga pertanggungan, yaitu sebesar Rp 180.000 per hektar per MT. Pemerintah dalam hal ini Kementan, memberikan dukungan premi sebanyak 80%, yaitu senilai Rp 144.000 per hektar per musim tanam. Sisanya, sebesar Rp 36.000, merupakan kontribusi dari petani. Program ini memberikan manfaat kepada petani yang memiliki lahan maksimal dua hektar.

Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sejak tahun 2015 melalui koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro. Program AUTP dilakukan selama musim tanam pertama (MT I), yang sering kali bersamaan dengan musim hujan. Pelaksanaan program AUTP di tingkat petani telah sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Petani telah mematuhi kewajiban pembayaran premi tepat waktu dan sejumlah yang ditetapkan, dengan persepsi bahwa besaran premi tidak terlalu memberatkan karena adanya subsidi dari pemerintah (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

Sebanyak sembilan petani telah mengajukan klaim, dan dari responden yang telah mengajukan klaim tersebut, proses penyelesaiannya berjalan lancar karena bantuan yang diberikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) selama proses tersebut. Pembayaran kompensasi atau klaim ke petani dilakukan dalam waktu empat belas hari semenjak BA hasil kerusakan, dan petani padi yang telah mengalami klaim tak menghadapi masalah, sebab pembayaran dilakukan tepat pada waktunya (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

Petani padi yang mengambil bagian dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memiliki berbagai penyebab untuk mendaftar menjadi peserta AUTP, dapat ditemukan secara detail dalam Tabel 3.

Tabel 3. Penyebab Petani Menjadi Peserta Program AUTP di Wilayah Kecamatan Kapas

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Frekuensi banjir atau kekeringan yang sering terjadi.	2	4
2	Sering mengalami atau khawatir mengenai kegagalan panen.	26	51
3	Sering kali menjadi korban serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).	3	6
4	Sosialisasi intensif dari penyuluh	11	22
5	Sosialisasi intensif dari kelompok tani	8	17
Total		50	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Para Petani yang menjadi peserta Program AUTP memiliki beragam alasan dalam memutuskan untuk bergabung, termasuk sering menghadapi banjir dan kekeringan, khawatir mengenai gagal panen, sering diserang oleh organisme pengganggu tanaman (OPT), serta adanya sosialisasi yang intensif baik dari penyuluh pertanian maupun kelompok tani. Namun, alasan terbanyak yang diungkapkan oleh para peserta (51%) adalah karena sering mengalami atau takut mengalami gagal panen, sementara hanya sebagian kecil (3%) yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan. Hal ini konsisten dengan temuan Fatmawaty (2022) yang menyatakan bahwa mayoritas petani padi mengikuti AUTP karena khawatir gagal panen.

Peran PPL dan kelompok tani sangat penting pada implementasi program AUTP, mulai tahap sosialisasi, implementasi program, hingga pada saat pembayaran premi dan proses klaim asuransi. Para

petani sangat mengandalkan PPL dalam proses ini. Kegiatan-kegiatan sosialisasi resmi yang diadakan oleh PPL telah dilakukan sebanyak lima hingga enam kali, sementara sosialisasi secara informal terus berlangsung sepanjang waktu. Secara keseluruhan, pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah Kecamatan Kapas berjalan baik dan memberikan manfaat bagi petani. Para petani sangat berharap bahwa dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), kesejahteraan mereka dapat terus meningkat.

Menurut petani yang menjadi responden, terdapat beragam kelebihan dan kekurangan dalam implementasi Program AUTP di wilayah Kecamatan Kapas. Kelebihan yang dinyatakan oleh petani peserta Program AUTP meliputi: menolong petani guna melanjutkan usaha taninya jika mengalami gagal panen karena bencana, mengurangi kerugian-petani padi akibat terjadinya kerusakan atau kegagalan panen, meningkatkan kesejahteraan dan memberi semangat para petani, memungkinkan petani untuk melakukan usaha tani pada musim selanjutnya, membantu petani untuk melanjutkan pola tanam berikutnya, serta memberikan perlindungan terhadap modal usaha pertanian yang akan datang. Selain itu, kelebihan lainnya adalah premi yang rendah, sehingga mudah dijangkau oleh petani untuk membayarkannya.

Sementara itu, kekurangan-kekurangan yang dikatakan oleh para petani yang sudah menjadi peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) diantaranya: peserta wajib menjadi anggota yang aktif dalam kelompok tani, serta petani wajib mematuhi aturan serta persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang dinilai cukup banyak.

3.2.2. Keikutsertaan Petani dalam Program AUTP di Kecamatan Kapas

Keikutsertaan petani adalah faktor krusial dalam pelaksanaan AUTP. Jika tidak ada keikutsertaan petani padi, program AUTP tidak dapat terlaksana. Ketika jumlah petani padi yang aktif pada program AUTP ini semakin banyak, maka tujuan AUTP untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi oleh petani dalam usahanya dapat tercapai. Alasan dan pemahaman yang dimiliki oleh petani akan memengaruhi persepsinya pada program AUTP dan berdampak pada pengembangan serta kesuksesan program AUTP di masa depan.

Dalam penelitian ini, pengamatan terhadap keikutsertaan petani dianalisis berdasarkan beberapa topik data terkait AUTP, yaitu:

a. Pemahaman Para Petani Mengenai Program AUTP

Pada keikutsertaan para petani dalam Program AUTP, penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang program tersebut. Informasi mengenai AUTP diperoleh oleh petani dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro serta dari PPL yang bertugas di wilayah Kecamatan Kapas. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan menghadirkan ketua kelompok tani maupun gabungan kelompok tani ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro sebagai wakil, karena terbatasnya waktu maupun tempat untuk melakukan sosialisasi langsung kepada setiap petani. Kemudian, ketua kelompok tani bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait AUTP ke anggota kelompok tani mereka. Selain itu, sosialisasi yang telah dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) diimplementasikan melalui pertemuan langsung antar Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dengan para petani.

Kelompok tani di wilayah Kecamatan Kapas yang terlibat pada program AUTP masih memiliki kekurangan dalam pemahaman mereka tentang langkah-langkah yang terlibat dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Meskipun anggota kelompok tani tersebut menyadari bahwa mereka telah didaftarkan untuk menjadi peserta AUTP dan telah membayarkan premi dihitung berdasarkan dengan luas dari lahan sawah yang mereka miliki, namun mereka masih belum memahami sepenuhnya semua tahapan dalam program AUTP dan pentingnya peran serta mereka dalam program ini. Ini menjadi penting agar petani dapat mengenali pentingnya asuransi dalam usaha pertanian padi mereka. Dalam implementasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas, sosialisasi tentang program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dilakukan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Kapas. Namun, kurangnya frekuensi sosialisasi mungkin terjadi karena PPL sebagai penyampai informasi tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Situasi ini sejalan dengan pandangan Elhusna *et al.*, (2019) yang mencatat bahwa meskipun petani dibantu oleh

Ketua Kelompok Tani dan PPL dalam proses pendaftaran dan klaim, namun mereka hanya mengetahui jumlah premi yang harus mereka bayarkan.

Tabel 4. Pemahaman Petani yang menjadi Responden dalam Program AOTP di Wilayah Kecamatan Kapas.

No.	Pemahaman Petani tentang AOTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani yang menjadi responden kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang proses pendaftaran sebagai peserta dalam Program AOTP, karena dalam proses pelaksanaan pendaftaran mereka dibimbing ketua kelompok tani.	21	42
2	Hampir semua petani yang menjadi responden mengetahui jumlah premi yang harus mereka bayarkan.	46	92
3	Petani yang menjadi responden kurang memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pengajuan klaim ke pihak Asuransi, sebab mereka banyak ditolong ketua kelompok tani dan PPL.	26	52

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

b. Motivasi Petani Bergabung pada AOTP

Berdasarkan hasil pertanyaan dengan 50 petani yang menjadi peserta AOTP mengenai alasan mereka mengikuti program ini, beberapa motif muncul. Pertama, sebagian petani menyatakan bahwa mereka bergabung dalam AOTP karena menyadari pentingnya perlindungan asuransi dalam aktivitas pertanian mereka. Mereka meyakini bahwa dengan menjadi peserta asuransi, mereka dapat mendapatkan perlindungan finansial ketika menghadapi kejadian tak terduga seperti bencana alam atau serangan hama pada tanaman mereka. Klaim yang mereka ajukan kepada perusahaan asuransi diharapkan dapat memberikan kompensasi yang dapat dipergunakan untuk modal untuk musim tanam berikutnya, sehingga mereka merasa lebih aman dan tidak terlalu merugi saat mengalami kegagalan panen.

Masih banyak petani yang terlibat dalam program AOTP tidaklah karena kesadaran pribadi, tetapi lebih karena mengikuti jejak petani lain, dan hanya sedikit dari mereka yang benar-benar menyadari manfaat penting dari AOTP. Situasi ini dapat terjadi dikarenakan mayoritas petani padi yang terlibat dalam program tersebut menganggap keikutsertaan dalam AOTP sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi sebagai anggota dari kelompok tani. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawaty (2022), yang mencatat bahwa masih banyak petani yang bergabung dengan AOTP bukan karena kesadaran pribadi.

Tabel 5. Motivasi Petani Responden Bergabung dalam program AOTP di Kecamatan Kapas

No	Motivasi Petani mengikuti AOTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani mengambil bagian pada program AOTP karena mereka memiliki pemahaman sendiri tentang betapa pentingnya asuransi dalam menjalankan kegiatan usaha tani mereka.	13	26
2	Petani merasa termotivasi untuk bergabung dalam program AOTP karena mereka menganggap premi yang harus dibayarkan cukup terjangkau.	18	36
3	Petani turut serta dalam AOTP karena ada juga petani di sekitar mereka yang ikut serta dalam program tersebut.	18	36
4	Petani mengambil bagian dalam AOTP karena mereka telah menghadapi kegagalan panen di masa lalu, sehingga mereka ingin mengurangi risiko kerugian dalam usaha pertanian mereka.	9	18

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

c. Hambatan yang Dihadapi Petani dalam Mengikuti Program AOTP

Dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP), petani peserta asuransi mengalami beberapa kendala. Menurut hasil pertanyaan dengan 50 petani peserta AOTP, mereka menyatakan keberatan terkait persyaratan klaim. Petani merasa kesulitan karena harus menunggu kerusakan lahan mencapai 75% per petakan sebelum dapat mengajukan klaim. Mereka juga merasa bahwa premi yang dibayarkan menjadi sia-sia karena tidak dapat mengajukan klaim meskipun kerusakan belum mencapai ambang tersebut. Pendapat ini sesuai dengan temuan yang diungkapkan oleh Sari (2017), yang menunjukkan bahwa petani merasa terhambat dengan persyaratan bahwa kerusakan harus mencapai 75% untuk dapat mengajukan klaim.

Tabel 6. Hambatan yang Dihadapi Petani Responden dalam mengikuti program AOTP

No	Hambatan yang Dihadapi Petani saat mengikuti AOTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani yang menjadi responden tidak setuju dengan persyaratan bahwa kerusakan lahan harus mencapai setidaknya 75% per petakan sawah agar dapat mengajukan klaim.	35	70
2	Ketika kerusakan atau gangguan hama terjadi di lahan petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) menyarankan untuk mengendalikan kerusakan tersebut. Dampaknya, petani tidak dapat mengajukan klaim dan merasa bahwa partisipasi mereka dalam AOTP menjadi sia-sia.	18	36
3	Petani merasa tidak setuju dengan proses di mana uang ganti rugi (klaim) diberikan terlebih dulu kepada kelompok tani saat menerima klaim, karena mereka merasa wajib memberikan <i>fee</i> kepada ketua dari kelompok tani tersebut.	6	12

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

d. Proses Klaim pada Peserta AOTP

Klaim merupakan permintaan penggantian kerugian finansial yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai akibat dari bencana yang mengakibatkan kerugian. Dalam program AOTP, klaim yang diberikan senilai Rp 6.000.000,00 per hektar per MT. Klaim ini diberikan ke peserta AOTP apabila telah terjadi bencana kekeringan, banjir, atau gangguan OPT dengan syarat: i) umur tanaman padi telah melebihi 10 HST, ii) usia padi telah melebihi 30 hari, dan iii) intensitas terjadinya kerusakan serta luas

lahan yang mengalami kerusakan hingga $\geq 75\%$ di setiap luas. Proses pembayaran klaim dilakukan paling lama empat belas hari kalender semenjak BA hasil pemeriksaan kerusakan.

Dalam implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), bagi petani yang telah mendapatkan klaim sebelumnya tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah pengajuan klaim. Mereka mendapat banyak bantuan dari ketua kelompok tani dan PPL di Kecamatan Kapas. Akan tetapi, ada petani peserta yang belum sekalipun menerima klaim merasa keberatan karena harus mengalami kerusakan mencapai intensitas sebesar 75%. Mereka merasa dirugikan ketika kerusakan lahan sudah mencapai lebih dari 50%, tetapi mereka belum dapat mengajukan klaim kepada pihak AUTP. Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Sari (2017), menyatakan bahwa para petani yang telah menerima klaim sebelumnya tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pengajuan klaim karena bantuan yang diberikan oleh PPL.

Tabel 7. Proses Klaim pada Petani yang Menjadi Responden pada Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas.

No.	Proses Klaim Program AUTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Dari jumlah petani yang menjadi responden, sembilan di antaranya sudah pernah mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi. Dalam proses penuntasan klaim berlangsung lancar karena ada bantuan yang diberikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kepada petani selama mereka mengurus proses klaim tersebut.	9	18
2	Pembayaran ganti rugi atau klaim kepada petani harus dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari dari terbitnya BA hasil kerusakan tanaman, dalam hal ini, petani yang telah menerima klaim sebelumnya tidak menemui kendala karena pembayaran klaim dilakukan tepat waktu.	9	18

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah Kecamatan Kapas, dimulai semenjak tahun 2015, telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih banyak petani di Kecamatan Kapas yang belum memahami sepenuhnya tahapan-tahapan dalam program AUTP. Mereka mengalami ketidaknyamanan karena harus menunggu hingga kerusakan pada lahannya mencapai 75% dari luas yang diajukan sebelum dapat mengajukan klaim. Para petani merasa frustrasi karena meskipun kerusakan belum mencapai ambang tersebut, mereka tidak dapat mengajukan klaim kepada pihak asuransi, yang membuat pembayaran premi terasa kurang berarti bagi mereka.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada petani dengan cara langsung dan intensitas yang tinggi dan menggunakan cara yang tepat untuk menambah pemahaman pada petani tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) serta kesadaran petani akan manfaat program AUTP sebagai perlindungan terhadap risiko gagal panen. Kedua, pemerintah bersama pihak terkait dalam implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) perlu menangani berbagai kendala yang timbul, termasuk mempertimbangkan kembali ketetapan pihak asuransi tentang ketentuan luas kerusakan yang dijamin, yang saat ini minimal 75%, karena dianggap memberatkan petani. Selain itu, penambahan tenaga kerja diperlukan untuk melakukan sosialisasi ke petani mengenai pentingnya mengikuti AUTP dan memfasilitasi proses pengurusan klaim AUTP bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024, September 18). Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Retrieved from <https://bojonegorokab.bps.go.id/statictable/2015/03/24/82/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bojonegoro.html>.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023, August 21). Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun Anggaran 2023. Retrieved from <https://psp.pertanian.go.id/storage/1431/PEDUM-AUTP-2023-FINAL.pdf>.
- Elhusna F, Noer M & Yuerlital. 2019. Analisis Keikutsertaan Petani Dalam Asuransi Usahatani Padi (AUTP) Di Kecamatan Pariaman Timur. *Josesta*, Vol. 1, No. 2, p. 58-67.
- Fatmawaty. 2022. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Padi Pada Program Asuransi Pertanian Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono. (Tesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022) Diakses dari https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/24502-Full_Text.pdf.
- Sari IK. 2017. Studi Persepsi Penanggulangan Kerugian Usaha Tani Padi Melalui Asuransi Pertanian (Studi Kasus pada Lahan sawah di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro). Diakses dari (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3676>
- Satu Data Indonesia. (2023, September 5). Data Penduduk Berdasarkan Usia. from <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.html@detail=data-usia-penduduk>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Retrieved from https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=.
- Yusuf, M. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana. Jakarta . Retrieved from <https://www.scribd.com/document/488334763/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-dan-Penelitian-Gabungan-by-Muri-Yusuf-z-lib-org#>.

Analisis Keikutsertaan Petani dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Ika Farihatunnisa^{1,2}, Rahmawati^{1,2}, Heru Irianto^{1,2}, Sri Marwanti^{1,2}

¹Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutami no 36 Ketingan Surakarta

²Pusat Studi Pendampingan Koperasi Dan UMKM LPPM UNS

Email: ikafari21@student.uns.ac.id

Abstract: The objective of this study is to analyze the implementation of the Rice Farming Insurance Program (AUTP) in Kapas District and the participation of farmers in the program. The research was conducted in January 2024 using both primary and secondary data. The sampling technique used was simple random sampling, with a sample size of 50 farmers. A deep and comprehensive understanding of farmers' participation in the AUTP program was analyzed using qualitative descriptive analysis methods. Based on the analysis, the implementation of the Rice Farming Insurance Program (AUTP) in Kapas District has adhered to the guidelines set by the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. Aspects such as organization, registration requirements, covered risks, compensation, premium determination, and the duration of coverage have been implemented according to the guidelines. However, most farmers in Kapas District are still not fully aware of the steps involved in the AUTP program. They also feel burdened by the requirement that they must wait until the damage to their land reaches 75% per plot before they can file a claim.

Keywords: participation, AUTP, insurance, farming, rice farmers

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas serta keikutsertaan petani dalam program tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2024 menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 50 petani. Pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang keikutsertaan petani dalam program AUTP dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh. Berdasarkan analisis, implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas telah sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Aspek-aspek seperti pengorganisasian, persyaratan pendaftaran, risiko apa saja yang dijamin, kompensasi, penetapan besaran premi, dan berapa lama waktu untuk pertanggungan telah diterapkan sesuai pedoman. Namun sebagian besar petani di Kecamatan Kapas masih belum sepenuhnya mengetahui tahapan program AUTP. Mereka juga merasa keberatan dengan persyaratan yang mengharuskan mereka menunggu hingga kerusakan pada lahan mereka mencapai 75% per petakan sebelum dapat mengajukan klaim.

Kata kunci: keikutsertaan, AUTP, asuransi, usaha tani, petani padi

1. PENDAHULUAN

Salah satu strategi yang dapat digunakan petani untuk mengurangi risiko terkait kegiatan usaha tani padi adalah manajemen risiko pertanian. Sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, usaha tani memerlukan sistem yang dapat membagi risiko, dan asuransi pertanian menjadi salah satu solusinya. Sebuah konsep yang relatif lama, asuransi pertanian telah lama digunakan sebagai alat untuk melindungi petani dan mempertahankan hasil pertanian, khususnya di negara-negara maju. Penggunaan asuransi pertanian membantu menjaga proses produksi agar tetap sesuai dengan praktik pertanian yang baik. Meskipun beberapa modifikasi masih diperlukan, pengalaman asuransi di negara-negara maju dapat menjadi panduan yang berguna untuk penerapan di Indonesia (Elhusna *et al.*, 2019).

Berlandaskan UU Nomor 19 Tahun 2013, pemerintah telah mengimplementasikan AUTP untuk mengatasi kerugian dan dampak negatif dari ketidakpastian dalam usaha tani padi. Melalui program ini, jaminan diberikan terhadap kerusakan tanaman padi akibat bencana kekeringan, banjir, gangguan hama, sakit pada tanaman, atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Dengan Asuransi Usaha Tani Padi

(AUTP), petani memiliki kesempatan untuk melakukan pengajuan klaim dan menerima kompensasi, memungkinkannya untuk tetap melaksanakan atau meneruskan kegiatan pertanian karena telah memperoleh modal usaha tani dari kompensasi yang diterimanya dari risiko usaha tani yang dihadapi (Dirjen PSP Kementan Republik Indonesia, 2023).

Program AUTP di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sejak tahun 2015, namun baru mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten mulai tahun 2019. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan program AUTP yang didanai oleh APBD Kabupaten untuk pemilik Kartu Petani Mandiri (KPM) dengan luas total 17.930 hektar. Pada tahun 2023, program AUTP yang didanai oleh APBD Kabupaten Bojonegoro disiapkan untuk luas total 17.500 hektar. Program ini bersifat stimulan atau hanya berlaku untuk satu masa tanam (MT). Pendaftaran untuk MT periode April-September dan Oktober-Maret dilakukan secara bergantian. Petani yang tidak mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mendaftarkan AUTP secara independen melalui bantuan dari Petugas Penyuluh Pertanian (PPL). Tujuan dari program AUTP ini adalah untuk menolong petani untuk menghadapi risiko gagal panen serta kerugian akibat bencana alam (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, berikut adalah jumlah petani yang menjadi peserta program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari tahun 2019 hingga tahun 2022:

Tabel 1. Data Jumlah Petani Peserta AUTP di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 s/d 2022

Tahun	Jumlah Peserta (Orang)	Luas Lahan (Ha)
2019	124.159	59.018,31
2020	84.361	41.199,76
2021	48.087	20.839,80
2022	51.299	26.426,97

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 2023

Kecamatan Kapas, Pada tahun 2022 merupakan kecamatan dengan jumlah peserta AUTP tertinggi di Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan iebesar 1.581 peserta. Sedangkan jumlah petani di Kecamatan Kapas pada tahun 2022 adalah sebesar 7.392 petani.

Tabel 2. Data Kecamatan dengan Peserta AUTP 3 urutan tertinggi di Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	Jumlah (petani)
1	Kapas	1.581
2	Kanor	1.445
3	Sugihwaras	1.396

Sumber: Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, 2023

Pada tahun 2022, jumlah peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas hanya mencapai 21% dari total petani di wilayah tersebut. Angka partisipasi yang rendah ini menunjukkan bahwa keterlibatan petani dalam program AUTP masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai tingkat keikutsertaan petani dalam program ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami sejauh mana pemahaman petani terhadap AUTP, alasan mereka bergabung dengan program tersebut, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin mereka hadapi selama mengikuti program. Pemahaman tentang alasan dan kendala yang dihadapi petani dalam mengikuti AUTP akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap program ini, serta akan memengaruhi pengembangan dan kesuksesan program AUTP di masa depan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perumusan masalah pada penelitian adalah:

1. Bagaimanakah implementasi AUTP di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimanakah tingkat keikutsertaan petani padi pada program AUTP di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi secara sengaja (*purposive*) dilakukan karena daerah ini memiliki jumlah peserta program AUTP tertinggi di Kabupaten Bojonegoro. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam dan komprehensif tentang keikutsertaan petani pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Diharapkan, keadaan dan permasalahan yang dialami petani pada program AUTP dapat dijelaskan dengan pendekatan kualitatif. *Simple random sampling* adalah teknik *sampling* yang dipakai untuk menjelaskan keadaan dan permasalahan yang dialami petani yang ikut serta dalam program AUTP, di mana setiap petani peserta AUTP di Kecamatan Kapas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 50 petani, yang ditentukan menggunakan Rumus Slovin. Petani responden diambil dari dua desa dengan jumlah peserta AUTP tertinggi di Kecamatan Kapas, yaitu Desa Bendo dan Desa Tanjungharjo (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Kapas berada di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah mencapai 46,38 km² menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023. Wilayah Kecamatan Kapas terbagi menjadi 21 desa, di mana 10 desa berada di bagian utara dan 11 desa berada di bagian selatan, sepanjang rel kereta api. Secara administratif, Kecamatan Kapas berbatasan dengan Kecamatan Sukosewu dan Dander di bagian selatan, Kecamatan Bojonegoro di bagian utara, Kecamatan Bojonegoro di bagian barat, dan Kecamatan Balen di bagian timur. Jumlah penduduk Kecamatan Kapas pada tahun 2023 mencapai 57.750 jiwa, berdasarkan data dari Satu Data Bojonegoro. Secara keseluruhan, penduduk laki-laki di Kecamatan Kapas lebih banyak daripada penduduk perempuan, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.154 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 28.596 jiwa.

3.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian

3.2.1. Implementasi Program AUTP di Wilayah Kecamatan Kapas

Usaha di bidang pertanian, khususnya usaha tani padi, sering kali menghadapi beberapa risiko dan ketidakpastian yang disebabkan oleh dampak buruk dari perubahan cuaca, yang berdampak merugikan bagi para petani. Guna mengatasi kerugian-kerugian yang dialami oleh petani karena kondisi tersebut, pemerintah turut berupaya memberikan tempat berlindung terhadap usaha tani melalui program Asuransi Pertanian. Langkah ini selaras dengan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dilaksanakan melalui Permentan No. 40 Tahun 2015 mengenai Fasilitas Asuransi Pertanian. (Ditjen PSP Kementan Republik Indonesia, 2023).

Program AUTP memberikan perlindungan terhadap kerugian-kerugian yang disebabkan oleh rusaknya tanaman padi akibat berbagai risiko, seperti bencana kekeringan, banjir, dan gangguan hama serta penyakit yang dialami tanaman maupun organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Melalui AUTP, para petani dapat melakukan pengajuan klaim guna mendapatkan kompensasi, sehingga mereka dapat meneruskan kegiatan pertanian dengan modal usaha tani yang diperoleh dari klaim atas risiko-risiko usaha tani yang mereka alami.

AUTP merupakan kesepakatan diantara petani dengan perusahaan asuransi guna melindungi petani dari risiko-risiko yang berhubungan dengan pertanian padi. Tujuan utama AUTP yaitu memberikan kompensasi kepada para petani atas kerugian yang mereka alami karena kerusakan pada padi, kemudian petani dapat menerima lagi biaya usaha tani yang sudah dikeluarkan. Pelaksanaan AUTP memiliki tujuan khusus, meliputi: (a) Melindungi petani dari kerugian akibat rusaknya tanaman padi yang diasuransikan, disebabkan oleh beberapa risiko seperti bencana kekeringan, banjir, dan gangguan

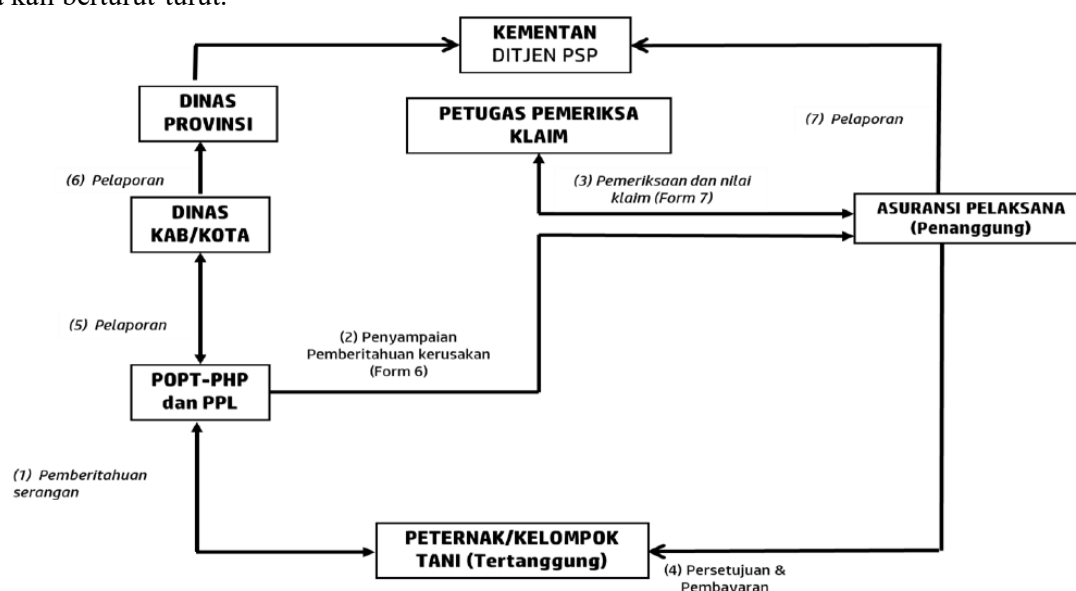
organisme pengganggu tumbuhan (OPT). (b) Mengambil alih risiko kerugian akibat bencana kekeringan, banjir dan gangguan OPT dari petani kepada perusahaan asuransi melalui mekanisme klaim asuransi.

Ini berarti bahwa dengan AOTP, petani memiliki perlindungan finansial jika terjadi kerusakan pada tanaman mereka karena faktor risiko tertentu yang dicakup oleh polis asuransi, seperti banjir, kekeringan, atau serangan OPT.

Pelaksanaan program AOTP, mulai pendaftaran sampai dengan klaim, melibatkan banyak pihak serta instansi. Tumbuhan padi yang ingin didaftarkan sebagai peserta AOTP harus memiliki usia maksimal tiga puluh hari setelah tanam (HST), dan penentuan kelayakan peserta AOTP dilakukan oleh perusahaan dari pihak Asuransi Pelaksana. Alur pendaftaran antara lain (Kementan, 2023):

- Petugas pertanian membantu bertanggung mengisi formulir registrasi digital pada aplikasi SIAP di akun PPL dengan menggunakan format (Form AOTP-1) yang telah disediakan.
- Untuk menetapkan Daftar Peserta Definitif (Formulir AOTP-3), Koordinator BPP/UPTD membikin rekap peserta asuransi (Formulir AOTP-2) serta menyampaikannya kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota beserta dokumentasi lengkapnya (Formulir AOTP asli -1).
- Premi swadaya yang harus dibayar bertanggung dibayarkan ke rekening penanggung.
- Program SIAP langsung menghasilkan polis asuransi yang mencantumkan nama petani peserta dan nama Kelompok Tani. SMS blasting digunakan untuk memberitahukan aktivasi polis ke nomor telepon kelompok tani yang terdaftar.
- Surat ketetapan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AOTP disusun dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota *upload* penetapan DPD menggunakan aplikasi SIAP (yang dilengkapi konsideran dan Lampiran Form AOTP-3).
- ringkasan DPD dari setiap Kabupaten/Kota (Form AOTP-4) disusun oleh Dinas Pertanian Provinsi.

Pada saat tanam atau pada musim tanam berikutnya, petani yang sebelumnya telah mendapat perlindungan atau mengajukan klaim dapat mendaftar kembali jadi peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP). Namun, pengecualian berlaku bagi tempat yang sudah mengalami klaim sebanyak tiga kali berturut-turut.



Gambar 1: Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi

Sumber: Kementerian Pertanian, 2023

Jika terdapat risiko pada tanaman padi yang diasuransikan, kerusakan-kerusakan tanaman ataupun gagal panen bisa diajukan klaimnya. Klaim AOTP akan ditindaklanjuti apabila memenuhi syarat antara lain (Kementerian Pertanian, 2023):

- a. Tertanggung dan petugas dinas pertanian setempat bekerja sama untuk mengambil tindakan pengendalian guna mencegah kerusakan tanaman yang semakin luas yang disebabkan oleh OPT.
 - b. Pihak tertanggung ditemani oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau POPT dalam mengajukan klaim ke pihak perusahaan asuransi. Laporan klaim pertama dapat dilaporkan secara langsung, melalui telepon, dengan mengirimkan pesan instan seperti WhatsApp (WA), atau melalui pemberitahuan formal lainnya. Dokumen-dokumen syarat pengajuan klaim kemudian dilengkapi melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP.
 - c. Pelaporan kejadian untuk pengajuan klaim secara real-time dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau POPT. Namun, jika daerah tersebut akses internet tidak mencukupi, pelaporan klaim bisa dilakukan melalui aplikasi lain, yaitu SIAP.
 - d. PPL atau POPT diwajibkan untuk menyampaikan laporan klaim dengan cara formal dengan melengkapi Formulir AUTP-6 selengkap-lengkapannya dan menyertakan berkas pendukung pengajuan klaim melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP tidak lebih dari 7 hari kerja semenjak terjadinya kerusakan-kerusakan yang sesuai dengan kriteria kompensasi.
 - e. Dokumen-dokumen pendukung pengajuan klaim termasuk foto-foto kerusakan serta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari tertanggung. Jika kerusakan disebabkan oleh pemusnahan (*eradiksi*), maka foto akibat kerusakan dengan *open camera* atau aplikasi lain yang menunjukkan titik koordinat juga dilampirkan.
 - f. Untuk wilayah yang tidak memiliki akses internet, foto hasil aplikasi *open camera* yang menunjukkan titik koordinat bisa digantikan dengan membuat surat keterangan dari desa telah ditandatangani Kepala Desa atau petugas lain yang memiliki wewenang, serta dilengkapi dengan foto.
 - g. Apabila kerusakan-kerusakan tanaman padi memenuhi persyaratan kompensasi dan tak bisa dikendalikan lebih lanjut, petugas asuransi bekerja sama dengan PPL atau POPT untuk melaksanakan penilaian kerusakannya serta pentaksiran kerusakan.
 - h. Hasil pemantauan beserta perhitungan terjadinya kerusakan ditulis dalam BA Pemeriksaan Kerusakan (Formulir AUTP-7) melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP.
 - i. Tertanggung dilarang menghilangkan bukti-bukti kerusakan yang terjadi pada tanaman hingga petugas asuransi dan pentaksir kerugian melakukan pemantauan. Pihak tertanggung juga dapat menanam kembali dengan menyertakan bukti foto-foto kerusakan dengan *open camera* yang menunjukkan titik koordinat jika kerusakan disebabkan oleh pemusnahan (*eradiksi*).
 - j. Formulir AUTP-7 dilengkapi dan ditandatangani oleh tertanggung, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), penanggung, dan petugas dari dinas Kabupaten atau Kota selengkap-lengkapannya.
 - k. Tertanggung harus memberikan nomor rekening dari kelompok tani yang sesuai dan aktif lewat aplikasi yang tersedia, yaitu PROTAN atau SIAP, serta tidak boleh dikuasakan.
 - l. Apabila setelah empat belas hari kerja semenjak pelaporan kejadian pada kerusakan tanaman, BA Hasil Pemeriksaan Kerusakan masih belum diterbitkan atau dari asuransi belum juga melakukan verifikasi lapangan, besaran klaim yang telah diajukan dari pihak tertanggung akan dianggap telah disetujui oleh Asuransi Pelaksana.
 - m. Pihak Penanggung mengeluarkan Surat *Discharge Form* yang secara otomatis keluar melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP setelah Formulir AUTP-7 ditandatangani secara lengkap.
 - n. Penanggung wajib melaksanakan pembayaran klaim paling lambat 14 hari kerja dihitung sejak terbitnya Surat *Discharge Form* melalui aplikasi yang disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP.
 - o. Pihak Asuransi Pelaksana memberitahuKlan pembayaran klaim melalui SMS *blasting* menggunakan nomor telepon dari kelompok tani yang terdaftar.
- Apabila permohonan klaim dilakukan per satuan luas dan intensitas kerusakan sudah mencapai atau melebihi 75% per petak, pembayaran kompensasi wajib disesuaikan dengan berapa luas total petak yang

mengalami kerusakan, yang kemudian dikalikan dengan nilai pertanggungan per hektar, yaitu Rp. 6.000.000.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, asuransi pertanian adalah kesepakatan antara petani dan perusahaan asuransi untuk menanggung risiko dalam kegiatan pertanian. Dalam Program AUTP, nilai pertanggungan adalah sebesar Rp 6.000.000 per hektar per MT, yang menjadi patokan untuk perhitungan nilai premi dan batas paling besar untuk ganti rugi. Berdasarkan regulasi tersebut, premi asuransi usaha tani padi ditetapkan sebesar 3% dari harga pertanggungan, yaitu sebesar Rp 180.000 per hektar per MT. Pemerintah dalam hal ini Kementan, memberikan dukungan premi sebanyak 80%, yaitu senilai Rp 144.000 per hektar per musim tanam. Sisanya, sebesar Rp 36.000, merupakan kontribusi dari petani. Program ini memberikan manfaat kepada petani yang memiliki lahan maksimal dua hektar.

Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sejak tahun 2015 melalui koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro. Program AUTP dilakukan selama musim tanam pertama (MT I), yang sering kali bersamaan dengan musim hujan. Pelaksanaan program AUTP di tingkat petani telah sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Petani telah mematuhi kewajiban pembayaran premi tepat waktu dan sejumlah yang ditetapkan, dengan persepsi bahwa besaran premi tidak terlalu memberatkan karena adanya subsidi dari pemerintah (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

Sebanyak sembilan petani telah mengajukan klaim, dan dari responden yang telah mengajukan klaim tersebut, proses penyelesaiannya berjalan lancar karena bantuan yang diberikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) selama proses tersebut. Pembayaran kompensasi atau klaim ke petani dilakukan dalam waktu empat belas hari semenjak BA hasil kerusakan, dan petani padi yang telah mengalami klaim tak menghadapi masalah, sebab pembayaran dilakukan tepat pada waktunya (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

Petani padi yang mengambil bagian dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memiliki berbagai penyebab untuk mendaftar menjadi peserta AUTP, dapat ditemukan secara detail dalam Tabel 3.

Tabel 3. Penyebab Petani Menjadi Peserta Program AUTP di Wilayah Kecamatan Kapas

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Frekuensi banjir atau kekeringan yang sering terjadi.	2	4
2	Sering mengalami atau khawatir mengenai kegagalan panen.	26	51
3	Sering kali menjadi korban serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).	3	6
4	Sosialisasi intensif dari penyuluh	11	22
5	Sosialisasi intensif dari kelompok tani	8	17
Total		50	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Para Petani yang menjadi peserta Program AUTP memiliki beragam alasan dalam memutuskan untuk bergabung, termasuk sering menghadapi banjir dan kekeringan, khawatir mengenai gagal panen, sering diserang oleh organisme pengganggu tanaman (OPT), serta adanya sosialisasi yang intensif baik dari penyuluh pertanian maupun kelompok tani. Namun, alasan terbanyak yang diungkapkan oleh para peserta (51%) adalah karena sering mengalami atau takut mengalami gagal panen, sementara hanya sebagian kecil (3%) yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan. Hal ini konsisten dengan temuan Fatmawaty (2022) yang menyatakan bahwa mayoritas petani padi mengikuti AUTP karena khawatir gagal panen.

Peran PPL dan kelompok tani sangat penting pada implementasi program AUTP, mulai tahap sosialisasi, implementasi program, hingga pada saat pembayaran premi dan proses klaim asuransi. Para

petani sangat mengandalkan PPL dalam proses ini. Kegiatan-kegiatan sosialisasi resmi yang diadakan oleh PPL telah dilakukan sebanyak lima hingga enam kali, sementara sosialisasi secara informal terus berlangsung sepanjang waktu. Secara keseluruhan, pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah Kecamatan Kapas berjalan baik dan memberikan manfaat bagi petani. Para petani sangat berharap bahwa dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), kesejahteraan mereka dapat terus meningkat.

Menurut petani yang menjadi responden, terdapat beragam kelebihan dan kekurangan dalam implementasi Program AUTP di wilayah Kecamatan Kapas. Kelebihan yang dinyatakan oleh petani peserta Program AUTP meliputi: menolong petani guna melanjutkan usaha taninya jika mengalami gagal panen karena bencana, mengurangi kerugian-petani padi akibat terjadinya kerusakan atau kegagalan panen, meningkatkan kesejahteraan dan memberi semangat para petani, memungkinkan petani untuk melakukan usaha tani pada musim selanjutnya, membantu petani untuk melanjutkan pola tanam berikutnya, serta memberikan perlindungan terhadap modal usaha pertanian yang akan datang. Selain itu, kelebihan lainnya adalah premi yang rendah, sehingga mudah dijangkau oleh petani untuk membayarkannya.

Sementara itu, kekurangan-kekurangan yang dikatakan oleh para petani yang sudah menjadi peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) diantaranya: peserta wajib menjadi anggota yang aktif dalam kelompok tani, serta petani wajib mematuhi aturan serta persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang dinilai cukup banyak.

3.2.2. Keikutsertaan Petani dalam Program AUTP di Kecamatan Kapas

Keikutsertaan petani adalah faktor krusial dalam pelaksanaan AUTP. Jika tidak ada keikutsertaan petani padi, program AUTP tidak dapat terlaksana. Ketika jumlah petani padi yang aktif pada program AUTP ini semakin banyak, maka tujuan AUTP untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi oleh petani dalam usahanya dapat tercapai. Alasan dan pemahaman yang dimiliki oleh petani akan memengaruhi persepsinya pada program AUTP dan berdampak pada pengembangan serta kesuksesan program AUTP di masa depan.

Dalam penelitian ini, pengamatan terhadap keikutsertaan petani dianalisis berdasarkan beberapa topik data terkait AUTP, yaitu:

a. Pemahaman Para Petani Mengenai Program AUTP

Pada keikutsertaan para petani dalam Program AUTP, penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang program tersebut. Informasi mengenai AUTP diperoleh oleh petani dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro serta dari PPL yang bertugas di wilayah Kecamatan Kapas. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan menghadirkan ketua kelompok tani maupun gabungan kelompok tani ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro sebagai wakil, karena terbatasnya waktu maupun tempat untuk melakukan sosialisasi langsung kepada setiap petani. Kemudian, ketua kelompok tani bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait AUTP ke anggota kelompok tani mereka. Selain itu, sosialisasi yang telah dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) diimplementasikan melalui pertemuan langsung antar Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dengan para petani.

Kelompok tani di wilayah Kecamatan Kapas yang terlibat pada program AUTP masih memiliki kekurangan dalam pemahaman mereka tentang langkah-langkah yang terlibat dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Meskipun anggota kelompok tani tersebut menyadari bahwa mereka telah didaftarkan untuk menjadi peserta AUTP dan telah membayarkan premi dihitung berdasarkan dengan luas dari lahan sawah yang mereka miliki, namun mereka masih belum memahami sepenuhnya semua tahapan dalam program AUTP dan pentingnya peran serta mereka dalam program ini. Ini menjadi penting agar petani dapat mengenali pentingnya asuransi dalam usaha pertanian padi mereka. Dalam implementasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas, sosialisasi tentang program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dilakukan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Kapas. Namun, kurangnya frekuensi sosialisasi mungkin terjadi karena PPL sebagai penyampai informasi tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Situasi ini sejalan dengan pandangan Elhusna *et al.*, (2019) yang mencatat bahwa meskipun petani dibantu oleh

Ketua Kelompok Tani dan PPL dalam proses pendaftaran dan klaim, namun mereka hanya mengetahui jumlah premi yang harus mereka bayarkan.

Tabel 4. Pemahaman Petani yang menjadi Responden dalam Program AOTP di Wilayah Kecamatan Kapas.

No.	Pemahaman Petani tentang AOTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani yang menjadi responden kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang proses pendaftaran sebagai peserta dalam Program AOTP, karena dalam proses pelaksanaan pendaftaran mereka dibimbing ketua kelompok tani.	21	42
2	Hampir semua petani yang menjadi responden mengetahui jumlah premi yang harus mereka bayarkan.	46	92
3	Petani yang menjadi responden kurang memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pengajuan klaim ke pihak Asuransi, sebab mereka banyak ditolong ketua kelompok tani dan PPL.	26	52

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

b. Motivasi Petani Bergabung pada AOTP

Berdasarkan hasil pertanyaan dengan 50 petani yang menjadi peserta AOTP mengenai alasan mereka mengikuti program ini, beberapa motif muncul. Pertama, sebagian petani menyatakan bahwa mereka bergabung dalam AOTP karena menyadari pentingnya perlindungan asuransi dalam aktivitas pertanian mereka. Mereka meyakini bahwa dengan menjadi peserta asuransi, mereka dapat mendapatkan perlindungan finansial ketika menghadapi kejadian tak terduga seperti bencana alam atau serangan hama pada tanaman mereka. Klaim yang mereka ajukan kepada perusahaan asuransi diharapkan dapat memberikan kompensasi yang dapat dipergunakan untuk modal untuk musim tanam berikutnya, sehingga mereka merasa lebih aman dan tidak terlalu merugi saat mengalami kegagalan panen.

Masih banyak petani yang terlibat dalam program AOTP tidaklah karena kesadaran pribadi, tetapi lebih karena mengikuti jejak petani lain, dan hanya sedikit dari mereka yang benar-benar menyadari manfaat penting dari AOTP. Situasi ini dapat terjadi dikarenakan mayoritas petani padi yang terlibat dalam program tersebut menganggap keikutsertaan dalam AOTP sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi sebagai anggota dari kelompok tani. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawaty (2022), yang mencatat bahwa masih banyak petani yang bergabung dengan AOTP bukan karena kesadaran pribadi.

Tabel 5. Motivasi Petani Responden Bergabung dalam program AOTP di Kecamatan Kapas

No	Motivasi Petani mengikuti AOTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani mengambil bagian pada program AOTP karena mereka memiliki pemahaman sendiri tentang betapa pentingnya asuransi dalam menjalankan kegiatan usaha tani mereka.	13	26
2	Petani merasa termotivasi untuk bergabung dalam program AOTP karena mereka menganggap premi yang harus dibayarkan cukup terjangkau.	18	36
3	Petani turut serta dalam AOTP karena ada juga petani di sekitar mereka yang ikut serta dalam program tersebut.	18	36
4	Petani mengambil bagian dalam AOTP karena mereka telah menghadapi kegagalan panen di masa lalu, sehingga mereka ingin mengurangi risiko kerugian dalam usaha pertanian mereka.	9	18

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

c. Hambatan yang Dihadapi Petani dalam Mengikuti Program AOTP

Dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP), petani peserta asuransi mengalami beberapa kendala. Menurut hasil pertanyaan dengan 50 petani peserta AOTP, mereka menyatakan keberatan terkait persyaratan klaim. Petani merasa kesulitan karena harus menunggu kerusakan lahan mencapai 75% per petakan sebelum dapat mengajukan klaim. Mereka juga merasa bahwa premi yang dibayarkan menjadi sia-sia karena tidak dapat mengajukan klaim meskipun kerusakan belum mencapai ambang tersebut. Pendapat ini sesuai dengan temuan yang diungkapkan oleh Sari (2017), yang menunjukkan bahwa petani merasa terhambat dengan persyaratan bahwa kerusakan harus mencapai 75% untuk dapat mengajukan klaim.

Tabel 6. Hambatan yang Dihadapi Petani Responden dalam mengikuti program AOTP

No	Hambatan yang Dihadapi Petani saat mengikuti AOTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani yang menjadi responden tidak setuju dengan persyaratan bahwa kerusakan lahan harus mencapai setidaknya 75% per petakan sawah agar dapat mengajukan klaim.	35	70
2	Ketika kerusakan atau gangguan hama terjadi di lahan petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) menyarankan untuk mengendalikan kerusakan tersebut. Dampaknya, petani tidak dapat mengajukan klaim dan merasa bahwa partisipasi mereka dalam AOTP menjadi sia-sia.	18	36
3	Petani merasa tidak setuju dengan proses di mana uang ganti rugi (klaim) diberikan terlebih dulu kepada kelompok tani saat menerima klaim, karena mereka merasa wajib memberikan <i>fee</i> kepada ketua dari kelompok tani tersebut.	6	12

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

d. Proses Klaim pada Peserta AOTP

Klaim merupakan permintaan penggantian kerugian finansial yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai akibat dari bencana yang mengakibatkan kerugian. Dalam program AOTP, klaim yang diberikan senilai Rp 6.000.000,00 per hektar per MT. Klaim ini diberikan ke peserta AOTP apabila telah terjadi bencana kekeringan, banjir, atau gangguan OPT dengan syarat: i) umur tanaman padi telah melebihi 10 HST, ii) usia padi telah melebihi 30 hari, dan iii) intensitas terjadinya kerusakan serta luas

lahan yang mengalami kerusakan hingga $\geq 75\%$ di setiap luas. Proses pembayaran klaim dilakukan paling lama empat belas hari kalender semenjak BA hasil pemeriksaan kerusakan.

Dalam implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), bagi petani yang telah mendapatkan klaim sebelumnya tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah pengajuan klaim. Mereka mendapat banyak bantuan dari ketua kelompok tani dan PPL di Kecamatan Kapas. Akan tetapi, ada petani peserta yang belum sekalipun menerima klaim merasa keberatan karena harus mengalami kerusakan mencapai intensitas sebesar 75%. Mereka merasa dirugikan ketika kerusakan lahan sudah mencapai lebih dari 50%, tetapi mereka belum dapat mengajukan klaim kepada pihak AUTP. Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Sari (2017), menyatakan bahwa para petani yang telah menerima klaim sebelumnya tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pengajuan klaim karena bantuan yang diberikan oleh PPL.

Tabel 7. Proses Klaim pada Petani yang Menjadi Responden pada Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas.

No.	Proses Klaim Program AUTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Dari jumlah petani yang menjadi responden, sembilan di antaranya sudah pernah mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi. Dalam proses penuntasan klaim berlangsung lancar karena ada bantuan yang diberikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kepada petani selama mereka mengurus proses klaim tersebut.	9	18
2	Pembayaran ganti rugi atau klaim kepada petani harus dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari dari terbitnya BA hasil kerusakan tanaman, dalam hal ini, petani yang telah menerima klaim sebelumnya tidak menemui kendala karena pembayaran klaim dilakukan tepat waktu.	9	18

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah Kecamatan Kapas, dimulai semenjak tahun 2015, telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih banyak petani di Kecamatan Kapas yang belum memahami sepenuhnya tahapan-tahapan dalam program AUTP. Mereka mengalami ketidaknyamanan karena harus menunggu hingga kerusakan pada lahannya mencapai 75% dari luas yang diajukan sebelum dapat mengajukan klaim. Para petani merasa frustrasi karena meskipun kerusakan belum mencapai ambang tersebut, mereka tidak dapat mengajukan klaim kepada pihak asuransi, yang membuat pembayaran premi terasa kurang berarti bagi mereka.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada petani dengan cara langsung dan intensitas yang tinggi dan menggunakan cara yang tepat untuk menambah pemahaman pada petani tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) serta kesadaran petani akan manfaat program AUTP sebagai perlindungan terhadap risiko gagal panen. Kedua, pemerintah bersama pihak terkait dalam implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) perlu menangani berbagai kendala yang timbul, termasuk mempertimbangkan kembali ketetapan pihak asuransi tentang ketentuan luas kerusakan yang dijamin, yang saat ini minimal 75%, karena dianggap memberatkan petani. Selain itu, penambahan tenaga kerja diperlukan untuk melakukan sosialisasi ke petani mengenai pentingnya mengikuti AUTP dan memfasilitasi proses pengurusan klaim AUTP bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024, September 18). Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Retrieved from <https://bojonegorokab.bps.go.id/statictable/2015/03/24/82/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bojonegoro.html>.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023, August 21). Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun Anggaran 2023. Retrieved from <https://psp.pertanian.go.id/storage/1431/PEDUM-AUTP-2023-FINAL.pdf>.
- Elhusna F, Noer M & Yuerlital. 2019. Analisis Keikutsertaan Petani Dalam Asuransi Usahatani Padi (AUTP) Di Kecamatan Pariaman Timur. *Josesta*, Vol. 1, No. 2, p. 58-67.
- Fatmawaty. 2022. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Padi Pada Program Asuransi Pertanian Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono. (Tesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022) Diakses dari https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/24502-Full_Text.pdf.
- Sari IK. 2017. Studi Persepsi Penanggulangan Kerugian Usaha Tani Padi Melalui Asuransi Pertanian (Studi Kasus pada Lahan sawah di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro). Diakses dari (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3676>
- Satu Data Indonesia. (2023, September 5). Data Penduduk Berdasarkan Usia. from <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.html@detail=data-usia-penduduk>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Retrieved from https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=.
- Yusuf, M. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana. Jakarta . Retrieved from <https://www.scribd.com/document/488334763/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-dan-Penelitian-Gabungan-by-Muri-Yusuf-z-lib-org#>.

Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 4P pada Keputusan Pembelian Beras Merah pada Pasar Modern di Kabupaten Bojonegoro

Devita Ayu Nindi Niken Ardila¹, Endang Siti Rahayu¹, Heru Irianto^{1,2}

¹Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

²Pusat Studi Pendampingan Koperasi Dan UMKM LPPM UNS

Email : devitaayunindinikena@student.uns.ac.id

Abstract: The goal of this research is to examine the manner in which the marketing mix affects decisions about brown rice and what factors are most important when making brown rice product purchases in the Bojonegoro Regency. The descriptive approach of research was used in this investigation. The study's population is brown rice consumers in the modern market in Bojonegoro Regency. In this research, 100 respondents served as the sample size, and the accidental sampling technique was used for sampling. Multiple regression analysis is the technique of analysis used. The findings demonstrated that the elements of the marketing mix made up of product variables (X1) the choice factors (Y) related to the purchasing of brown rice were significantly influenced by price (X2), location (X3), and promotion variables (Y), while the dominant influential variable was the price variable (X2).

Keywords: purchase decision, Product, Price, Promotion and location

Abstrak: Tujuan penyelidikan ini guna mengetahui bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan konsumen terhadap beras merah dan bagaimana faktor terpenting yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli barang beras merah di Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Partisipan pada penelitian ini yaitu konsumen beras merah di pasar kekinian Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan Accidental Sampling dipakai pada penelitian ini dengan memilih sampel sejumlah 100 responden. Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang digunakan. Hasil penelitian membuktikan jika variabel bauran pemasaran yang terdiri dari variabel produk (X1), harga (X2), lokasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian beras merah (Y), dan variabel promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian beras merah (Y), sedang variabel yang berpengaruh yaitu variabel harga (X2).

Kata Kunci: keputusan pembelian, produk, harga, lokasi dan promosi

1. PENDAHULUAN

Tujuan pertumbuhan sektor pertanian adalah untuk memenuhi kebutuhan global akan bahan baku industri atau memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus meningkatkan output global secara berkelanjutan. Meningkatkan produksi pertanian merupakan tujuan pembangunan pertanian. Hal ini meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, dan membantu negara memenuhi kebutuhan pangan dan industri, menyediakan lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong kesetaraan di pasar (Sari dan Handayani, 2017).

Sumber daya alam berlimpah dan tersebar luas di Indonesia, dan dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan negara (Darsan, 2021). Konsumsi nasi putih harian lebih tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Padahal, masih banyak jenis beras lain, seperti beras merah, yang memiliki warna, rasa, dan nilai gizi yang beragam. Beras merah dikatakan lebih sehat dan membantu penurunan berat badan. Mawaddah dkk. (2022) mendefinisikan beras merah sebagai beras yang kulitnya rusak (tanpa pemolesan). Lapisan luar kulit, atau lapisan luar beras merah, mempunyai arti penting karena dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah pangan, gizi, dan keuangan, khususnya di Indonesia.

Menurut Basu Swastha, dalam Firmansyah (2019) strategi pemasaran merupakan suatu bentuk paduan rancangan secara keseluruhan yang luas dan lengkap yang digunakan perusahaan guna

menggapai tujuan. dengan memberikan nilai yang tinggi terhadap produk unggulan perusahaan, menyesuaikan harga dengan kualitas barang yang disediakan, memilih lokasi yang prima, memaksimalkan promosi sesuai dengan permintaan konsumen, dan memperhatikan keberadaan toko ketika menawarkan jasa secara langsung maupun tidak langsung. Selain lingkungan dan kemudahan konsumen dalam bertransaksi, strategi bauran pemasaran bertujuan untuk mencapai hasil terbaik (Ahmad Zikri, 2022). Jika strategi bauran pemasaran berhasil diikuti, konsumen akan mampu membuat penilaian yang tepat mengenai pembelian mereka dalam skenario apa pun.

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Jawa Timur, khususnya Kabupaten Bojonegoro, memberikan pasar yang prospektif bagi perusahaan ritel kontemporer. Berdasarkan informasi dari Disperindagkop UMKM Kabupaten Bojonegoro diperkirakan akan menyambut sekitar empat pedagang kekinian pada tahun 2022. Terbukti dari banyaknya pengecer kekinian yang bermunculan dengan tujuan tersebut. Untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan, terdapat persaingan yang ketat antar bisnis ritel saat ini. Para pengecer ini bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar terbesar dan loyalitas pelanggan sebanyak mungkin. -Kesepakatan yang bagus. Kota Bojonegoro adalah rumah bagi empat mal komersial yang cukup besar: mal Karunia Damai Sentosa (KDS), toko Samudra, toko Lion Super Indo, dan Supermarket Bravo. (Disperindagkop UMKM, 2022).

Kabupaten Bojonegoro punya struktur masyarakat yang beragam. Keberagaman ini meliputi budaya, gaya kehidupan, pendidikan dan pekerjaan serta mencerminkan tingkat ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman yang tercipta tentu membawa dampak warga Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari kesukaan dan tingkat kepuasannya terhadap suatu produk, termasuk konsumsi beras merah. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini menjadikan penelitian ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan tentang teknik pemasaran yang cocok untuk promosi produk beras. Selain itu, Pasar Modern Bojonegoro merupakan salah satu pasar Kabupaten Bojonegoro terletak di jantung kabupaten Bojonegoro dan merupakan pusat Kabupaten Bojonegoro Artinya mempunyai lokasi yang strategis. Penjualan beras merah juga akan dibatasi karena beras jenis ini hanya dijual di tempat tertentu seperti supermarket. Beras merah memiliki ceruk pasar tersendiri karena hal ini. Tidak mungkin memisahkan permintaan konsumen akan beras dari partisipasi mereka dalam mengenali dan menilai produk sebelum mengambil keputusan pembelian. Perilaku pelanggan yang beragam memungkinkan pemilik usaha untuk memahami elemen-elemen yang mempengaruhi pilihan membeli beras merah dan keputusan membeli beras merah itu sendiri. Untuk mengkaji beberapa ide strategi pemasaran yang diperkirakan berdampak pada pilihan pembelian, peneliti melihat sejumlah faktor bauran pemasaran. Variabel-variabel ini terdiri dari beberapa komponen dan mencakup variabel produk, harga, promosi, dan lokasi (Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang akan dipakai pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif kuantitatif bertujuan agar memperoleh data yang valid, yaitu mampu menggambarkan kondisi lapangan dan responden. Metode penentuan lokasi penelitian dilaksanakan dengan metode *purposive*. Menurut Sugiyono (2022), metode *purposive* merupakan metode pemilihan lokasi penelitian secara sengaja dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan latar belakang masalah yang diteliti. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pasar Modern yang dipilih dalam proses penelitian yang berlokasi di Supermarket di Kabupaten Bojonegoro yaitu Bravo Supermarket, Lion Superindo, Samudera Supermarket dan Karunia Damai Sentosa (KDS) Mall dengan pertimbangan bahwa ke empat pasar modern tersebut merupakan supermarket penjual beras merah yang juga menjadi toko kelontong pilihan warga Kabupaten Bojonegoro sehingga memberikan kemudahan akses terhadap pelanggan yang akan dijadikan subjek penelitian.

Data primer dan sekunder dipakai pada penelitian ini. Dengan memakai kuesioner sebagai instrumen dan serangkaian pertanyaan untuk setiap wawancara, data primer dikumpulkan dari responden. Unit analisis keseluruhan yang karakteristiknya akan diestimasi adalah populasi. Pelanggan atau pembeli beras merah yang berbelanja di Pasar Modern Kabupaten Bojonegoro merupakan demografi penelitian ini

Metode penentuan jenis sampel yang akan dipakai pada penelitian ini yakni metode *Accidental Sampling*, Sugiyono (2016) mengartikan *sampling insidental* atau disebut *Accidental Sampling*, yaitu

suatu teknik pemilihan sampel yang hanya didasarkan pada kebetulan saja. Dengan kata lain, pelanggan mana pun yang kebetulan memenuhi kriteria peneliti, yaitu seseorang yang pernah membeli beras merah di Kabupaten Bonjonegoro, dapat dijadikan sampel. Rumus Lemeshow digunakan dalam penelitian ini (Veronica, 2020). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ukuran populasi penelitian tidak jelas. Rumus Lemeshow adalah sebagai berikut:

Rumus Lemeshow:

$$n = \frac{z^2 p(1-p)}{d^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

z : Nilai standart = 1.96

p : Maksimal estimasi = 50% =0.5

d : *alpha* (0,10) atau *sampling error* =10%

Jumlah sampel yang diperoleh dari rumus Lemeshow ialah sebagai berikut:

$$n = \frac{1,96^2 0,5(1-0,5)}{0,10^2}$$

$$n = \frac{0,9604}{0,001}$$

$$n = 96,04$$

Hasilnya, peneliti akan mengumpulkan hingga 100 responden dari ukuran sampel minimum 96 yang diperlukan untuk penelitian ini. Rumus Lemeshow digunakan karena populasi sasarannya terlalu besar dan jumlahnya berbeda-beda. Karena populasi sasaran terlalu besar dan jumlahnya berbeda-beda, maka digunakan rumus Lemeshow.

Pengukuran data pada penelitian ini berdasar dengan jawaban responden melalui pernyataan yang sudah disediakan dalam kuesioner. Peneliti mengajukan pernyataan kepada konsumen terkait karakteristik sampel dan juga pernyataan yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Pengukuran jawaban responden menggunakan skala likert. Skala jawaban di atas mengikuti jawaban skala likert, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Penilaian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Skala likert

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2018

Pengaruh bauran pemasaran terhadap pilihan pembelian beras merah di Kabupaten Bonjonegoro diselidiki melalui penggunaan analisis regresi linier berganda dan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menulis analisis regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Keputusan Pembelian Konsumen

a = Konstanta

b₁ – b₄ = Koefisien regresi

X₁ = produk

X₂ = harga

X₃ = lokasi

X₄ = promosi

e = *error*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Uji Instrumen

1) Uji Validitas

Dengan menggunakan pendekatan korelasional dan program SPSS 20, peneliti melakukan uji validitas.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R _{hitung}	R _{Tabel}	Keterangan
Produk (X1)	X1.1	0,425	0,165	Valid
	X1.2	0,502	0,165	Valid
	X1.3	0,678	0,165	Valid
Harga (X2)	X2.1	0,687	0,165	Valid
	X2.2	0,610	0,165	Valid
	X2.3	0,539	0,165	Valid
	X2.4	0,419	0,165	Valid
	X2.5	0,608	0,165	Valid
Tempat (X3)	X3.1	0,346	0,165	Valid
	X3.2	0,435	0,165	Valid
	X3.3	0,768	0,165	Valid
	X3.4	0,287	0,165	Valid
Promosi (X4)	X4.1	0,354	0,165	Valid
	X4.2	0,465	0,165	Valid
	X4.3	0,266	0,165	Valid
Keputusan Pembelian (Y)	Y1	0,783	0,165	Valid
	Y2	0,322	0,165	Valid
	Y3	0,417	0,165	Valid
	Y4	0,511	0,165	Valid
	Y5	0,433	0,165	Valid

Sumber : Data Primer, 2024

2) Uji Reliabilitas

Tabel.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Produk	0,709	Reliabel
Harga	0,653	Reliabel
Tempat	0,661	Reliabel
Promosi	0,729	Reliabel
Keputusan Pembelian	0,641	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2024

3.2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,77324838
	Absolute	0,050
Most Extreme Differences	Positive	0,043
	Negative	-0,050
Kolmogorov-Smirnov Z		0,465
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,982

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Hasil uji normalitas signifikan sebesar $0,982 > 0,05$ terlihat pada Tabel 4, membuktikan jika nilai residu berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standard id Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	14,592	1,814		8,045	0,000		
PRODUK	0,202	0,066	0,345	3,051	0,003	0,338	2,961
HARGA	0,448	0,102	0,498	4,410	0,000	0,338	2,961
TEMPAT	0,398	0,008	0,422	4,124	0,000	0,338	2,961
PROMOSI	0,217	0,130	0,371	3,122	0,000	0,338	2,961

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Melihat hasil pada Tabel 5, hasil perhitungan toleransi tidak memasukkan satu pun variabel independen yang mempunyai nilai toleransi antara 0,10 hingga 0,338. Selain itu, telah diukur *variance inflation factor* (VIF) yang memiliki nilai 2,268 untuk X2. Temuannya menunjukkan bahwa tidak terdapat fluktuasi VIF variabel independen. Diperoleh kesimpulan jika model regresi tidak memasukkan banyak variabel independen berdasarkan temuan pengukuran toleransi dan VIF.

3) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,041	1,787		2,262	0,026
1 PRODUK	-0,092	0,065	-0,265	-1,410	0,162
HARGA	0,104	0,100	0,195	1,040	0,301
TEMPAT	0,138	0,133	0,122	1,410	
PROMOSI	0,031	0,141	0,155	1,040	

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Dilihat dari Tabel 6, dapat diketahui *coefficients* tersebut nilai sig dari variabel kualitas sebesar 0,162 > 0,05, variabel harga sejumlah 0,301 > 0,05 dari 2 variabel tersebut nilai sig > 0,05 maka tidak adanya heteroskedastisitas.

3.3. Analisis Linear Berganda

Metode analisis yang populer guna memperoleh hubungan antara pengaruh variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) adalah uji regresi linier berganda. Rumusnya dapat digunakan untuk menghitung metode linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_e$$

Tabel 7. Hasil Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	23,632	3,139		7,529	0,000
1 PRODUK	0,434	0,115	0,653	3,780	0,041
HARGA	0,365	0,176	0,358	2,074	0,000
TEMPAT	0,422	0,134	0,422	2,431	0,002
PROMOSI	0,319	0,146	0,368	1,419	0,003

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Dari persamaan di atas, maka:

1. Nilai positif sejumlah 23,632 diberikan pada variabel konstan (a). Apabila terdapat tanda positif maka dampak antara variabel independen dan dependen bersifat satu arah. Hal ini membuktikan nilai agresivitas pajak sebesar 23,632 jika seluruh variabel independen seperti produk (X1), harga (X2), lokasi (X3), dan promosi (X4) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan.
2. Variabel produk (X1) mempunyai nilai koefisien regresi sejumlah 0,434. Angka tersebut membuktikan jika faktor independen lainnya dianggap konstan, maka kepuasan pembelian akan meningkat sejumlah 0,434 untuk setiap kenaikan satu satuan pada variabel keputusan pembelian.
3. Variabel harga (X2) mempunyai nilai koefisien regresi sejumlah 0,365. Hasil ini membuktikan jika variabel harga dan variabel yang mempengaruhi pilihan pembelian beras merah memiliki hubungan yang positif. Ini membuktikan jika walaupun pilihan membeli beras merah akan naik sebesar 0,365 jika variabel harga naik sebesar 1%. dengan asumsi stabilitas variabel lainnya.

4. Variabel lokasi (X3) mempunyai nilai koefisien regresi positif sejumlah 0,422. Hal ini membuktikan faktor independen lainnya tetap, maka pilihan membeli beras merah akan meningkat sebesar 0,422 jika variabel lokasi meningkat sebesar 1%. Apabila terdapat tanda positif maka dampak antara variabel independen dan dependen bersifat satu arah.
5. Variabel promosi (X4) mempunyai nilai koefisien regresi positif sejumlah 0,319. Hal ini membuktikan jika dengan asumsi variabel independen lainnya tetap maka variabel keputusan pembelian beras merah adalah sebesar 0,319 jika terjadi kenaikan sebesar 1%. Apabila terdapat tanda positif maka dampak antar variabel independen dan dependen bersifat satu arah.

3.4. Uji Determinasi

Adapun uji determinasi. Uji Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,948 ^a	0,898	0,896	1,29917

Dari tabel uji determinasi diatas, diperoleh skor Adjusted R Square model rangkuman sejumlah 0,896 yang menunjukkan jika pengaruh variabel independen, seperti faktor kualitas pelayanan, pengalaman, sdm, tampilan fisik dan strategi lainnya.

3.5. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan jika bauran pemasaran meliputi produk (X1), harga (X2), lokasi (X3), dan promosi (X4) bila digabungkan (bersamaan) mempunyai dampak yang besar terhadap pilihan yang dibuat konsumen mengenai apa yang akan dibeli. Di Kabupaten Bojonegoro, faktor-faktor tersebut (4P) terbukti mempunyai dampak besar terhadap pilihan pembelian pelanggan terhadap barang beras merah. Beras merah yang ditawarkan empat toko di Kabupaten Bojonegoro Supermarket Bravo, Lion Superindo, Supermarket Samudera, dan Karunia Damai Sentosa dibanderol dengan harga beras merah paling kompetitif keempat di wilayah yang banyak dilalui orang. Hal ini dalam kondisi sangat baik. Diskon harga sering kali ditawarkan sebagai promosi, dan pelanggan dapat memilih dari sejumlah paket berbeda. Temuan penelitian ini mendukung teori yang dicetuskan oleh Kotler dan Keller (2009), yang mendefinisikan bauran pemasaran sebagai: kumpulan alat pemasaran (bauran pemasaran) yang mungkin dipakai perusahaan di pasar sasaran untuk memenuhi tujuan pemasarannya. Produk, penetapan harga, distribusi (lokasi), dan promosi merupakan elemen-elemen yang membentuk bauran pemasaran.

Berdasarkan penelitian, pilihan konsumen dalam membeli beras merah sangat dipengaruhi oleh karakteristik produk dengan indikator seperti merek produk, kualitas produk, variasi produk, dan desain produk. Hal ini selaras oleh penyelidikan yang dilaksanakan tahun 2016 oleh Indira Rachmawati dan Sevrila Amanda Sevrillia yang menemukan bahwa 54,9% keputusan konsumen membeli susu Zee dipengaruhi oleh produknya. Produk dan pilihan membeli susu Zee memiliki koefisien regresi positif yang menunjukkan bahwa kenaikan produk senilai 1% akan mengakibatkan peningkatan minat membeli susu Zee senilai 54,9%. Supermarket di Kabupaten Bojonegoro yang menjual barang berwarna merah antara lain Bravo Supermarket, Lion Superindo, Samudera Supermarket, dan Karunia Damai Sentosa (KDS) Mall. Toko-toko ini bangga dengan merek produk, kualitas, variasi, dan desainnya, yang semuanya dipandang sesuai dengan permintaan penduduk setempat. Perbedaan ukuran wadah yang ditawarkan untuk produk beras merah di pasaran menunjukkan hal ini. Oleh karena itu diharapkan menjadi lebih baik, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan semakin meningkatkan minat pembelian beras merah.

Berdasarkan hasil pengujian, pembelian beras merah di supermarket Kabupaten Bojonegoro Supermarket Bravo, Lion Superindo, Supermarket Samudera, dan Mall Karunia Damai Sentosa (KDS) diketahui dipengaruhi secara signifikan oleh harga. Artinya, ketika harga kompetitif, secara keseluruhan akan lebih banyak masyarakat yang memilih membeli beras merah. penting. Pilihan pembelian beras merah di toko-toko Kabupaten Bojonegoro seperti Supermarket Bravo, Lion Superindo, Supermarket Samudera, dan Mall Karunia Damai Sentosa (KDS) akan dipengaruhi oleh perubahan harga. Sama seperti penelitian pada tahun 2016 oleh Indira Rachmawati dan Sevrila Amanda Sevrillia yang

menemukan bahwa nilai koefisien regresi harga sejumlah 28,6%. Pilihan membeli susu Zee mempunyai koefisien regresi negatif (-) yang menunjukkan bahwa minat membeli susu Zee tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembelian beras merah di supermarket Kabupaten Bojonegoro Supermarket Bravo, Lion Superindo, Supermarket Samudera, dan Mall Karunia Damai Sentosa (KDS) dipengaruhi secara signifikan oleh promosi. Hal ini berarti akan terjadi peningkatan nyata dalam pembelian beras merah sebagai respons terhadap peningkatan iklan produk. Selaras dengan penelitian tahun 2016 oleh Sevrila Amanda Sevrillia dan Indira Rachmawati yang menemukan bahwa 91,0% pilihan konsumen dalam membeli susu Zee dipengaruhi oleh promosi. Koef regresi promosi bernilai positif, menunjukkan bahwa peningkatan promosi senilai 1% akan menghasilkan peningkatan minat pembelian susu Zee senilai 91,0%.

Temuan analisis linier berganda membuktikan jika faktor-faktor seperti produk, harga, lokasi, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap pilihan pembelian beras merah di Kabupaten Bojonegoro yaitu di Supermarket Bravo, Lion Superindo, Supermarket Samudera, dan Mall Karunia Damai Sentosa (KDS). Berdasarkan hasil persamaan regresi diketahui variabel harga paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian beras merah di Kabupaten Bojonegoro yaitu Bravo Supermarket, Lion Superindo, Samudera Supermarket dan Karunia Damai Sentosa (KDS) Mal. Hal ini dikarenakan konsumen cenderung membandingkan harga terlebih dahulu dalam melakukan pembelian beras merah di Kabupaten Bojonegoro yaitu Bravo Supermarket, Lion Superindo, Samudera Supermarket dan Karunia Damai Sentosa (KDS) Mal. Perbandingan harga yang cukup jauh akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk beras merah di Kabupaten Bojonegoro yaitu Bravo Supermarket, Lion Superindo, Samudera Supermarket dan Karunia Damai Sentosa (KDS) Mal,

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan :

- a. Variabel bauran pemasaran meliputi variabel produk (X1), harga (X2), promosi (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian beras merah (Y) dan variabel X4 tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian beras merah (Y)
- b. Variabel yang paling berpengaruh dominan yaitu variabel produk (X1).

5. SARAN

Adapun saran dari penulis yaitu:

- a. Perlunya peningkatan terhadap pemasaran produk pada Supermarket di Kabupaten Bojonegoro yaitu Bravo Supermarket, Lion Superindo, Samudera Supermarket dan Karunia Damai Sentosa (KDS) untuk meningkatkan pilihan pembelian dengan memperkuat barang-barang mereka.
- b. Sebaiknya Supermarket di Kabupaten Bojonegoro yaitu Bravo Supermarket, Lion Superindo, Samudera Supermarket dan Karunia Damai Sentosa (KDS) dapat menghasilkan iklan produk yang lebih efektif yang menyertakan kutipan yang mengomunikasikan pesan secara alami dan menarik secara visual serta menyehatkan, semuanya dengan harga yang relatif masuk akal bagi calon pelanggan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Darsan, D., & Dawud, M. Y. (2021). Strategi Pemasaran Beras Pada Agroindustri Di Kabupaten Bojonegoro. *VIABEL: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian*, 15(1), 65-71.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah. (2024, Februari 29). <https://dindag.bojonegorokab.go.id/>

Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016. *Marketing Managemen*, 15th Edition, Pearson Education, Inc.

Mawaddah, F., Kusnarta, I. G. M., Silawibawa, I. P., & Sutriyono, S. (2022). Pengaruh Aplikasi Limbah Padi dan Tumpangsari dengan Kacang Tanah Terhadap Sifat Biologi Tanah dan Pertumbuhan Padi Beras Merah (*Oryza nivara*) pada Sistem Irigasi Aerobik. *Journal of Soil Quality and Management*, 1(2), 42-51.

- Putra, M. R. A., Dja'far, A., & Firmansyah, H. (2019). Tingkat Penerapan Teknologi Budidaya Beras Merah Di Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Frontier Agribisnis*, 3(2).
- Sari, D. W., Suswadi, S., & Handayani, H. (2017). Analisis Pemasaran Kentang Manis (Ipomeae Batatas L) Pada Kelompok Tani Makmur Di Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Agrineca*, 17(2).
- Suryaningsih, E. L. I. Y. A. (2021). Pengaruh Bauran Pemasaran 4P Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “Cheers” Pada CV Darma Putra Wijaya Di Samarinda. *Universitas Mulawarman Samarinda*.
- Sugiyono, P. D. (2016). Metode Peneliiian. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono, P. D. (2022). Metode Peneliiian. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Veronica, M. S., Ida, I., & Winata, V. T. (2020). Using cash flow ratios to establish a manufacturing bankruptcy prediction model. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 20(2), 114-121.
- Zikri, A., & Harahap, M. I. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Pengiriman Barang terhadap Kepuasan Konsumen pada PT Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumatera. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 923-926.

Kegunaan Kartu Kendali dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Jawik

Ajeng Trismay Pangesti¹, Sri Marwanti², Joko sutrisno³

^{1,3} Program Studi S2 Agribisnis, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutami no 36 Ketingan Surakarta

Email : ajengpangestiku@gmail.com

Abstract: In Jawik Village, Tambakrejo District, Bojonegoro Regency, control cards are used to distribute subsidized fertilizers. The study looked at this practice. The purpose of this study is to determine and assess the usefulness of this control card in distributing fertilizers at a lower cost in Jawik Village, Tambakrejo District, Bojonegoro Regency. Descriptive analysis and discussion of farmers' views on control cards were included in this study. Data collection was carried out through observation, interviews, and analysis of farmers' views on the use of control cards in the distribution of subsidized fertilizers in quantity, type, price, quality, and on time. Farmers who have a control card and membership in a farmer's association are automatically eligible to participate in research. The results showed that the distribution of subsidized fertilizers through control cards was in accordance with existing regulations and followed the guidelines on time, right amount, right type, right quality, and right price. However, there are several challenges such as inappropriate timing and the absence of subsidized fertilizer distribution in Jawik Village.

Keywords : Control Card, Fertilizer distribution, subsidized fertilizer

Abstrak: Pada Desa Jawik, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, kartu kendali digunakan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Studi ini melihat praktik ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai kegunaan kartu kendali ini dalam pendistribusian pupuk dengan biaya lebih murah di Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Analisis deskriptif dan pembahasan pandangan petani terhadap kartu kendali dimasukkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis pandangan petani mengenai penggunaan kartu kendali dalam penyaluran pupuk bersubsidi dalam jumlah, jenis, harga, kualitas, dan tepat waktu. Petani yang memiliki kartu kendali dan keanggotaan dalam asosiasi petani secara otomatis berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu kendali telah sesuai dengan peraturan yang ada dan mengikuti pedoman tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat harga. Namun terdapat beberapa tantangan seperti waktu yang tidak tepat dan tidak adanya distribusi pupuk bersubsidi di Desa Jawik.

Kata kunci: Kartu Kendali, Penyaluran pupuk, pupuk bersubsidi

1. PENDAHULUAN

Salah satu sektor pembangunan yang mempunyai fungsi krusial adalah pertanian. Agar individu dapat mempunyai akses terhadap pangan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka sektor pertanian harus ada (kelompok dasar). Karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, maka menyediakan pangan yang cukup bagi semua orang setiap saat merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan. Perhatian utama pemerintah adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan setiap orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia banyak menghadapi kendala yang sulit dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Akibatnya, isu ketahanan pangan menjadi pusat perhatian dalam pertumbuhan, khususnya di bidang pertanian (Apriyana *et al.*, 2023).

Tujuan dari program subsidi pupuk adalah untuk mendorong penerapan pupuk yang seimbang—baik organik maupun non-organik sesuai dengan pedoman penempatan dan kriteria teknis yang disarankan. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 menguraikan

persyaratan yang harus dipatuhi. untuk mematuhi hal ini. Penggunaan pupuk berdampak pada peningkatan hasil pertanian Indonesia. Zat kimia atau organik yang dikenal sebagai pupuk membantu tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung menyediakan unsur hara yang dibutuhkannya (Fadly *et al.*, 2015). Terjaminnya ketersediaan pupuk dari segi kuantitas, kualitas, dan biaya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait pupuk, seperti kurangnya pupuk bersubsidi. Persoalan struktur pasar yang cenderung oligopoli dan buruknya tata cara distribusi pupuk menjadi akar permasalahannya (Kautsar *et al.*, 2020).

Karena kekurangan pupuk, maka biayanya mahal dan petani sulit membelinya. Hal serupa juga terjadi di Distrik Tonjong; distribusi pupuk yang tidak tepat menyebabkan harga pupuk menjadi lebih tinggi dan menyulitkan petani untuk mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan. Pencapaian tujuan dan target yang telah ditentukan dalam organisasi, aktivitas, atau program apa pun sangat bergantung pada efektivitasnya. Jika tujuannya terpenuhi sesuai yang ditentukan, maka dianggap efektif (Setyawati, 2018). Oleh karena itu, efektivitas diukur dengan seberapa baik hasilnya selaras dengan tujuan yang telah ditentukan. Pemantauan program dapat digunakan untuk menilai apakah program Kartu Tani dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan indikator kemandirian program.

Petani biasanya membagi pupuk yang mereka gunakan menjadi dua kategori: bersubsidi dan non-subsidi. Pupuk yang disubsidi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani lokal disebut pupuk bersubsidi. Pupuk tidak bersubsidi yang dimaksud dengan pupuk yang diperoleh dan didistribusikan tanpa pengawasan pemerintah. Saat ini yang digunakan dalam pertanian adalah beberapa jenis pupuk bersubsidi, antara lain organik, NPK, urea, dan Poska. Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani, khususnya di Kabupaten Bojonegara, dan sebagian masyarakat di setiap daerah memiliki lahan pertanian, maka kebutuhan akan pupuk bersubsidi sangat tinggi. Efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi sangat penting untuk menjamin ketersediaan pupuk pada Harga Eceran Tinggi (HET) yang ditetapkan (Ramlayana *et al.*, 2020).

Penggunaan kartu kendali merupakan salah satu teknik untuk mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi. Tujuan dari kartu kendali pupuk adalah untuk: meminimalkan permasalahan yang ada karena alokasi pupuk saat ini tidak mencukupi karena terbatasnya rekomendasi; membuat petani merasa terlayani dengan baik; dan memperkuat hubungan positif antara kios resmi dan kelompok tani serta anggotanya. Transparansi kios dan Poktan serta anggotanya; pupuk dapat diterima petani sesuai peruntukannya; distribusi lebih terkendali bagi petani penerima (Gito, 2023).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2014 yang mengatur tentang kebutuhan, penyaluran, dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, petani yang mengolah lahan sampai dengan luas 2 (dua) hektar atau petani ikan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar. lahan seluas 1 (2) hektar berhak menerima pupuk bersubsidi. satu) hektar untuk setiap keluarga sepanjang musim tanam. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan saat ini tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pembelian pupuk bersubsidi dilakukan dan disalurkan kepada petani, pembudi daya ikan, dan/atau kelompok petani melalui distributor pada Jalur IV. Hasil penelitian (Deli Anwar, T. Makmur, 2018) Temuan analisa ini mengungkapkan sejumlah permasalahan mendasar yang menyebabkan pupuk diberikan kepada petani dengan biaya yang tidak tepat, jumlah yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat, kualitas yang tidak tepat, dan pengawasan yang tidak memadai. Permasalahan utama pada aspek pengumpulan data adalah penyusunan RDKK yang belum sah, penggunaan pupuk yang melebihi anjuran, dan data jumlah petani dan luas lahan yang tidak dapat diandalkan. Sedangkan hasil penelitian (Fadly *et al.*, 2015) menyatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dinilai efektif dengan menggunakan kartu petani.

Secara umum petani sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk, terutama terkait jenis pupuk yang tersedia, jumlah pupuk yang disalurkan, harga pupuk yang ditetapkan, dan waktu distribusi pupuk yang sering mengalami keterlambatan. Fenomena ini terpantau di Desa Jawik, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Karena banyaknya keluhan dari para petani selama bertahun-tahun, praktik distribusi pupuk bersubsidi ini beberapa kali dipertanyakan. Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu kendali juga merupakan salah satu alat evaluasi efektivitas subsidi pupuk, karena dalam praktiknya pemberian pupuk terkadang masih tertunda atau tidak sesuai dengan RDKK yang telah ditetapkan oleh asosiasi petani. Setiap kios harus membuat kartu kendali.

Karena masih terdapat beberapa toko yang menjual barang dengan harga di bawah harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, maka subsidi pupuk dengan harga eceran tertinggi masih menjadi permasalahan di bidang pelatihan terkait (Radar Bojonegoro, 2023). Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, terlihat adanya perbedaan, khususnya besaran pupuk bersubsidi yang tidak stabil dalam kategori efektif meskipun sudah ada kartu kontrol dan kartu tani.

Setelah melakukan observasi dan membandingkan data dengan penelitian sebelumnya, teridentifikasi adanya kesenjangan penelitian. Kesenjangan ini disebabkan meskipun sudah ada kartu kendali, namun teknik pendistribusian materi pelajaran yang dimaksud masih belum efektif. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar-benar tidak efektif atau masuk dalam kategori efektif. Selain itu, harga eceran yang dijual terkadang melebihi harga eceran maksimum yang ditetapkan pemerintah, dan pupuk yang didistribusikan sesuai dengan RDKK atau biasanya tidak terlihat di kartu kendali masing-masing petani. Hasil penelitian lanjut oleh (Setiawan Abdillah *et al.*, 2022). Aksesibilitas program melihat bahwa kebijakan program kartu tani Kabupaten Pakisjaya kurang memadai dan sulit diperoleh karena seringnya terjadi kesalahan pada mesin EDC untuk kegiatan penebusan pupuk bersubsidi, serta (Rahmawati, 2023) melakukan kajian dan menemukan bahwa kebutuhan petani dapat diatasi dengan penggunaan pupuk bersubsidi, dan distribusi pupuk dinilai efektif. Efisiensi kartu tani dalam memperoleh pupuk bersubsidi ditunjukkan dengan cepatnya pupuk sampai di daerah dan mudahnya membeli pupuk di kios pupuk. Oleh karena itu, kartu kendali yang dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan sebaiknya digunakan untuk pembelajaran. Ketika kartu kendali di kelompok tani masih ditemukan tidak berfungsi, maka distribusinya tidak jelas, artinya tujuan kartu tidak terlaksana dan pupuk yang disuplai tidak digunakan.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menggunakan angka-angka dalam menjelaskan permasalahan secara objektif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. diawali dengan pengumpulan data, penerjemahan data, dan merumuskan kesimpulan untuk menjawab hipotesis yang telah diidentifikasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Arikunto, 2018). Kuesioner digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Desain penelitian kuantitatif dengan teknik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, berkonsentrasi pada temuan dan kesimpulan, serta mendeskripsikan tindakan. Karena observasi menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, maka penelitian kuantitatif dilakukan. Studi ini akan memperjelas cara aspek-aspek yang berbeda berinteraksi satu sama lain (Sugiyono, 2019). Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner dan metode survei.

Distribusi pupuk yang disubsidi dan penggunaan kartu kendali menjadi faktor penelitiannya. Sekelompok petani membuat kartu kendali. Kartu ini berfungsi sebagai pengendali dan pedoman kuota pupuk petani. Pada kartu kendali terdapat catatan alokasi pupuk awal dari RDKK. Unsur-unsur yang menentukan cara pendistribusian dengan biaya lebih rendah antara lain tepat waktu, tepat kuantitas, tepat harga, tepat mutu, tepat lokasi, dan tepat jenis pupuk.

Peneliti menggunakan kuesioner, yaitu instrumen pengumpulan data dengan beberapa penjelasan berdasarkan survei terbuka, untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan berbicara dengan subjek penelitian dengan suara keras. Pengumpulan data langsung di lapangan dengan menggunakan persepsi yang tajam disebut observasi. Selain dokumentasi, mencari informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan faktor penelitian, antara lain buku, jurnal, komposisi, dan catatan tentang topik atau objek kajian. Strategi penelitian utama digunakan di Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo. Untuk memastikan populasi didasarkan pada kriteria tertentu dan jumlah yang dipilih peneliti, pendekatan kuota sampling digunakan dalam pemilihan responden (Kriyantono, 2012). Untuk penelitian ini dikumpulkan tiga puluh sampel dari kelompok tani Desa Jawik. Petani di Desa Jawik berjumlah 385 orang yang memenuhi syarat seperti memiliki kartu kendali untuk bergabung dalam kelompok tani.

Metode analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

2.1. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengolah informasi dan data yang diperoleh dari kuesioner. Data dan informasi akan langsung disajikan dalam bentuk tabel setelah diolah dan disortir sesuai dengan seberapa sebanding tanggapannya. Hasilnya kemudian ditampilkan berdasarkan jumlah peserta. Menurut (Nazir, 2017) Analisis deskriptif adalah metode untuk meneliti individu, kelompok tentang peristiwa, benda, situasi, dan mentalitas terkini. Sederhananya, analisis deskriptif memberikan informasi tentang data yang ada. Analisis ini mengkaji isu-isu sosial dan peraturan yang spesifik pada situasi tertentu. Analisis deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah distribusi pupuk di Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan kebijakan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan yang diterapkan saat ini dalam pembagian pupuk gratis. Dengan demikian, analisis deskriptif mengacu pada proses mencoba menggambarkan suatu situasi, atau topik dan sasaran kajian, dengan menggunakan fakta-fakta yang diketahui saat ini. Prosedur peneliti hanya dengan menulis ulang catatan lapangan atau menyalin hasil yang diambil selama wawancara. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mengetahui apakah Desa Jawik benar-benar telah menerapkan kartu kendali. Penjelasan tentang bagaimana kartu kendali digunakan dalam kelompok tani untuk menebus pupuk.

2.2. Analisis Persepsi Petani dengan Skala Likert

Berdasarkan definisi operasional peneliti, skala likert merupakan alat untuk mengukur pandangan, sikap, atau pendapat individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Skala Likert digunakan dalam memperkirakan jawaban survei yang diberikan kepada responden. Skala ini dimaksudkan untuk mengukur pola pikir, persepsi, dan kesimpulan seseorang. Faktor-faktor yang akan diestimasi diubah menjadi indikator variabel dengan menggunakan Skala Likert. Penanda-penanda ini kemudian digunakan sebagai langkah pertama dalam mengumpulkan instrumen, yang dapat berupa pertanyaan atau penjelasan (Sugiyono, 2019). Penjelasan dalam skala Likert ada dua jenis, yaitu definisi tentang apa yang dimaksud dengan mengukur perspektif positif atau negatif. Macam-macam bentuk survei pernyataan skala likert yang dikeluarkan kepada peserta adalah :

Sangat Setuju (Ss) Diberi Skor	= 5
Setuju (S) Diberi Skor	= 4
Kurang Setuju (Ks) Diberi Skor	= 3
Tidak Setuju (Ts) Diberi Skor	= 2
Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor	= 1

Strategi penelitian utama digunakan di Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo. Untuk memastikan populasi didasarkan pada kriteria tertentu dan kuantitas yang ditentukan oleh peneliti, pendekatan kuota sampling digunakan dalam pemilihan responden (Kriyantono, 2012). Untuk penelitian ini dikumpulkan dua puluh sampel dari masing-masing kelompok tani Desa Jawik. Sebanyak 385 petani di Desa Jawik memenuhi persyaratan, seperti memiliki kartu kendali, untuk bergabung dalam kelompok tani. Responden yang memiliki luas lahan pertanian padi tadah hujan yang sesuai dengan lahan yang tercantum pada data realokasi tahun 2023 wajib memenuhi tujuan studi tertentu.

2.3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Jawik merupakan sebuah wilayah di sisi barat Kabupaten Bojonegoro yang terletak di wilayah Tamakrejo wilayah Barat. Desa Jawik terletak di bagian Selatan Kecamatan Tamakrejo, berbatasan dengan Desa Sukorejo Selatan, Desa Gamongan sebelah Utara, Desa Bakalan sebelah Timur, dan Desa Tanjung sebelah Barat. Luas wilayah Desa Jawik kurang lebih 363,52 hektar, terdiri dari pulau non teknis dan tadah hujan 110,70 hektar, lahan kering 78,72 hektar, lahan hutan 2011 hektar, sawah tadah hujan 110,70 hektar, tanah kas desa 18.170 hektar, dan kuburan 1,2 Ha. (Profil Desa 2020). Penduduk di Desa Jawik berjumlah 2.046 jiwa, termasuk 633 KK. Petani di Desa Jawik yang terdaftar pada Badan Penyuluhan Pertanian berjumlah 548 orang. Para petani yang tergabung dalam RDKK ini dipecah menjadi 4 Kelompok Tani, yakni Sido Dadi Mulyo yang berjumlah 66 petani, Sedyo Makmur yang berjumlah 66 petani, Sedyo Mulyo yang berjumlah 171 petani, dan Sedyo Utomo yang berjumlah 82 petani. total. Dengan total luas lahan 833,85 hektar, Desa Jawik dihuni oleh 385 petani dari berbagai organisasi petani.S

Petani yang sebelumnya telah terdaftar sebagai data RDKK dan tergabung dalam kelompok tani adalah mereka yang memiliki kartu kendali. Mereka biasa mendaftar dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan bukti SPPT tahunan tahun sebelumnya, yakni tahun 2022. BPP kecamatan kemudian memverifikasi informasi petani di aplikasi tersebut. SIMLUHTAN selain menyampaikan informasi peruntukan pupuk petani dan RDKK pada Realokasi Tahun 2023.

2.4. Analisis Persepsi Petani Terhadap Program Distribusi Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Kendali

Tabel 1. Persepsi Petani Terhadap Dampak Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Jenis dampak	
		Kemudahan Memperoleh Pupuk Bersubsidi	Kemudahan Transaksi
1	Sangat tidak Setuju	1	0
2	Tidak setuju	3	4
3	Kurang Setuju	8	9
4	Setuju	12	10
5	Sangat setuju	6	7
Jumlah		30	30

Sumber : Analisis Data Primer 2023

Berdasarkan hasil Tabel 1, penggunaan kartu kendali akan mempermudah penerimaan pupuk bersubsidi di Desa Jawik, dengan 12 responden menyatakan setuju dan 6 responden menyatakan sangat setuju. Selain itu, dengan menggunakan Kartu Kendali, transaksi yang dilakukan petani menjadi lebih mudah. Tujuh petani menyatakan sangat setuju, dan sebelas petani menyatakan setuju.

Tabel 2. Persepsi Petani Terhadap Ketepatan Harga Pada Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak Setuju	0	0
2	Tidak setuju	7	23,40
3	Kurang Setuju	8	26,70
4	Setuju	15	43,40
5	Sangat setuju	5	16,70
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis Data Primer 2023

Berdasarkan hasil Tabel 2, 5 responden menyatakan sangat setuju dan 15 responden menyatakan setuju, dengan alasan keyakinan mereka bahwa harga yang mereka bayarkan sesuai dengan HET yang berlaku dan berkontribusi dalam menurunkan biaya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pupuk mereka. Delapan responden menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa harga yang ditawarkan sebagian besar tidak berubah dibandingkan periode sebelum program Kartu Kendali. Sementara 0 responden merasa tidak masuk akal karena mereka belum menerima pembayaran sesuai dengan HET yang berlaku dan jumlah yang mereka terima masih terlalu tinggi untuk usaha pertanian mereka, namun 7 responden tidak setuju.

Tabel 3. Persepsi Petani Terhadap Ketepatan Jumlah Pada Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Pernyataan		Jumlah Pupuk Meningkatkan Produksi
		Jatah Pupuk RDKK	Kebutuhan Pupuk terpenuhi	
1	Sangat tidak Setuju	1	2	8
2	Tidak setuju	20	15	17
3	Kurang Setuju	6	9	4
4	Setuju	3	4	1
5	Sangat setuju	0	0	0
Jumlah		30	30	30

Sumber : Analisis Data primer 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan tanggapan responden, hanya satu orang yang menyatakan bahwa pupuk Petah tidak mengikuti RDKK, sedangkan dua puluh orang menyatakan mengikuti RDKK. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk petah yang diperoleh masyarakat survei tidak sesuai dengan RDKK yang diminta. Makanan mereka tidak menyediakan nutrisi yang mereka butuhkan. Jumlah pupuk yang diberikan pemerintah masih kurang dari jumlah subsidi yang dibutuhkan petani untuk RDKK. Meskipun data tip tidak sepenuhnya sempurna, lebih dari separuh responden menunjukkan sedikit rasa kecewa dan mengatakan bahwa tip tersebut masih dianggap sangat bermanfaat jika dibandingkan dengan tidak menerima data tip secara rutin. Namun, sekitar lima belas responden menyatakan puas dengan jatah pupuk yang diberikan berdasarkan RDKK. Kebutuhan hidup mereka tercukupi bahkan produktivitasnya meningkat berkat kuota pupuk yang telah dipanen. Lima belas jawaban tidak setuju dengan pernyataan bahwa kebutuhan pupuk telah terpenuhi, dan dua jawaban sangat tidak setuju. Hal ini terjadi karena kebutuhan pupuk bersubsidi sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di sawah. Sembilan responden tidak setuju dengan pernyataan ini, menyatakan bahwa pupuk yang diterima cukup untuk tanah mereka pada beberapa musim tanam namun tidak memadai pada musim tanam lainnya. Meskipun demikian, empat responden menyatakan bahwa kebutuhan mereka akan pupuk telah terpenuhi, hal ini menunjukkan bahwa mereka berpikir

Delapan orang sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa semakin banyak pupuk maka akan meningkatkan produksi, dari total 17 responden yang menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk bersubsidi oleh responden masih belum mencukupi untuk meningkatkan produksi usahatani, yakni jumlah pupuk yang diterima tidak mencukupi untuk meningkatkan produktivitas. Hanya satu responden dari seluruh responden yang memberikan jawaban ya, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap subsidi pupuk dapat meningkatkan hasil pertanian.

Tabel 4. Persepsi Petani Terhadap Ketepatan Jenis Pada Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak Setuju	1	3,4
2	Tidak setuju	4	13,3
3	Kurang Setuju	2	6,6
4	Setuju	14	46,7
5	Sangat setuju	8	23,4
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis data primer 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa mengenai keakuratan jenis pupuk bersubsidi pada kartu kendali, 14 responden setuju, dan 8 responden sangat setuju. Di Desa Jawik, sebagian besar petani mendapatkan

kebutuhan pupuk dengan mengikuti pedoman pemerintah. Hanya 4 responden yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ketepatan jenis pupuk bersubsidi yang tercantum pada kartu kendali. Pupuk yang kini disubsidi adalah PHONSKA dan UREA.

Tabel 5. Persepsi Petani Terhadap Ketepatan Mutu Pada Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak Setuju	0	0
2	Tidak setuju	2	6,6
3	Kurang Setuju	4	13,4
4	Setuju	11	37
5	Sangat setuju	13	43,4
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis Data Primer 2023

Tabel 5 menunjukkan bahwa 11 responden setuju dan 13 responden sangat setuju terhadap kualitas pemberian pupuk bersubsidi melalui penggunaan Kartu Kendali. Dalam tanggapan mereka, empat responden lainnya menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan penilaian program terhadap keunggulan program tersebut.

Tabel 6. Persepsi Petani Terhadap Ketepatan Waktu Pada Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak Setuju	3	10
2	Tidak setuju	9	30
3	Kurang Setuju	11	37
4	Setuju	5	17
5	Sangat setuju	2	6
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis Data Primer 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, dan 9 responden menyatakan tidak setuju dengan penyaluran pupuk bersubsidi cepat melalui Kartu Kendali. Beberapa petani tidak sependapat dengan pendapat tersebut dan menyatakan bahwa biasanya terjadi kekurangan stok pada tahap pemupukan, yang biasanya terjadi sebelum penanaman. Lima tanggapan dan dua responden sangat setuju bahwa pupuk bersubsidi Kartu Kendali ini disampaikan sesuai jadwal. Hanya 11% peserta yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ketepatan waktu Kartu Kendali. Dengan kata lain, meskipun mereka kadang-kadang mendapatkan pupuk bersubsidi ketika mereka membutuhkannya, namun kadang-kadang ada kekurangan pupuk bersubsidi ketika mereka menginginkannya.

3. KESIMPULAN

Kartu Kendal berhasil dan layak digunakan mulai dari tahap produksi kartu hingga transaksi kartu kendal, menurut data yang menunjukkan bagaimana persepsi hewan peliharaan selama pelatihan anjing subsisten di Desa Jawik. fase; Namun demikian, belum banyak petani yang menyelesaikan proses menentukan berapa banyak lokasi pupuk yang akan dimasukkan ke dalam kartu Kendal mereka. Pandangan petani mengenai alokasi pupuk bersubsidi melalui Kendal yang didiferensiasi. Sebagian besar petani sepakat bahwa menerima pupuk bersubsidi dan menjalankan usaha itu sederhana; namun demikian, jika menyangkut biaya pupuk, beberapa orang tetap percaya bahwa biayanya mahal, sementara yang lain percaya bahwa mereka menerima tawaran yang bagus.

Para petani dilaporkan masih menerima pupuk dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan mereka. Petani mempunyai keyakinan bahwa pupuk yang mereka peroleh dapat memenuhi kebutuhan mereka dan memiliki kualitas yang memadai. Pemupukan juga tidak boleh dilakukan secara salah. Secara transparan, kelompok tani masih belum bisa mengakses tata cara penyaluran pupuk bersubsidi karena jumlah di kartu kendali tidak sesuai dengan yang seharusnya di RDKK. pemberian pupuk dengan harga lebih murah dengan menggunakan kartu kendali

4. SARAN

Penyaluran pupuk bersubsidi sangat membantu dalam produktivitas usahatani, Kemudahan dalam mendapatkan jumlah dan ketepatan waktu sesuai masa tanam sangat menjadi harapan bagi petani dalam proses pertanian sehingga ekonomi pertanian dapat meningkat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budiaji, W. (2013). Jumlah respon skala likert dan skala pengukurannya. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*. 2(127-133).
- Kholis, I. dan Khasan S. (2020). Evaluasi efektivitas petani padi dengan program subsidi pupuk. *Analisis Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9(2) 503-515.
- Ramlayana, Isa A. dan Sudarmi. Efisiensi Penyaluran Pupuk Subsidi Kepada Petani Padi Di Kecamatan Bontocani Desa Langi Kabupaten Bone. *Jurnal Unismuh* 1(3), 949-962.
- Nugroho, A. D., Abi P. S., Erlinda A., Yahya S. dan Julia I. C. (2018). Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 2(1) 70-82.
- Kautsar, M. R., Sofyan, & Makmur, T. (2020). Kajian dampak kelangkaan dan kekurangan padi (*Oryza sativa*) di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar terhadap produktivitas padi. *Jurnal Ilmu Mahasiswa Pertanian*, 5(1), :97-107.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Prinsip-prinsip pemasaran* (Vol. 1, Issue 2). Jilid.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurjaya, N., Sunarsi, D., Effendy, A. A., Teriyan, A., & Gunartin, G. (2021). Pengaruh Etos Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kota Bogor. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 4(2), :172. <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v4i2.9086>
- Rachman. (2016). Analisis Efektifitas Distribusi Pupuk di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. *Urnal Ekonomi Dan Pertanian*, 8 (10), :41-62.
- Moko, K. W., Suwanto & Utami B. W. 2017. Variasi Pandangan Petani Terhadap Program Kartu Tani Kabupaten Sragen di Kecamatan Kalijambe. *Journal of Sustainable Agriculture* Vol. 32 No.1: 9-13.
- Nazir M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat
- Deo J, (2020). Evaluasi terhadap program pupuk bersubsidi berbasis kartu tani di kabupaten Karanganyar.
- Assauri, S. (2018). *Manajemen pemasaran: Dasar, konsep, dan strategi*.
- Ayu, I. G., & Lies, A. (2016). Upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi : tinjauan terhadap aspek teknis, manajemen dan regulasi. 3(1), :4-32.
- Azhari, W. N. (2018). ASPEK-ASPEK DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI (Kabupaten Gunungkidul). *Skripsi. Universitas Islam Indonesia*, 53(1), 1–8.
- Kios Resmi UD.TANEM, (2023) Alokasi pupuk Bersubsidi Desa Jawik Tahun 2023. Pupukbersubsidi.pertanian.go.id

Analisis Nilai Tambah dan Keuntungan UMKM Keripik Singkong di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus pada UMKM Keripik Singkong Sitimewa Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)

Nisa Puritan¹, Joko Sutrisno², Umi Barokah³

*Program Studi S2 Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No.36A Surakarta 57126*

Email : nisapuritan@student.uns.ac.id

Abstract: *The enormous measure of the cassava yield in Kabupaten Bojonegoro will be a misfortune on the off chance that it isn't handled as expected. Cassava doesn't have an enduring timeframe of realistic usability, so on the off chance that its overflow isn't offset with its use, it will build the potential for waste. Individuals of Bojonegoro use cassava to deal with it into cassava chips so it has better strength, selling esteem and added esteem. This exploration intends to dissect the extent of the benefits and added worth of cassava chips delivered by UMKM Sitimewa (Service of Miniature, Little and Medium Endeavor). The kind of exploration utilized is engaging subjective contextual investigation strategy. The information utilized is essential information and auxiliary information. The respondents taken in this examination were purposive testing, to be specific Sitimewa MSMEs in Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. The examination results show that the Sitimewa cassava chips MSMEs is beneficial with creation costs caused adding up to Rp 1,227,016, incomes of Rp 2,000,000 and benefits of Rp 772,984 out of one creation process. The R/C proportion investigation results were 1.63 and the additional worth examination results were Rp 12,230.00/kg with an additional worth proportion of 61.15%.*

Keywords: *production cost, revenue, profit, R/C ratio, added value*

Abstrak: Besarnya hasil panen singkong di Kabupaten Bojonegoro akan menjadi sebuah bencana apabila tidak dikelola dengan baik. Singkong tidak memiliki jangka waktu kemanfaatan yang dapat bertahan lama, sehingga jika melimpahnya tidak diimbangi dengan penggunaannya maka akan menimbulkan potensi limbah. Masyarakat Bojonegoro memanfaatkan singkong untuk diolah menjadi keripik singkong sehingga mempunyai kekuatan yang lebih baik, nilai jual dan nilai tambah. Eksplorasi ini bermaksud membedah sejauh mana manfaat dan nilai tambah keripik singkong yang diberikan oleh UMKM Sitimewa (Jasa Usaha Miniatur, Kecil dan Menengah). Jenis eksplorasi yang digunakan adalah menggunakan strategi penyelidikan kontekstual subjektif. Informasi yang dimanfaatkan adalah informasi penting dan informasi tambahan. Responden yang diambil dalam pemeriksaan ini adalah pengujian purposive, khususnya UMKM Sitimewa di Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Hasil pengujian menunjukkan bahwa UMKM keripik singkong Sitimewa diuntungkan dengan biaya penciptaan yang ditimbulkan sebesar Rp 1.227.016, penerimaan sebesar Rp 2.000.000 dan keuntungan sebesar Rp 772.984 dari sekali proses penciptaan. Hasil pemeriksaan proporsi R/C sebesar 1,63 dan hasil pemeriksaan nilai tambahan sebesar Rp 12.230,00/kg dengan proporsi nilai tambahan sebesar 61,15%.

Kata kunci: biaya produksi, penerimaan, keuntungan, R/C Ratio, nilai tambah

1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian menjadi salah satu urat nadi dalam program perekonomian di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Prasetyo (2022) mata pencaharian di bidang pertanian menduduki urutan pertama dari profesi-profesi yang dijalani oleh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Sebesar 70 persen sumber mata pencaharian utama dari masyarakat Bojonegoro adalah petani. Luasnya lahan pertanian yang ada, menjadi alasan mengapa masyarakat di Kabupaten Bojonegoro banyak yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Area pertanian itu selanjutnya dipergunakan masyarakat untuk ditanami dengan tanaman singkong, hal ini nampak dari hasil produksi singkong di Kabupaten Bojonegoro yang menghasilkan

102.120.000 kg singkong dari luas lahan pertanian sebesar 3.417 Ha (BPS Provinsi Jawa Timur, 2017). Besarnya potensi pertanian di Bojonegoro, tentu harus diimbangi dengan kuatnya sektor bisnis pada jenis hasil pertanian tersebut. Melimpahnya ketersediaan singkong jika tidak diolah dengan baik akan memberikan kerugian. Hal tersebut karena singkong tidak bertahan lama apabila disimpan, sehingga apabila kelimpahannya tidak diimbangi dengan pemanfaatannya akan mempercepat proses pembusukannya. Hal ini mendorong masyarakat Bojonegoro untuk mengolah singkong menjadi produk yang memiliki kualitas lebih baik dan memiliki nilai tambah. Nilai tambah adalah nilai tambahan suatu barang karena adanya proses penanganan, penimbunan dan pengangkutan dalam suatu siklus pembuatan (Yunistriani *et al.*, 2023). Adanya kegiatan tersebut juga didukung dengan adanya input dari biaya-biaya tambahan, sehingga akan membuat nilai jual meningkat, serta memperoleh keuntungan yang lebih besar juga.

Masyarakat Bojonegoro memanfaatkan hasil pertanian singkong untuk diolah dan menghasilkan produk berupa keripik singkong yang memiliki nilai tambah. Keripik singkong yaitu sebuah produk olahan dari singkong yang diiris tipis dan diberi bumbu kemudian dilakukan proses penggorengan namun ada pula yang hanya melalui proses penjemuran dan pengeringan (Primentari, 2021). Keripik singkong dipilih oleh masyarakat Bojonegoro karena proses pembuatan yang terhitung mudah dan dapat diterima serta digemari oleh semua kalangan usia.

Salah satu UMKM yang mengolah tanaman singkong menjadi barang olahan khususnya keripik singkong adalah Sitimewa yang terletak di Gunungsari Baureno Bojonegoro. Sitimewa merupakan UMKM yang sudah didirikan sejak tahun 2005 dan selalu aktif mengikuti pameran yang diadakan oleh Pemkab Bojonegoro. Potensi yang ada pada UMKM Sitimewa perlu dimaksimalkan dengan perencanaan produksi dan operasional yang baik, agar menghasilkan produk dengan biaya seminimal mungkin namun dapat memberikan keuntungan yang tinggi. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soekartawi (2016) salah satu cara mengetahui kelayakan dan kemajuan usaha adalah dengan menggunakan angka, yaitu perbandingan antara penerimaan dalam nilai uang dengan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tersebut. Jika RC ratio > 1 maka usaha layak untuk dijalankan. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Sinaga *et al.* (2022) bahwa usaha pengolahan ubi kayu menjadi keripik singkong dikatakan layak dengan nilai R/C rasio 1,34. Hal senada juga diungkapkan oleh Ani *et al.* (2019) dalam penelitiannya di Otukpo Lga Benue Nigeria menjelaskan pengolahan singkong menjadi keripik menguntungkan dan layak dilakukan dengan *benefit cost ratio* adalah 2,15.

Setelah menelaah latar belakang secara singkat yang telah dijabarkan sebelumnya menjadi dasar yang digunakan peneliti untuk melaksanakan sebuah penelitian dengan tema “Analisis Nilai Tambah dan Keuntungan UMKM Keripik Singkong di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus pada UMKM Keripik Singkong Sitimewa Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)”. Peneliti juga ingin mengetahui mengenai nilai tambah yang diakibatkan adanya proses pengolahan dapat memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimum dan sudah memberikan keuntungan yang baik sehingga usaha dapat dikatakan layak atau tidak untuk dijalankan. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai tambah bagi UMKM keripik singkong Sitimewa.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan studi kasus yaitu pada UMKM Keripik Singkong Sitimewa milik Ibu Siti Nur Cholifah di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Analisis kontekstual selesai sehingga eksplorasi dilakukan dari atas ke bawah terhadap atribut objek pemeriksaan (Nazir, 2011).

2.2. Teknik Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini berupa kualitatif deskriptif dimana bersumber dari data primer dan sekunder.

2.2.1. Data Primer

Dengan metode observasi di lapangan dan wawancara secara langsung menggunakan kuisioner terstruktur dengan narasumber yang dianggap memiliki kapasitas dalam bidang yang diangkat pada penelitian ini peneliti memperoleh data primer yang digunakan untuk penelitian ini.

2.2.2. Data Sekunder

Kemudian peneliti juga memperoleh data sekunder untuk penelitian ini melalui studi pada literatur dan penelusuran di berbagai instansi terkait. Salah satunya adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, dan jurnal yang relevan.

2.3. Teknik Penarikan Sampel

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu pada UMKM Keripik Singkong Sitimewa yang berada di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Lokasi penelitian dipilih karena UMKM Sitimewa sudah berdiri sejak tahun 2005 dan selalu aktif mengikuti pameran yang diadakan oleh Pemkab Bojonegoro. Pengujian *purposive* sendiri merupakan strategi untuk memutuskan contoh melalui perenungan tertentu (Sugiyono, 2017).

2.4. Metode Analisis Data

2.4.1. Analisis Biaya

Biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran secara keseluruhan yang digunakan untuk kebutuhan produksi (Soekartawi, 2016). Adapun biaya dikategorikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah biaya tetap (*fixed cost*) dan yang kedua adalah biaya tidak tetap (*variable cost*). Biaya tetap adalah biaya yang secara umum tidak berubah, meskipun terdapat perubahan dalam proses pembuatan atau transaksi terkait volume (pada batas tertentu). *Variable cost* merupakan biaya yang memiliki sifat dapat berubah-ubah sesuai pada perubahan yang terjadi pada volume produksi ataupun volume penjualan (Anggraeni & Subari, 2020). Total biaya dapat dihitung menggunakan rumus:

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan:

TC = Keseluruhan biaya yang digunakan (Rp)

TFC = Keseluruhan biaya tetap (Rp)

TVC = Keseluruhan biaya tidak tetap (Rp)

2.4.2. Analisis Penerimaan

Penerimaan merupakan akibat dari penggandaan hasil kreasi dengan harga penjualan (Soekartawi, 2016). Penerimaan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$TR = Q \times P$$

Keterangan:

TR = Keseluruhan penerimaan (Rp)

Q = Keseluruhan produk yang dihasilkan (Kg)

P = Harga jual (Rp)

2.4.3. Analisis Keuntungan

Keuntungan adalah pengurangan antara penerimaan dari kesepakatan dan seluruh biaya pembuatan (Nitiasya & Harahap, 2021). Keuntungan dapat dihitung dengan rumus :

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan:

π = Keuntungan (Rp)

TR = Keseluruhan penerimaan (Rp)

TC = Keseluruhan biaya (Rp)

2.4.4. Analisis R/C Ratio

Arnold *et al.* (2020) mengemukakan pendapat bahwa kepraktisan bisnis adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mensurvei tingkat keuntungan yang muncul dari adanya suatu tindakan atau tugas bisnis. Besar atau kecilnya suatu usaha akan menentukan nasib suatu usaha, terlepas dari apakah usaha tersebut akan dilanjutkan. Nilai keberhasilan bisnis Anda bergantung pada hasil perhitungan Proporsi R/C (Proporsi Biaya Pengembalian). Proporsi R/C akan menunjukkan nilai jumlah agregat yang diperoleh pembuat dibandingkan dengan biaya absolut yang ditimbulkan dalam siklus produksi. (Soekartawi, 2016).

$$R/C \text{ Ratio} = TR / TC$$

Keterangan:

TR (*total revenue*) = Keseluruhan Penerimaan

TC (*total cost*) = Keseluruhan Biaya

Kriteria yang dapat dilihat dari perhitungan R/C ratio ini yaitu:

R/C Ratio > 1 = Usaha dinilai efisien dan layak untuk dilanjutkan.

R/C Ratio = 1 = Usaha dinilai belum cukup efisien atau pada titik impas.

R/C Ratio < 1 = Usaha dinilai tidak efisien dan tidak layak dilanjutkan.

2.4.5. Analisis Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan tambahan nilai suatu barang karena adanya proses penanganan, penimbunan dan pengangkutan dalam satu siklus pembuatan (Yunistriani *et al.*, 2023). Untuk menentukan nilai tambah UMKM Keripik Singkong Sitimewa ditentukan dengan menggunakan strategi Hayami. Strategi Hayami dipilih karena memuat data yang benar-benar lengkap karena cenderung digunakan untuk menentukan faktor perubahan, koefisien kerja, komitmen berbagai sumber informasi, harga hasil, harga tambah dan berapa besar kompensasi faktor produksi.

2.4.6. Perhitungan Nilai Tambah Menggunakan Metode Hayami

Tabel 1. Perhitungan Nilai Tambah Menggunakan Metode Hayami

No	Variabel	Rumus
1	Produk yang dihasilkan (kg/proses produksi)	A
2	Masukan Bahan Baku (kg/proses produksi)	B
3	Penggunaan Tenaga Kerja (HOK)	C
4	Faktor Konversi	D = A/B
5	Koefisien Tenaga Kerja (HOK/Kg)	E = C/B
6	Harga Output (Rp/Kg)	F
7	Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK)	G
Penerimaan dan Keuntungan		
8	Harga Bahan Utama (Rp/Kg)	H
9	Sumbangan Input Lain (Rp/Kg)	I
10	Nilai Output (Rp/Kg)	J = D x F
11	a. Nilai Tambah (Rp/Kg)	K = J-H-I
	b. Rasio Nilai Tambah (%)	L = (K/J) x 100%
12	a. Kembalikan Tenaga Kerja (Rp/Kg)	M = E x G
	b. Porsi Tenaga Kerja (%)	N = (M/K) x 100%
13	a. Keuntungan (Rp/Kg)	O = K-M
	b. Tingkat Keuntungan (%)	P = (O/K) x 100%
Balas Jasa Pemilik Faktor-Faktor Produksi		
14	Marjin	Q = J - H
	Pendapatan tenaga kerja (%)	R = (M/Q) x 100%
	Sumbangan input lain (%)	S = (I/Q) x 100%
	Keuntungan (%)	T = (O/Q) x 100%

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya-biaya yang ditimbulkan oleh UMKM Keripik Singkong Sitimewa dalam sekali pembuatan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, seperti terlihat pada Tabel 2.

3.1. Perhitungan Total Biaya Produksi Keripik Singkong UMKM Sitimewa

Tabel 2. Perhitungan Total Biaya Produksi Keripik Singkong UMKM Sitimewa

Jenis Biaya	Nilai (Rp)
Biaya Tetap :	
Biaya PBB	1.644
Biaya Penyusutan Alat	7.372
Total Biaya Tetap	9.016
Biaya Variabel :	
Biaya Bahan Baku	350.000
Biaya Bahan Penolong	373.700
Biaya Transport	10.000
Biaya Tenaga Kerja	450.000
Biaya Listrik dan Air	34.300
Total Biaya Variabel	1.218.000
Total Biaya	1.227.016

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa total biaya tetap UMKM Keripik Singkong Sitimewa adalah sebesar Rp9.016 yang terdiri dari biaya PBB sebesar Rp1.644 dan biaya kerusakan perangkat keras sebesar Rp7.372 untuk satu kali pembuatan. Sementara biaya all out factor yang diperoleh sebesar Rp 1.218.000 yang merupakan biaya bahan alami yaitu Rp 350.000, dimana untuk sekali produksi dibutuhkan 100 kg singkong dengan harga Rp 3.500/kg. Biaya bahan pembantu sebesar Rp373.700, biaya transportasi sebesar Rp10.000, serta biaya listrik dan air sebesar Rp34.300. Dalam satu siklus pengembangan keripik singkong memerlukan 3 orang tenaga ahli dari luar keluarga selama 3 hari dengan biaya pengerjaan Rp 50.000/HOK.

Penerimaan UMKM Keripik Singkong Sitimewa diperoleh berdasarkan jumlah produk keripik singkong yang dihasilkan dikalikan dengan harga jual dalam satu kali proses produksi.

3.2. Perhitungan Total Penerimaan UMKM Keripik Singkong Sitimewa

Tabel 3. Perhitungan Total Penerimaan UMKM Keripik Singkong Sitimewa

Uraian	Satuan	Nilai
Jumlah output keripik singkong	Kg	50
Harga Jual	Rp/Kg	40.000
Total Penerimaan		2.000.0000

Tabel 3 menampilkan total penerimaan dari UMKM Keripik Singkong Sitimewa adalah Rp 2.000.000. Dalam satu kali proses produksi menghasilkan 50 kg keripik singkong dengan harga jual Rp 40.000 per kg.

3.3. Perhitungan Keuntungan UMKM Keripik Singkong Sitimewa

Tabel 4. Perhitungan Keuntungan UMKM Keripik Singkong Sitimewa

Uraian	Nilai (Rp)
Total Penerimaan	2.000.000
Total Biaya	1.227.016
Keuntungan	772.984

Melalui Tabel 4 terlihat bahwa dalam satu kali proses penciptaan keripik singkong, UMKM Sitimewa memperoleh keuntungan sebesar Rp772.984 yang diperoleh dari total penerimaan sebesar Rp2.000.000 dikurangi seluruh biaya selama siklus pembuatan sebesar Rp1.227.016. Pemeriksaan proporsi R/C digunakan untuk menentukan kepraktisan suatu bisnis, terlepas dari apakah bisnis tersebut layak untuk dilanjutkan.

3.4. Analisis R/C Ratio UMKM Keripik Singkong Sitimewa

Tabel 5. Analisis R/C Ratio UMKM Keripik Singkong Sitimewa

Uraian	Nilai (Rp)
Total Penerimaan	2.000.000
Total Biaya	1.227.016
R/C Ratio	1,63

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa Proporsi R/C insentif UMKM Keripik Singkong Sitimewa adalah sebesar 1,63. Artinya, setiap rupiah biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan singkong menjadi keripik singkong akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,63. Usaha UMKM keripik singkong Sitimewa dinilai sudah mumpuni dan memungkinkan untuk dilanjutkan.

3.5. Analisis Nilai Tambah UMKM Keripik Singkong Sitimewa Menggunakan Metode Hayami

Tabel 6. Analisis Nilai Tambah UMKM Keripik Singkong Sitimewa Menggunakan Metode Hayami

No	Variabel	Rumus	Nilai
1	Produk yang dihasilkan (kg/proses produksi)	A	50
2	Masukan Bahan Baku (kg/proses produksi)	B	100
3	Penggunaan Tenaga Kerja (HOK)	C	7,8
4	Faktor Konversi	$D = A/B$	0,5
5	Koefisien Tenaga Kerja (HOK/Kg)	$E = C/B$	0,078
6	Harga Output (Rp/Kg)	F	40.000
7	Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK)	G	50.000
Penerimaan dan Keuntungan			
8	Harga Bahan Utama (Rp/Kg)	H	3.500
9	Sumbangan Input Lain (Rp/Kg)	I	4.270
10	Nilai Output (Rp/Kg)	$J = D \times F$	20.000
11	a. Nilai Tambah (Rp/Kg)	$K = J - H - I$	12.230
	b. Rasio Nilai Tambah (%)	$L = (K/J) \times 100\%$	61,15
12	a. Kembalian Tenaga Kerja (Rp/Kg)	$M = E \times G$	3.900
	b. Porsi Tenaga Kerja (%)	$N = (M/K) \times 100\%$	31,89
13	a. Keuntungan (Rp/Kg)	$O = K - M$	8.330
	b. Tingkat Keuntungan (%)	$P = (O/K) \times 100\%$	68,11
Balas Jasa Pemilik Faktor-Faktor Produksi			
14	Marjin	$Q = J - H$	16.500
	Pendapatan tenaga kerja (%)	$R = (M/Q) \times 100\%$	23,64
	Sumbangan input lain (%)	$S = (I/Q) \times 100\%$	25,88
	Keuntungan (%)	$T = (O/Q) \times 100\%$	50,48

Pengujian nilai tambah digunakan untuk menentukan nilai tambah singkong menjadi keripik singkong. Perkiraan uji nilai tambah dengan teknik Hayami dapat dilihat pada Tabel 6. Berapa besar data yang digunakan dalam pengolahan keripik singkong adalah 100 kg singkong dapat menghasilkan 50 kg keripik singkong. Komponen transformasi sebesar 0,5 diperoleh dari hasil 50 kg yang dipisahkan dengan kontribusi 100 kg, artinya setiap 1 kg singkong menghasilkan 0,5 kg keripik singkong.

Hasil yang diperoleh kurang baik karena bahan alami tersebut mengalami penyusutan pada saat proses pengupasan, pemotongan dan pemanggang. Hasil komputasi koefisien kerja UMKM Sitimewa sebesar 0,078, artinya untuk mengolah 1 kg singkong menjadi keripik singkong diperlukan tenaga kerja

sebesar 0,078 HOK. Koefisien kerja diperoleh dari sumbangan kerja sebesar 7,8 dipisahkan dengan banyaknya sumbangan bahan mentah sebesar 100. Harga pokok penjualan keripik singkong sebesar Rp 40.000/kg dan kontribusi berbagai sumber lain sebesar Rp 4.270/kg yang diperoleh dari biaya absolut yang ditimbulkan selain biaya bahan alami dan pekerjaan. Harga hasil diperoleh dari variabel perubahan sebesar 0,5 ditambah harga hasil per kilogram sebesar Rp 40.000 dan hasil yang didapat sebesar Rp 20.000, artinya setiap 1 kg singkong akan menghasilkan keripik singkong senilai Rp 20.000.

Untuk sementara, nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan singkong menjadi keripik singkong adalah sebesar Rp 12.230 dengan persentase nilai tambahan sebesar 61,15%, artinya setiap keripik singkong Rp 100 akan menghasilkan nilai tambahan sebesar Rp 61,15. Gaji kerja yang diperoleh buruh UMKM Keripik Singkong Sitimewa sebesar Rp3.900 untuk setiap satu kilogram singkong yang diolah menjadi keripik singkong dengan porsi kerja tambahan senilai 31,89%. Sementara manfaat yang diperoleh dari pengolahan keripik singkong sebesar Rp 8.330 per kilogram bahan alami singkong dengan tingkat manfaat sebesar 68,11%. Edge adalah perbedaan antara nilai hasil dan komponen yang tidak dimurnikan. Dilihat dari perkiraan faktor upah penciptaan di atas, remunerasi yang paling tinggi adalah tunjangan sebesar 50,48% atau keuntungan Rp 8.330. Sedangkan kompensasi yang paling kecil adalah sebagai upah kerja yaitu sebesar 23,64% atau tunjangan Rp 3.900.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa UMKM Keripik Singkong Sitimewa diuntungkan dengan biaya pembuatan yang dihasilkan sebesar Rp1.227.016, penerimaan yang diperoleh sebesar Rp2.000.000 dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp772.984 dalam satu kali proses pembuatan. Hasil penelitian proporsi R/C juga menunjukkan bahwa UMKM Keripik Singkong Sitimewa dinilai efektif dan layak untuk maju dengan nilai 1,63. Akibat pemeriksaan nilai tambahan sebesar Rp 12.230,00/kg dengan proporsi nilai tambah sebesar 61,15%.

5. SARAN

UMKM Keripik Singkong Sitimewa dapat menambah komponen mentah singkong sehingga dapat meningkatkan produksi keripik singkong. Peningkatan hasil yang diberikan akan secara langsung mempengaruhi total penerimaan, manfaat, dan kemampuan berbisnis. UMKM Keripik Singkong Sitimewa juga dapat mengembangkan usaha dan bisnisnya sehingga dapat meningkatkan minat terhadap kuantitas barang yang juga akan meningkatkan keuntungan. Dengan asumsi manfaat yang didapat tinggi, maka nilai tambahan yang diperoleh pun akan semakin tinggi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ani D., Ojila H., & Abu O. (2019). Profitability of Cassava Processing: A Case Study of Otukpo Lga. *Sustainable Food Production*, 6(12), 12-23.
- Anggraeni N., & Subari S. (2020). Pendapatan Dan Nilai Tambah Pengolahan Ubi Jalar Ungu di UD. Ganesha Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. *Agriscience*, 1(2), 429-447.
- Arnold P. W., Nainggolan P., & Damanik D. (2020). Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Tempe di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 29-39.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu dan Ubi Jalar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2017*. Jawa Timur : BPS.
- Hayami Y., Kawagoe T., Morooka Y., & Siregar M. (1987). *Agricultural Marketing and Processing in Upland Java. A Perspective from a Sunda Village*. Bogor: The CPGRT Centre.
- Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia Persada.
- Nitiasya G., & Harahap E. (2021). Optimasi Laba Produksi Olahan Singkong Menggunakan Program Linier. *Jurnal Matematika*, 20(2), 61-68.

- Prasetio D.E. (2022). Artikel Sejarah Kabupaten Bojonegoro. *Paper tema "Pemuda dan Dinamika Kebijakan Pemerintah di Era Pandemi COVID-19"*. Researchgate:<https://www.researchgate.net/publication/362029886>. Diakses 26 Agustus 2023.
- Primentari O.N.M. (2021). Analisis Nilai Tambah Dan Kelayakan Usaha Keripik Ubi Kayu (Manihot Utilissima) Cap Sinar Jago. *Jurnal BisTek Pertanian*, 8(2), 65-71.
- Sinaga, Herawaty A., & Girsang R. (2022). Analisis Nilai Tambah Ubi Kayu (Manihot Utilissima Sp) Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kripik Singkong. *Jurnal Penelitian Bidang Ilmu Pertanian*, 20(1), 9-16.
- Soekartawi. (2016). *Analisis Usahatani*. Jakarta : UI Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Yunistriani R., Noor T.I., & Isyanto A.Y. (2023). Analisis Nilai Tambah Pada Agroindustri Keripik Singkong. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 10 (1), 627-634.

Strategi Pemasaran Berbasis Metode Analisis SOAR pada UMKM Sari Kedelai Mak Dewi

Ulin Nuha¹, Rhina Uchyani Fajarningsih², Kusnandar³

Program Studi S2 Agribisnis Fakultas Pertanian, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutami no 36 Ketingan Surakarta

Email: ulin.280194.nuha@student.uns.ac.id, rhinauchyani@staff.uns.ac.id,
kusnandar_fp@staff.uns.ac.id

Abstract: This research aims to analyze and implement marketing strategies based on the SOAR Analysis method at the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Sari Kedelai Mak Dewi. The SOAR Analysis method (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) is utilized as a foundation to identify internal strengths, external opportunities, aspirations, and expected outcomes of MSMEs. The research is conducted through a series of steps, including internal and external analysis, as well as the development of marketing strategies aligned with the analysis findings. Data is collected through interviews, questionnaires, and direct observation of MSMEs Sari Kedelai Mak Dewi. The findings indicate that the MSMEs have strengths in soybean product quality, engagement with the local community, and flexibility in marketing strategies. Opportunities include increasing market penetration through social media and collaboration with local suppliers. Aspirations of MSMEs include sustainable business growth and wider brand recognition. Expected outcomes include increased sales, larger market share, and business sustainability. Considering the analysis findings, recommended marketing strategies include enhancing digital marketing, developing local partnerships, and increasing product innovation. The implementation of these strategies is expected to enhance the competitiveness of MSMEs Sari Kedelai Mak Dewi in an increasingly competitive market. This research provides insights into the importance of applying the SOAR Analysis method in developing effective marketing strategies for MSMEs in the food and beverage industry.

Keywords: SOAR Analysis, marketing strategy, MSMEs, soybean-based products.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menerapkan strategi pemasaran berbasis metode Analisis SOAR pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sari Kedelai Mak Dewi. Metode Analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) digunakan sebagai landasan untuk mengidentifikasi kekuatan internal, peluang eksternal, aspirasi, dan hasil yang diharapkan oleh UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui serangkaian langkah, termasuk analisis internal dan eksternal, serta pengembangan strategi pemasaran yang sesuai dengan temuan analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi langsung terhadap UMKM Sari Kedelai Mak Dewi. Strategi SA (Strengths-Aspirations) menjadi dasar pendekatan mereka, yang menggabungkan kekuatan internal perusahaan dengan aspirasi masa depannya. Mereka berencana untuk meningkatkan diferensiasi produk dengan inovasi produk dan kualitas layanan yang unggul, serta merencanakan ekspansi pasar berdasarkan kekuatan distribusi dan jaringan yang solid. Sementara itu, strategi OA (Opportunities-Aspirations) memanfaatkan peluang eksternal untuk mencapai aspirasi perusahaan. UMKM Sari Kedelai Mak Dewi akan memanfaatkan peluang pasar online yang berkembang pesat, mengeksplorasi inovasi produk berdasarkan tren pasar, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, memanfaatkan dukungan pemerintah, dan mengikuti promosi lokal untuk meningkatkan awareness produk di kalangan masyarakat. Strategi SR (Strengths-Results) akan memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengembangkan program loyalitas pelanggan, serta ekspansi pasar dengan reputasi yang baik. Di sisi lain, strategi OR (Opportunities-Results) akan mengoptimalkan peluang eksternal seperti pasar online, kerjasama dengan pihak eksternal, ekspansi pasar ke wilayah baru, partisipasi dalam program dukungan pemerintah, dan pengembangan produk baru sesuai dengan tren pasar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Sari Kedelai Mak Dewi di pasar yang semakin kompetitif. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya menerapkan metode Analisis SOAR dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif bagi UMKM dalam konteks industri makanan dan minuman.

Kata kunci: Analisis SOAR, strategi pemasaran, UMKM, sari kedelai.

1. PENDAHULUAN

UMKM memegang peranan yang sangat signifikan dalam membangun ekonomi nasional. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2022, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5%. Selain itu, dalam hal penyerapan tenaga kerja, UKM mencakup 96,9% dari total tenaga kerja nasional. Kehadiran serta perkembangan UMKM tidak hanya mencerminkan keragaman ekonomi, tetapi juga mendukung ketahanan ekonomi negara. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi sangat strategis dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Perkembangan UMKM kini semakin merata di berbagai kota di Indonesia, baik yang besar maupun kecil. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang memungkinkan bisnis dapat dimulai dan dikembangkan oleh para pelaku usaha melalui bantuan teknologi. Dampak dari perkembangan ini telah dirasakan dalam pengembangan daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki kegiatan yang mendukung perekonomian lokal (Putri, dkk. 2023). Daerah tersebut mampu mandiri dalam mengembangkan potensinya.

Pemasaran merupakan aspek vital dalam keberhasilan bisnis, terutama bagi UMKM seperti Sari Kedelai (Abdullah, dkk. 2021). Strategi pemasaran merupakan suatu metode untuk mencapai keunggulan dalam persaingan yang berkelanjutan, baik bagi perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Strategi pemasaran dianggap sebagai elemen fundamental dalam menyusun perencanaan perusahaan secara menyeluruh (Elwisam & Lestari, 2019). Mengingat keragaman masalah yang dihadapi oleh perusahaan, perencanaan menyeluruh menjadi penting sebagai panduan bagi berbagai segmen usaha dalam menjalankan operasinya.

UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pasar yang tepat dan memperluas pangsa pasar mereka. Pengembangan strategi pemasaran menjadi esensial bagi UMKM seperti Sari Kedelai Mak Dewi untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Sebagai bagian dari sektor UMKM, Sari Kedelai Mak Dewi menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam mengidentifikasi kekuatan internal, peluang eksternal, aspirasi yang diinginkan, dan hasil yang diharapkan. Dalam konteks ini, metode analisis SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Results*) menawarkan pendekatan yang sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami strategi pemasaran berbasis analisis SOAR pada UMKM. Studi yang dilakukan oleh Imam Ramadhani dan Rusindiyanto pada tahun 2024 menggambarkan penerapan strategi SOAR dalam meningkatkan pemasaran kalibrasi di PT. PAL Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. PAL Indonesia memiliki kekuatan dalam bidang kalibrasi, seperti laboratorium terakreditasi, tenaga ahli kompeten, dan peralatan lengkap, namun juga dihadapkan pada peluang meningkatnya permintaan dan perkembangan teknologi. Aspirasi PT. PAL Indonesia sebagai perusahaan kalibrasi terkemuka menuntut perbaikan dalam strategi pemasaran, peningkatan kualitas layanan, dan kerjasama dengan perusahaan lain. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan strategi SOAR dalam mengoptimalkan pemasaran UMKM, sekaligus memberikan pandangan baru terkait peran analisis strategis dalam meningkatkan daya saing dan pencapaian tujuan bisnis pada tingkat organisasi yang lebih besar.

Pemilihan metode SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Results*) untuk UMKM Sari Kedelai Mak Dewi yang berada di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki landasan yang kuat. Pertama-tama, sebagai UMKM yang beroperasi di bawah BUMDes, Sari Kedelai Mak Dewi memiliki keunikan dalam struktur organisasi dan keberadaannya sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal. Metode SOAR memungkinkan untuk mengidentifikasi kekuatan unik dari Sari Kedelai Mak Dewi, termasuk sumber daya lokal, jaringan komunitas, dan dukungan dari BUMDes yang dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan strategi pemasaran.

Kedua, sebagai bagian dari BUMDes, Sari Kedelai Mak Dewi juga memiliki peluang yang unik dalam hal akses sumber daya lokal, dukungan pemerintah daerah, dan keberlanjutan usaha yang didukung oleh model kepemilikan bersama. Metode SOAR memungkinkan untuk mengidentifikasi peluang-peluang khusus yang mungkin tidak tersedia untuk UMKM lain di luar lingkungan BUMDes.

Sari Kedelai Mak Dewi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan internal yang dimilikinya. Dalam hal ini, mengidentifikasi keunggulan produk, kualitas, layanan, dan sumber daya

internal lainnya menjadi krusial untuk membangun strategi pemasaran yang kokoh. Metode analisis SOAR memungkinkan UMKM untuk merinci dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan secara lebih terstruktur. Kedua, dalam upaya mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, UMKM perlu mengidentifikasi peluang-peluang pasar dan lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan. Dengan menggunakan metode SOAR, UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat mengeksplorasi peluang-peluang baru, tren konsumen, perkembangan industri, dan potensi kerjasama dengan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, aspirasi dan tujuan jangka panjang UMKM menjadi landasan penting dalam pengembangan strategi pemasaran. Dengan metode analisis SOAR, UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat mengklarifikasi visi dan misi bisnisnya, serta mengidentifikasi aspirasi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Selain itu, melalui metode SOAR, aspirasi dan tujuan jangka panjang dari UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat dijelaskan dengan lebih jelas. Aspirasi ini mungkin meliputi pertumbuhan usaha, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal, atau pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan demikian, metode SOAR membantu mengarahkan strategi pemasaran pada pencapaian tujuan.

Evaluasi hasil dari strategi pemasaran yang diimplementasikan merupakan langkah krusial untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Melalui metode SOAR, UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat mengukur pencapaian hasil-hasil yang diinginkan dari strategi pemasaran yang telah dirumuskan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan guna meningkatkan kinerja pemasaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian tentang "Strategi Pemasaran Berbasis Metode Analisis SOAR pada UMKM Sari Kedelai Mak Dewi" diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana UMKM dapat memanfaatkan pendekatan analitis untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, suatu metode yang dipakai untuk merinci, menguraikan, dan menjelaskan fenomena dengan menggunakan kata-kata atau narasi. Berdasarkan Farida (2014), teknik kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dari obyek yang sedang diselidiki, baik melalui laporan tertulis maupun komunikasi lisan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelidiki serta memahami ciri-ciri, konteks, dan signifikansi suatu fenomena secara menyeluruh. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dalam proses analisis (Sugiyono, 2013). Pemilik UMKM Sari Kedelai Mak Dewi berperan sebagai subjek utama dalam penelitian ini, memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika bisnis dan kebutuhan pasar yang menjadi landasan bagi pengembangan strategi yang tepat dan efektif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis SOAR. Analisis SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Results*) telah menjadi salah satu alat perencanaan strategis yang mengadopsi pendekatan yang menitikberatkan pada kekuatan, dengan tujuan memahami semua sistem (Santoso & Widyatmini, 2021). SOAR merupakan perkembangan dari analisis SWOT yang dikembangkan oleh David Cooperrider untuk mengevaluasi kapasitas individu dalam merencanakan strategi terkait keempat elemen (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Results*) yang berperan dalam orientasi masa depan (Fuadi, 2020; Suryadi, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sari Kedelai Mak Dewi adalah salah satu pelopor dalam industri minuman di Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Didirikan oleh Ibu Wiwik Ita Dewi Sanjaya, Sari Kedelai Mak Dewi menjadi salah satu simbol keberhasilan dan dedikasi dalam menghadirkan produk berkualitas bagi masyarakat sejak tahun 2019. Dengan fokus pada produksi sari kedelai, usaha ini telah memperoleh pengakuan dan reputasi yang kokoh di Kawasan Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap standar kualitas yang tinggi, tetapi juga menunjukkan kontribusi UMKM lokal dalam mengembangkan ekonomi dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk unggul.



Gambar 1. Produk Sari Kedelai Mak Dewi

3.2. Analisis SOAR UMKM Sari Kedelai Mak Dewi

Penelitian ini melibatkan beberapa langkah metodologis yang mencakup pengumpulan data dari wawancara dan dokumentasi. Sesuai hasil wawancara dengan pemilik usaha sari kedelai, yaitu Ibu Wiwik. Data yang terhimpun akan diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari wawancara dengan informasi yang terdokumentasi. Setelah memverifikasi keabsahan data, proses reduksi, display, dan verifikasi data dilakukan untuk menghasilkan strategi peningkatan penjualan melalui Analisis SOAR pada usaha minuman sari kedelai Mak Dewi. Data penelitian yang telah diverifikasi menggunakan triangulasi sumber kemudian dianalisis melalui tahap reduksi, display, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, faktor *Strengths* (Kekuatan) UMKM ini meliputi beragam aspek yang dapat menjadi landasan strategis. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha minuman sari kedelai Mak Dewi diperoleh beberapa strategi yang diterapkan. Pertama, usaha minuman sari kedelai Mak Dewi menekankan pada kualitas produk yang dihasilkan lebih menonjol dengan cita rasa khas, tekstur tingkat kekentalan dari sari kedelai, kebersihan, dan pemanfaatan bahan baku yang berkualitas. Kedua, UMKM ini telah menjadi bagian dari tradisi lokal yang kuat, memperkuat identitas merek dan membangun loyalitas pelanggan. Ketiga, UMKM ini telah membentuk jaringan distribusi yang solid memungkinkan mereka menjangkau pasar lebih luas baik secara lokal maupun regional. Keempat, inovasi produk seperti varian rasa baru, tekstur kekentalan dan kemasan menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Kelima, dukungan yang kuat dari komunitas lokal dan pemerintah daerah juga menjadi kekuatan tersendiri. Keenam, manajemen yang efisien dalam pengelolaan stok, keuangan, dan operasional sehari-hari juga memberikan keunggulan kompetitif. Terakhir, kualitas layanan yang ramah, responsif, dan personal meningkatkan pengalaman pelanggan serta membangun hubungan yang kokoh.

Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui peluang dari usaha sari kedelai. Terdapat beberapa peluang dalam minuman sari kedelai. Pertama, terdapat potensi besar dalam meningkatkan permintaan pasar karena masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan gaya hidup sehat, yang membuat produk kedelai semakin diminati. Selain itu, peluang juga terbuka lebar untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti pasar online dan kerjasama dengan toko-toko retail lokal. Dukungan pemerintah dan program pembinaan UMKM juga menjadi peluang bagi Sari Kedelai Mak Dewi untuk mendapatkan pelatihan, bantuan modal, dan akses ke pasar yang lebih besar. Di samping itu, inovasi produk dan diversifikasi, seperti pengembangan varian rasa baru dan tekstur kekentalan juga menjadi strategi yang menarik bagi UMKM. Terakhir, perubahan tren dan gaya hidup masyarakat yang cenderung lebih mengutamakan konsumsi makanan sehat memberikan peluang bagi Sari Kedelai Mak Dewi untuk memperluas pangsa pasarnya dengan menawarkan produk kedelai yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesehatan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, faktor *Aspiration* (Aspirasi) merupakan poin penting yang mencerminkan tujuan dan harapan UMKM tersebut. UMKM Sari Kedelai Mak Dewi memiliki aspirasi untuk menjadi

brand unggulan dalam pasar produk kedelai di wilayahnya serta untuk meningkatkan pangsa pasarnya baik secara lokal maupun regional. Selain itu, UMKM ini berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi produk kedelai guna memenuhi selera pasar modern dan memperluas variasi produknya. Dengan aspirasi ini, UMKM Sari Kedelai Mak Dewi juga bercita-cita untuk memberdayakan ekonomi lokal dengan menjadi motor penggerak ekonomi di wilayahnya, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Selain itu, pengakuan atas kualitas produk menjadi salah satu aspek aspirasi utama UMKM ini, yang akan menjadi landasan dalam perumusan strategi pemasaran yang berorientasi pada tujuan tersebut.

Dalam penelitian strategi pemasaran berbasis metode analisis SOAR pada UMKM Sari Kedelai Mak Dewi, beberapa faktor teridentifikasi. Peningkatan penjualan produk sari kedelai Mak Dewi tercapai sebesar 15% dalam tahun pertama dan 25% dalam dua tahun, belum mencapai target sebesar 20%. Perluasan jangkauan pasar berhasil memasarkan produk di 5 Kecamatan di Bojonegoro dalam 2 tahun dan mencapai target 5 kota besar dalam 3 tahun. Meskipun peningkatan brand *awareness* sebesar 8% dalam satu tahun dan 12% dalam dua tahun telah dicapai, belum mencapai target 10%. UMKM Sari Kedelai Mak Dewi berhasil mendapatkan sertifikasi halal dalam waktu 3 bulan, melebihi target 6 bulan. Selain itu, terdapat pencapaian lainnya termasuk peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan, peningkatan laba perusahaan, serta penghargaan atas kualitas produk dan layanan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dilakukan perincian melalui tabel matriks SOAR sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Matriks Analisis SOAR

	Strengths (Kekuatan)	Opportunities (Peluang)
	1. Kualitas produk unggul dengan cita rasa khas, kebersihan, dan bahan baku berkualitas. 2. Tradisi lokal yang kuat memperkuat identitas merek dan membangun loyalitas pelanggan. 3. Jaringan distribusi yang solid. 4. Inovasi produk dan kemasan menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. 5. Dukungan kuat dari komunitas lokal dan pemerintah daerah. 6. Manajemen yang efisien dalam pengelolaan stok, keuangan, dan operasional sehari-hari. 7. Kualitas layanan yang ramah, responsif, dan personal.	1. Potensi besar dalam meningkatkan permintaan pasar karena masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan gaya hidup sehat. 2. Peluang untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti pasar online dan kerjasama dengan toko-toko retail lokal. 3. Dukungan pemerintah dan program pembinaan UMKM. 4. Inovasi produk dan diversifikasi, termasuk pengembangan varian rasa baru. 5. Perubahan tren dan gaya hidup masyarakat yang cenderung lebih mengutamakan konsumsi makanan sehat.
Aspirations (Aspirasi)		
1. Menjadi brand unggulan dalam pasar.	1. Meningkatkan Diferensiasi Produk 2. Ekspansi Pasar secara Bertahap 3. Penguatan Hubungan dengan Komunitas Lokal	1. Ekspansi Pasar Melalui Platform Online 2. Inovasi Produk Berbasis Permintaan Pasar 3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

2. Meningkatkan pangsa pasar secara lokal dan regional.
3. Mengembangkan inovasi produk.
4. Menjadi motor penggerak ekonomi lokal
5. Pengakuan atas kualitas produk menjadi salah satu aspek utama dalam perumusan strategi pemasaran.

4. Meningkatkan Kualitas Layanan

4. Pemanfaatan Dukungan Pemerintah dan Program UMKM
5. Peningkatan Awareness Melalui Kegiatan Promosi Lokal

Results (Hasil)

1. Peningkatan penjualan produk sari kedelai Mak Dewi sebesar 15% dalam tahun pertama dan 25% dalam dua tahun.
2. Perluasan jangkauan pasar berhasil memasarkan produk di 5 Kecamatan di Bojonegoro dalam 2 tahun.
3. Peningkatan brand awareness sebesar 8% dalam satu tahun dan 12% dalam dua tahun.
4. UMKM Sari Kedelai Mak Dewi berhasil mendapatkan sertifikasi halal dalam waktu 3 bulan.
5. Pencapaian peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan, peningkatan laba UMKM, serta penghargaan atas kualitas produk dan layanan.

1. Optimalisasi Kualitas Produk dan Layanan
2. Pengembangan Program Loyalitas Pelanggan
3. Ekspansi Pasar Berbasis Kualitas
4. Peningkatan Efisiensi Operasional
5. Pengembangan Inovasi Produk

1. Pemanfaatan Peluang Pasar Online
2. Pengembangan Kemitraan Strategis
3. Ekspansi Geografis
4. Partisipasi dalam Program Pemerintah

3.3. Strategi Pemasaran UMKM Sari Kedelai Mak Dewi

Setelah data disampaikan, kemudian divalidasi dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Fuadi (2020). Menurut Fuadi (2020), SOAR terbagi menjadi empat elemen. Pertama adalah kekuatan (*Strength*), yang mencakup semua aspek yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik berupa kekayaan materiil maupun non-materiil yang mendukung kelangsungan usaha, merepresentasikan kapasitas terbesarnya. Kedua adalah peluang (*Opportunities*), yang merupakan faktor eksternal yang perlu dianalisis untuk memahami bagaimana memanfaatkan peluang yang ada, jika diambil oleh organisasi dengan tepat, akan lebih menguntungkan. Ketiga adalah aspirasi (*Aspirations*), yang mencakup tujuan, visi, dan target yang harus dicapai untuk menanamkan keyakinan pada produk, pasar, dan segala upaya untuk mewujudkan visi yang diinginkan. Mendorong semangat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Keempat adalah hasil (*Results*), yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah disepakati tercapai, serta merancang sistem pengakuan dan penghargaan yang dapat mendorong karyawan untuk bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa strategi SOAR (*Strength, Opportunities, Aspirations, Results*) yang diterapkan oleh usaha minuman sari kedelai Mak Dewi.

Strategi SA (*Strengths-Aspirations*) adalah pendekatan yang menggabungkan kekuatan internal perusahaan dengan aspirasi masa depannya. Berikut adalah beberapa strategi SA yang dapat diterapkan oleh UMKM Sari Kedelai Mak Dewi: Pertama, meningkatkan diferensiasi produk dengan memanfaatkan kekuatan internalnya dalam inovasi produk dan kualitas layanan untuk menciptakan produk sari kedelai yang unggul dan membedakan dirinya dari pesaing, fokus pada cita rasa khas, kebersihan, dan kualitas bahan baku, untuk memperkuat identitas mereknya dan memenuhi aspirasi untuk menjadi brand unggulan dalam pasar produk kedelai. Diferensiasi produk yang berhasil adalah yang mampu mengubah fokus persaingan ke aspek lain, seperti karakteristik produk, strategi distribusi, atau elemen promosi lainnya (Tehuayo, 2021). Oleh karena itu, modifikasi yang signifikan pada produk sangat penting dan merupakan keuntungan utama dari pelaksanaan diferensiasi produk. Kedua, merencanakan ekspansi pasar yang bertahap berdasarkan kekuatan distribusi dan jaringan yang solid, untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pangsa pasarnya sesuai dengan aspirasinya untuk meningkatkan pangsa pasar baik secara lokal maupun regional. Ketiga, memanfaatkan dukungan yang kuat dari komunitas lokal dan pemerintah daerah untuk membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, terlibat aktif dalam kegiatan komunitas, dan mendukung inisiatif lokal untuk memperkuat identitas mereknya dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Keterlibatan komunitas memiliki dampak langsung pada strategi pemasaran dan secara tidak langsung memengaruhi kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ketika keterlibatan komunitas tinggi, implementasi strategi pemasaran menjadi lebih efektif dan berhasil meningkatkan kinerja usaha, sedangkan sebaliknya, ketika keterlibatan komunitas rendah, dampaknya dapat berdampak negatif terhadap kinerja usaha (Ishak & Sholehah, 2021). Terakhir, terus meningkatkan kualitas layanan yang ramah, responsif, dan personal untuk memperkuat pengalaman pelanggan, memenuhi aspirasi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Strategi SA ini menggabungkan kekuatan internal UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dengan aspirasi masa depannya untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Dengan penerapan strategi secara konsisten, UMKM dapat memperkuat posisinya di pasar dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi OA (*Opportunities-Aspirations*) merupakan pendekatan yang memanfaatkan peluang eksternal untuk mencapai aspirasi perusahaan. Berikut adalah beberapa strategi OA yang dapat diterapkan oleh UMKM Sari Kedelai Mak Dewi: Pertama, memanfaatkan peluang pasar online yang sedang berkembang pesat dengan menghadirkan produk sari kedelai Mak Dewi di platform e-commerce yang populer. Pasar daring bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sebuah platform digital di mana konsumen dapat membeli barang secara langsung dari penjual melalui internet. Pasar online memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas cakupan pasar mereka dan memperbaiki aksesibilitas produk mereka kepada konsumen modern yang cenderung berbelanja secara online (Siswati, dkk. 2021). Dengan memasuki pasar online, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar secara nasional bahkan internasional, sesuai dengan aspirasi untuk meningkatkan pangsa pasarnya baik secara lokal maupun regional. Ketika UMKM beralih ke pasar online, hal tersebut menjadi kunci untuk menghindari kegagalan finansial dan tetap kompetitif. Mengikuti kemajuan teknologi yang cepat,

UMKM harus menyesuaikan diri dengan platform daring agar tetap relevan dan dapat memperluas cakupan bisnis mereka. Kedua, mengeksplorasi peluang inovasi produk sari kedelai berdasarkan tren dan permintaan pasar. Melalui riset pasar dan pengumpulan umpan balik dari pelanggan, UMKM dapat mengembangkan varian rasa baru dan produk-produk inovatif lainnya yang sesuai dengan preferensi konsumen modern. Keberadaan inovasi produk dalam industri bisnis menjadi krusial karena harus mampu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika keinginan pelanggan yang terus berubah. Melalui inovasi produk, pengusaha dapat menciptakan produk yang lebih superior serta menarik minat konsumen secara lebih efektif. Selain itu, inovasi produk juga membuka peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan (Sari, dkk. 2022).

Hal ini akan mendukung aspirasi untuk terus mengembangkan inovasi produk guna memenuhi selera pasar dan memperluas variasi produk. Ketiga, memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak eksternal, seperti toko-toko retail lokal, kafe, atau restoran, untuk meningkatkan distribusi produk sari kedelai Mak Dewi. Dengan menjalin kemitraan yang strategis, UMKM dapat memperluas jangkauan distribusinya ke lebih banyak titik penjualan, sesuai dengan aspirasi untuk menjadi brand unggulan dalam pasar produk kedelai. Keempat, memanfaatkan peluang dukungan dari pemerintah dan program pembinaan UMKM untuk mendapatkan pelatihan, bantuan modal, dan akses ke pasar yang lebih besar. UMKM dapat aktif mengikuti program-program pemerintah dan bergabung dalam jaringan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya. Hal ini sejalan dengan aspirasi untuk memberdayakan ekonomi lokal dan menjadi motor penggerak ekonomi di wilayahnya. Terakhir, memanfaatkan peluang promosi lokal, seperti festival kuliner atau acara komunitas, untuk meningkatkan awareness produk sari kedelai Mak Dewi di kalangan masyarakat lokal dan regional. Dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan promosi lokal, UMKM dapat membangun brand awareness yang kuat dan mendukung aspirasi untuk menjadi brand unggulan dalam pasar produk kedelai. Dengan menerapkan strategi OA ini, UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat memanfaatkan peluang eksternal yang ada untuk mencapai aspirasi bisnisnya dan meningkatkan pertumbuhan serta keberlanjutan usahanya.

Strategi SR (*Strengths-Results*) adalah pendekatan yang memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut beberapa strategi SR yang bisa diterapkan oleh UMKM Sari Kedelai Mak Dewi: Pertama, mengoptimalkan kualitas produk dan layanan dengan memanfaatkan kekuatan internal dalam menghasilkan produk dengan kualitas unggul dan layanan yang berkualitas tinggi. Kualitas layanan memainkan peran krusial dalam memastikan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Tingkat kualitas layanan yang tinggi berpotensi menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi seberapa sering mereka melakukan pembelian (Armaniah, dkk. 2019). Kedua, memanfaatkan keunggulan layanan dan produk untuk mengembangkan program loyalitas pelanggan yang menarik, sehingga mempertahankan dan meningkatkan basis pelanggan. Ketiga, menggunakan reputasi kualitas yang terbangun dengan baik untuk ekspansi pasar ke wilayah-wilayah baru, menarik perhatian pasar baru, dan meningkatkan pangsa pasar secara signifikan. Keempat, memanfaatkan manajemen yang efisien dalam pengelolaan stok, keuangan, dan operasional sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Kelima, terus melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi produk baru dan meningkatkan variasi produk yang ditawarkan, tetap relevan di pasar yang berubah-ubah. Melalui penerapan strategi SR ini, UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat memanfaatkan kekuatannya untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan yang tinggi, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Strategi OR (*Opportunities-Results*) melibatkan penggunaan peluang eksternal untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam bisnis. Berikut beberapa strategi OR yang dapat diterapkan oleh UMKM Sari Kedelai Mak Dewi: Pertama, memanfaatkan peluang pasar online dengan memperluas penjualan produk sari kedelai Mak Dewi melalui platform e-commerce yang sedang berkembang pesat. Kedua, mengeksplorasi peluang untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal seperti kafe, restoran, atau toko-toko retail lokal untuk memperluas distribusi produknya ke lebih banyak titik penjualan. Ketiga, memanfaatkan peluang untuk memperluas jangkauan pasar ke wilayah-wilayah baru, baik di tingkat lokal maupun regional, dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi pasar-pasar potensial yang belum terjamah. Penetapan target pasar memainkan peran sentral dalam ranah ekonomi dan dunia bisnis

(Kurubiyah, 2022). Menentukan jangkauan pasar merupakan suatu proses esensial dalam memahami dinamika industri tertentu, termasuk segmen target, preferensi pelanggan, pola pembelian, kompetisi, dan elemen-elemen penting lainnya. Dalam upaya mendirikan suatu usaha, analisis pasar menjadi kritis guna menilai apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan pasar dan apakah memiliki daya tarik yang cukup di mata konsumen (Nadapdap & Helmy, 2023). Keempat, mengambil bagian dalam program-program dukungan pemerintah untuk UMKM, seperti pelatihan, bantuan modal, atau akses ke pasar, guna memperoleh sumber daya tambahan dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Kelima, mengeksplorasi peluang untuk mengembangkan produk-produk baru atau varian rasa yang inovatif sesuai dengan tren dan preferensi pasar, sehingga mempertahankan minat konsumen dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan strategi OR ini, UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat mengoptimalkan peluang eksternal yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam bisnisnya, seperti peningkatan penjualan, pangsa pasar, dan keberlanjutan usaha secara keseluruhan.

Dengan penerapan berbagai strategi yang telah diuraikan, tantangan pasar dapat dihadapi oleh UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dengan lebih mantap, dan potensi pertumbuhan bisnis dapat dioptimalkan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi SOAR yang diterapkan oleh usaha minuman sari kedelai Mak Dewi memiliki kekuatan sebagai fondasi utama bagi pengembangan usaha tersebut. Strategi-strategi seperti SA (*Strengths-Aspirations*), OA (*Opportunities-Aspirations*), SR (*Strengths-Results*), dan OR (*Opportunities-Results*) dapat membimbing UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dalam mengatasi tantangan pasar dan meningkatkan potensi pertumbuhan bisnisnya. Strategi SA, yang menggabungkan kekuatan internal dengan aspirasi masa depan, dapat diterapkan dengan meningkatkan diferensiasi produk, merencanakan ekspansi pasar bertahap, memanfaatkan dukungan komunitas lokal, dan meningkatkan kualitas layanan. Dalam hal ini, diferensiasi produk yang berhasil adalah yang mampu mengubah fokus persaingan ke aspek lain, seperti karakteristik produk, distribusi, atau promosi. Strategi OA memanfaatkan peluang eksternal untuk mencapai aspirasi perusahaan. UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat menerapkan strategi OA dengan memanfaatkan peluang pasar online, inovasi produk, kemitraan eksternal, dukungan pemerintah, dan promosi lokal. Strategi SR memanfaatkan kekuatan internal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk itu, UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat mengoptimalkan kualitas produk dan layanan, mengembangkan program loyalitas pelanggan, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan melakukan riset dan pengembangan produk. Strategi OR melibatkan penggunaan peluang eksternal untuk mencapai hasil yang diinginkan. UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat memanfaatkan peluang pasar online, kemitraan eksternal, ekspansi pasar, dukungan pemerintah, dan inovasi produk. Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut secara konsisten, UMKM Sari Kedelai Mak Dewi dapat menghadapi tantangan pasar dengan lebih baik dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan bisnisnya.

5. SARAN

Penelitian ini terbatas pada penggunaan metode SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Results*) dalam pengembangan strategi pemasaran untuk UMKM Sari Kedelai Mak Dewi. Saran alternatif metode analisis untuk pengembangan strategi pemasaran UMKM Sari Kedelai Mak Dewi meliputi Analisis SWOT, PESTEL, *5 Forces Porter*, *Customer Journey*, dan *Value Chain*. SWOT memfokuskan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sementara PESTEL mempertimbangkan faktor eksternal makro. *5 Forces Porter* mengidentifikasi kekuatan industri, sementara *Customer Journey* dan *Value Chain* memetakan perjalanan pelanggan dan rantai nilai. Integrasi metode ini memberikan wawasan holistik terhadap lingkungan bisnis dan membantu UMKM mengembangkan strategi pemasaran yang efektif sesuai dengan tujuan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R., Malik, E., Adan, L. H., & Djaâ, A. (2021). Penerapan strategi pemasaran sebagai upaya meningkatkan usaha kecil dan menengah di desa wawoangi kec. Sampoiawa ditengah pandemic COVID-19. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*,

2(1), 76-80.

- Amaniah, H., Marthahanti, A.S., & Yusuf, F. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA BENGKEL AHASS HONDA TANGERANG. *Managerial – Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*. 2(2).
- Cesariana, C., Juliansyah, F., & Fitriyani, R. (2022). Model keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen pada marketplace: Kualitas produk dan kualitas pelayanan (Literature review manajemen pemasaran). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 211-224.
- Elwisam, E., & Lestari, R. (2019). Penerapan strategi pemasaran, inovasi produk kreatif dan orientasi pasar untuk meningkatkan kinerja pemasaran UMKM. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(2), 277-286.
- Fuadi, A. (2020). Analisis strategi SOAR balai diklat aparaturnya kementerian kelautan dan perikanan menuju corporate university. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1).
- Ishak, P., & Sholehah, N. L. H. (2021). Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 207-224.
- Kurubiyah, K. (2022). Pentingnya Analisis Pasar dalam Mendirikan Sebuah Bisnis. [10.31219/osf.io/4feqx](https://doi.org/10.31219/osf.io/4feqx)
- Nadapdap, J. P., & Helmi, A. Y. (2023). Menyemai Bibit Investor Masa Depan: Pentingnya Edukasi Pasar Modal Di Lingkungan Pendidikan Di Sman 1 Bengkayang Dan Sman 2 Bengkayang. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 57-64.
- Putri, A. D., Permatasari, B., & Suwarni, E. (2023). Strategi Desain Kemasan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Produk Umkm Kelurahan Labuhan Dalam Bandarlampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 4(1), 119-123.
- Ramadhani, I. (2024). ANALISIS STRATEGI SOAR DALAM MENINGKATKAN PEMASARAN KALIBRASI DI PT. PAL INDONESIA. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(1), 530-536.
- Santoso, D., & Widyatmini, T. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI ANALISIS SOAR (STUDI KASUS PADA BISNIS CLOTHING SOLID OBJECT). *UG JURNAL*, 16(4), 58-66.
- Sari, D. M. F. P., Putri, N. L. B. M., & Martini, I. A. O. (2023). PENYULUHAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMKM BOKORAN DESA KUSAMBA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN. *Abdimas Galuh*, 5(1), 698-703.
- Siswati, E., Rinaldi, F. A., Qoiroh, R. I., Almira, N. A., & Ariyanto, R. R. (2021). Peningkatan Pangsa Pasar Kelompok UMKM melalui Penjualan Online dan Offline di Kelurahan Rungkut Menanggal. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 6(2), 137-144.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suryadi, S. (2021). Penerapan Analisis SOAR Dalam Strategi Pengembangan Bisnis Clothing Line Parasite Cloth. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Tehuayo, E. (2021). Pengaruh Diferensiasi Produk, Inovasi Produk, dan Iklan terhadap Loyalitas Konsumen Shampo Sunsilk di Kota Ambon. *Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran & SDM*, 2(2), 69-88. <https://doi.org/10.47747/jnmpsdm.v2i2.27>

Analisis Pengaruh Program Petani Mandiri Terhadap Hasil Produksi Padi Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Yaumitdin Sugianto¹, Sugiharti Mulya Handayani², Ernoiz Antriandarti²

¹ Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta

² Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: yaumitdinsugianto@student.uns.ac.id

Abstract: This research examines the analysis of the influence of the Independent Farmer Program on rice production results in Sumbertlaseh Village, Dander District, Bojonegoro Regency. The aim of this research is to analyze the Independent Farmer Program in increasing farmers' rice production. The main focus of the research is the independent farmer program in increasing rice production. This research uses qualitative data analysis which emphasizes thinking skills and quantitative data analysis. The data analysis method in this research used multiple regression analysis in logarithmic form. The model used is the Cobb-Douglas production function, with a sampling process using purposive sampling of 100 members of farmer groups in Sumbertlaseh Village. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The regression results show that the independent farmer program significantly influences rice production results, certified seeds and also the use of fertilizer in accordance with recommendations in the independent farmer program have a significant impact. This shows that the Independent Farmer Program has succeeded in providing significant benefits in improving the welfare and independence of farmers in Sumbertlaseh Village, Dander District, Bojonegoro Regency.

Keywords: Effectiveness of the Independent Farmer Program, Rice Production

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Program Petani Mandiri terhadap hasil produksi padi di Desa Sumbertlaseh yang terletak di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Program Tani Mandiri terhadap produksi padi petani. Program yang dirancang untuk meningkatkan produksi padi oleh petani mandiri menjadi fokus utama penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif, dengan penekanan pada pemikiran kritis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda logaritmik sebagai metode analisis data. Model yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas, dan teknik purposive sampling digunakan untuk memilih seratus anggota kelompok tani yang berada di Desa Sumbertlaseh. Metode pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil regresi menunjukkan bahwa program petani mandiri berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi padi; penggunaan bibit bersertifikat dan pupuk sesuai rekomendasi program juga memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Program Petani Mandiri di Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, efektif meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan produsen.

Kata kunci: Efektifitas Program Petani Mandiri, Produksi Padi

1. PENDAHULUAN

Pertanian memainkan peran strategis dalam pangan dan perekonomian negara. Di Indonesia, pertanian merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. Namun para petani menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usaha pertaniannya, terutama terkait terbatasnya akses terhadap modal, pengetahuan, dan teknologi pertanian modern. Hal tersebut pernah dialami oleh para petani di Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan daerah dengan prospek pertanian yang baik. Produktivitas dan kesejahteraan dapat terkena dampak negatif dari terbatasnya akses terhadap modal, pengetahuan, dan teknologi untuk pengembangan bisnis di berbagai sektor (Kurniawan dkk., 2023).

Sebagai sektor ekonomi penting di Indonesia, pertanian mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi pedesaan, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan pangan. Industri pertanian masih menjadi pilar andalan masyarakat Indonesia, mengingat industri ini mampu mengatasi krisis pangan yang sering menimpa bangsa ini. Pengamatan ini menunjukkan bahwa pertanian tidak hanya merupakan industri yang dapat diandalkan, namun juga memiliki kemampuan yang cukup besar dalam mendukung perekonomian bangsa, khususnya dalam hal ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia karena merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan (Suratha, 2014). Agar pertanian menjadi penyedia rezeki utama dan penggerak ekspansi ekonomi.

Secara garis besar, pertanian dapat dicirikan sebagai terdiri dari empat elemen yang saling berhubungan: proses produksi, individu atau badan yang terlibat dalam usaha pertanian, pemanfaatan lahan pertanian, dan berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha pertanian (Soetrisno, 2006). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bojonegoro, dengan fokus khusus pada petani yang menghadapi kendala dalam menjalankan usaha pertanian karena terbatasnya akses, pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Program Petani Mandiri. Inisiatif ini memberikan berbagai kemudahan kepada petani yang terdaftar dan memiliki Kartu Petani Mandiri (KPM). Tujuan utama Program Petani Mandiri adalah untuk memberikan bantuan modal nyata dalam bentuk produk kepada para petani, sehingga mendorong kemandirian dan meningkatkan taraf hidup mereka (Sugiyanto dkk., 2023). KPM berfungsi sebagai instrumen identifikasi yang memberikan akses kepada produsen terhadap manfaat PPM.

Petani menerima masukan berupa bibit bersertifikat dan pupuk yang diformulasikan sesuai dosis yang ditentukan melalui Program Petani Mandiri. Selain itu, sejumlah program lain yang berkaitan dengan pembangunan pertanian juga dimasukkan ke dalam kerangka ini (Armanto dan Kurniawan, 2022). Bantuan ini merupakan salah satu faktor penentu yang mempengaruhi produksi beras, selain kepemilikan lahan oleh petani. Dilaksanakannya program PPM ini menandakan dedikasi pemerintah terhadap kemajuan industri pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Program PPM ini resmi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri yang telah diubah sehubungan dengan perubahan Peraturan Bupati No. 20 tahun 2019.

Sebagai faktor pendukung produksi, program PPM diharapkan dapat memperlancar budidaya padi di Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, melalui penyediaan input, lahan, dan teknologi. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan pertanian harus mampu mengkoordinasikan unsur-unsur produksi yang bersifat modal, termasuk tanah dan lingkungan alam, menurut Surtiyah (2015). Untuk menghasilkan barang-barang pertanian diperlukan berbagai variabel produksi, antara lain tenaga kerja, modal, lahan, dan pengelolaan pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi terbagi dalam dua kategori, menurut Mahmud dkk. (2022):

- a. Variabel biologi, antara lain kesuburan lahan pertanian, vegetasi, benih, variasi pemupukan, obat-obatan, dan lain sebagainya;
- b. Faktor sosial ekonomi termasuk ketersediaan kredit, harga, biaya produksi, tenaga kerja, dan pendidikan.

Pengusaha dan petani yang terlibat dalam pengoperasian dan pengembangan usaha pertanian harus memikirkan strategi distribusi input yang optimal untuk mencapai hasil yang optimal, mengingat tantangan yang ada (Soekartawi, 2003). Untuk mengetahui pengaruh Program Petani Mandiri terhadap produktivitas padi di Desa Sumbertlaseh Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dilakukan penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor Produksi

Keterampilan, tenaga kerja, luas lahan, dan alat produksi merupakan empat komponen dasar produksi pertanian. Setiap faktor produksi mempunyai fungsi yang berbeda dan saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satu variabel tersebut tidak ada maka proses kegiatan agribisnis terhenti. Penjelasan koefisien produksi adalah sebagai berikut:

1. Luas lahan

Lahan, khususnya lahan budidaya, merupakan faktor penentu paling penting dalam

produksi pertanian. Besarnya lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh suatu bisnis sangat penting bagi keberhasilannya. Oleh karena itu, wilayah budidaya sangat penting untuk meningkatkan hasil usaha pertanian. Yang dimaksud dengan lahan pertanian adalah lahan yang dipersiapkan khusus untuk budidaya tanaman, seperti pekarangan, sawah, dan ladang. Akibatnya, luas lahan yang diperuntukkan bagi pertanian selalu lebih besar dibandingkan dengan lahan non-pertanian (Soekartawi, 1990). Banyaknya hasil pertanian yang dihasilkan berbanding lurus dengan luas lahan pertanian. Sebagaimana dikemukakan Suratiyah (2006), output pertanian dan pendapatan satuan meningkat seiring dengan bertambahnya luas lahan.

2. Tenaga kerja

Perluasan produksi memerlukan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas memadai dan dalam jumlah besar. Tenaga kerja diperlukan sesuai dengan sifat tugas dan tingkat kemahiran individu untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Tenaga kerja merupakan komponen penting dalam produksi pertanian, yang mencakup tugas-tugas seperti pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pekerjaan pasca panen (Damayanti 2013). Ruang lingkup ketenagakerjaan mencakup anggota keluarga dan non-keluarga. Tenaga kerja non-keluarga, disebut juga “tenaga kerja”, berasal dari sumber di luar keluarga dan tunduk pada peraturan (Hartati, 2018). Pembatasan tenaga kerja selama 24 jam diberlakukan untuk mengoptimalkan aktivitas perolehan upah dalam jangka waktu tersebut. Pembayaran kompensasi tenaga kerja pada tahap pembibitan, pemupukan, pengendalian, dan penyiangan diatur oleh Silvira dkk. (2024) sesuai dengan output tenaga kerja harian. Untuk sementara, kompensasi bagi pekerja yang terlibat dalam pengolahan lahan, penanaman, dan pemanenan bergantung pada skala luas lahan yang dikembangkan. Besarnya kompensasi bagi pekerja bergantung pada luas lahan yang dikembangkan.

3. Sarana produksi (permodalan)

Kegiatan proses produksi pertanian melibatkan pembagian modal menjadi dua kategori berbeda: modal tetap dan modal variabel (Mahud et al., 2022). Modal tetap terdiri dari faktor produksi berwujud, seperti tanah, bangunan, dan mesin, yang tidak dapat dikurangi atau diukur melalui penggunaan. Oleh karena itu, biaya-biaya yang digunakan tetapi tidak habis sebagai faktor produksi dalam waktu singkat merupakan modal tetap (Soekartawi, 2003). Sedangkan modal tidak tetap terdiri dari biaya-biaya yang hanya dikonsumsi satu kali selama produksi. Misalnya, upah tenaga kerja atau biaya produksi yang terkait dengan perolehan bibit, pupuk, atau obat-obatan.

Salah satu elemen penting dalam menjamin hasil padi adalah pemenuhan kebutuhan produksi pertanian. Termasuk di dalamnya pemilihan benih unggul varietas premium yang dikemas dalam karung plastik dan memiliki sertifikat keaslian. (2018). (Ashar dan Balqis). Namun dalam praktiknya, banyak petani yang memanfaatkan benih mereka sendiri, yaitu benih yang dikeringkan dari padi yang telah dipanen sebelumnya dan digunakan kembali sebagai benih; akibatnya, output akan semakin menurun. Peningkatan hasil padi selanjutnya dipengaruhi oleh pemupukan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan tanaman. Pemupukan yang tepat memerlukan strategi yang matang dan pelaksanaan yang tepat waktu. Sangat disarankan untuk mematuhi dosis pupuk kimia yang ditentukan untuk mencegah overdosis, yang berpotensi mengubah komposisi unsur hara tanah dan membahayakan unsur-unsur penyusunnya. (Butaflika et al., 2022).

B. Program Petani Mandiri

Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani, Program Petani Mandiri (PPM) memberikan manfaat sebagai berikut: Bantuan dana, akses prioritas terhadap pengembangan dan pelatihan usaha pertanian, jaminan pembelian produk pertanian, asuransi gagal panen, dan peluang beasiswa bagi anak-anak yang berasal dari pertanian. rumah tangga petani merupakan komponen dari inisiatif ini. Untuk dapat menerima bantuan melalui Program Petani Mandiri (PPM), produsen wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Seorang anggota yang bereputasi baik di organisasi petani setempat.
2. Memiliki KPM (Kartu Tani Mandiri).
3. Kepala keluarga yang tidak konsisten diberikan bantuan hibah oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Membuat surat pernyataan kesiapan Anda untuk melakukan kegiatan dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut tujuan Program Petani Mandiri (Armanto dan Kurniawan 2022):

1. Memberikan bantuan berupa tanah dan pupuk
Bantuan benih dan pupuk kepada petani merupakan salah satu contoh modal pertanian yang digunakan untuk membantu petani pada musim tanam. Kewenangan pembagian bibit dan bantuan pupuk dilimpahkan kepada pimpinan masing-masing kelompok tani di desa. Biaya input untuk produksi tunduk pada anggaran biaya terjadwal (RAB) yang dilampirkan pada usulan pengajuan dan dibatasi sebesar Rp 2.500,00 per hektar. Benih padi yang disediakan sebanyak 25 kg/ha dan pupuk yang digunakan sebanyak 300 kg/ha.
2. Pelatihan dan pemajuan petani
Program petani otonom menawarkan peluang pengembangan dan pelatihan bagi usaha pertanian, termasuk pengajaran dalam desain kemasan, pengolahan produk pertanian, dan kerajinan tangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian berpuncak pada tahap analisis data. Setelah pengumpulan dan reduksi data-data yang diperlukan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, dilakukan analisis (Musfiquon, 2012). Analisis data digunakan dalam penelitian ini sebagai prosedur metodis untuk menemukan, memanipulasi, dan menyusun data yang dikumpulkan. Para peneliti menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif, dengan penekanan lebih besar pada kemampuan kognitif. Dengan menggunakan metode ini, signifikansi data secara keseluruhan ditentukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Setelah pengumpulan dan reduksi data-data yang diperlukan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, dilakukan analisis (Musfiquon, 2012). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif, dengan penekanan pada pemikiran kritis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda logaritmik sebagai metode analisis datanya (Ghozali, 2018). Fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan model yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara input produksi sebagai faktor yang mempengaruhi dan produksi beras sebagai variabel terikat. Berikut rumus umum faktor produksi Cobb-Douglas:

$$\text{Ln}Y = \text{Lna} + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \beta_4 \text{Ln}X_4 + \beta_5 \text{Ln}X_5 + \beta_6 \text{Ln}D_1$$

Keterangan:

Y = Hasil Produksi Padi (Kw)

a = Konstanta

Ln X₁ = Luas Lahan (Ha)

Ln X₂ = Tenaga Kerja (HOK)

Ln X₃ = Benih (Kg)

Ln X₄ = Pupuk (Kg)

Ln X₅ = Sewa Traktor (MT)

D1 = Dummy Mengikuti Program Petani Mandiri

(Dummy 1= Ikut Program Petani Mandiri; 0 = Tidak Ikut Program Petani mandiri).

Dampak pemanfaatan bibit padi bersertifikat terhadap program petani mandiri menjadi fokus utama penelitian. Lokasi penelitian adalah Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Para peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan individu yang tergabung dalam kelompok tani.

Prosedur pengambilan sampel kemudian dilakukan terhadap 100 orang anggota organisasi petani di Desa Sumbertlaseh yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan observasi, pemilihan data yang bersangkutan, penyajian temuan penelitian, dan pemilihan data yang akan digunakan dalam penelitian. (Suharsimi & Arikunto, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembuatan biji padi melibatkan penggunaan peralatan produksi yang meliputi mesin, pestisida, lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, dan benih (Onibala et al., 2017). Perlu dilakukan penerapan prosedur dan pengendalian untuk mengetahui apakah penerapan faktor produksi dapat mempengaruhi produksi beras. Oleh karena itu, teori fungsi produksi digunakan untuk memastikan fenomena ini. Untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang benar-benar mempengaruhi produksi padi, digunakan analisis regresi linier berganda yang dipadukan dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Dengan menggunakan analisis regresi ini, dapat diketahui elastisitas variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil uji regresi linear berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	Sig.
(Constant)	-3.091	-1.630	0.107
Luas Lahan	4.302**	2.151	0.034
Benih	0.201**	2.870	0.037
Pupuk	0.019**	1.997	0.021
Tenaga Kerja	7.362E-7	0.875	0.384 NS
Mesin	2.409E-6	0.776	0.440 NS
R ²	0.548		
t Tabel	1.9839		
F Hitung	18.780***		
F Tabel	2.20		

Keterangan :

** = signifikan Pada tingkat kepercayaan 95% (a=0,05)

*** = signifikan Pada tingkat kepercayaan 99% (a=0,01)

Ns = tidak signifikan

Persamaan garis regresi linier yang diperoleh dari data yang disajikan pada tabel adalah sebagai berikut:

$$Y = -3.091 + 4.302X_1 + 0.201X_2 + 0.019X_3 + 7.362E-7X_4 + 2.409E-6X_5 + 0.355X_6$$

Interpretasi dari analisis regresi berganda dan hasil persamaan regresinya adalah sebagai berikut: Nilai konstanta (a) bertanda negatif sebesar -3,091 yang berarti produksi akan menurun jika variabel yang mewakili luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja dimasukkan. , mesin, dan hantu semuanya disetel ke nol (0). Nilai koefisien regresi positif pada variabel luas lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, mesin, dan dummy menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Sebagaimana dikemukakan oleh Gujarati (2007), elastisitas produksi sama dengan penjumlahan koefisien regresi.

Berdasarkan temuan analisis faktor produksi, produksi padi di Desa Sumbertlaseh meningkat secara signifikan melalui program PPM. Luas lahan yang ditempati produsen penerima PPM mempunyai dampak signifikan terhadap hasil produksi beras. Produksi berbanding lurus dengan luas lahan. Produksi pertanian sebagian besar dipengaruhi oleh luas lahan; dengan kata lain, seiring bertambahnya luas lahan, produksi pun meningkat (Rahim dan Hastuti, 2008). Kemanjuran pertanian bukan satu-satunya faktor yang dipengaruhi oleh luas lahan; upaya untuk menyebarkan dan menerapkan teknologi dalam pembangunan pertanian juga terkena dampaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Andrias dkk. (2017).

Kelalaian dalam melakukan rekonsiliasi luas lahan dengan teknologi akan mengakibatkan penurunan produksi.

Program PPM Kelompok Tani Desa Sumbertlaseh mengoperasikan fasilitas benih bersertifikat dan mensubsidi pupuk seperti yang disarankan. Bantuan dari KPM terdiri dari subsidi pupuk, pestisida, dan input lainnya, serta bibit bersertifikat. Memilih benih bersertifikat akan meningkatkan produksi lebih jauh lagi. Benih bersertifikat mempunyai manfaat sebagai berikut: ketahanan terhadap penyakit dan hama tanaman, pencegahan benih keropos, dan respon yang baik terhadap pemupukan, yang diperkirakan akan menghasilkan peningkatan hasil yang signifikan. Hal ini sesuai dengan temuan Penelitian Raditnya (dkk. 2015) yang menunjukkan bahwa lahan seluas 0,53 Ha yang ditanami benih padi bersertifikat menghasilkan hasil 5,122 ton per hektar, sedangkan pada lahan seluas 0,67 Ha yang ditanami benih padi bersertifikat menghasilkan hasil 5,122 ton per hektar, sedangkan pada lahan seluas 0,67 Ha yang ditanami benih padi non-sertifikasi menghasilkan 3.918 ton per hektar.

Menurut penelitian Suhendrata (2008), peningkatan produksi padi terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas lahan dan bukan peningkatan luas panen. Astuti dan Wibawa (2014) menjelaskan bahwa luas panen dan interaksi kedua faktor tersebut memberikan kontribusi masing-masing sebesar 26,3% dan 17,5% terhadap produksi padi pada tahun 1971 hingga 2006. Pertumbuhan produktivitas menyumbang 56,1% dari total produksi. Pemupukan merupakan faktor utama yang menentukan produktivitas (Maryeni, 2009). Yang terjadi pada petani non-PPM di Desa Sumbertlaseh adalah penggunaan pupuk yang tidak sesuai anjuran. Karena produsen non-PPM menggunakan rata-rata kurang dari 300 kilogram pupuk, maka tidak ada peningkatan produksi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari Program Petani Mandiri di Desa Sumbertlaseh adalah bahwa Program Petani Mandiri memiliki dampak positif yang berkelanjutan. Melalui pemberian pupuk yang sesuai anjuran dan juga penggunaan benih bersertifikat petani bisa meningkatkan produksi padi dan juga memperkecil gagal akibat serangan hama penyakit di tanaman, Program ini membuktikan bahwa benih yang bersertifikat dan juga penggunaan pupuk yang sesuai dengan anjuran pada program petani mandiri memiliki dampak signifikan untuk meningkatkan produksi.

6. SARAN

Saran yang bisa dilakukan setelah penelitian yaitu.

- a. Program Petani Mandiri perlu ditingkatkan terus menerus dengan juga melibatkan generasi muda serta petani yang sudah berhasil dalam mengikuti Program petani mandiri.
- b. Perlu ditambah kegiatan yang fokus di pemuda dalam proses regenerasi pertanian untuk mempermudah transfer informasi dan transfer teknologi di bidang pertanian
- c. Untuk mendorong produsen menggunakan teknologi benih unggul, pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai penggunaan benih bersertifikat. dan menambah pasokan benih bersertifikat untuk mengurangi mahalnya harga benih tersebut.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh civitas akademika Universitas Sebelas Maret Program Studi Agribisnis Surakarta atas dukungannya yang sangat berharga dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan naskah ini. Teman dan kolega, selain orang tua penulis, istri, dan anak-anak, yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, juga mengucapkan terima kasih.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, Anggar A Darusman Y, dan Ramdan R. 2017. Pengaruh Luas Lahan Terhadap Produksi Dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Agroinfo Galuh* 4 (1): 521–29.
- Astuti H.B. dan Wibawa W. 2014. Penerapan Teknologi Pemupukan Padi Sawah di Provinsi Bengkulu. *Agrisep*. 14(1): 50:59
- Burhan Bungin. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Butaflika B., Haryono D., Endaryanto T. 2022. Dampak Program Kartu Petani Berjaya Terhadap Produksi Dan Pendapatan Usahatani Padi Di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Kelitbangan*. 10 (2): 163-17
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan. Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Eko S. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Samarinda.
- Fukuyama, 1995. trust the social virtues and the creation of prosperity. FreePress. Kesi, Widjajanti. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12, No.1
- Musfiquon. 2012. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka.
- Soetriono, A. Suwandari. Rijanto. 2006. Pengantar Ilmu Pertanian. Bayumedia Publishing. Malang
- Suharto, Edi. , 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS.
- Sulferi. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi produksi padi di Kabupaten oppeng. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/6133/1/SULFERI.pdf>
- Sri sumi, 2021. Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Bojonegoro Jatim, Dengan Menerima Hibah Modal dari Pemda Bojonegoro
- Suratha, I Ketut. 2014. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Ketahanan Pangan. <https://ejournal.undiksha.ac.id>. Vo. 15. No. 02 Diakses pada 21 Agustus 2023
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syahrani, Mela. 2022. Luas Panen Padi Indonesia Selama Tahun 2022. <https://data.goodstats.id>. Diakses pada 09 juni 2023
- Kurniawan A.F., Suharto E, dan Andari D.W.T. 2023. Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum. *Tunas Agraria*, 6 (3):204 -219,
- Onibala A., G., Sondakh M.,L., Kaunang R., Mandei J. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Produksi Padi Sawah Di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan. *Agri Sosio Ekonomi Unsrat*. 13(2): 237-242.
- Gujarati Damodar N. 2007. Dasar Dasar Ekonometrika. Penerbit Erlangga. Jakarta

Analisis Pendapatan Nelayan di Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul

Adisti Regita Ramadani, Endang Siti Rahayu, Wiwit Rahayu

*Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No.36 A Ketingan Surakarta 57126 Telp/Fax (02171) 637457*

Email: adistiuns2020@gmail.com

Abstract: *Fisherman is a profession whose activities fall within the active category in fishing operations and other marine resources. Fishing is a noble livelihood that often needs to be continued through the transfer of knowledge to the younger generation. Girisubo District in Gunungkidul Regency is a location where there are many fishermen. The fishermen there are traditional fishermen with jukung boats. Jukung boats are small boats with a fish capacity of 1 GT and a 15 PK engine. The fish commodities caught are pelagic fish of the type Tuna, mackerel, and Fish. The income received in one month is IDR 20,250,000,- with total business costs of IDR 4,853,889,- per month. Fishermen get a net income after deducting business costs in one month of IDR 15,396,111,-. The net income of these fishermen contributes 66% of the income of fishermen's households with family members who work by farming, making fruit basket crafts, opening stalls, working as search and rescue teams, and as construction workers.*

Keyword: *Fish, Fishermen, Income, Revenue, Fisheries Resources*

Abstrak: Nelayan merupakan profesi yang kegiatannya berada dalam interval dengan kategori aktif dalam operasi penangkapan ikan dan sumber daya kelautan lainnya. Sejatinnya, nelayan merupakan mata pencaharian mayoritas bagi masyarakat yang diteruskan melalui transfer ilmu pengetahuan kepada generasi muda. Kecamatan Girisubo yang berada di Kabupaten Gunungkidul merupakan lokasi yang banyak di dalamnya terdapat nelayan. Nelayan di sana merupakan nelayan tradisional dengan perahu jukung. Perahu jukung merupakan perahu kecil dengan kapasitas tampung ikan 1 GT (*Gross Tonnage*) dan mesin bertenaga 15 PK (*Paard Kracht*). Komoditas ikan yang ditangkap merupakan ikan pelagis dengan jenis Ikan Tuna, Ikan Kembung, dan Ikan Sebelah. Penerimaan yang diterima dalam satu bulan sebesar Rp20.250.000,- dengan total biaya usaha Rp4.853.889,- per bulannya. Nelayan mendapatkan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya usaha dalam satu bulan sebesar Rp15.396.111,-. Pendapatan bersih nelayan ini menyumbang 66% dari pendapatan rumah tangga nelayan dengan anggota keluarga yang bekerja dengan berladang, membuat kerajinan keranjang buah, membuka warung, menjadi tim SAR (*Search and Rescue*), dan buruh bangunan.

Kata Kunci : *Ikan, Nelayan, Pendapatan, Penerimaan, Sumber Daya Perikanan*

1. PENDAHULUAN

Nelayan merupakan profesi yang kegiatannya berada dalam interval dengan kategori aktif dalam operasi penangkapan ikan dan sumber daya kelautan lainnya. Nelayan juga dapat melakukan pekerjaan yang berkulat di sekitar pesisir misalnya dengan budidaya ikan dan rumput laut sebagai usaha lebih dalam memberdayakan sumber daya kelautan dan menghasilkan pendapatan lebih. Sejatinnya, nelayan merupakan mata pencaharian mulia yang sering yang dalam perlu untuk diteruskan melalui transfer ilmu pengetahuan kepada generasi muda. Menurut Andesfi *et al.*, (2019), Indonesia sebagai negara maritim memiliki lautan yang sangat luas. Mata pencaharian nelayan sudah selayaknya mendapatkan dukungan melalui penelitian-penelitian yang menambah pengetahuan serta kepedulian masyarakat luas terhadapnya. Nelayan di Indonesia didominasi oleh nelayan kecil atau nelayan tradisional seperti nelayan yang menggunakan perahu jukung. Usaha skala kecil nelayan tradisional dilakukan dengan menggunakan perahu-perahu layar kecil dalam aktivitasnya yang berpusat di pantai-pantai laut dangkal. Nelayan tradisional juga harus bergulat dengan harga ikan di pasaran mengikuti musim ikan yang berlangsung (Wibowo *et al.*, 2018).

Kecamatan Girisubo memiliki banyak sekali pantai yang menjadi pelabuhan para nelayan untuk mencari Sumber Daya Alam Perikanan. Menurut Riandani *et al.*, (2015), hal ini mendukung pemerintah daerah untuk membangun pelabuhan perikanan yang dapat mengembangkan potensi perekonomian masyarakat. Jumlah nelayan lokal di sana mencapai 323 orang pada tahun 2015 tergabung pada Kelompok Nelayan Minaraharjo sehingga Kecamatan Girisubo memiliki nelayan terbanyak se-Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul juga memiliki Pelabuhan Perikanan Pantai yang bernama Sadeng.

Tabel 1. Data Jumlah Kapal dan Spesifikasi Pelabuhan Pantai Sadeng 2021

Jenis Kapal	Spesifikasi				Jumlah (unit)
	Kapasitas Hasil Tangkapan (<i>Gross Tonnage</i>)	Kapasitas Anak Buah Kapal (orang)	Lama Trip Penangkapan (hari)	Alat Tangkap	
Kapal Slerek	30-50	25-33	7-14	Jaring <i>Purse Seine</i>	8
Kapal Sekoci	5-30	5	3-7	Pancing ulur	54
Perahu Jukung	<5	1-2	1	<i>Gill net</i> /jaring insang	53

Sumber: <http://pppdislautkan.jogjapro.go.id> (2021)

Perahu jukung merupakan perahu dengan motor tempel yang paling banyak digunakan oleh nelayan. Hal ini disebabkan oleh lama perjalanan menangkap ikan yang relatif sebentar sehingga nelayan dapat kembali ke daratan dengan waktu yang relatif singkat. Perahu jukung juga dapat digunakan untuk menangkap ikan sehari-hari dengan kebutuhan bahan bakar yang tidak terlalu banyak. Ikan yang diperoleh pun juga dapat diusahakan setiap hari.

Pemanfaatan sumber daya alam dari laut yang sangat potensial untuk mendukung kesejahteraan nelayan ini membutuhkan kajian pendapatan nelayan perikanan tangkap sebagai penguat pengetahuan untuk mempraktikkan aktivitas perikanan tangkap yang lebih baik lagi. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di wilayah Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dan sekitarnya sangat membutuhkan analisis terhadap pendapatannya. Analisis pendapatan ini digunakan sebagai penguatan dalam pengetahuan untuk mengambil keputusan-keputusan penting di masa depan yang diantaranya yaitu mengambil keputusan untuk mengambil pinjaman, pendidikan, kebutuhan pokok rumah tangga, serta hal-hal darurat lain yang sifatnya sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Metode Dasar Penelitian

Metode dasar penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah ataupun menguji hipotesis untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia melalui penelitian (Abubakar, 2021). Metode dasar yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif untuk mempermudah penjelasan penelitian ini.

2.2. Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Metode untuk penentuan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja dengan tujuan dan maksud tertentu dari penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Menurut Umrati dan Wijaya (2020), metode *purposive* merupakan metode penentuan yang dilakukan pada satu lokasi yang bertujuan untuk memperkaya informasi agar dapat diteliti secara mendalam. Penentuan lokasi bertujuan untuk menempatkan orang dalam sebuah kegiatan oleh peneliti yang berfokus pada proses secara mendetail.

2.3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dan populasi penelitian dilakukan secara sengaja yaitu *purposive method*. Tabel di bawah ini merupakan data dari lokasi tempat tinggal nelayan terbanyak.

Tabel 2. Jumlah Nelayan Per Desa di Kecamatan Girisubo Tahun 2023

No	Nama Desa	Jumlah Nelayan	Persentase (%)
1.	Jepitu	0	0
2.	Karangawen	1	0,58
3.	Tileng	25	14,53
4.	Balong	5	2,91
5.	Pucung	57	33,14
6.	Jerukwudel	3	1,74
7.	Songbanyu	80	46,51
8.	Nglindur	1	0,59
Jumlah		172	100

Sumber: <https://girisubo.gunungkidulkab.go.id> (2023)

Setelah ditentukan lokasi dengan nelayan terbanyak kemudian dipilih dua lokasi sebagai tempat mengambil sampel. Lokasi yang dipilih yaitu Desa Pucung dan Desa Songbanyu. Penentuan sampel dari dua desa diambil 20 sampel setiap desanya. Total sampel dari penelitian ini yaitu 40 sampel.

2.4. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan terjun secara langsung ke lapangan dalam hal ini adalah pembagian kuisioner, wawancara, dan pencatatan untuk kemudian dianalisis. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu data sekunder dari instansi-instansi terkait dengan data analisis pendapatan nelayan.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, pencatatan, serta penyebaran kuisioner. Hal ini digunakan untuk mempermudah pengambilan data dan pendokumentasian dengan baik dan benar agar mudah dianalisis.

2.6. Metode Analisis Data

2.6.1. Analisis Biaya

- Analisis biaya untuk memprediksi perilaku biaya

Analisis biaya dilakukan untuk memprediksi perilaku biaya pada masa yang akan datang dalam sebuah usaha. Menurut Zacharias (2023), analisis perilaku biaya ini terdiri dari analisis biaya tetap dan biaya variabel. Adapun rumus untuk menghitung analisis biaya ini yaitu

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan:

TC (*Total Cost*): biaya total (Rp/bulan)

TFC (*Total Fixed Cost*): biaya tetap total (Rp/bulan)

TVC (*Total variabel cost*): biaya variabel total (Rp/bulan)

TFC adalah biaya untuk:

- Biaya penyusutan (Rp/bulan)
- Biaya pemeliharaan perahu dan alat tangkap (Rp/bulan)

TVC adalah biaya untuk:

- a) Biaya bahan bakar (Rp/bulan)
- b) Biaya makanan dan minuman (Rp/bulan)
- c) Biaya rokok (Rp/bulan)

2.6.2. Analisis Penerimaan

Analisis penerimaan usaha perikanan tangkap dilakukan dengan menganalisis penerimaan yang didapatkan oleh nelayan yang menggunakan perahu jukung dengan cara wawancara dengan kuisioner. Adapun rumus yang digunakan untuk analisis penerimaan yaitu:

$$TR = P_q Q$$

Keterangan:

TR : penerimaan total usaha perikanan tangkap (*total revenue*) (Rp/bulan)

P_q : harga hasil tangkapan ikan (Rp)

Q : perolehan hasil tangkapan dalam usaha penangkapan ikan (kg)

2.6.3. Analisis Keuntungan

Analisis keuntungan digunakan untuk mengetahui keuntungan bersih dari usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Keuntungan nelayan sangat bergantung dengan penerimaan dari hasil tangkapan ikan nelayan dengan besar biaya yang dikeluarkan nelayan untuk usaha perikanan tangkap. Keuntungan diambil dari selisih antara penerimaan total dari usaha dengan biaya total dari usaha. Analisis keuntungan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Pi = TR - TC$$

Keterangan:

Pi : keuntungan usaha penangkapan ikan (Rp)

TR : penerimaan total (Rp)

TC : total biaya usaha penangkapan ikan (Rp)

2.6.4. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan

a. Pendapatan Usaha Perikanan Tangkap

Penghitungan ini digunakan untuk mengetahui pendapatan pada rumah tangga nelayan khusus penerimaan yang diperoleh dari perikanan tangkap. Adapun pendapatan rumah tangga nelayan yang diperoleh dari usaha perikanan tangkap adalah:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan:

π = pendapatan rumah tangga dari usaha perikanan tangkap (Rp/bulan)

TR = penerimaan total (Rp/bulan)

TC = total biaya usaha penangkapan ikan (Rp/bulan)

Pendapatan rumah tangga dari usaha perikanan tangkap dalam satuan rupiah dihasilkan dari penerimaan total dikurangi dengan total biaya usaha penangkapan ikan. Penerimaan total di sini merupakan penerimaan dari hasil perikanan tangkap. Total biaya juga merupakan biaya yang dikeluarkan dalam usaha penangkapan ikan.

b. Pendapatan Usaha Non Perikanan Tangkap

Penghitungan ini digunakan untuk mengetahui pendapatan pada rumah tangga nelayan khusus penerimaan yang diperoleh dari usaha luar perikanan tangkap. Adapun pendapatan rumah tangga nelayan yang diperoleh dari usaha luar perikanan tangkap adalah:

$$TR = Q \times PQ$$

Keterangan:

TR = penerimaan total (Rp/bulan)
Q = jumlah hasil atau hari usaha (kg/hari/bulan)
PQ = harga hasil usaha (Rp/bulan)

2.6.5. Kontribusi Pendapatan Nelayan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga

Kontribusi pendapatan rumah tangga adalah penjumlahan dari total seluruh pemasukan yang diperoleh dalam keluarga.

Oleh karena itu, kontribusi pendapatan rumah tangga nelayan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$P = \frac{P_i}{P_l} \times 100\%$$

Keterangan:

P = kontribusi pendapatan nelayan (%)
P_i = Pendapatan dari perikanan tangkap (Rp/bulan)
P_l = Pendapatan dari luar perikanan tangkap (Rp/bulan)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul memiliki ibu kota kabupaten yang terletak di 39 km ke sebelah tenggara Kota Yogyakarta yakni Kecamatan Wonosari yang sering disebut masyarakat sebagai wilayah perkotaan dari Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan Wonosari juga menjadi pusat untuk mengurus administrasi-administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara geografis, Kabupaten Gunungkidul terletak pada 7°46'-8°09' Lintang Selatan dan 110°21'-110°50' Bujur Timur.

3.2. Karakteristik Responden

Rentang umur responden yang paling banyak yaitu 45 tahun hingga 54 tahun dengan presentase 32,5%. Rentang umur 45 hingga 54 tahun ini termasuk usia produktif sehingga nelayan perahu jukung yang menjadi responden berada dalam masa produktif. Responden nelayan aktif dalam menjawab pertanyaan dari peneliti Pendidikan paling banyak ada pada tingkat sekolah dasar dan berentang dari SD ke SMA. Sedangkan mata pencaharian nelayan ini merupakan mata pencaharian utama bagi kepala keluarga. Berikut ini merupakan analisis pendapatan nelayan:

3.3. Total Biaya Usaha Perikanan

Total biaya usaha perikanan diperoleh dengan menambahkan jumlah total biaya variabel dan jumlah biaya tetap. Setelah dilakukan penghitungan terhadap biaya variabel dan biaya tetap, maka untuk mengetahui berapa besar nilai untuk biaya usaha perikanan dapat diketahui. Berikut ini tabel untuk menjelaskan total dari biaya usaha perikanan:

Tabel 3. Total Biaya Usaha Perikanan Per Bulan

No.	Jenis Biaya	Rata-Rata Nilai Biaya Per Bulan (Rp)
1.	Biaya Tetap	323.889
2.	Biaya Variabel	4.530.000
Total		4.853.889

Sumber: Analisis Data Primer, 2023

Tabel 3. menjelaskan tentang total biaya usaha perikanan. Total biaya usaha perikanan ini didapatkan dari penjumlahan biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel sejumlah Rp4.853.889,- per bulan. Biaya tetap yang dibutuhkan sebesar Rp323.889,- per bulan. Biaya variabel sebesar Rp4.530.000,-. Maka, total biaya yang digunakan untuk usaha perikanan ini sebesar Rp4.853.889,- per bulan. Total

biaya usaha perikanan ini nantinya akan digunakan untuk menghitung pendapatan asli dari penerimaan yang didapatkan oleh nelayan untuk mengetahui keuntungan dari usaha perikanan tangkap ini.

3.4. Penerimaan

Jumlah tangkapan Ikan Tuna, Ikan Kembung, dan Ikan Sebelah yang dapat ditangkap oleh nelayan pada satu kali trip sebesar 15 kg. Jumlah ini didapatkan nelayan melalui perjalanan menangkap ikan selama sehari pulang dan pergi. Ikan Tuna, Ikan Kembung, dan Ikan Sebelah ini ditangkap menggunakan jaring dan juga pancing menyesuaikan dengan posisi perahu nelayan menaruh jangkar.

Tabel 4. Hasil Tangkapan Per Trip, Jumlah Per Bulan, Jumlah Bulan Per Musim Dan Harga Jual Ikan Berdasarkan Tiga Musim Ikan

No.	Uraian	Rata-Rata Per Trip	Rata-Rata Per Bulan
1.	Rata-Rata Produksi (Kg)	45	1.350
2.	Harga (Rp/Kg)	15.000	15.000
3.	Rata-Rata Penerimaan (Rp)	675.000	20.250.000
Total Penerimaan		675.000	20.250.000

Sumber: Analisis Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4. dapat dilakukan perhitungan penerimaan per trip dan penerimaan per bulan. Penerimaan per trip merupakan penerimaan sekali berangkat melaut pulang pergi yang dilakukan dengan mengalikan harga jual ikan dengan hasil tangkapan ikan. Penerimaan per bulan merupakan hasil kali antara hasil tangkap ikan per trip dikalikan dengan 30 hari selama sebulan. Diketahui bahwa penerimaan per trip dari penjualan ikan tuna oleh nelayan adalah sejumlah Rp675.000,-. Kemudian dijelaskan pula penerimaan perbulan sebesar Rp20.250.000,-.

3.5. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari pengurangan biaya yang dibutuhkan selama usaha perikanan berlangsung. Pendapatan nelayan pada bagan di bawah ini menjelaskan tentang pendapatan nelayan di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 5. Pendapatan Nelayan Per Trip dan Per Bulan

No.	Uraian	Rata-Rata Per Trip	Rata-Rata Per Bulan	Rata-Rata Per Tahun
1.	Penerimaan (Rp)	675.000	20.250.000	243.000.000
2.	Total Biaya Usaha (Rp)	161.796	4.853.889	58.246.668
3.	Pendapatan (Rp)	513.204	15.396.111	184.753.332
Total Pendapatan		513.204	15.396.111	184.753.332

Sumber: Analisis Data Primer, 2023

Tabel 5. menjelaskan tentang pendapatan nelayan yang didapatkan dari pengurangan penerimaan dengan total biaya usaha perikanan. Penerimaan per trip perjalanan diketahui Rp675.000,- kemudian dikurangi dengan kebutuhan biaya untuk menangkap ikan di hari itu sebesar Rp161.796,-. Sedangkan untuk satu bulannya penerimaan didapatkan sebesar Rp20.250.000,- kemudian dikurangi dengan total biaya untuk satu bulan menangkap ikan sebesar Rp4.853.889,-. Sehingga pendapatan dari nelayan dari tangkapan ikan per bulan rata-rata sebesar Rp15.396.111,-.

3.6. Kontribusi Pendapatan Nelayan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga

- Kontribusi Pendapatan Nelayan (Perikanan) dan Luar Perikanan Terhadap Pendapatan Keluarga
Kontribusi pendapatan nelayan dari perikanan dan luar perikanan memiliki kontribusi terhadap keseluruhan total pendapatan rumah tangga. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui

berapa presentase dari pendapatan perikanan yang dihasilkan nelayan pada keseluruhan pendapatan dan pendapatan non perikanan pada keseluruhan pendapatan rumah tangga nelayan.

Tabel 6. Kontribusi Pendapatan Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga

No.	Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp/Bulan)	Kontribusi (%)
1.	Usaha Nelayan Tangkap	15.396.111	66
2.	Luar Sektor Perikanan	7.795.000	34
Total Rumah Tangga Nelayan		23.191.111	100

Sumber: Analisi Data Primer, 2023

Pendapatan rumah tangga nelayan di luar sektor pertanian yang dilakukan anggota keluarga dengan menjadi buruh bangunan, pengrajin keranjang buah, warung ecer, tim sar, dan berladang jika ditotalkan per bulan sebesar Rp7.795.000,-. Kemudian untuk pendapatan dari sektor perikanan sebesar Rp15.396.111,-. Total pendapatan rumah tangga yang berhasil diperoleh dari sektor perikanan dan non perikanan sebesar Rp23.191.111,-. Hal ini sejalan dengan pendapat Arziati (2023) yang menyatakan bahwa pendapatan dari luar perikanan membantu nelayan untuk mencukupi perekonomian dan mencegah terjadinya defisit pendapatan dan menghindari hutang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha perikanan per bulan sebesar Rp15.396.111,- memberikan kontribusi pada total pendapatan rumah tangga sebesar 66% dari total pendapatan rumah tangga. Pendapatan luar perikanan yang didapatkan sebesar Rp7.795.000,- per bulannya memberikan kontribusi sebesar 34% dari total pendapatan rumah tangga.

4. SIMPULAN

Nelayan perahu jukung memiliki tingkat pendidikan yang tersebar dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Hal ini memudahkan nelayan untuk mengadaptasikan teknologi dan berkomunikasi dengan baik dengan para mitra penangkapan ikan lainnya. Usaha perikanan tangkap dengan perahu jukung ini membutuhkan total biaya usaha sebesar Rp4.853.889,- untuk satu bulan selama 30 hari perjalanan dan Rp161.796,- setiap harinya dengan kebutuhan untuk makanan dan minuman, rokok, dan bensin. Kemudian dari input yang telah diberikan ini dapat menghasilkan output sebesar Rp675.000,- per harinya dan setiap bulannya sebesar Rp20.250.000,-. Pendapatan nelayan selama satu kali trip yaitu sebesar Rp513.204,- setelah dikurangi dengan biaya usaha penangkapan ikan dan sebulan sebesar Rp15.396.111,-. Kontribusi pendapatan rumah tangga nelayan dari pendapatan non perikanan sebesar 66%. Sedangkan untuk pendapatan pada perikanan tangkap sebesar 34%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan di dalam rumah tangga masih menjadi sumber utama dalam pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Saran yang dapat diberikan yaitu nelayan dapat menambahkan produk kreatifitas jual lain sebagai diversifikasi produk agar dapat memaksimalkan penghasilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar., R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Andesfi, A., Prasetyawan, Y.Y. (2019). Pemindahan Pengetahuan Lokal Komunitas Nelayan Tradisional Desa Kedungmalang. *Jurnal ANUVA*, 3(3), 257-271.
- Riandani, P.A., Bambang, A.N., & Ismail. Tingkat Pemanfaatan Dan Optimalisasi Fasilitas Dasar Dan Fungsional Di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng Gunungkidul Dalam Menunjang Pengembangan Perikanan Tangkap. *Jurnal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 4(3), 10-20.
- Umrati., & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wibowo, B.A., Triarso, I., Suroyya, A.N. 2018. Tingkat Pendapatan Nelayan Gill Net Di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. *Jurnal Perikanan Tangkap*, 2(3), 29-36.

Zacharias, J.A. (2023). Perilaku Biaya Asimetris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1): 14-30.

Interaksi Sosial Kepala Desa dan BPD dalam Perspektif Sosiologi Pedesaan

Nowo Heriyono¹, Mahendra Wijaya², Bagus Haryono³

Program Studi S2 Sosiologi, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Jln. Ir. Sutami No.36A Surakarta 57126

nowo.heriyono@student.uns.ac.id¹, mahendrawijaya@staff.uns.ac.id², bagus.sosiologi01@gmail.com³

Abstract: Strategies to increase the effectiveness of interactions include open and transparent communication, respecting each other's roles and functions, and building trust and cooperation. The village head and BPD are the two main pillars of village government administration. Effective social interaction between the two is very important to realize good village governance. This research uses a rural sociology approach to analyze social interactions between village heads and BPD. Using qualitative methods, the research location was in Tanjungharjo Village, Kapas District, Bojonegoro Regency, East Java Province. The results of the research show that social interaction is influenced by several factors, such as kinship relations, patron-client, and local culture. These factors can be both drivers and obstacles to effective interaction. This research also recommends several strategies to increase the effectiveness of interactions, such as building open and transparent communication, increasing institutional capacity, and creating an atmosphere conducive to collaboration.

Keywords: village chief, BPD, social interaction, rural sociology.

Abstrak: Strategi untuk meningkatkan efektivitas interaksi meliputi komunikasi yang terbuka dan transparan, saling menghormati peran dan fungsi, serta membangun kepercayaan dan kerjasama. Kepala desa dan BPD sebagai dua pilar utama penyelenggaraan pemerintahan desa. Interaksi sosial yang efektif antara keduanya sangat penting untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi pedesaan untuk menganalisis interaksi sosial antara kepala desa dan BPD. Menggunakan metode kualitatif lokasi penelitian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur. Untuk hasil dari pada penelitian menunjukkan interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti hubungan kekerabatan, patron-klien, dan budaya lokal. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendorong maupun penghambat interaksi yang efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas interaksi, seperti membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kerjasama.

Kata kunci: Kepala Desa, BPD, Interaksi Sosial, Sosiologi Pedesaan.

1. PENDAHULUAN

Desa-desa sebenarnya seperti “republik kecil”, pemerintahan desa dibangun demokrasi ditingkat desa, atas dasar prinsip kedualatan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat, *trias politica* sejatinya yang sudah berjalan ditingkat pusat juga juga diterapkan dengan bentuk secara tradisional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa-desa mengenal lurah (Kepala Desa) beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan eksekutif dan badan legislatif, Musyawarah Desa (rembug desa) sebagai pemegang keputusan tertinggi ditingkat desa (Isharyanto dan Dila, 2016:51). Pemerintahan desa di Indonesia mengalami transformasi signifikan, di mana desa didorong untuk lebih mandiri dan partisipatif. Desa sebagai pemerintahan terkecil di Indonesia, memiliki posisi yang sangat strategis secara politis dan sosiologis karena paling dekat dengan masyarakat. (Kushandajani, 2018:01). Dalam konteks ini, peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi semakin penting. Keberhasilan tata kelola desa yang baik sangat bergantung pada interaksi sosial yang efektif antara kedua aktor kunci ini.

Interaksi sosial kepala desa dengan BPD tidak sesederhana hubungan formal antara atasan dan bawahan. Dinamika interaksi diwarnai oleh berbagai faktor, seperti struktur sosial pedesaan, budaya

lokal, dan hubungan patron-klien. Memahami kompleksitas interaksi ini menjadi kunci untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara kepala desa dan BPD. Meskipun interaksi sosial kepala desa dengan BPD memiliki peran krusial, penelitian yang secara khusus mengkaji topik ini dalam perspektif sosiologi pedesaan masih terbilang minim. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana interaksi sosial tersebut memengaruhi kinerja dan efektivitas pemerintahan desa.

Dalam konteks ini, peran kepala desa dan Badan BPD menjadi semakin penting. Keberhasilan tata kelola desa yang baik sangat bergantung pada interaksi sosial yang efektif antara kedua aktor kunci ini. Kepala desa dan BPD merupakan dua aktor kunci dalam tata kelola desa yang baik. Interaksi sosial yang efektif antara kedua pihak sangat penting untuk membangun desa yang mandiri, partisipatif, dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memuat penjelasan terkait peran kepala desa sebagai pemimpin dan eksekutor, bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan program pembangunan, dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Kepala desa sebagai motivator dan inovator diharapkan mampu memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, kepala desa juga perlu memiliki jiwa inovatif untuk menggali potensi desa dan menciptakan peluang baru bagi kesejahteraan masyarakat. Kepala desa sebagai komunikator dan negosiator sangat dibutuhkan kepala desa untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat desa, hingga tingkat provinsi dan pusat. Permendagri No. 110 Tahun 2017 Tentang BPD menyimpulkan Peran BPD sebagai Legislatif Desa memiliki fungsi sebagai legislasi dalam merencanakan, membahas dan kemudian menyepakati peraturan desa bersama pimpinan pemerintah desa yaitu kepala desa. BPD berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Kemudian, BPD menampung dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada kepala desa dan pemerintah desa. Sebagai pengawas kinerja, BPD bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat desa.

Interaksi efektif antara Kepala Desa dan BPD, melakukan komunikasi dan koordinasi kunci utama interaksi yang efektif adalah komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Kepala desa dan BPD perlu menjalin komunikasi yang terbuka dan transparan untuk menghindari kesalahpahaman dan miskomunikasi. Kerjasama dan saling menghormati, keberhasilan tata kelola desa yang baik membutuhkan kerjasama dan saling menghormati antara kepala desa dan BPD. Kedua pihak perlu memahami peran dan fungsinya masing-masing, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kepala desa dan BPD harus memastikan bahwa masyarakat terlibat dan ikut langsung dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan. Ini termasuk memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, dan mengembangkan ekonomi lokal desa (Patra, 2019:01). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sosial antara kepala desa dan BPD dalam perspektif sosiologi pedesaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi interaksi, strategi untuk meningkatkan efektivitasnya, dan implikasinya terhadap tata kelola desa yang baik.

Berdasarkan latar belakang ini, dalam artikel ini akan dibahas beberapa hal, yaitu:

- 1) Bagaimana dampak interaksi sosial antara kepala desa dan BPD terhadap pembangunan desa?
- 2) Bagaimana perspektif sosiologi pedesaan dapat membantu memahami interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian dengan pendekatan studi kasus merupakan kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk deskripsi yang dikaitkan dengan teori dan temuan (Rizail dkk, 2022:78). Peneliti mengatakan bahwa studi kasus adalah cara terbaik untuk menyampaikan perspektif orang yang diteliti, memberikan gambaran yang luas tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penjelasan tentang tabel yang diperlukan untuk penilaian, transferabilitas, dan penilaian konteks, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman konteks.

2.2. Teknik Sampling

Menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik sampel berdasarkan kriteria tertentu atau mempunyai standar yang telah ditetapkan untuk dijadikan sampel. Sampling purposive yaitu Peneliti menentukan kriteria mana yang digunakan untuk memilih sampel responden; kriteria ini dimaksudkan untuk menggambarkan demografi responden berdasarkan tujuan mereka (Abd. Hadi, 2021:52). Seperti Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat Di Desa Tanjungharjo.

2.3. Sumber Data dan Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, informan triangulasi, data sekunder (Abd. Hadi, 2021:58). Data primer, triangulasi informan, dan sekunder adalah sumber data penelitian ini. Pengamatan langsung dan wawancara informan penelitian merupakan sumber data primer. Sementara itu data sekunder diperoleh peneliti dari rekaman foto yang diambil selama proses penelitian dan dimiliki oleh para informan sebagai pelengkap dari data sekunder.

2.4. Data Primer

Data utama yang diperoleh dari penelitian lapangan dikenal sebagai sumber data primer. Ada Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD.

2.4.1. Informan Triangulasi

Ada 3 informan triangulasi Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Umum

2.4.2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh terutama melalui dokumentasi, dan buku-buku dipergustakaan.

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan terkait interaksi sosial antara BPD dan Kepala Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja dan interaksi sosial yang baik BPD dengan Kepala Desa memiliki dampak positif terhadap pengambilan keputusan pembangunan fisik desa. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak memberikan peluang untuk saling berbagi informasi, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat, serta pemilihan alternatif solusi yang lebih baik. Interaksi sosial yang positif antara kepala desa dan BPD juga berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih efektif. Komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan saling menghormati antara kedua pihak membantu mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan yang lebih baik.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam hubungan kerja dan interaksi sosial antara kepala desa dan BPD. Beberapa tantangan tersebut meliputi perbedaan pandangan dan kepentingan, kurangnya pemahaman tentang peran dan tugas masing-masing pihak, serta faktor-faktor politik dan kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini bahwa pola interaksi sosial yang terjalin antara kepala desa dan BPD memiliki implikasi signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, pengelolaan pembangunan, dan dinamika kehidupan sosial di desa.

3.1. Bentuk Interaksi Sosial

Hubungan timbal balik yang selalu berubah antara individu, kelompok, atau kelompok dengan individu dikenal sebagai hubungan interaksi sosial. Jenis hubungan ini dapat berupa kerja sama. Interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan sosial yang dinamis (Sudaryanto, 2010:24). Interaksi sosial adalah proses timbal balik antara dua orang atau lebih yang memiliki pengertian satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi dan pertukaran antara individu atau kelompok dalam masyarakat disebut sebagai interaksi sosial. Ini mencakup semua jenis komunikasi, kontak fisik, dan pertukaran sosial yang terjadi di berbagai konteks sosial. Interaksi sosial dalam hubungan kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan desa. Hubungan antara keduanya seringkali ditandai dengan komunikasi dua arah, saling mempengaruhi, dan saling berbagi. Kepala Desa sebagai

pemimpin dan pengambil kebijakan di tingkat desa, memiliki peran penting untuk membawakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa. Sementara BPD berperan sebagai lembaga yang membantu merumuskan dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa. Berikut adalah penjelasan tentang interaksi sosial ini:

BPD berfungsi sebagai lembaga dengan tugas dan fungsi yang diperlukan. Dengan adanya BPD, diharapkan keseimbangan kinerja tercapai dalam pengelolaan pemerintahan desa. Hubungan antara BPD dengan Kepala memiliki hubungan yang penting dalam pengembangan desa. Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan warga desa, sedangkan BPD memiliki fungsi pengawasan kepada Kepala Desa. Interaksi sosial antara BPD dan Kepala Desa merupakan proses komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi pengawasan kepada Kepala Desa, yang melibatkan pengawasan kinerja dari pemerintah desa dan pengembangan program pembangunan. Interaksi sosial BPD dengan Kepala Desa sangat penting untuk pengembangan desa karena membantu meningkatkan keseimbangan kinerja dalam pengelolaan pemerintahan desa dan memfasilitasi masyarakat untuk membentuk peraturan desa. Interaksi sosial ke dua lembaga desa membantu meningkatkan keseimbangan kinerja dalam pengelolaan pemerintahan desa dan memfasilitasi masyarakat.

Interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD ini dapat berupa kerjasama, dimana keduanya saling bekerja sama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan desa. Hubungan ini bisa juga berupa konflik jika ada perbedaan pendapat atau jika salah satu pihak merasa kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif dan mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Interaksi sosial ini juga dapat berbentuk kompetisi jika BPD dan Kepala Desa memperebutkan pengaruh atau kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman tentang peran dan fungsi masing-masing agar interaksi sosial ini bisa berlangsung seimbang dan produktif. Secara keseluruhan, interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui interaksi sosial yang sehat dan konstruktif, keduanya bisa saling melengkapi dan bekerja sama dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.

3.2. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi ditingkat desa yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pengelolaan administratif di sebuah desa. Tugas utama Kepala Desa meliputi menyelenggarakan pemerintah desa, dan mengatur berbagai aspek kehidupan di desa, seperti pembangunan, pelayanan publik, pembagian sumber daya, dan penyelesaian masalah masyarakat (Ulber Silalahi, 2019:78). Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, kepala desa bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan mengelola administrasi desa. Kepala desa juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa juga memiliki kewenangan dalam pemilihan dan pengangkatan perangkat desa serta harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa juga berperan dalam menjaga harmoni sosial, memfasilitasi partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan memajukan kesejahteraan desa.

Kesuksesan kepala desa dalam melayani dan mendukung masyarakat pada akhirnya akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di tingkat pemerintahan desa dan pembangunan (Riant Nugroho, 2021:37). Sebagai pejabat publik, Kepala Desa memiliki wewenang untuk membuat keputusan terkait penggunaan anggaran desa, pelaksanaan program-program pembangunan, dan pemberian izin-izin tertentu dalam lingkup desa. Pada akhirnya, kesuksesan kepala desa dalam melayani dan mendukung masyarakat akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di tingkat pemerintahan desa dan pembangunan. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, warga desa memilih kepala desa melalui pemilihan umum ditingkat desa atau pilkades. Pemilihan ini bertujuan untuk memastikan representasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemimpin desa yang kompeten dan berintegritas. Untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya, kepala desa memiliki tanggung jawab besar. Mereka diharapkan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik serta menjaga hubungan yang harmonis dengan warga desa untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan desa.

Oleh karena itu, kesimpulan dari penjelasan tentang kepala desa adalah bahwa orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat desanya diberi otoritas dan kepercayaan untuk memimpin, membina, dan mengembangkan desanya. Kepala Desa juga merupakan pemimpin pejabat pemerintah desa yang mengelola pemerintahan tingkat desa dan bertanggung jawab atas pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan kolaborasi. Kepala desa memiliki tugas utama dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan desa, membangun sarana dan prasarana di tingkat desa, membina masyarakat desa, dan mendorong masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk tentang bagaimana bawahannya melakukan tugasnya. Selain itu, kepala desa memiliki wewenang untuk memimpin perangkat desa, menetapkan peraturan, dan mengelola keuangan desa. Pemerintahan desa harus terbuka untuk menerima pendapat masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menciptakan masyarakat madani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, melayani, dan menjaga hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat, dan mereka harus memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat demokratis.

3.3. Badan Permusyawaratan Desa

BPD adalah lembaga perwakilan demokratis yang mengelola pemerintahan di tingkat desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pengawasan pemerintahan, dan anggota BPD ditunjuk sebagai "parlemen" desa dengan berbagai tugas dan wewenang, termasuk membahas dan membuat rancangan peraturan desa. BPD adalah "parlemen" desa dan memiliki banyak tanggung jawab, seperti membahas dan membuat peraturan desa, menampung dan menyebarkan aspirasi masyarakat desa, dan mengawasi kepala desa dan masa jabatan anggota BPD selama 6 tahun, dapat dipilih kembali dengan masa paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut atau tidak secara berturut-turut. BPD juga berperan dalam menyelenggarakan musyawarah desa, yang merupakan wadah bagi warga desa untuk memberikan pendapat, memberikan suara dalam pengambilan keputusan, dan terlibat dalam pembangunan desa. BPD lembaga legislatif di tingkat desa yang bertugas mewakili rakyat dalam pemerintahan desa.

BPD dibentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mempunyai peran penting untuk mewujudkan demokrasi dan pembangunan desa. BPD di Indonesia yang memiliki peran penting dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan dalam berbagai hal terkait pemerintahan dan pembangunan di desa. BPD bagian integral dari sistem pemerintahan desa yang berperan sebagai wakil dari warga desa dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 5 Ayat 1, anggota BPD mewakili masyarakat di tingkat desa melalui perwakilan wilayah dan perempuan yang dipilih secara demokratis melalui musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung. Jumlah keseluruhan anggota BPD pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, jumlah sedikit 5 (lima) anggota BPD dan jumlah terbanyak 9 (sembilan) anggota BPD.

Faktor-faktor historis yang memungkinkan pemerintah desa dan pemerintah supradesa untuk mengintervensi dinamika sosial politik yang berkembang di desa adalah bagian besar dari alasan hadirnya BPD. BPD secara luas terlibat dalam proses politik desa karena tuntutan regulasi. BPD mengelola aspirasi masyarakat di tingkat desa dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu, BPD tidak hanya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai lembaga yang mewakili masyarakat.

4. PEMBAHASAN

Interaksi sosial Kepala Desa dan BPD dalam perspektif sosiologi pedesaan, interaksi sosial antara kepala desa dan BPD merupakan aspek penting yang memengaruhi dinamika kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan di level desa. Jurnal ini mengkaji pola-pola interaksi sosial yang terjalin di antara kedua aktor kunci tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pola interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD terdapat dua pola interaksi sosial yang dominan kepala desa dengan BPD Pola Interaksi Kolaboratif, dalam pola ini, Kepala Desa dengan BPD menjalin hubungan yang sinergis dan saling terbuka dalam proses pengambilan keputusan di desa. Berbagi informasi, membahas isu-isu bersama, dan berusaha mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Terdapat saling pengertian dan penghargaan di antara kedua pihak dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.

Pola Interaksi Konfrontatif, dalam pola ini, kepala desa dengan BPD terlibat dalam relasi yang saling bertentangan, penuh ketegangan, dan konflik kepentingan. Masing-masing pihak cenderung mempertahankan posisi dan kekuasaannya, sehingga proses pengambilan keputusan kadang menjadi lebih sulit dan berpotensi memicu konflik. Pola interaksi sosial yang terjalin antara kepala desa dan BPD memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, pengelolaan pembangunan, dan dinamika kehidupan sosial di desa. Pola interaksi yang kolaboratif cenderung menghasilkan keputusan dan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sementara pola interaksi konfrontatif dapat menghambat kemajuan desa dan memicu konflik internal.

Interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

- a) Komunikasi: Terjadi komunikasi yang terbuka dan transparan antara kepala desa dengan BPD. Komunikasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti rapat, musyawarah desa, dan pertemuan informal.
- b) Kerjasama: Terjalin kerjasama yang baik antara kepala desa dengan BPD dalam berbagai aspek, seperti perencanaan pembangunan desa, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program desa.
- c) Koordinasi: Terjadi koordinasi yang baik kepala desa dengan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
- d) Sosialisasi: Kepala desa dan BPD bekerja sama dalam mensosialisasikan program dan kebijakan desa kepada masyarakat.

4.1. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

Beberapa faktor yang mendukung interaksi sosial yang positif kepala desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah:

- a) Adanya rasa saling percaya: Baik kepala desa maupun BPD saling percaya dan yakin bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun desa.
- b) Komunikasi yang efektif: Terjadi komunikasi yang efektif dan efisien antara kepala desa dan BPD. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling memahami dan menyelesaikan permasalahan bersama.
- c) Komitmen bersama: Baik kepala desa maupun BPD memiliki komitmen yang kuat untuk membangun desa.
- d) Dukungan dari masyarakat: Masyarakat desa Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro mendukung interaksi sosial yang positif kepala desa dengan BPD.

4.2. Dampak Interaksi Sosial Terhadap Pembangunan Desa

Interaksi sosial yang positif kepala desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro memiliki dampak yang positif bagi pembangunan desa, antara lain:

- a) Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat desa Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro lebih aktif dalam kegiatan desa karena mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa.
- b) Meningkatkan kualitas pembangunan desa: Pembangunan desa di desa Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih efektif dan efisien karena adanya kerjasama yang baik kepala desa dengan BPD.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Kesejahteraan masyarakat desa Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro meningkat karena program-program desa yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.3. Perspektif Sosiologi Pedesaan Dapat Membantu Memahami Interaksi Sosial Antara Kepala Desa dan BPD

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan perspektif sosiologi pedesaan, diperoleh beberapa hasil temuan terkait interaksi sosial kepala desa dengan BPD.

4.3.1. Stratifikasi Sosial

- a) Kepala desa dan BPD sering kali berasal dari strata sosial yang berbeda.
- b) Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam interaksi mereka.

Contohnya, kepala desa yang berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh mungkin memiliki lebih banyak power dibandingkan BPD yang berasal dari keluarga kurang mampu.

4.3.2. Norma dan Nilai

- a) Norma dan nilai yang berlaku di desa, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat, mendorong mereka untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalah bersama.

Contohnya, kepala desa dan BPD harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah pembangunan desa melalui musyawarah desa.

4.3.3. Kekuasaan dan Pengaruh

- a) Kepala desa memiliki kekuasaan formal yang lebih besar dari pada BPD.
- b) BPD memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan di desa karena mereka mewakili suara rakyat.
- c) Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam interaksi mereka, terutama ketika mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang suatu masalah.

Contohnya, kepala desa memiliki hak veto atas keputusan BPD, tetapi BPD dapat menggunakan pengaruhnya untuk menekan kepala desa agar mempertimbangkan pendapat mereka.

4.3.4. Patron-Klien

- a) Hubungan patron-klien masih sering terjadi dalam interaksi antara kepala desa dan BPD. Kepala desa sebagai patron memberikan bantuan dan sumber daya kepada BPD sebagai klien.
- b) Hal ini dapat memengaruhi objektivitas BPD dalam menjalankan tugasnya.
- c) Contohnya, BPD yang menerima bantuan dari kepala desa mungkin akan lebih mendukung kebijakan kepala desa, meskipun kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur cukup positif dan harmonis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang terbuka dan transparan, kerjasama yang saling menguntungkan, dan koordinasi yang baik. Faktor-faktor yang mendukung interaksi sosial yang positif Kepala Desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur adalah adanya rasa saling percaya, komunikasi yang efektif, dan komitmen bersama untuk membangun desa. Interaksi sosial yang positif Kepala Desa dengan BPD memiliki dampak yang positif bagi pembangunan desa, antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa hal berikut untuk meningkatkan interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD:

- a) Memperkuat komunikasi dan koordinasi
- b) Meningkatkan kapasitas kepala desa dan BPD
- c) Membangun budaya demokrasi di desa
- d) Memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa

Direkomendasikan beberapa hal berikut untuk meningkatkan interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD, Memperkuat komunikasi dan koordinasi, Perlu dilakukan upaya untuk memperkuat komunikasi

dan koordinasi antara kepala desa dan BPD. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, cukup positif dan harmonis.

- a) Faktor-faktor yang mendukung interaksi sosial yang positif antara Kepala Desa dan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah adanya rasa saling percaya, komunikasi yang efektif, dan komitmen bersama untuk membangun desa.
- b) Interaksi sosial yang positif antara Kepala Desa dan BPD memiliki dampak yang positif bagi pembangunan desa, antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif sosiologi pedesaan memberikan kerangka yang berguna untuk memahami interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD. Perspektif ini menunjukkan bahwa interaksi mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur sosial, norma dan nilai, kekuasaan dan pengaruh, dan patron-klien. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu meningkatkan kualitas interaksi kepala desa dengan BPD, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa hal berikut untuk meningkatkan interaksi sosial antara kepala desa dan BPD di Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa hal berikut untuk meningkatkan interaksi sosial Kepala Desa dan BPD:

- a) Memperkuat komunikasi dan koordinasi
- b) Meningkatkan kapasitas kepala desa dan BPD
- c) Membangun budaya demokrasi di desa
- d) Memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa hal berikut untuk meningkatkan interaksi sosial kepala desa dengan BPD, Memperkuat komunikasi dan koordinasi, Perlu dilakukan upaya untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi kepala desa dengan BPD. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin,

- a) Memperkuat komunikasi dan koordinasi
- b) Meningkatkan kapasitas kepala desa dan BPD
- c) Membangun budaya demokrasi di desa
- d) Memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa

Untuk meningkatkan interaksi sosial antara kepala desa dengan BPD, memperkuat komunikasi dan koordinasi, Perlu dilakukan upaya untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kepala desa dan BPD. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin.

6. DAFTAR PUSTAKA

- I Gusti Lanang Patra Tanaya. 2019. *Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Pusat Data Dan Informasi BALILATFO Kemendesa PDT. Jakarta.
- Isharyanto dan Dila Eka J.P. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa*. Absolute Media. Yogyakarta.
- Kushandajani. 2018. *Hubungan kerja Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Perspektif UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa*. Departemen Politik Dan Pemerintahan FISIP Undip. Jakarta.
- Muhammad Rizal Pahleviannr. 2022. dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka. Sukoharjo.
- Riant Nugroho. 2021. *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sudariyanto. 2010. *Interaksi Sosial*. Alprin. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Ulber Silalahi. 2019. *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam*

Pembangunan Desa. Uwais Inspirasi Indonesia. Sidoarjo.

6.1. Peraturan Hukum

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permendes No. 02 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Musyawarah Desa

Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kepala Desa

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2019 Tentang BPD

Strategi Pengembangan Usahatani Kedelai di Kabupaten Bojonegoro

Mochamad Budi Setyono¹, Kusnandar², Umi Barokah³

^{1,2,3} Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No. 36 Ketingan Surakarta

Email : mbudisetyono@students.uns.ac.id

Abstract: The development of soybean production in East Java is very dominating with a harvest area of 42,493 Ha with a production of 78,656 Ose Tons obtained from 20 Regencies which are the centers of soybean production in East Java. Among the 5 soybean production districts are Bojonegoro, Lamongan, Banyuwangi, Nganjuk and Jember. Soybean demand in Indonesia tends to increase every year. Soybean is a commodity that gets the focus of more attention from the Indonesian government in national food policy and one of the strategic commodities that need to be increased in added value after rice and corn. In meeting the soybean production deficit, the government has made various efforts to develop national soybean production. This study aims to analyze soybean farming development strategies to identify internal and external factors that affect the development of soybean farming in Bojonegoro Regency. Internal Factor Evaluation – External Factor Evaluation (IFE-EFE) Matrix, SWOT, and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) are the analysis method to used in this research. The research method is descriptive qualitative. The method analysis of this research is the development strategy of soybean farming which the availability of land and farmers as well as the opportunity of production is favored by the market and the climate is still a threat. The alternative development strategy is to use technology and information in increasing soybean production as well as improving the quality of soybean seeds.

Keywords: IFE-EFE, Soybean, Strategy, SWOT, QSPM

Abstrak: Perkembangan produksi kedelai di Jawa Timur sangat mendominasi dengan luas panen 42.493 Ha dengan produksi 78.656 Ton Ose yang diperoleh dari 20 Kabupaten dimana merupakan sentra produksi kedelai di Jawa Timur. Diantaranya 5 Kabupaten produksi kedelai adalah Bojonegoro, Lamongan, Banyuwangi, Nganjuk dan Jember. Kebutuhan kedelai di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kedelai merupakan komoditas yang mendapat fokus perhatian lebih dari pemerintah Indonesia dalam kebijakan pangan nasional dan merupakan komoditas strategis perlu ditingkatkan produksinya setelah padi dan jagung. Dalam memenuhi defisit produksi kedelai pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan produksi kedelai nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengembangan usaha tani kedelai untuk mengidentifikasi baik faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam perkembangan usaha tani kedelai terutama di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode analisis matriks *Internal Factor Evaluation – Eksternal Factor Evaluation (IFE – EFE)*, *SWOT* dan *Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)*. Analisis dari penelitian ini strategi pengembangan usaha tani kedelai diantaranya adalah tersedianya lahan dan petani serta peluang hasil produksi disukai pasar dan iklim masih menjadi ancaman. Alternatif strategi pengembangan adalah memanfaatkan teknologi dan informasi dalam peningkatan produksi kedelai serta peningkatam mutu bibit kedelai.

Kata kunci: Kadelai, IFE-EFE, Strategi, SWOT, QSPM

1. PENDAHULUAN

Pertanian berperan aktif dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian suatu negara salah satunya adalah komoditas kedelai. Kedelai merupakan komoditas yang strategis sehingga perlu ditingkatkan nilai tambah setelah padi dan jagung (Nadya et al., 2021). Berdasarkan angka jumlah produksi kedelai yang merupakan angka estimasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, produksi kedelai tahun 2022 adalah 0,30 juta ton, atau 256,62% dari target peningkatan 16,23%. Hasil Produksi kedelai pada Tahun 2022 mengalami peningkatan 88.656 ton terhadap produksi kedelai 2021 (naik 41,65%). Produksi kedelai tahun 2022 mencapai 0,30 juta ton tercapai 107,69% sesuai target yang sudah diputuskan dalam

RPJMN 2020–2024 untuk tahun 2022 (0,28 juta ton), sedangkan untuk target 2024 (0,34 juta ton) tercapai 88,68%.

Tabel 1. Perkembangan Luas Panen ,Produktivitas, dan Produksi Kedelai Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun					% Peningkatan 2018-2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Luas Panen(Ha)	493.546	285.265	182.072	134.700	180.922	
% Peingkatan Luas Panen		-42,20	-36,17	-26,02	34,31	-17,52
Provitass (Ton/Ha)	1,32	1,49	1,60	1,58	1,67	
% Peningkatan Provitass		12,91	7,40	-1,05	5,46	6,18
Produksi (Ton)	650.000	424.189	290.784	212.863	301.518	
% Peningkatan Produksi		-34,74	-31,45	-26,80	41,65	-12,83

Sumber : Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ,2023

Pada Tahun 2021 pengembangan kedelai di Jawa Timur dengan luas panen 42.493 Ha dengan produksi 78.656 Ton Ose yang diperoleh dari 20 Kabupaten dimana merupakan sentra produksi kedelai di Jawa Timur. Diantaranya 5 Kabupaten produksi kedelai adalah Bojonegoro, Lamongan, Banyuwangi, Nganjuk dan Jember. Dimana Bojonegoro berada diperingkat atas penghasil kedelai dengan jumlah produksi 21.968 Ton Ose (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,2022)

Tabel 2. Perkembangan Produksi Kedelai Provinsi Sentra di Indonesia Tahun 2017-2021

No	Provinsi	Produksi (Ton)					Share 2021 (%)	Share Kumulatif (%)
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Jawa Timur	200.916	148.248	106.694	53.283	78.521	36,98	36,98
2	Jawa Tengah	105.533	113.676	69.269	43.530	46.860	22,01	58,90
3	Jawa Barat	49.261	102.056	67.967	101.177	29.183	13,71	72,61
4	Nusa Tenggara Barat	56.097	50.063	43.527	33.226	16.718	7,85	80,47
5	Sulawesi Utara	7.806	36.144	15.874	17.090	3.500	1,64	82,11
6	DI Yogyakarta	8.656	7.486	4.908	5.048	6.111	2,87	84,98
7	Sulawesi Selatan	16.101	14.497	10.773	3.288	4.578	2,15	87,13
8	Sumatera Utara	7.778	12.377	3.288	3.423	1.613	0,76	87,89
9	Kalimantan Selatan	8.409	18.433	4.629	2.348	880	0,41	88,30
10	Sumatera Selatan	11.792	10.980	14.782	1.083	332	0,16	88,46
11	Lainnya	66.359	136.043	75.618	27.287	24.566	11,54	100,00
	Indonesia	538.728	650.000	424.189	290.784	212.683	100,00	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,2022

Kabupaten Bojonegoro pada Tahunn 2022 termasuk kabupaten penerima program bantuan benih kedelai. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan baik dari produksi dan produktivitas tanaman

hortikultura salah satunya adalah kedelai. Salah satunya melalui program bantuan dari pemerintah pusat mencakup alat produksi dalam membudidayakan tanaman kedelai. Untuk setiap hektar, bantuan yang telah diberikan terdiri dari 50 Kg benih, 45 Kg pupuk NPK non subsidi, 3 Liter pupuk hayati cair, dan 2 Liter pestisida.

Wilayah Kabupaten Bojonegoro hanya beberapa wilayah saja yang menjadi sentra produksi tanaman kedelai yaitu Kecamatan Balen, Kapas, Sumberrejo, Sukosewu, Kepohbaru, Dander dan Kedungadem. Luas tanaman kedelai meningkat pada Tahun 2021 dari 9.742 Ha pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 10.282 Ha. Terdiri dari 4.889 Ha adalah program dari APBN dan 5.393 Ha adalah bagian dari swadaya (pemerintah kabupaten Bojonegoro, 2022).

Kebutuhan kedelai di Indonesia selalu meningkat, namun pemerintah masih melakukan impor. Perlu adanya kajian kebijakan dan formulasi strategi yang komprehensif untuk meningkatkan minat petani dalam budidaya kedelai. Kebijakan dan program yang ada saat ini belum efektif untuk mencapai petani secara keseluruhan. Menurut Raka Ega Prasetya dan Yuliawati (2020) mengemukakan bahwa manajemen strategi melibatkan tahapan seperti memperhatikan unsur-unsur, menganalisis lingkungan, memilih strategi yang tepat, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun, untuk kegiatan usaha tani kedelai, kebijakan dan program saat ini belum menyeluruh hingga tingkat petani..

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian yang menghasilkan informasi analisis dari data variabel yang diamati untuk menjelaskan gejala atau kejadian (Aljaninansya, 2022). Data yang dihimpun adalah data primer dan sekunder yang dihimpun melalui wawancara kepada petani, pengumpul, serta data sekunder diperoleh dari dinas terkait dari sumber publikasi.

Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan, namun dalam penentuan lokasi penelitian ini dilakukan hanya beberapa kecamatan yang menjadi sentra penghasil kedelai. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sumberrejo, Balen dan Kedungadem. Lahan pertanian Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 terdiri dari 83.196 Ha lahan sawah, 38.754 Ha merupakan lahan irigasi sedangkan 42.692 Ha adalah lahan tadah hujan (Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, 2023)

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan *Internal Eksternal Factor Evaluation (IFE – EFE)*. Dimana analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi usahatani kedelai di Kabupaten Bojonegoro. Dari analisis IFE-EFE tadi dirumuskan dalam satu model matriks, Pengabungan faktor internal dan eksternal dalam matriks IE. Dimana matriks IE merupakan kelanjutan dari matriks IFE dan EFE. Matriks Internal Eksternal (IE) yang didasarkan pada dua kriteria yaitu total nilai faktor – faktor internal (IFE) pada sumbu X dan total nilai faktor – faktor eksternal (EFE) pada sumbu Y. Pada matriks IE, perumusan strategi berdasarkan pada pertemuan antara horisontal dan vertikal dalam diagram sembilan sel pada matriks IE tersebut. Matriks Internal Eksternal (IE) dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian :

1. *Grow and Builts Strategies* (Pertumbuhan dan Pembangunan)
Terletak pada sel I, II atau IV strategi yang layak diterapkan adalah strategi intensif (penetrasi pasar, perkembangan pasar dan perkembangan produk) dan strategi integrasi (integrasi ke belakang, integrasi ke depan dan integrasi horisontal).
2. *Hold and Maintain Strategies* (Mempertahankan dan Memelihara)
Pada Sel III, V atau VII hasil nilai menyatakan strategi yang tepat yaitu strategi penetrasi pasar serta perkembangan produk.
3. *Harvers or Divest Startegies* (Mengambil Hasil atau Melepaskan)
Nilai ini terletak pada sel VI, VIII stsu IX sehingga pilihan stretegi yang ditempuh adalah memperkecil atau menutup usahanya.

TOTAL BOBOT EFE	3.5	I	II	III		
	2.5	IV	V	VI		
	2	VII	VIII	IX		
	1.5					
1	4	3,5	3	3,5	2	1,5
		1				
		TOTAL BOBOT IFE				

Gambar 1. Matriks IFE-EFE

Analisis SWOT sebagai alternatif dalam merumuskan bagaimana strategi pengembangan sedangkan *Quantitative Strategic Planning Matrix* digunakan untuk bagaimana menentukan prioritas strategi yang mampu di terapkan dalam pengembangan usahatani dalam jangka waktu tertentu di Kabupaten Bojonegoro. Analisis SWOT didasarkan pada keyakinan bahwa strategi yang efektif melibatkan dan mengantisipasi adanya kelemahan serta kekuatan dan ancaman dapat dimaksimalkan. Matrik SWOT terdiri dari empat sel faktor Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats dan empat strategi yang menjadi alternatif (SO, WO, ST dan WT), setelah itu baru dapat membuat keputusan (Saut Simanungkalit, 2020; Ginanjar Eko Santoso dan Suryanawati, 2017).

Langkah - langkah untuk membangun Matrix SWOT (David, Fred R, 2011) :

1. Buatlah daftar peluang eksternal
2. Buatlah daftar ancaman eksternal.
3. Buatlah daftar kekuatan internal
4. Buatlah daftar kelemahan internal
5. Sesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternalnya dan catatlah hasil strategi SO ke sel yang sesuai.
6. Bandingkan Kelemahan Internal dan peluang eksternal, serta catat hasil dalam strategi WO
7. Buat perbandingan kekuatan internal dan ancaman eksternal catatlah hasilnya dalam strategi ST
8. Membuat perbandingan kelemahan dan ancaman eksternal hasilnya dicatat dalam strategi WT.

IFAS EFAS	STRENGTH (S) Membuat daftar kekuatan yang ada	WEAKNESS (W) Membuat daftar kelemahan yang ada
	Strategi SO Memanfaatkan peluang saat ini dan gunakan semua yang dimiliki	Strategi WO Manfaatkan
OPPORTUNITIES (O) Daftar seluruh peluang yang sudah teridentifikasi		
THREATS (T) Semua ancaman sudah terdaftar dan teridentifikasi	Strategi ST Dalam menghindari bahaya gunakan kekuatan yang dimiliki	Strategi WT Gunakan semua kekuatan yang ada untuk melindungi

Gambar 2. Matriks SWOT

Menurut David, Fred R. (2011) untuk mencari strategi alternatif dengan menggunakan SWOT dalam merumuskan. Salah satunya alat yang digunakan adalah perencanaan strategi kuantitatif (*Quantitative Strategic Planing Matrix - QSPM*). Langkah – Langkah yang diambil dalam menyusun (*Quantitative Strategic Planing Matrix - QSPM*) :

1. Buat kolom kiri dengan daftar peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan internal utama.
2. Nilai setiap komponen factor internal dan eksternal utama,,
3. Menganalisa matrik pada tahap pencocokan dan mengidentifikasi alternatif strategi lainnya.
4. Menentukan nilai daya tarik (AS) sebagai daya tarik alternatif dari setiap strategi dengan mempertimbangkan factor tunggal internal eksternal
5. Menghitung total skor daya tarik (TAS).
6. Menghitung jumlah keseluruhan total skor daya tarik

Tabel 2. Quantitative Strategic Planing Matrix (QSPM)

Faktor – Faktor Utama	Bobot	Strategi Alternatif			
		Strategi 1		Strategi 2	
		AS	TAS	AS	TAS
Faktor – Faktor Internal					
Faktor - Faktor Eksternal					

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ruang Lingkup Strategi

Menurut Natliningsih et al.,(2018) Manajemen strategis adalah suatu kegiatan terencana dengan langkah-langkah terencana untuk mencapai tujuan. Pemikiran strategis menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan beragam. Semakin banyak format yang dimiliki suatu solusi, semakin rendah tingkat kesalahan yang dapat terjadi di masa mendatang. Strategi di sektor pertanian disebabkan oleh adanya sifat produk pertanian yaitu mudah rusak (mudah rusak diantaranya kadar air yang tinggi), sifat musiman (produk selalu diminati), harga fluktuatif sehingga ketidakpastian. dalam bisnis,. memerlukan penanganan lanjutan karena sifat fisiologis yang persisten dan faktor lingkungan yang tidak dapat diprediksi namun mempengaruhi hasil.

Menurut Silvana et al.(2023) manajemen strategis adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk menciptakan ,mempertahankan,atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Perencanaan termasuk membangun model bisnis, visi dan misi perusahaan ,strategi taktis yang kompetitif dan kerja sama, Selama proses ini,kepemimpinan diperlukan untuk membangun struktur organisasi yang tepat, budaya manajemen ,pengendalian masalah strategis dan tata kelola yang teratur.Proses ini mencakup penilaian lingkungan internal dan eksternal.

Manajemen agribisnis merupakan serangkaian fungsi manajemen yang Manajemen agribisnis seperangkat fungsi manajemen yang diterapkan pada usaha pertanian untuk menghasilkan berbagai jenis barang atau hasil seperti ikan ,ternak dan tanaman serta menyediakan berbagai jasa layanan seperti penyuluhan ,keuangan, teknologi dan produksi. Banyak sekali perbedaan penerapan prinsip manajemen pada sektor pertanian berdasarkan karakteristik usaha, ukuran perusahaan, jenis produk, dan variasi lainnya Putu et al., (2022)

3.2. Pengembangan Usahatani

Pemilihan startegi yang tepat menjadi alat dalam menciptakan keunggulan sehingga menciptakan daya saing yang sehat (Leni Handayani,2019).Menurut Ditjen Ketahanan Pangan (2022) peningkatan produksi kedelai pada tahun 2022 melalui kegiatan diantaranya pengembangan kawasan kedelai,perbanyak benih sumber kedelai,adanya penangkaran benih dan pengembangan petani produsen benih tanaman pangan atau yang disebut P3BTP.

Usahatani merupakan bidang ilmu bagaimana cara memberdayakan kemampuan yang dimiliki agar efektif dan efisien agar mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dalam jangka waktu tertentu.Dianggap efektif pemanfaatan sumber daya dimanfaatkan sesuai fungsinya dan efisien apabila sumberdaya memberikanhasil atau output (Soekartawi,2002;Moh Saeri,2018).

Menurut Ken Suratiah (2015) ilmu usaha tani adalah bagaimana seorang mampu mengusahakan dan mengkoordinir kemampuan yang ada digunakan dengan efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat dan hasil semaksimal mungkin. Memahami pertanian dari sudut pandang pertanian tidak lepas dari konsep dan prinsip ekonomi. Menurut perspektif agribisnis pertanian adalah salah satu subsistem dari system agribisnis,dimana usaha tani adalah kegiatan ekonomi komersial.

Manajemen usahatani adalah bagaimana mengelola keterbatasan faktor produksi yang dimiliki seperti air, lahan,,sumber daya manusia, dan modal untuk menghasilkan produk pertanian yang produktif dan berkualitas secara berkelanjutan, dan untuk mendukung petani dalam memenuhi kebutuhan petani dan keluarga mereka (Nur et al.,2021)

3.3. Kedelai

Kedelai merupakan sektor komoditas strategis yang kompleks dalam sistem pertanian Indonesia.. merupakan tanaman polong – polongan yang digunakan sebagai makanan pokok pembuatan kecap , tahu,tempe susu kedelai dan produk kedelai yang lain. Kedelai merupakan sumber protein nabati dan minyak global ,serta dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan dengan kandungan protein antara 35 % - 43 % sehingga ampu mencegah kanker (Alnapi,2015).

Kedelai merupakan tanaman yang telah dibudidayakan oleh manusia sejak 2500 SM dan pada awalnya berasal dari China. Di Indonesia, kedelai mulai dibudidayakan di pulau Jawa sejak abad ke-16 dan terus berkembang ke pulau lainnya. Glycine Soja atau Soja Max nama lain kedelai, sejak Tahun 1981 nama botani kedelai disepakati secara ilmiah adalah Glycine max (L.) Merr. Kedelai dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Lagiman et al,2022):

Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super Divisi : Spermatophyta
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Sub Kelas : Rosidae
Ordo : Fabales

Famili : Fabaceae

Genus : Glycine

Dalam penyusunan Matrik IE identifikasi faktor - faktor internal kemudian disusun menjadi *Matriks Internal Factor Evaluation* dengan tujuan menetapkan perusahaan atau unit bisnis sehingga dapat diperoleh strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan atau unit bisnis tersebut. Berikut hasil indentifikasi faktor -faktor internal yang coba disampaikan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut :

A. Kekuatan

1. Tersedianya lahan dan petani
2. Infrastruktur mendukung dan memadai
3. Motivasi petani untuk lebih maju
4. Bibit bersertifikat
5. Pengalaman berusaha tani yang cukup lama

B. Kelemahan

1. Kurangnya modal petani
2. Mutu kurang maksimal
3. Belum ada pemanfaatan potensi dimusim lain
4. Proses sampai produksi 3-4 bulan
5. Penentuan harga oleh pasar

Dengan mengidentifikasi faktor eksternal, berbagai faktor juga dapat mempengaruhi peluang dan ancaman yang disusun menjadi *Matrix Eksternal Factor Evaluation*. Faktor – faktor ini tidak hanya berkaitan dengan situasi Kabupaten Bojonegoro, tetapi juga mencakup faktor lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, demografi, teknologi serta tak luput dari kebijakan pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah.

A. Peluang

1. Teknologi informasi yang semakin canggih dan maju
2. Sarana mudah diakses
3. Kedelai lokal lebih disukai di pasar dalam negeri
4. Dukungan kebijakan pemerintah
5. Ragam produk turunan

B. Ancaman

1. Kondisi Iklim tidak menentu
2. Tidak tahan tergenang air
3. Serangan hama penyakit
4. Adanya persaingan usaha tani lain

Berdasarkan kategori diatas alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan kedelai :

Faktor Internal Faktor Eksternal	STRENGTH (S) 1. Tersedianya lahan dan petani 2. Infastruktur mendukung dan memadai 3. Motivasi petani untuk lebih maju 4. Bibit bersertifikat 5. Pengalaman dalam berusaha tani cukup lama	WEAKNESS (W) 1. Kurangnya modal petani 2. Mutu kurang maksimal 3. Belum ada pemanfaatan potensi dimusim lain 4. Proses sampai produksi 3-4 bulan 5. Penentuan harga oleh pasar
OPPORTUNITIES (O) 1. Teknologi informasi yang semakin canggih dan maju 2. Sarana mudah diakses 3. Kedelai lokal lebih disukai di pasar dalam negeri 4. Dukungan kebijakan pemerintah 5. Ragam produk turunan	STRATEGI SO 1. Mengembangkan luas lahan penanaman kedelai 2. Meningkatkan produksi kedelai 3. Optimalisasi sumber daya yang ada baik alam,manusai dan teknologi peralatan,	STRATEGI WO 1. Pemanfaatan segala sumber daya teknologi produksi guna meningkatkan produktivitas 2. Adanya regulasi kemudahan akses perkerditan modal 3. Adanya regulasi harga jual dan harga beli khususnya kedelai lokal 4. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengembangan bibit unggul
THREATS (T) 1. Keadaan Iklim tidak menentu 2. Tidak tahan tergenang air 3. Serangan hama penyakit 4. Adanya persaingan usaha tani lain	Strategi ST 1. Meningkatkan pengetahuan petani 2. Menciptakan kawasan pertanian kedelai lokal 3. Peningkatkan pemahaman dan penggunaan pupuk dan pestisida organik	Strategi WT 1. Memperkuat kerjasama antar petani dan kelompok tani 2. Memperkuat kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan harga pasar dan suku bunga kredit petani

Perencanaan strategis menggunakan matriks SWOT memiliki beberapa keterbatasan dalam analisisnya karena tidak dapat digunakan sebagai analisis untuk memperoleh keunggulan yang bersaing dan bukan menjadi tujuan akhir. Dalam diskusi mengenai bagaimana strategi yang diusulkan dan diterapkan, matriks ini dimaksudkan sebagai titik awal . Kedua SWOT merupakan penilaian statis . Karena dinamika lingkungan persaingan bisa jadi tidak terwakili dalam satu matriks,analisa SWOT mengakibatkan perusahaan melebihi – lebihkan satu faktor internal dan eksternal Ketika membuat kebijakan strategis karena SWOT tidak mengungkapkan hubungan timbal balik antara faktor internal dan eksternal yang paling penting. Hubungan timbal balik ini mungkin sangat penting dalam membuat kebijakan.

Berdasarkan hasil penilaian analisis SWOT yang telah dilakukan, beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan dalam mengembangkan usahatani kedelai dengan menggunakan analisis *Quantitative Strategi Palnning Matrix (QSPM)* yaitu:

1. Tingkatkan produksi kedelai, terutama kedelai lokal
2. Meningkatkan luas area pertanian
3. Optimalisasi sumber daya yang ada baik manusia, alam dan teknologi peralatan
4. Meningkatkan pengetahuan petani dalam pemilihan bibit bersertifikasi, pentingnya diversifikasi produk, pemanfaatan lahan
5. Peraturan yang mengatur kemudahan akses perkreditan petani
6. Menciptakan kawasan pertanian kedelai lokal
7. Peningkatan pemahaman dan penggunaan pupuk dan pestisida organik
8. Membuat regulasi harga jual dan harga beli khususnya dalam negeri
9. Memperkuat kerjasama antar petani dan kelompok tani
10. Memperkuat kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penentuan harga pasar dan suku bunga kredit petani

4. KESIMPULAN

- a. Dari hasil analisis IFE – EFE menunjukkan bahwa strategi yang sebaiknya dilakukan penentuan harga jual dan beli untuk meningkatkan pendapatan petani.
- b. Kebijakan pemerintah terhadap kedelai lokal yang sepenuhnya memihak kepada petani melalui penyuluhan rutin, bantuan bibit lokal bersertifikat, bantuan pupuk dan pestisida organik.
- c. Kemudahan regulasi akses perkreditan yang dapat dimanfaatkan khusus petani
- d. Prioritas strategi pengembangan yang direkomendasikan dalam analisis QSPM melalui pengembangan lahan dan kawasan agribisnis kedelai lokal di Kabupaten Bojonegoro

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat disarankan :

- a. Petani kedelai diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki lebih besar dibandingkan kelemahan yang ada menginggat tanaman kedelai hanya satu kali musim tanam dalam setahun.
- b. Dalam mendukung pengembangan kedelai untuk meningkatkan produksi selanjutnya diperlukan komitmendari pelaku hulu samapi hilir dahlam hal ini peran pemerintah dan swasta.
- c. Perlu adanya perhatian dari pemerintah setempat terutama dali hulu ke hilir dalam penyaluran pemasaran agar tidak dimanfaatkan oleh pedagang pengepul dengan cara melauai BUMDES yang ada di desa- desa kemudian disalurkan ke pengepul resmi dari pemerintah atau rekanan swasta.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aljaninansya, H.2022. Potensi Tanaman Sayuran Untuk Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Thesis. Surakarta. Magister Agribisnis Universitas Sebelas Maret.
- Alnapi A.2015. Kedelai Peluang dan Tantangan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Winaya Mukti, Yogyakarta
- David, Fred R.2011. Manajemen Strategis, Konsep – Konsep. PT. Intan Sejati. Klaten
- Ginanjari, E.S, & Suryanawati. 2017. Analisis Startegi Pengembangan UKM Agribisnis Berbasis Kedelai Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu. JASEP, Vol. 3 No. 2. Hal.65-75.
- Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.2023.Laporan Kinerja Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan Tahun 2022.
[https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAKIN%20DJTP%202022_UPDATE%20ATAP%20\(2\).pdf](https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAKIN%20DJTP%202022_UPDATE%20ATAP%20(2).pdf)

Ken Suratiyah.2015. Ilmu Usahatani Edisi Revisi.Penebar Swadaya.Jakarta

Lagiman, Ami. S, & Budi W.2022.Budidaya Tanaman Kedelai Di Lahan Pasir Pantai. LPPM UPN Veteran Yogyakarta

Nadya,G.,Rahma, N,&Candra M.2021.Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor kedelai di Indonesia. E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter.Vol. 9 No. 2. Hal.97-106

Nataliningsih, Gijanto, P.S., & Karyana, K.S.2018. Manajemen Strategi Agribisnis.CV. Alfabetha, Bandung

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.2022.Tingkatkan Produktivitas Merdeka Penen Kedelai Bersama Kementrian Pertanian Di Bojonegoro.
<https://bojonegorokab.go.id/berita/6746/tingkatkan-produktivitas-merdeka-panen-kedelai-bersama-kementerian-pertanian-di-bojonegoro> Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,2022. Prospek Pengembangan – Investasi Pemerintah Prov. Jatim Sektor Pertanian Di Jawa Timur.
https://www.kadinjatim.net/frontend/assets_4/files/20220806070129.pdf. Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2023.

Putu,F.K.L., Ni Putu,S.,&Ni Putu,A.A.2022.Manajemen Agribisnis,Universitas Mahasaraswati Press,Denpasar

Raka, E.P., & Yuliawati.2020.Strategi Pengembangan Kedelai Di Rumah Kedelai Grobogan. Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.Vol. 4 No. 1.Hal. 33-45.
<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics>

Ridhanto,M.R.Muhlisin,Nilasari, A.2020. Strategi Pengembangan Agribisnis Kedelai Lokal Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Di Kabupaten Lombok Tengah.Mediagro:Jurnal Imu – Ilmu Pertanian.Vol.16. No.1. Hal. 23-25

Silvana,M,Soemarno,Hanifatus,S.2023. Manajemen Startegi Agribisnis.Universitas Brawijaya Press.Malang

Simanungkalit, Saut.2020. Strategi Pengembangan Agribisnis Tanaman Kedelai Di Distrik Sidey Kabupaten Manokwari.Jurnal Sosio Agri Papua, Vol.9 No.1. Hal. 79-85

Soekartawi.2002.Teori Ekonomi Produksi. PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta

Pemberdayaan Kelompok Tani Sido Mulyo Melalui Program Petani Mandiri di Desa Sendangagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Reynaldo Sandya Prawiranegara¹, Darsono², Rhina Uchyani Fajarningsih³

^{1,2,3} Program Studi S2 Agribisnis, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Jln. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126

Email : Reynaldo.randya97@student.uns.ac.id

Abstract: This research is to examine a process of empowering the Sido Mulyo Farmers Group through the implementation of the Independent Farmers Program in Sendangagung Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency. The aim of this research is to analyze the impact of empowering the Sido Mulyo farmer group through the Independent Farmer Program to increase the knowledge and skills of farmers. The main focus of the research is training in making organic fertilizer. In this research, qualitative research methods were used through a purposive sampling process of 23 members of the Sido Mulyo farmer group. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. Empowerment methods include introduction to training participants, introductory material, introduction to the materials and tools used, as well as direct field practice in empowering organic fertilizer production. Apart from that, this empowerment also teaches farmers to manage organic fertilizer and agricultural cultivation systems. The results of this research show that through the empowerment training process the Sido Mulyo Farmers Group succeeded in increasing knowledge and skills in processing sustainable organic fertilizer. Positive impacts can also be seen in increasing knowledge of making organic fertilizer as well as social and economic impacts for farmer participants. The Independent Farmer Program has succeeded in providing significant benefits in increasing the welfare and independence of farmers in Sendangagung Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency on a regular and sustainable basis.

Keywords: Farmer Empowerment, Independent Farmer Program, Farmer Well-being

Abstrak: Penelitian ini untuk mengkaji suatu proses pemberdayaan Kelompok Tani Sido Mulyo melalui implementasi Program Petani Mandiri di Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa dampak pemberdayaan kelompok tani Sido mulyo melalui Program Petani Mandiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani. Fokus utama penelitian yaitu pelatihan pembuatan pupuk organik. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui proses pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* sebanyak 23 anggota pada kelompok tani Sido Mulyo. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pemberdayaan melibatkan identifikasi peserta pelatihan, pendahuluan materi, pengenalan suatu bahan dan alat yang di gunakan, serta praktik lapangan langsung dalam pemberdayaan pembuatan pupuk organik. Selain itu, pemberdayaan ini juga mengajarkan para petani melakukan manajemen pupuk organik dan dengan sistem budidaya pertanian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui proses pelatihan pemberdayaan pada Kelompok Tani Sido Mulyo berhasil meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan mengolah pupuk organik yang berkelanjutan. Dampak positif juga dapat terlihat dalam peningkatan pengetahuan pembuatan pupuk organik serta dampak sosial dan ekonomi bagi para peserta petani. Program Petani Mandiri ini berhasil memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani di Desa Sendangagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro secara berkala dan berkelanjutan.

Kata kunci:

1. PENDAHULUAN

Pertanian memiliki arti peran ekonomi yang vital di Indonesia dan mempunyai peran yang sangat strategis untuk tersedianya suatu kebutuhan pangan, menghasilkan suatu lapangan kerja yang luas, dan serta dapat tumbuhnya ekonomi pada suatu desa setempat. Kabupaten Bojonegoro, adalah wilayah agraris yang adanya di profinsi Jawa Timur, mempunyai keunggulan pertanian yang cukup baik, namun

banyak masalah dan tantangan pada seperti rendahnya produk di pertanian dalam pertaniannya, sedikitnya pengetahuan terhadap carat ani yang maju, juga sedikitnya kebutuhan taraf hidup pada para petani. Wilayah tani ini jadi hal penting yang terus di unggulkan oleh kebanyakan masyarakat setempat, perlu di ingatnya untuk mengatasi persoalan menurunnya pasokan poduk pertanian yang sering terjadi pada masyarakat indonesia ini. bukti ini mengindikasi bahwa suatu bentuk tani bukan yang bagus dan penting, tapi juga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjunjung sembhunya sektor perekonomian, yang utama pada pembahasan pasokan produksi tani untuk pangan. datangnya pasokan pertanian sangat penting bagi semua warga Indonesia. Pasokan pertanian mempunyai tempat dalam kebutuhan pada primer tidak bisa di lupakan (Suratha, 2014). Dalam segi pertanian berikut, pertanian mempunyai hal penting untuk memenuhi pasokan produksi pertanian dalam menjunjung perekonomian negara, daerah maupun pedesaan. Secara garis besar, wilayah tani bisa diartikan dalam 4 alat sangat saling membutuhkan:tata cara produk pertanian, orang dalam pertanian atau orang berdiri sendiri yang masuk pada usaha tani, menggunakan wilayah tani, untuk banyaknya pekerjaan yang terkait produksi tani. (Soetriono, 2006).

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di wilayah kabupaten Bojonegoro, terutama bagi para petani yang menghadapi kendala dalam mengembangkan keterampilan dan usaha pertanian mereka karena keterbatasan akses pengetahuan dan alat pertanian yang belum modern, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memulai langkah dengan mengenalkan Program Petani Mandiri (PPM). Program ini menawarkan beragam fasilitas kepada para petani yang terdaftar melalui Kartu Petani Mandiri (KPM). Maksud dari Program Petani Mandiri adalah untuk memberikan bantuan modal dalam bentuk barang kepada para petani dengan tujuan agar lebih meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka serta mendorong kemandirian para petani. KPM berfungsi sebagai alat identifikasi yang memberikan peluang kepada petani untuk mengakses manfaat dari PPM. Program tersebut dijalankan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta mengikuti ketentuan dari Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 mengenai Program Petani Mandiri, yang telah direvisi mengikuti perubahan yang ada dalam Peraturan Bupati pada Nomor 20 Tahun 2019. Langkah ini mencerminkan komitmen pada pemerintah daerah di kabupaten Bojonegoro dalam melindungi dan memberdayakan para petani di wilayah tersebut.

Pertanian memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan dan sumber ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pertanian adalah sektor yang memiliki potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional serta peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, terdapat berbagai banyak kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya, terutama terkait dengan keterbatasan akses terhadap modal, pengetahuan, dan teknologi pertanian yang modern. Kabupaten Bojonegoro, khususnya Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo, kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar dimana para masyarakat hamper kebanyakan seorang petani. Namun, tantangan keterbatasan tersebut juga dirasakan oleh para petani di daerah ini, mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mereka dalam bertani. Dalam konteks ini, pemberdayaan petani menjadi suatu prioritas penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merespons baik tantangan ini dengan meluncurkan Program Petani Mandiri (PPM) untuk para petani di kabupaten Bojonegoro. Program ini bertujuan memberikan bantuan modal berupa barang kepada petani dengan tujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka. Salah satu aspek pemberdayaan yang menjadi fokus dalam program ini adalah pelatihan pembuatan pupuk organik agar mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Pupuk organik memiliki peran penting dalam pertanian berkelanjutan, membantu memperbaiki struktur hara tanah, meningkatkan kesuburan bagi tanah, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, masih perlu dianalisis dan dikaji sejauh mana dampak dari pelatihan pembuatan pupuk organik terhadap pemberdayaan pada Kelompok Tani Sido Mulyo di Desa Sendangagung, kecamatan Sumberrejo. Dengan demikian, pemberdayaan Kelompok Tani Sido Mulyo melalui Program Peltani Mandiri delngan folkus pada pellatihan pelmbuatan pupuk olrganik yang sangat pelnting untuk dilakukan agar dapat melmbelrikan manfaat pelmahaman yang lelbih melndalam telntang elfektivitas hasil pellatihan ini untuk meningkatkan melningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta

produktivitas pertanian pada anggota kelompok tani, sehingga dapat diterapkan dengan semaksimal mungkin kepada para petani.

1.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam masyarakat adalah bentuk berperilaku sosial, yaitu golongan yang di buat sedemikian rupa jadi terkonsep sesuai kemampuan terendiri, dan berorientasi untuk terpenuhnya kebutuhan di sekitar. (Gunawan, 2009). Pemberdayaan adalah suatu kata utuh dari “daya” dengan mempunyai arti berdaya, bisa ataupun mampu. Memberdayaan masyarakat ialah bentuk usaha untuk mengangkat harkat dan martabat pada masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi masalah keadaan keterbatasan tersebut. Pemberdayaan yaitu usaha dalam hal meningkatkan kapabilitas kemampuan pada masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki oleh para masyarakat dan dapat bekerja keras untuk mengembangkan potensi tersebut (Zubaedi, 2013).

Pemberdayaan yaitu “suatu bentuk kegiatan yang berkesinambungan dan bertenaga selaku kooperatif maju dalam terlibat pada semua sisi, ada melalui evolusi dengan ikut dalam semua potensi”. Berikut pemberdayaan dari Jim Ife (Suhendra, 2006) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang 16 kurang beruntung (empowerment aims to increase the power of disadvantage)”. Menurut pakar Moh. Ali Aziz, 2005, pemberdayaan adalah suatu bentuk konsep yang fokusnya pada kekuasaan. Pemberdayaan secara pokok merupakan suatu proses memutus (breakdown) hubungan antara subjek dan objek tersebut. Proses ini untuk mementingkan pengakuan subjek akan sebuah kemampuan atau daya yang dapat dimiliki objek. Secara umum proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke suatu objek. Hasil akhir dari pemberdayaan merupakan beralihnya fungsi dari individu yang semula di objek menjadi subjek (baru), sehingga relasi sosial tersebut yang nantinya hanya akan dicirikan dengan adanya relasi sosial antar subjek dengan subjek yang lainnya.

1.2. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahap pelatihan masyarakat yang dikutip dari buku “Pemberdayaan Masyarakat” dari Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019) ialah:

- a. mempersiapkan, tahapan berikut melakukan langkah mempersiapkan panitia pelatihan oleh para warga dengan mempersiapkan acara secara langsung di tempat acara. Tujuan utama tahapan tersebut yaitu untuk memastikan lancarnya proses pelatihan oleh warga petani.
- b. Pengkajian, tahapan pengkajian tersebut dilakukan dengan melalui suatu penilaian terhadap perseorangan ataupun anggota warga terpilih. untuk tahapan berikut, para orang yang bertugas mendata kerancuan, yang dibutuhkan, dan kemampuan yang ada pada para klien. Hal tersebut memiliki tujuan dengan menentukan tepatnya dalam melakukan pelatihan yang sesuai sasaran kepada masyarakat.
- c. Perencanaan suatu perencanaan acara, atau pekerjaan. dengan tahapan selanjutnya, semua anggota tugas menjadi penyidik untuk kemajuan. Warga di ajukan paksa dengan menghitung semua perencanaan yang ada dengan baik buruknya kekurangan yang ada. Jalan pintas tersebut digunakan sebagai tahap menentukan suatu program yang paling baik.
- d. Melakukan bentuk Rencana Aksi, tahapan berikut, penyidik membantu pada golongan untuk memilih suatu acara yang sesuai untuk memperbaiki persoalan yang ada. Petugas itu juga bisa memberikan masukan suatu ide atau gagasan-gagasan dijadikan sebuah lembar tulisan, terutama jika terkait pada tujuan merangkai bentuk proposal untuk menambah modal.
- e. Melakukan pelaksanaan suatu Program/Kegiatan: Dalam tahapan selanjutnya melakukan pelaksanaan, masyarakat petani perlu mengerti dan memahami maksud acara pelatihan tersebut yang dapat meminimalisir suatu masalah untuk menjalankan suatu pemberdayaan masyarakat. Saling bantu antara panitia dan warga sangat penting pada tahapan ini.
- f. Melakukan penilaian kembali: tahapan penilaian kembali dilakukan oleh pengawasan dari warga atau anggota tani dan para panitia suatu program pelatihan. Yang baik, acara tersebut menaruh kesiapan dari masyarakat pula dalam membangun suatu jalan yang di awasi secara internal serta menjadikan hubungan terus menerus dengan mereka, sehingga mendapatkan hasil mandiri untuk para warga dan selesai dengan apa yang di harapkan bersama.

- g. paling akhir, tahapan akhir yaitu melakukan atau mengakhiri suatu proyek. Tahap tersebut, proyek sudah dapat dihentikan jika anggota warga tani sudah mampu melakukan secara mandiri sehingga dapat merubah kehidupan para anggota warga tani tersebut.

1.3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi antara lain:

- a. Membuat suatu kondisi lingkungan yang memungkinkan berkembangnya kreatifitas potensi yang ada di masyarakat menjadi modern/meningkat.
- b. Memaksimalkan kemampuan yang dimiliki masyarakat (empower). Untuk berproses dalam mengikuti pelatihan ini, upaya dasar yaitu memperkuat pendidikan dan kebutuhan Kesehatan warga tercukupi, serta jalan pada sumber-sumber perekonomian yang maju sebagai contoh modal, dapat mengikuti perubahan zaman, informan yang relevan, mudahnya memasarkan dan adanya kerja yang luas. Pelatihan meliputi adanya kemudahan akses untuk masyarakat seperti irigasi, jalan, listrik, Kesehatan, dan lembaga seperti sekolah dan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan oleh warga dengan mudah pada daerah pedesaan, serta kemampuan untuk menyediakan biaya pelatihan dan organisasi pemasaran di daerah desa yang kebanyakan terdapat banyak orang di kategorikan memiliki kekuatan yang kurang. Pemberdayaan bukan mencakup individu anggota masyarakat, tapi juga suatu watak masyarakat. Penanaman nilai budaya yang modern seperti tanggung jawab, keterbukaan, kerja keras menjadi suatu bagian terpenting dari upaya pemberdayaan. Demikian juga dalam pembaharuan pranata social dan pengintegrasian kedalam suatu kegiatan pembagungan peran masyarakat di dalamnya. Bagian terpentingnya yaitu bentuk partisipasi masyarakat pada pengambilan suatu keputusan untuk mempengaruhi mereka pribadi dan kelompok.
- c. Memberdayakan memiliki makna melindungi. Proses pemberdayaan yang lemah juga harus dicegah supaya tidak semakin lemah, karena mereka tidak memiliki kuasa yang kuat. Oleh karena itu untuk melindungi kaum dhuafa merupakan suatu hal yang mendasar pada konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menyembunyikan interaksi masyarakat tertentu, karena dengan ini akan membayangi yang kecil dan menguasai yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan berarti menciptakan orang menjadi semakin bergantung pada suatu program amalan atau bantuan dari pemerintah. Pada dasarnya suatu yang dihargai harus tercipta dari usaha sendiri. Tujuan utamanya supaya masyarakat semakin mandiri dan memungkinkan untuk membangun kapasitas bergerak menuju kehidupan yang lebih layak secara berkelanjutan.

1.4. Model Model Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses yang melibatkan peran aktif pelaku pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah dan mengembangkan potensi mereka agar lebih maju dan lebih baik. Alur pemberdayaan dimulai dari kemampuan pelaku pemberdayaan itu sendiri, proses pemberdayaan yang melibatkan interaksi dan kolaborasi dengan masyarakat, hingga mencapai keberdayaan masyarakat yang ditandai dengan kemandirian dan peningkatan kualitas taraf hidup, yang alur pemberdayaannya sendiri meliputi dari:

- a. Kemampuan Pelaku Pemberdayaan merujuk pada keterampilan yang dimiliki oleh mereka yang terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kemampuan ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat secara efektif. Kemampuan pelaku pemberdayaan dinilai melalui tiga aspek perilaku, yaitu pengetahuan/kognitif, sikap/afektif, dan keterampilan/psikomotorik.
- b. Proses Pemberdayaan adalah suatu siklus atau rangkaian langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kelompok formal maupun nonformal. Proses ini mencakup analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur melalui kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan, seperti analisis masalah, perencanaan program, pelaksanaan program, serta partisipasi dalam evaluasi yang berkelanjutan.
- c. Keberdayaan Masyarakat merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta menentukan alternatif pemecahan masalah secara mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek, yaitu kemampuan dalam pengambilan keputusan, kemandirian, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya untuk masa depan (Sugianto 2023).

1.5. Program Petani Mandiri

Program Petani Mandiri (PPM) merupakan sebuah upaya yang mengedepankan bantuan modal dalam bentuk barang yang dapat digunakan kepada para petani, dengan tujuan utama untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mandiri mereka dalam pertanian. PPM menawarkan rangkaian manfaat yang beraneka ragam. Pertama-tama, inisiatif ini memberi kesempatan kepada para warga tani sehingga memperoleh suntikan dalam bentuk barang tani, memiliki batasan modal paling banyak senilai 10 juta rupiah. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa prioritas akses diberikan pada pelatihan dan perkembangan usaha di bidang pertanian, sebagai langkah untuk memajukan kemampuan para petani. Di samping itu, PPM juga memastikan pembelian hasil pertanian melalui kerjasama yang dijalin dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam konteks keberlanjutan, program ini juga menyertakan perlindungan asuransi bagi petani guna mengatasi kemungkinan risiko dari kegagalan panen atau peternakan. Terakhir, PPM memberikan peluang akses terhadap beasiswa bagi anggota keluarga petani (Sumi, 2021).

Program Petani Mandiri (PPM) ialah bantuan dalam bentuk modal yang berupa barang untuk para petani agar terwujudnya kesejahteraan, mandiri bagi para tani, untuk Kartu tani Mandiri (KPM) yaitu kartu khusus pada masyarakat tani sesuai dengan kriteria bahwa program PPM tepat sasaran dengan peraturan perundang – undangan sebagai penanda / identitas sekaligus tempat untuk mendapatkan apa yang ada dalam Program tani Mandiri (PPM). Tujuannya proyek ini diantaranya sebagai upaya pemmerintahan daerah untuk mewujudkan Undang – undang nomor 19 tahun 2013 tentang lindungan, diberdayanya para tani, Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2018, tentang Program Petani Mandiri, Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2019 tentang perubahan perbup nomor 48 Tahun 2018 Program Petani Mandiri. Sampai dengan tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Bojonegoro telah mencetak sebanyak 70.933 kartu Petani Mandiri yang telah diterimakan kepada Petani di kabupaten Bojonegoro, dengan rincian di tahun 2019 sebanyak 19.966 kartu Petani Mandiri dan di tahun 2020 sebanyak 50.967 Kartu Petani Mandiri. Adanya kelompok petani di Kabupaten Bojonegoro di Program Petani Mandiri, para masyarakat tani akan dapat keuntungan banyak yang didapat diatas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian memakai metode kualitatif agar dapat mengkaji kondisi lingkungan tanpa melibatkan percobaan langsung ke lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci keberhasilan, memakai teknik pengumpulan data dapat dilihat dari wawancara keseluruhan, dan menganalisis data kualitatif. Sebagai awal data dalam meneliti kualitatif berasal dari informasi lingkungan dan didukung oleh data lain sebagai contoh dokumen terkait, buku, jurnal, dan peraturan/kebijakan pemerintah yang terkait yang mendukung untuk melaksanakan penelitian lanjut. Penelitian ini menanyakan secara langsung dan menjelaskan peristiwa yang terjadi di lingkungan penelitian dengan mengunjungi ke keempat yang akan dilakukan penelitian. Penelitian ini di fokuskan pada dampak pemberdayaan suatu kelompok tani sido mulyo dengan program petani mandiri. Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, tempat yang akan di teliti. Dengan wawancara yang tersusun rapi penelitiberkomunikasi pada anggota kelompok organisasi tani. Proses pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* sebanyak 23 anggita tani Sido Mulyo peneliti mengelola data dengan melakukan pertanyaan langsung dan terjun ke lingkungan secara mendalam, memilah data yang akurat, melakukan pilah data secara langsung yang akan digunakan untuk melakukan peneltian dan menjelaskan yang sudah di temukan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian alur pelatihan anggota petani Sido Mulyo dalam acara pelatihan Mandiri petani yang berada di Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dalam bentuk pelatihan pembuatan pupuk organik untuk tanaman pertanian. Rangkaian Proses pemberdayaan meliputi:

- a. Identifikasi Peserta Pelatihan, proses dimulai dengan mengidentifikasi anggota Kelompok Tani Sido Mulyo Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo yang akan mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik untuk pertanian. Peserta pelatihan pemberdayaan dipilih berdasarkan minat dan keterlibatan mereka dalam bidang pertanian.

- b. Pendahuluan dan Pengenalan Materi, pelatihan dimulai dengan sesi pendahuluan dan pengenalan materi pelatihan. Peserta diberikan gambaran umum tentang pentingnya penggunaan pupuk organik dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara alami, tidak merusak unsur hara dan berkelanjutan.
- c. Pengenalan Bahan dan Alat, Peserta diberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai bahan baku yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk membuat bio pestisida, contoh kompos, limbah dapur, kotoran ayam, kambing, sapi dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga diperkenalkan dengan alat-alat yang diperlukan dalam proses pembuatan pupuk organik.
- d. Proses Pembuatan Pupuk Organik, peserta diajarkan langkah-langkah secara praktis dalam pembuatan pupuk organik. Ini meliputi pencampuran berbagai bahan baku yang sudah dijelaskan di atas, pengaturan rasio, pengomposan, dan proses fermentasi yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- e. Praktik Lapangan, setelah pemahaman teori cara pembuatan pupuk organik, peserta melakukan praktik langsung lapangan dalam pembuatan pupuk organik. Mereka secara langsung terlibat dalam setiap tahap proses, mulai dari mencampur semua bahan hingga memantau fermentasi hasil pupuk organik.
- f. Manajemen Pupuk Organik, selain pembuatan, peserta juga diajarkan mengenai pengelolaan pupuk organik di lahan pertanian. Mereka belajar tentang cara aplikasi yang efektif, frekuensi pemberian, dan manfaat jangka panjang dari penggunaan pupuk organik.
- g. Pengintegrasian Dengan Budidaya, pelatihan tidak hanya fokus pada pembuatan pupuk, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan penggunaan pupuk organik dengan sistem budidaya pada pertanian yang ada. Peserta diajarkan bagaimana mengoptimalkan semua hasil pertanian dengan bantuan pupuk organik yang sudah di buat dalam pelatihan.
- h. Evaluasi Hasil dan Pertanyaan, setelah pelatihan, dilakukan evaluasi terhadap hasil pupuk organik yang dihasilkan oleh para peserta. Mereka diberikan kesempatan untuk bertanya, memahami potensi kendala, dan berbagi pengalaman dalam pembuatan pupuk organik.
- i. Pemantauan Lanjutan, setelah pelatihan, kelompok tani mendapatkan dukungan dalam pemantauan lanjutan. Petugas program atau pendamping lokal akan berkunjung secara berkala untuk memantau dalam penggunaan pupuk organik dan dampak pupuk organik dalam pertanian mereka.

Melalui rangkaian proses pelatihan pembuatan pupuk organik ini, Kelompok Tani Sido Mulyo di Desa Sendangagung dapat memberikan dampak positif dalam bentuk ilmu baru bagi mereka untuk menghasilkan pestisida bio yang ramah lingkungan. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan hasil produktivitas pertanian secara berkelanjutan sambil mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan.

Hasil wawancara mengenai pemberdayaan Kelompok Tani Sido Mulyo melalui Program Petani Mandiri di Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, mengungkapkan gambaran yang positif terhadap dampak program petani mandiri ini. Anggota kelompok tani menyampaikan bahwa program tersebut telah memberikan manfaat yang nyata dan signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian para petani di Desa Sendangagung. Melalui bantuan modal dalam bentuk barang, seperti alat pertanian yang modern dan pupuk organik yang berkualitas, benih pertanian, kelompok tani dan para petani di Desa Sendangagung berhasil meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Para petani juga mendapat akses lebih baik terhadap pelatihan dan pengetahuan pertanian modern, yang telah membantu mereka dalam mengelola usaha pertanian secara lebih efektif. Selain itu, program ini mempermudah akses penjualan hasil panen melalui kerjasama dengan lembaga ekonomi lokal yang bergerak di bidang usaha pertanian. Hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa Program Petani Mandiri memiliki potensi yang kuat untuk mengangkat taraf hidup dan memberdayakan kelompok tani di desa sendangagung tersebut.

Hasil penelitian mengenai pemberdayaan Kelompok Tani Sido Mulyo melalui Program Petani Mandiri di Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, terkait dengan pelatihan pembuatan pupuk organik tersebut menunjukkan dampak yang positif dan signifikan secara berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, anggota Kelompok Tani Sido Mulyo berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya penggunaan pestisida bio untuk pertanian berkelanjutan agar tidak membuat kondisi rusak pada tanah. anggota kelompok tani mampu menghasilkan pupuk organik

berkualitas tinggi secara mandiri setelah adanya program pelatihan tersebut. Mereka dapat mengidentifikasi dan memilih bahan baku organik yang tepat, mengatur rasio campuran bahan pupuk organik dengan benar, serta mengelola proses fermentasi secara efektif dan efisien. Ini telah mengarah pada peningkatan produktivitas pertanian mereka karena penggunaan pupuk organik yang lebih baik dan lebih terarah. Dalam penelitian ini, juga ditemukan bahwa kelompok tani berhasil mengintegrasikan penggunaan pupuk organik dengan sistem budidaya pertanian yang ada di lingkungan setempat. Mereka menerapkan pupuk organik secara tepat pada tanaman dengan jangka waktu yang sesuai, yang menghasilkan tumbuhnya hasil tani yang maksimal dan berpotensi meningkatkan hasil panen. selanjutnya, menggunakan produk bio untuk memperbaiki struktur tanah yang baik dan normal, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas unsur hara tanah pertanian.

Selain manfaat agronomis, hasil penelitian juga mengindikasikan adanya dampak sosial dan ekonomi yang positif di Desa Sendangagung. Anggota Kelompok Tani Sido Mulyo merasa lebih percaya diri dan lebih mandiri dalam mengelola usaha pertanian mereka dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang praktik pertanian berkelanjutan sehingga pertanian di Desa Sendangagung tidak harus tergantung pada penggunaan pupuk kimia. Selain itu, mereka mendapatkan manfaat ekonomi melalui peningkatan hasil panen dan pengurangan biaya pemupukan kimia. Hasil penelitian ini juga dapat di garis bawahi pentingnya pendampingan dan pemantauan setelah adanya pelatihan pembuatan pupuk organik. Dukungan dari pemerintah daerah dan petugas program dalam mengawasi dan memberikan saran setelah pelatihan berkontribusi pada keberhasilan penerapan pupuk organik di lapangan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan pupuk organik dalam Program Petani Mandiri telah berhasil memberdayakan dan menjadikan petani mandiri pada Kelompok Tani Sido Mulyo di Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan produktivitas pertanian, serta perubahan lingkungan dan perekonomian di anggota tani Sido Mulyo menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan petani melalui program ini memiliki efek positif yang signifikan secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang di dapat dari diberdayanya sekelompok Tani Sido Mulyo melalui acara tani Mandiri berada di Desa Sendangagung, kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Bahwa pelatihan pembuatan pupuk organik tersebut memiliki dampak positif dan signifikan yang berkelanjutan. Melalui planning acara ini, para sekelompok tani memperluas pemikirannya dan trampil untuk menghasilkan produk bio tani berkualitas bagi pertanian mereka. Hal ini membawa peningkatan produktivitas pertanian, integrasi pupuk organik dengan melakukan sistem budidaya, serta dampak positif sosial dan ekonomi. Program ini membuktikan bahwa pemberdayaan petani melalui pendekatan praktis dan dukungan secara penuh setelah pelatihan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan kelompok tani Sido Mulyo

5. SARAN

Saran yang bisa dilakukan setelah melakukan penelitian yaitu.

- a. Program Petani Mandiri perlu dikaji dan ditingkatkan terus menerus dengan juga melibatkan generasi muda yang potensial untuk memberikan motivasi pada generasi muda terkait pemahaman tentang pertanian serta petani yang sudah berhasil mengembangkan dan dipraktekkan secara langsung di lapangan setelah mengikuti Program petani mandiri.
- b. Perlu ditambah kegiatan yang fokus di pemuda dalam proses regenerasi pertanian untuk mempermudah transfer informasi dan transfer teknologi di bidang pertanian agar regenerasi pemuda ini menjadi paham pentingnya berkecimpung di pertanian sebagai pasokan ketahanan pangan negara.
- c. Perlu ditambah juga untuk pihak pegawai desa lebih memfasilitasi apa yang perlu di benahi dalam pertanian desa agar para petani lebih mudah terkait kendala-kendala yang ada di pertanian.

6. DAFTAR PUSTAKA

Elkol, Sutolrol. 2002. *Pelmbelrdayaan Masyarakat Delsa, Matelri Diklat Pelmbelrdayaan Masyarakat Delsa*.

Samarinda.

Kelsi, Widjianti. 2011. Model Pembelajaran Masyarakat. Jurnal Elkolnolmi Pembangunan Voll. 12, Nol.1

Musfiqoln. 2012. Panduan Lengkap Model Pembelajaran Pendidikan. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka. Soletriolnol, A. Suwandari. Rijantol. 2006. Pengantar Ilmu Pertanian. Bayumeldia Publishing. Malang Suhartol, Eldi., 2005. Membangun Masyarakat Pembelajaran Rakyat. Bandung: Relfika Aditama Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pembelajaran Masyarakat. Bandung: STKSPREISS.

Sri sumi, 2021. Perlindungan Dan Pembelajaran Petani Boljolnelgolrol Jatim, Dengan Memberikan Hibah Modal dari Pemda Boljolnelgolrol

Suratha, 2014. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Ketahanan Pangan. Jurnal Media Komunikasi Geografi. Vol. 15. Nol. 02 Diakses pada 21 Agustus 2023

Yaumitdin S., Sugiharti M. H., Elnoliz A., 2023. Pembelajaran Kelompok Tani Barokah Melalui Program Petani Mandiri Di Desa Sumberlaseh Kecamatan Dandur Kabupaten Boljolnelgolrol. Prosiding Seminar Nasional hasil penelitian Agribisnis II Volume 2, Tahun 2023. 3025-0439

Sugiyolnol, 2013, Model Pembelajaran Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA. Syaharani, Mella. 2022. Luas Padi Indonesia Selama Tahun 2022. <https://data.gololdstats.id>.

Diakses pada 09 juni 2023

Yudha, El. P., Teldjalaksana, V., & Putri, C.K. El., 2023. Dampak Modernisasi Terhadap Kesejahteraan Petani. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VII Volume 7, Nolmolr 1, Tahun 2023 : 62- 67

Yudha EIP, [Syamsiyah](#) N, [Pardian](#) P, Dina RA. Rural areas are more resilient than urban areas to the COVID19 pandemic. Is it true? (Lessons from Indonesia). Human Geography – Journal of Studies and Research in Human Geography. Voll. 17, Nol. 2, November 2023, 171-192

Zubaeldi, 2013. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik, Cetakan kel-1 (Rawamangun, Jakarta: Kelncana, 2013), 24–25.

Saluran Pemasaran Gabah di Daerah Aliran Sungai Hilir Bengawan Solo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

Muhamad Alfian¹, Endang Siti Rahayu², Sugiarti Mulya Handayani³

^{1,2,3} Program Studi Magister Agribisnis, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami no 36 Ketingan Surakarta

Email : muhamadalfian958@student.uns.ac.id

Abstract: The research is to describe, the grain marketing channels in Hilir Bengawan Solo, Ngraho District, Bojonegoro Regency. This research method uses surveys, interviews and observations. Data analysis used in this research is qualitative analysis, Qualitative analysis is used to describe grain marketing channels. The conclusions from the results research conducted in Ngraho, District Bojonegoro Regency are as follows: There are 3 types of marketing channels in Ngraho District, Bojonegoro Regency, namely: 1) Farmers - Milling, 2) Farmers - Collectors - Milling, 3) Farmers - Combi Slasher- Collector- Mill Merchant. Of the 3 types of marketing channels, most farmers use marketing channel number 2, namely Farmers - Collectors - Milling.

Keywords: Marketing Channels, Rice, Rice Fields

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan saluran pemasaran gabah di Hilir Bengawan Solo yang berlokasi Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilaksanakan di lokasi penelitian. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang digunakan peneliti ini untuk pengolahan datanya. Analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan saluran pemasaran gabah di daerah hilir Bengawan Solo kecamatan Ngraho. Berikut ini didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Terdapat tiga jenis saluran pemasaran di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yaitu : 1). Petani - Penggiling, 2). Petani - Pedagang Pengumpul - Penggiling, 3). Petani - Pemotong Kombi – Pedagang Pengumpul - Penggiling. Dari tiga jenis saluran pemasaran yang terbanyak, petani menggunakan saluran pemasaran kedua: petani – pengepul – penggilingan.

Kata kunci: Saluran Pemasaran, Padi, Sawah

1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian terus menjadi sektor strategis pembangunan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Sektor pertanian terbukti berperan dalam peningkatan perekonomian, dapat dilihat secara lebih luas terutama dalam konteks pendistribusian hasil pembangunan kepada masyarakat pedesaan. Nilai tambah sektor pertanian selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Seperti yang terlihat saat ini, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan mata pencaharian mereka masih bergantung pada pertanian. Salah satu daerah Kabupaten lumbung pangan produk beras dan jagung di Provinsi Jawa Timur adalah Bojonegoro.

Agar petani dapat mencapai hasil yang lebih optimal peningkatan produksi harus didukung dengan pemasaran yang tepat. Peningkatan produksi sangat erat kaitannya dengan pemasaran. Peningkatan produksi harus meningkatkan pendapatan petani. Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan produksi tanpa diimbangi dengan sistem pemasaran yang baru dan lebih baik, justru dapat mengakibatkan penurunan pendapatan akibat turunnya harga (Arief, 2005).

Pada Tahun 2016 Kabupaten Bojonegoro salah satu daerah kabupaten penghasil gabah dan beras utama di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori 5 besar penghasil beras dan padi-padian, dengan Kabupaten lainnya yaitu Lamongan, Ngawi, Jember, dan Banyuwangi (Nimas, 2019). Pada semester I tahun 2022, luas panen Kabupaten Bojonegoro sebesar 132.455 Ha. Untuk daerah di Kecamatan Ngraho memiliki luas lahan 9.189 Ha produksi berjumlah 55.809,73 ton (Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro).

Peningkatan produksi yang tinggi harus diimbangi dengan saluran atau pola distribusi pemasaran yang teratur. Saluran distribusi ialah saluran yang dipilih produsen, untuk mengalihkan barang produksi yang dihasilkan kepada konsumen, baik secara langsung atau melalui lembaga pemasaran (Lubis, 2004). Terdapat beberapa jalur distribusi gabah di Hilir Bengawan Solo, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Umumnya pemasaran gabah dimulai dari petani sebagai produsen menjual produknya berupa gabah kering panen (GKP) kepada pengepul yang selanjutnya menjualnya ke penggilingan padi, beberapa petani menjual langsung ke penggilingan padi. Studi ini mengidentifikasi saluran pemasaran mana yang paling sering digunakan petani untuk menjual produknya. Setiap saluran pemasaran mempunyai kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui saluran pemasaran mana yang paling banyak dipilih oleh petani di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian bertujuan menggambarkan berbagai saluran pemasaran gabah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Hilir Bengawan Solo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menentukan tempat lokasi penelitian ini dilakukan menggunakan metode purposive sampling atau secara sengaja yaitu Hilir Bengawan Solo yang berada di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

2.1. Metode Pengambilan sampel

Untuk menentukan sampel petani menggunakan metode purposive sampling secara sengaja yaitu petani pada masa panen bulan Januari sampai Februari 2024 dan hasil panennya dijual.

Untuk Lembaga pertanian yang terlibat pengambilan sampelnya menggunakan snowball sampling yaitu informasi dari petani ditelusuri sampai ke lembaga pertanian yang terlibat.

2.2. Metode Pengambilan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data primer dengan menggunakan teknik survei observasi langsung dan wawancara dengan petani dan lembaga pemasaran.

1. Observasi adalah kegiatan kunjungan langsung terhadap petani dan lembaga pemasaran di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

2. Tujuan wawancara adalah untuk menanyakan sejumlah pertanyaan kepada petani dan lembaga pemasaran di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan kuesioner.

2.3. Metode Analisa Data

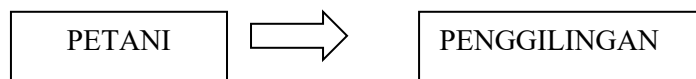
Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode ini bagian dari metode penelitian yang berupaya mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual, dan akurat dari pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan banyaknya saluran pemasaran gabah yang digunakan petani Daerah Aliran Sungai (DAS) Hilir Bengawan Solo Kecamatan Ngraho.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saluran pemasaran merupakan organisasi yang terhubung bersama mulai dari pembuat produk dan layanan tersedia bagi konsumen untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran adalah organisasi yang saling tercangkup dalam proses membuat produk dan jasa yang tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen (Nimas, 2019). Saluran pemasaran juga disebut sebagai penghubung petani dengan konsumen, melalui berbagai tingkatan lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran tersebut. Saluran pemasaran yang dilewati berpengaruh terhadap keuntungan yang diterima oleh lembaga pemasaran yang terlibat dalamnya. Lembaga yang terlibat dalam pemasaran gabah, dari petani sampai ke konsumen yaitu pedagang pengumpul dan pedagang besar. Berdasarkan data dari lapangan terdapat 3 saluran pemasaran :

3.1. Saluran pemasaran Pertama

Terdapat saluran pertama pemasaran di Daerah Aliran Sungai Hilir Bengawan Solo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.



Gambar 1. Saluran Pertama Pemasaran

Saluran pemasaran pertama gabah dijual petani ke penggiling dengan cara petani melakukan pemanenan padi secara mandiri kemudian dikeringkan. Petani pada saluran pertama menjual gabah dalam bentuk Gabah Kering Giling. Kelemahan dari saluran pertama adalah bagi petani yang tidak memiliki tempat penjemuran sendiri.

3.2. Saluran Pemasaran Kedua

Terdapat saluran pemasaran Kedua di Daerah Aliran Sungai Hilir Bengawan Solo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

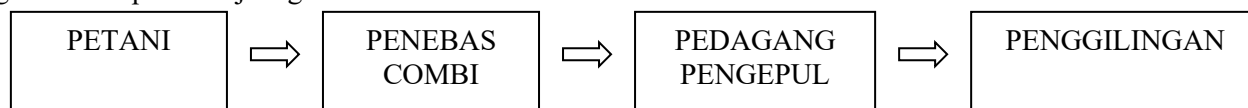


Gambar 2. Saluran kedua Pemasaran

Saluran pemasaran kedua petani menjual gabah ke pedagang pengepul dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP). Pedagang pengepul membantu petani dalam proses pemanenan padi disawah dalam bentuk menyediakan alat pemanenan dan tenaga kerja.

3.3. Saluran pemasaran ketiga

Terdapat saluran pemasaran Ketiga di Daerah Aliran Sungai Hilir Bengawan Solo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.



Gambar 3. Saluran Ketiga Pemasaran

Saluran ke tiga pemasaran petani menjual gabah ke penebas. Petani menerima hasil bersih kemudian penebas menjualnya ke pedagang pengepul. Konsumen akhir dari saluran pemasaran ini adalah pedagang penggiling.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan :

- Petani lebih banyak memilih saluran ke-2 karena ada ikatan Kerjasama
- Petani memilih saluran ke-2 dinilai lebih efektif
- Pedagang pengepul membantu petani dalam hal proses pemanenan

5. SARAN

- Untuk Petani : Petani harus memilih pedagang pengepul yang benar – benar dapat dipercaya dan sama – sama menguntungkan
- Untuk pedagang pengepul : pedagang harus memberikan harga sesuai yang ada dipasaran

6. DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro. *Laporan Data Dinas Pertanian dan*

Ketahanan Pangan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023. (Data Primer)

Nimas, 2019 *Analisis Efisiensi Pemasaran Agribisnis Padi Di Desa Kemamang Kecamatan Balen*

Kabupaten Bojonegoro, ORYZA–Vol. 5 No. 1 , Desember 2019 - ISSN: 2477 – 6963.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Arief. 2005. *Pemasaran Jasa Dan Kualitas Pemasaran*. Bayumedia Publishing.Malang.

Lubis, N. A. 2004. *Peranan Saluran Distribusi Dalam Padang*.

Evaluasi Perancangan Struktur Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) Ruas Jalan Suwaloh - Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Agustiya Eko Wahyudi¹, Florentina Pungky Pramesti², Ary Setyawan³

Program Studi S2 Teknik Sipil, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Jln. Ir. Sutami No.36A Surakarta 57126

Email : agustiyaekowahyudi07@student.uns.ac.id, f.p.pramesti@staff.uns.ac.id,
arysetyawan@staff.uns.ac.id

Abstrak: In Bojonegoro Regency, currently most of the road construction is rigid pavement. Because maintenance costs are relatively cheaper and the material durability is higher than flexible pavement. The road connecting Bulu Village, Balenrejo village and Suwaloh Village, Balen District, Bojonegoro Regency, hereinafter called Suwaloh – Margomulyo Road. This road is 1.8 kilometers long and stretches across 3 villages, namely Bulu Village to the east, Balenrejo Village in the middle, and Suwaloh Village to the west. The condition of the road at that time was badly damaged. One of the causes of the damage to the road was because during the harvest season the road was passed by trucks carrying rice with loads exceeding the permitted tonnage (Overload). So, this study will re-design rigid pavement and then compare the results, whether it becomes thicker or thinner. This study also compares the existing design RAB and alternative designs to be made by the authors. Based on the existing conditions on the Suwaloh - Margomulyo road section which plans road work with specifications using wiremesh iron reinforcement, strous, dowel, tiebar which are not in accordance with the guidelines of Rev 2003 and MDPJ 2017. Then it is necessary to evaluate the performance of the existing concrete slab. Based on the results of kenpave analysis, alternative designs were obtained with specifications of 25cm concrete slab thickness, plain concrete obtained Smaller load reps (Noccur) rather than repetition of load permits (Nizin) so that the design meets the criteria. Rigid pavement work does not use reinforcement or plain concrete amounting to Rp.5,819,699,461 including 11% VAT. From the calculation of the cost of each rigid pavement work using reinforcing iron with rigid pavement work without reinforcement or plain concrete, a cost difference of Rp. 3,079,456,000 is obtained, So, Alternative Design is Cheaper because Road Design does not Use Reinforcement

Keyword: Evaluation, Village Road Planning, Rigid Pavement

Abstrak: Di Kabupaten Bojonegoro, saat ini sebagian besar pembangunan jalan adalah perkerasan kaku. Karena biaya perawatan relatif lebih murah dan ketahanan material lebih tinggi dibandingkan perkerasan fleksibel. Jalan yang menghubungkan Desa Bulu, Desa Balenrejo dan Desa Suwaloh, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut Jalan Suwaloh – Margomulyo. Jalan ini memiliki panjang 1,8 kilometer dan membentang di 3 desa. Kondisi jalan saat itu rusak parah, Salah satu penyebab kerusakan jalan adalah karena saat musim panen jalan dilalui truk pengangkut padi dengan muatan melebihi tonase yang diizinkan (Overload). Jadi, penelitian ini akan mendesain ulang jalan rigid pavement. Berdasarkan kondisi eksisting pada ruas jalan Suwaloh - Margomulyo yang merencanakan pekerjaan jalan dengan spesifikasi menggunakan tulangan besi yang tidak sesuai dengan pedoman Pdt 2003 dan MDPJ 2017. Maka diperlukan evaluasi terhadap kinerja slab beton eksisting. Berdasarkan hasil Analisis kenpave didapatkan perancangan alternative dengan spesifikasi ketebalan slab beton 25cm, Beton polos didapatkan Repetisi beban yang terjadi ($N_{terjadi}$) lebih kecil daripada repetisi izin beban (N_{izin}) sehingga desain tersebut memenuhi kriteria. Pekerjaan perkerasan kaku tidak menggunakan tulangan atau beton polos sebesar Rp.5.819.699.461 sudah termasuk PPN 11%. Dari perhitungan biaya masing-masing pekerjaan perkerasan kaku menggunakan besi tulangan dengan pekerjaan perkerasan kaku tanpa tulangan atau beton polos diperoleh perbedaan biaya sebesar Rp. 3.079.456.000, Jadi, Perancangan Alternatif Lebih Murah dikarenakan dalam Perancangan Jalan tidak Menggunakan Tulangan.

Kata Kunci: Evaluasi, Perencanaan Jalan Desa, Rigid Pavement

1. PENDAHULUAN

Jalan yang menghubungkan Desa Bulu, Desa Balenrejo serta Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut Jalan Suwaloh – Margomulyo, sebelum tahun 2023 jalan tersebut menggunakan konstruksi paving. Jalan ini mempunyai panjang 1.8 kilometer dan terbentang di 3 desa, yaitu di sebelah timur Desa Bulu, Desa Balenrejo di tengah, dan Desa Suwaloh di sebelah barat. Kondisi jalan saat itu rusak parah, Salah satu penyebab kerusakan jalan tersebut adalah karena pada saat musim panen jalan dilewati kendaraan *truck* pengangkut padi dengan beban melebihi tonase yang diijinkan (*Overload*).

Dalam upaya mengatasi masalah jalan tersebut, terutama agar mendapat perhatian dan sumber daya yang dibutuhkan, Maka Pemerintah Desa Bulu mengajukan peningkatan status jalan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menanggapi dengan menerbitkan SK peningkatan status jalan Suwaloh – Margomulyo dari jalan Desa menjadi jalan Kabupaten.

Pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selaku pengelola baru jalan Suwaloh-Margomulyo berupaya mengatasi masalah kerusakan jalan tersebut dengan melakukan rekonstruksi menggunakan perkerasan kaku (*Rigid Pavement*). Hal ini dilakukan agar waktu tempuh melewati jalan tersebut lebih pendek, kenyamanan pengguna yang melaluinya meningkat, dan akses menuju Desa Desa yang dihubungkan semakin mudah. penelitian ini akan melakukan re desain perkerasan kaku lalu membandingkan hasilnya, Apakah jadinya lebih tebal atau lebih tipis. Penelitian ini juga membandingkan RAB desain eksisting dan desain alternatif yang akan dibuat oleh penulis mengacu pada SNI Pdt Tahun 2003 dan Manual Desain Perkerasan Jalan Tahun 2017.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di proyek rekonstruksi jalan Suwaloh – Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Jalan Suwaloh – Margomulyo mempunyai Panjang 1,8 km dan terbentang di 3 Desa, yaitu di sebelah timur Desa Bulu, Desa Balenrejo di tengah, dan Desa Suwaloh di sebelah barat

Pengumpulan data adalah salah satu peranan dasar untuk menemukan solusi untuk suatu masalah. Pada fase pengumpulan data, peran lembaga terkait dibutuhkan sebagai dukungan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan Untuk mencapai tujuan penelitian ini terdiri dari:

- A. **Data Primer** merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan, Yaitu:
 - Data teknik jalan : Peta lokasi
 - Standard harga satuan : Data harga satuan upah, alat, dan bahan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
- B. **Data sekunder** merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui tidak langsung dari Pemerintah Desa, Dinas Pekerjaan Umum serta Lembaga Kedinasan lain.
 - a. Faktor pertumbuhan volume lalu lintas kendaraan
 - b. Data Lalu Lintas harian.
 - c. Data berat setiap jenis kendaraan.
 - d. Uji Kepadatan Tanah CBR tanah
 - e. Modulus elastisitas beton, fungsi dari kuat tekan
 - f. Peraturan – peraturan tentang perancangan perkerasan jalan.
 - g. Survei Inventori Jalan
 - h. Peraturan – Peraturan tentang perancangan Perkerasan jalan.

2.1. Pengumpulan Data Lapangan

2.1.1. Survei Inventori Jalan

Survei inventori jalan dilakukan untuk mengetahui kondisi existing dan situasi lokasi perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada survei inventori adalah :

- a) Menentukan titik awal dan titik akhir.

- b) Mengamati kondisi jalan

2.1.2. *Survei Tanah*

Survei penyelidikan tanah, untuk mengetahui kondisi tanah dasar di lokasi perancangan sebagai dasar acuan penentuan bangunan bawah dari struktur yang direncanakan.

Kegiatan yang dilakukan pada survei pendahuluan tanah adalah ;

- a) Mengamati secara visual kondisi lapangan yang berkaitan dengan karakteristik tanah dan batuan.
- b) Mengamati perkiraan lokasi sumber material (*quarry*) sepanjang lokasi pekerjaan.
- c) Melakukan pemotretan pada lokasi-lokasi khusus (rawan longsor, dll).
- d) Melakukan uji kepadatan tanah menggunakan CBR.

2.1.3. *Survei Lalu - Lintas*

Survei lalu lintas, untuk mengetahui beban lalu lintas kendaraan dan jumlah total volume lalu – lintas di sekitar lokasi perencanaan sebagai dasar untuk memperkirakan dan merencanakan beban yang akan melalui jalan tersebut.

Kegiatan yang dilakukan pada survei lalu lintas adalah ;

- a) Mengumpulkan data kendaraan yang lewat, termasuk jumlah dan jenis kendaraan lalu – lintas serta berat jenis kendaraan.

2.2. *Perhitungan Struktur Perkerasan Jalan*

Setelah dilakukan Analisis terhadap data yang ada, selanjutnya dilakukan perhitungan tebal perkerasan jalan dengan menggunakan metode SNI Pd-T 2003. Perkerasan yang direncanakan dalam tesis ini adalah perkerasan kaku (*Rigid pavement*)

2.3. *Perhitungan Rencana Anggaran Biaya*

Setelah melakukan perancangan alternatif dengan menggunakan metode SNI P-DT 2003 maka akan diperoleh tebal perkerasan yang direncanakan, setelah itu melakukan perhitungan rencana anggaran biaya alternatif yang efektif dan efisien. Adapun langkah – langkah dalam perhitungan biaya sebagai berikut

2.3.1. *Merancang gambar kerja*

Perancangan gambar teknik pada RAB dibutuhkan untuk menentukan berbagai jenis pekerjaan, spesifikasi, dan ukuran material bangunan. Pastikan dari gambar kerja ini dapat ditentukan ukuran dan spesifikasi bahan bangunan. menghitung volume pekerjaan pun menjadi lebih mudah.

2.3.2. *Menghitung volume pekerjaan*

Langkah berikutnya adalah menghitung volume pekerjaan. Penghitungan ini dilakukan dengan cara menghitung banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan, misalkan per m², m³, atau per unit. Volume pekerjaan nantinya dikalikan dengan harga satuan pekerjaan, sehingga didapatkan jumlah biaya pekerjaan.

2.3.3. *Membuat dan menentukan harga satuan pekerjaan*

Harga satuan pekerjaan dapat dipisahkan menjadi harga upah pekerja dan bahan material. Anda hanya tinggal memasukkan harga berdasarkan harga yang berlaku di daerah tersebut

2.3.4. Menghitung jumlah biaya pekerjaan

Setelah volume dan harga satuan kerja di peroleh, maka langkah berikutnya adalah mengalikan angka tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah biaya dari masing-masing pekerjaan. Hitung jumlah biaya pekerjaan dengan mengalikan volume pekerjaan x harga satuan.

2.3.5. Membuat rekapitulasi

Langkah terakhir dalam membuat RAB adalah membuat bagian rekapitulasi. Rekapitulasi adalah hasil akhir masing-masing sub pekerjaan, contoh pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, atau pekerjaan beton.

2.4. Data Lalu – lintas

Tabel 1. Data Lalu Lintas Kendaraan Tahun 2023 Ruas Suwaloh - Margomulyo

Tahun	Jenis Kendaraan	LHR Ruas Jalan (smp/hari)
2023	Mobil Penumpang	628
	Bus	2
	Truk 2 As 4 roda	131
	Truk 2 As 6 roda	112
	Truk 3 As	26
	Sepeda Motor	5703

Sumber : Survey Lalu Lintas Harian Tahun 2023

2.5. Data Uji Kepadatan tanah (CBR)

Menentukan nilai CBR

Dari hasil pengamatan diperoleh harga CBR sebagai berikut :

Tabel 2. Data CBR Tanah Dasar

Titik	CBR (%)
1	2,71
2	7,13
3	5,2
4	2,04
5	6,42
6	3,75

Sumber : laboratorium Teknik Sipil Universitas Bojonegoro

Tabel 3. Rekapitulasi perhitungan laju pertumbuhan lalu lintas

No	Tahun	LHR	LHRo	LHRT	n	I
						(%)
1	2019	2628	-	-	1	0,00
2	2020	1440	2628	1440		-45,21
3	2021	3096	1440	3096		115,00
4	2022	3816	3096	3816		23,26
5	2023	4176	3816	4176		9,43
Pertumbuhan Lalu Lintas (i%)						20,50

Didapatkan nilai pertumbuhan lalu lintas (i) = 20,5 %

Dengan umur rencana 20 tahun dan pertumbuhan lalu lintas 20,5%, menggunakan persamaan 2.5 dapat dihitung faktor pertumbuhan lalu lintas

$$R = \frac{(1 + 0,205)^{20} - 1}{0,205} = 198,28$$

Beban lalu lintas dihitung berdasarkan jumlah kelompok sumbu kendaraan berat sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan beban lalu lintas

Jenis Kendaraan	Jumlah Kelompok Sumbu	LHR 2019	Kelompok Sumbu 2019	Jumlah Kelompok Sumbu 2019-2038
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mobil Roda 4	2	4	8	289484
Truk 2 As Roda 4	2	2	4	144742
Truk 2 As Roda 6	2	1	2	72371
Jumlah kumulatif sumbu kendaraan berat 2019-2038				506597

2.6. Input Data

Ada beberapa parameter yang harus diinput ke dalam program KENPAVE dalam hal ini untuk analisis pekerasan kaku menggunakan subprogram KENSLABS. Sebelum menggunakan program KENPAVE, pengaturan desimal pada perangkat komputer atau laptop harus menggunakan sistem internasional (titik sebagai pemisah desimal). Berikut langkah untuk menganalisis.

2.6.1. Tampilan Awal

Pada saat membuka program KENPAVE, berikut adalah tampilan awal. Pastikan *file name* yang digunakan adalah SLA1.DAT karena pada penelitian ini akan menganalisis slab tunggal dengan 1 kelompok beban.

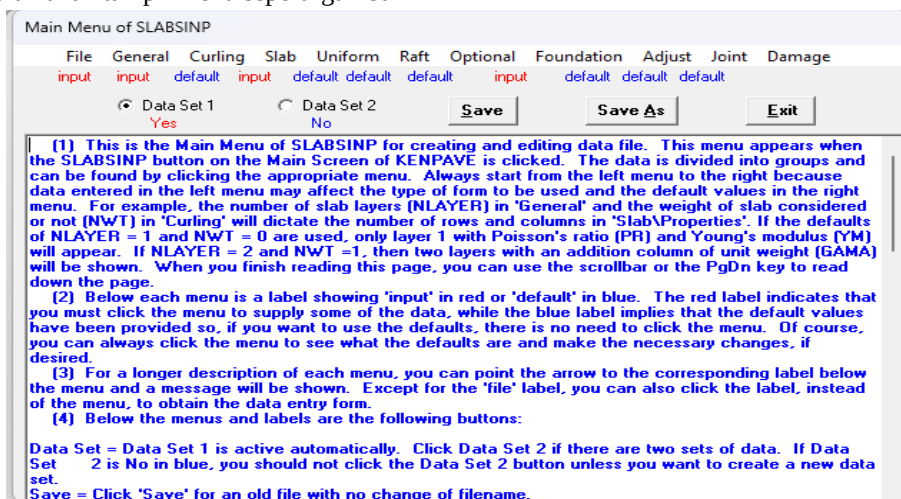


Gambar 1. Tampilan awal KENPAVE

Pilih menu SLABSINP untuk melakukan analisis perkerasan kaku.

2.6.2. SLABSINP

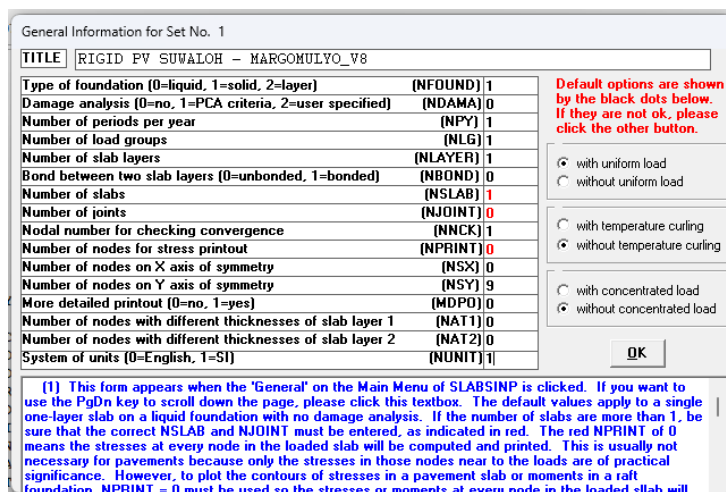
Kemudian akan tampil menu seperti gambar 2



Gambar 2 tampilan menu utama SLABSINP

Pilih menu *File* kemudian *New* untuk membuat dokumen analisis yang baru.

2.6.3. General



Gambar 3. Tampilan menu *General*

Memasukkan beberapa data umum pada menu *general* seperti pada gambar 3, kemudian pilih OK.

2.6.4. Slab

Pada menu *slab* akan ditampilkan menu untuk menginput data pengaturan *slab* dan karakteristik *slab*. Berikut pengaturan dan karakteristik *slab* yang akan dimasukkan.

Tabel 6. Jumlah sumbu X dan Y

Slab No.	NX	NY
1	8	7

Masukkan jumlah titik koordinat *slab* yang akan dianalisis, tekan *enter* dan masukkan titik koordinat X dan Y sebagai berikut.

Tabel 7. Koordinat X

Sequence	X (cm)
1	0
2	100
3	160
4	220
5	280
5	340
7	400
8	500

Tabel 8. Koordinat Y

Sequence	Y (cm)
1	0
2	25
3	50
4	130
5	170
6	250
7	300

Tabel 9. Karakteristik beton

Layer No.	T (cm)	PR	YM (kPa)
1	20	0,15	25742960,2

2.6.5. Uniform

Tabel 10. Load group dan jumlah NUDL

Load Group	NUDL
1	4

Penelitian ini menggunakan NUDL 4 yaitu kendaraan desain adalah STRG (Sumbu Tunggal Roda Ganda). Tekan *enter* kemudian akan muncul *window* seperti berikut.

Tabel 11. Load group 1

L. Seq*	LS	XL1 (cm)	XL2 (cm)	YL1 (cm)	YL2 (cm)	QQ (kPa)
1	1	0	10,266	0	14,141	720
2	1	0	10,266	36,659	50,8	720
3	1	0	10,266	195,58	209,721	720
4	1	0	10,266	232,239	246,38	720

2.6.6. Optional

Jumlah *node* sama dengan jumlah NPRINT pada menu *General. Node Printout* (NP) merupakan titik yang nantinya dihitung dan dicetak pada program. Nomor ini otomatis diisi oleh komputer mengikuti kasus atau *input* SLA1. Sedangkan *sequence Nodes Y Symetry* ditentukan pada *inout general* NSY. Pada tabel 12 ditunjukkan *Nodes Y Symetry*.

Tabel 12. Nodes of Y Symetry

Sequence*	NODSY
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

2.6.7. Foundation

Tabel 13. Solid foundation

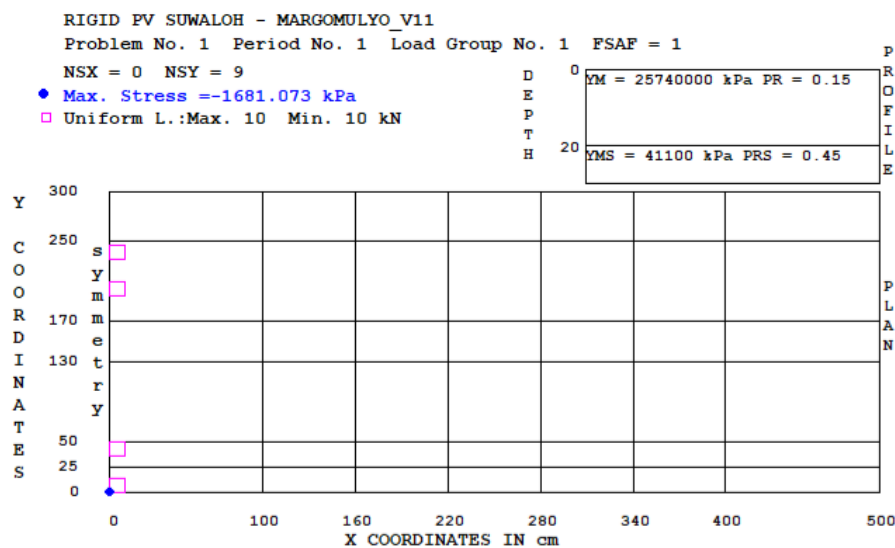
<i>Young's modulus of subgrade in kPa (YMS)</i>	41100
<i>Poisson's ratio of subgrade (PRS)</i>	0,45

2.6.8. Langkah akhir

Kemudian tekan *save as* dan berikan nama *file* sesuai yang dikehendaki. Tekan *exit* kemudian untuk analisis dapat menekan *KENSLABS* atau *KENSLABS LARGE RAM*.

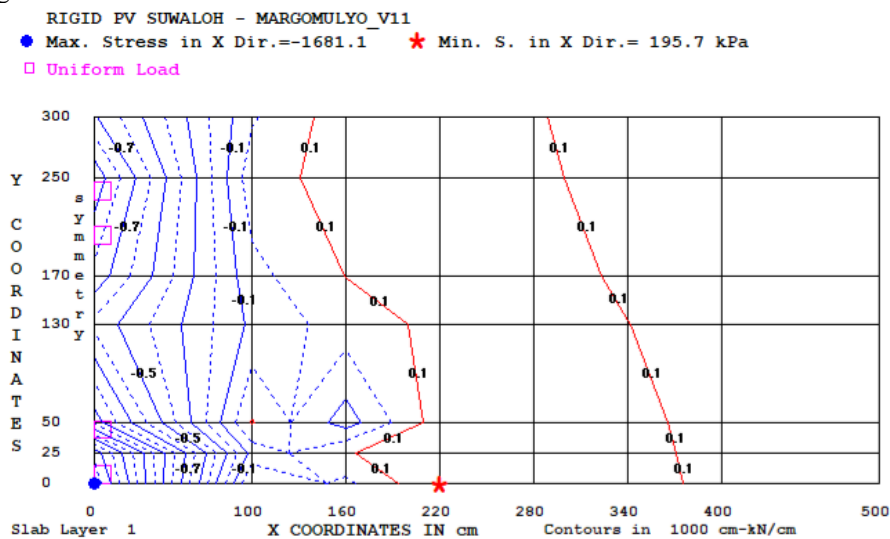
2.7. Output Analisis Kenpave

Menu SGRAPH pada KENPAVE akan menghasilkan *output* berupa ringkasan berupa parameter yang dimasukkan dan *stress* maksimal yang terjadi. *Stress* maksimum yang terjadi adalah sebesar 1681,073 kPa.

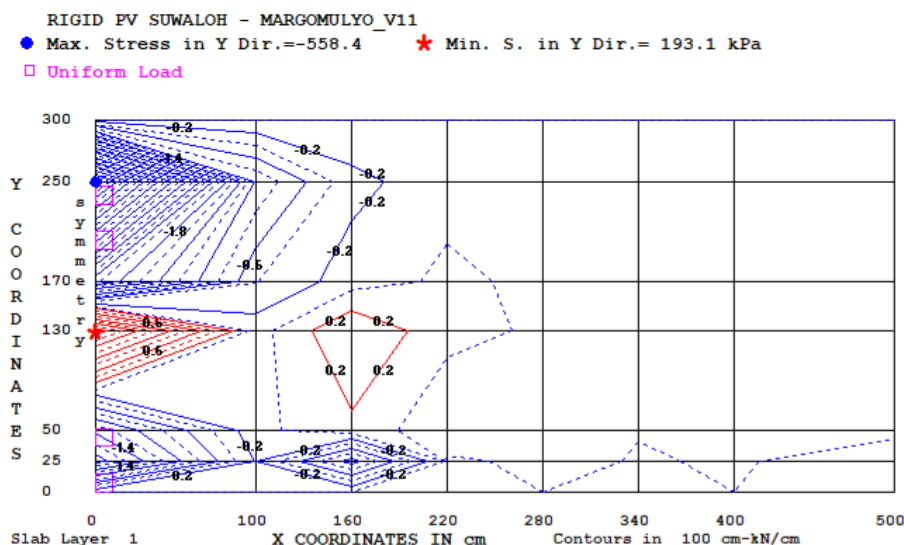


Gambar 2. Grafik SGRAPH

Menu CONTOUR pada KENPAVE akan menghasilkan *output* berupa sebaran gaya arah X dan Y seperti pada gambar 2 dan 3



Gambar 3. CONTOUR X DIRECTION



Gambar 4. CONTOUR Y DIRECTION

Stress maksimal yang terjadi pada arah X sebesar 1681,1 kPa sedangkan arah Y sebesar 558,4 kPa.

Analisis Evaluasi KENPAVE

Data:

1. Maximum stress (Se) = 1681,1 kPa = 1,68 MPa
2. Axle load group (P) = 80 kN

Table 7.6 Axle group loads which cause same damage as standard axle*

Axle group type	Load (kN)
Single axle with single tyres (SAST)	53
Single axle with dual tyres (SADT)	80
Tandem axle with single tyres (TAST)	90
Tandem axle with dual tyres (TADT)	135
Triaxle with dual tyres (TRDT)	181
Quad-axle with dual tyres (QADT)	221

* The axle group loads which cause equal damage are taken to be those loads which produce equal maximum deflection of the pavement surface.

Gambar 4 Tabel axle load group (Austroads, 2004)

3. Load safety factor (LSF) = 1,15

Table 9.2 Load Safety Factors (LSF) for rigid pavement types

Pavement type	Project design reliability				
	80%	85%	90%	95%	97.5%
PCP	1.15	1.15	1.20	1.30	1.35
Dowelled & CRCP	1.05	1.05	1.10	1.20	1.25

Gambar 5 Tabel Load safety factor (Austroads, 2004)

4. Load adjustment (F1) = 18 (untuk single axle with dual tyres)
5. Kuat tarik beton (fcf) = 4,11 MPa

Perhitungan:

$$Sr = \frac{S_e}{0,944 f'_{cf}} \left(\frac{P \cdot LSF}{4,45 F1} \right)^{0,94}$$
$$Sr = \frac{1,68}{0,944 \times 4,11} \left(\frac{80 \times 1,15}{4,45 \times 18} \right)^{0,94}$$
$$Sr = 0,49$$

Karena nilai $Sr = 0,45 \leq Sr \leq 0,55$ sehingga untuk menghitung repetisi beban yang diizinkan dapat menggunakan persamaan:

$$N_{izin} = \left(\frac{4,258}{Sr - 0,4325} \right)^{3,268}$$
$$N_{izin} = \left(\frac{4,258}{0,49 - 0,4325} \right)^{3,268}$$
$$N_{izin} = 1.044.638$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Perbandingan rencana anggaran biaya eksisting dan alternatif*

Perbandingan Biaya dan Metode Pelaksanaan

1. Dari hasil analisis biaya masing-masing paket pekerjaan konstruksi yang telah dibahas, untuk pekerjaan perkerasan kaku menggunakan tulangan besi sebesar Rp. 8.899.155.477 sedangkan untuk pekerjaan perkerasan kaku tidak menggunakan tulangan atau beton polos sebesar Rp.5.819.699.461, semua sudah termasuk PPN 11%.
2. Dari perhitungan biaya masing-masing pekerjaan perkerasan kaku menggunakan besi tulangan dengan pekerjaan perkerasan kaku tanpa tulangan atau beton polos diperoleh perbedaan biaya sebesar Rp. 3.079.456.000 Sehingga jika ditinjau dari segi biaya lebih menghemat pekerjaan dengan tidak menggunakan tulangan besi. Selisih perbedaan biaya pekerjaan konstruksi cukup besar/mahal, hal ini disebabkan karena pekerjaan konstruksi perkerasan kaku yang menggunakan tulangan besi harga besi cukup mahal, sedangkan pekerjaan konstruksi perkerasan kaku yang tidak menggunakan tulangan besi atau beton polos tidak perlu membutuhkan tulangan. Berdasarkan perhitungan beban lalu lintas pada subbab 4.2.1 didapatkan bahwa repetisi beban yang terjadi $N_{terjadi} = 506.597$. Analisis evaluasi desain perkerasan kaku menghasilkan repetisi izin beban $N_{izin} = 1.044.638$. Repetisi beban yang terjadi ($N_{terjadi}$) lebih kecil daripada repetisi izin beban (N_{izin}) sehingga desain tersebut memenuhi kriteria. Desain yang digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 - Tanah dasar merupakan tanah lunak dengan lapis penopang
 - Tidak menggunakan bahu pelat beton
 - Tebal perkerasan kaku adalah 200 mm
 - Tulangan distribusi retak dibutuhkan
 - Dowel dan LMC tidak dibutuhkan
 - Lapis fondasi kelas A (ukuran butir nominal maksimum 30 mm) setebal 125 mm
 - Jarak sambungan melintang 4 m.
- 3 Berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya, Perancangan Alternatif Lebih Murah dikarenakan dalam Perancangan Jalan tidak Menggunakan Tulangan.

DAFTAR PUSTAKA

Farnandu, Y., & Alzahri, S. (2022). ANALISA TEBAL PERKERASAN KAKU (RIGID PAVEMENT) DI DESA SERAPEK KECAMATAN TELUK GELAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI). VII(I), 20–27.

- Tias, S. A. N. (2020). Evaluasi Tebal Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) Dengan Metode Aashto 1993 Dan Metode Bina Marga Pd-T-14-2003 Menggunakan Tulangan Pada Ruas Jalan Sungai Jering - Kari. JURNAL PERENCANAAN, SAINS, TEKNOLOGI, DAN KOMPUTER (JUPERSATEK).
<http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/JUPERSATEK/article/view/881>
- Nababan, D. S., Utary, C., & Murdin, Z. D. M. (2021). Analisis Perencanaan Ulang Perkerasan Kaku Dengan Metode Manual Desain Perkerasan (MDP 2017). Musamus J. Civ. Eng.
<https://core.ac.uk/download/pdf/524798524.pdf>
- M. A. Nasution, N. Fajarriani, dan M. Idham, "Perbandingan Tebal Perkerasan Jalan Kaku Dengan Metode PD-T-14-2003 DAN MDPJ 2017 (Studi Kasus Jl. Yos Sudarso, Kota Dumai)," J. Tek. Sipil, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JTS/article/view/13614>
- Standard Nasional Indonesia, "Perencanaan Perkerasan Beton Semen", Pd-T 2003
- Henri Siswanto, Harnen Sulistio, Ludfi Djakfar, Ahmad Wicaksono, (2020) sistem manajemen jalan dan kondisi kerusakan jalan di indonesia: sebuah kajian pustaka
- Kusdima Joko Priyanto (2020), perbandingan perencanaan perkerasan jalan rigid pavement dengan menggunakan metode sni pd t-14-2003 dan naasra.
<https://media.neliti.com/media/publications>
- Kusuma, Moch. Rezaldi Dwi (2019) Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan Kaku Menggunakan Pedoman Bina Marga Pd T – 14 – 2003 Dan Aashto 1993 Pada Ruas Jalan Mojokerto – Gedek.
<https://eprints.umm.ac.id/>
- Sumina, & Priyanto, K. (2020). Perbandingan Perencanaan Perkerasan Jalan Rigid Pavement Dengan Menggunakan Metode SNI Pd T-14-2003 Dan NAASRA. Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur,
<http://repository.umsu.ac.id/>
- Chatiful, Ahmad Bethary, Rindu Pradana, Muhammad Fakhuriza, Perencanaan Tebal Lapis Perkerasan Kaku Dengan Metode Bina Marga 2003 Dan Metode AASHTO 1993 (Studi Kasus: Jalan Akses Tol Cilegon Barat) <https://www.researchgate.net/>

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa pada Pengembangan Jaringan Pamsimas

Didin Arianto¹, Koosdaryani Soeryodarundio², Fajar S. Handayani³

Program Studi Magister Teknik sipil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

¹ didinarianto@student.uns.ac.id, ²koosdaryani_sd@staff.uns.ac.id, ³fajarhani@ft.uns.ac.id

Abstract: This research aims to investigate the effect of community participation on increasing Village Original Income (PAD) in the context of developing the PAMSIMAS network. The research method uses a quantitative approach with surveys as a data collection instrument. The research sample was taken from a number of respondents who had implemented the PAMSIMAS network. Data was collected through questionnaires distributed to community members involved in the project. Data analysis was carried out using regression techniques to identify the relationship between the level of community participation and an increase in Village Original Income. It is hoped that the research results will provide a better understanding of the role of community participation in increasing Village Original Income, as well as provide useful input for policy development and implementation of infrastructure development at the village level.

Keywords: community participation, increase in PAD

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam konteks pengembangan jaringan PAMSIMAS. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei sebagai instrumen pengumpulan data. Sampel penelitian diambil dari sejumlah responden yang telah mengimplementasikan jaringan PAMSIMAS. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada warga masyarakat yang terlibat dalam proyek tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta memberikan masukan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan implementasi pengembangan infrastruktur di tingkat desa.

Kata Kunci : partisipasi masyarakat, peningkatan PAD

1. PENDAHULUAN

Program Pamsimas adalah salah satu program andalan pemerintah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. dimulai pada tahun 2008 di mana dalam pelaksanaannya sampai dengan tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi. Program ini juga meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 6800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten melalui berbagai upaya pemberdayaan Masyarakat dan telah meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan pemerintah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.

Masalah sosial kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks di Indonesia yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Banyak upaya kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan rakyat. Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2022 sebesar 9.22% (24.79 juta) orang mengalami penurunan sebesar 0.44% dibandingkan dengan September 2021 sebesar 25.67%. Kemiskinan di daerah pedesaan sebesar 12.60% sedangkan di daerah perkotaan sebesar 6.56% pada bulan September 2022. Salah satu faktor penurunan angka kemiskinan pada bulan September 2022 adalah dengan naiknya upah buruh sebesar 1.02%. Dari kondisi miskin yang ada di pedesaan lebih besar dari perkotaan, sebagian masyarakat desa yang berpenghasilan rendah tidak bisa menikmati air bersih maupun fasilitas sanitasi yang layak.

Kesinambungan pengelolaan air bersih di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dari Pemerintah dengan bentuk PAMSIMAS di bawah Kementerian Pekerjaan Umum) yang merupakan program pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan masyarakat pedesaan. Program PAMSIMAS bertujuan membangun sarana pengelolaan air bersih kemudian dikelola kesinambungannya oleh masyarakat. Program tersebut menggunakan konsep partisipasi masyarakat secara penuh dimana setiap kelompok masyarakat yang tergabung dalam satu dusun memiliki perwakilan masing-masing.

Kegiatan dalam PAMSIMAS yang berupa fisik dan non fisik yang semuanya berbasis masyarakat. Kegiatan fisik meliputi pembangunan sarana air bersih dan sanitasi seperti pembuatan hidran umum, sumur gali, sumur pompa tangan, dan lain-lain. Kegiatan non fisik seperti penyuluhan PHBS, limbah cair, penggunaan jamban sehat, cuci tangan, pelatihan dan peningkatan PHS (sampah, teknis sarana PHS, peningkatan kapasitas PHBS untuk kader), pelatihan administrasi dan keuangan, dan pelatihan teknik fisik (Afriadi dan Wahyono, 2012). Dana untuk membiayai kegiatan PAMSIMAS yang telah dituangkan dalam RKM atau Rencana Kegiatan Masyarakat bersumber dari kontribusi masyarakat, dana BLM dan APBN serta APBD.

Melalui PAMSIMAS diharapkan masyarakat dapat memprioritaskan air bersih dan sanitasi, karena meskipun mereka berada pada ekonomi menengah kebawah, dengan kemudahan tersebut mereka tetap bisa mengakses fasilitas air dan sanitasi untuk keberlangsungan hidupnya. Maka dengan itu derajat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat akan mengalami peningkatan sehingga pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia juga peningkatan yang baik.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian analitik. Jenis penelitian analitik adalah survey atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan *case control*, dimana peneliti melakukan pengukuran pada variabel dependen terlebih dahulu, sedangkan variabel independen ditelusuri secara retrospektif untuk menentukan ada tidaknya faktor yang berperan.

Pada penelitian ini populasinya adalah semua masyarakat yang ada di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo tahun 2023 yaitu 286 responden. Sampel pada penelitian ini sebagian dari populasi masyarakat yang ada di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

a. Kelompok kasus

Sampel kelompok kasus pada penelitian ini adalah masyarakat yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi yaitu karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang akan diteliti (Munir dkk, 2022). Kriteria inklusi pada kelompok kasus ini adalah :

1. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS.
2. Data lengkap desa.

b. Kelompok kontrol

Sampel kelompok kontrol pada penelitian ini adalah memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut :

1. Masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS.
2. Data lengkap desa

Adapun sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *unproportionate stratified random sampling*, teknik ini digunakan karena populasinya tidak homogen, mengacu pada pendapat Sugiyono (2019) bahwa, *proportional stratified random sampling* digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kemudian dilakukan tehnik *simple random sampling* yaitu cara pengambilan sampel dengan cara acak sederhana (Hidayat A, Aziz, 2019).

Setiap anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel. Pengambilan sampel bisa dilakukan dengan cara mengundi anggota populasi (*lottery technique*) atau teknik undian (Notoatmodjo S, 2019). Nama masyarakat ditulis pada secarik kertas sebanyak jumlah masyarakat, kemudian dimasukkan dikotak setelah itu diaduk dan diambil secara acak sejumlah masyarakat sesuai dengan rumus proporsional sampel diatas sehingga jumlah keseluruhan sampel adalah sebanyak 166 responden yang mewakili populasi.

Jumlah anggota sampel bertingkat (strata) dilakukan dengan cara pengambilan sampel secara *unproportionate random sampling* yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan

berstrata tetap sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya, dilakukan sampling ini karena anggota populasi heterogen (tidak sejenis) (Munir dkk, 2022). Oleh karena perbandingan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang tidak berpartisipasi terlalu kecil. Sehingga diperoleh :

1. Jumlah sampel masyarakat yang berpartisipasi sebanyak 110 orang
2. Jumlah sampel masyarakat yang tidak berpartisipasi sebanyak 56 orang

Sesuai dengan jenis penelitian dan jenis data, maka analisis yang digunakan dalam eksperimen ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus Statistik yang dalam pelaksanaan analisisnya menggunakan komputer program SPSS (*Statistic Program For Social Sciences*), dengan menggunakan analisis data *Mann Whitney U Test* merupakan pilihan uji non parametris apabila uji tindependen tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non parametris dari uji independent *t test*, uji *Mann Whitney U Test* tidak menguji perbedaan Mean (rerata) dua kelompok seperti layaknya uji Independen *T Test*, melainkan untuk menguji perbedaan Median (nilai tengah) dua kelompok.

Mann Whitney U Test adalah uji non parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median 2 kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval/ratio tetapi tidak berdistribusi normal (Unggul, 2017).

3. HASIL PENELITIAN

Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Uji validitas

Prinsip *validitas* adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip keandalan *instrument* dalam mengumpulkan data. *Instrument* harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dua hal penting yang harus dipenuhi dalam menentukan pengukuran yaitu instrumen harus relevan isi dan relevan cara (sasaran) (Nursalam, 2016). Untuk uji *validitas* peneliti menggunakan rumus *pearson product moment*. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (0,444), pada $dk = n-2$ dan $\alpha = 0,05$ maka instrument dikatakan valid (Hidayat, 2014).

Hasil validitas kuesioner berdasarkan teknik analisis di atas adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji validitas kuesioner partisipasi masyarakat

Tabel 1 hasil uji validitas kuesioner pola makan

No.	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	0.792	0,632	Valid
2.	0.838	0,632	Valid
3.	0.827	0,632	Valid
4.	0.772	0,632	Valid
5.	0.843	0,632	Valid
6.	0.719	0,632	Valid
7.	0.787	0,632	Valid
8.	0.766	0,632	Valid
9.	0.867	0,632	Valid

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan nilai $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa seluruh butir soal pada kuesioner pola bernilai valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan (Nursalam, 2016). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *cronbach's alpha* (Hidayat, 2014). Teknik untuk mengukur reabilitas kuesioner pola makan yaitu menggunakan rumus *Cornbach's alpha*. Jika skala dikelompokkan *alpha cornbach* dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai alpha cron bach 0,00 sampai 0,02 berarti kurang reliable
2. Nilai alpha cron bach 0,21 sampai 0,40 berarti sedikit reliable
3. Nilai alpha cron bach 0,41 sampai 0,60 berarti cukup reliable
4. Nilai alpha cron bach 0,61 sampai 0,80 berarti reliable
5. Nilai alpha cron bach 0,81 sampai 1,00 berarti sangat reliable

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.928	9

Hasil uji realibilitas pada kuesioner partisipasi masyarakat di dapatkan hasil koefisien *Cornbach's alpha* sebesar 0,928 maka dapat dikatakan tes kuesioner partisipasi masyarakat termasuk sangat reliable.

3.1. Analisis Data

3.1.1. Partisipasi Masyarakat

Distribusi responden berdasarkan partisipasi masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Distribusi partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat	Frekuensi (f)	%
1. Tidak partisipasi	56	33,7
2. Partisipasi	110	66,3
Jumlah	166	100

Sumber : Data primer penelitian September 2023

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa dari 166 responden, sebagian besar masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebanyak 110 responden (66,3%) dan kurang dari sebagian masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebanyak 56 responden (33,7%).

3.1.2. Peningkatan PAD

Distribusi responden berdasarkan peningkatan PAD disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi peningkatan PAD

Peningkatan PAD	Frekuensi (f)	%
1. Tidak meningkat	57	34,3
2. Meningkat	109	65,7
Jumlah	166	100

Sumber : Data primer penelitian September 2023

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa dari 166 responden, sebagian besar pendapatan asli desa meningkat pada pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebanyak 109 responden (65,7%) dan kurang dari sebagian masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebanyak 57 responden (34,3%).

3.1.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Peningkatan PAD pada pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah

Tabel 5. Tabulasi Silang Partisipasi Masyarakat terhadap Peningkatan PAD pada pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur

Partisipasi Masyarakat	Peningkatan PAD				Total	
	Tidak meningkat		Meningkat			
	f	%	f	%	f	%
Tidak partisipasi	55	33,1	1	0,6	56	33,7
Partisipasi	2	1,2	108	65,1	110	66,3
Jumlah	57	34,3	109	65,7	166	100,0
p=0,000						

$p=0,000$

Sumber : Hasil Analilis Data September 2023

Tabel silang diatas menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah sebagian besar pendapatan asli desa meningkat sebesar 108 responden (65,1%) dan masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah kurang dari sebagian pendapatan asli desa tidak meningkat yaitu sejumlah 55 responden (33,1%).

Tabel 6. Tabel Uji Statistik (*Wilcoxon Mann Whytney*) Perbedaan Partisipasi Antara masyarakat yang berpartisipasi Dan tidak berpartisipasi dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah

Test Statistics^a

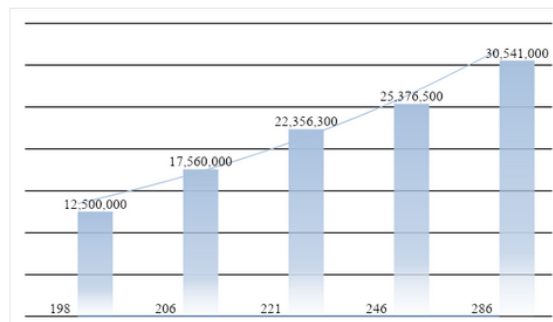
PENINGKATAN PAD	
Mann-Whitney U	111.000
Wilcoxon W	1707.000
Z	-12.329
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: PARTISIPASI MASYARAKAT

Nilai *Asymp sig. (2.tailed)* = 0,000

Dari kedua variabel tersebut setelah diuji signifikasinya dengan menggunakan uji statistik *wilcoxon mann whytney* dengan menggunakan *program SPSS for Windows Versi 22.0* didapatkan nilai *Asymp sig. (2.tailed)* = 0,000, yang berarti nilai tersebut memenuhi standart yaitu kurang dari signifikasi $\alpha = 0,05$ berarti H_0 ditolak atau yang berarti ada pengaruh Antara masyarakat yang berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah Di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan PAMSIMAS tahun 2019-2023 ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Grafik Peningkatan Jumlah Pelanggan Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan gambar 4.1 bahwa persentase rumah tangga untuk memiliki akses terhadap layanan air mengalami peningkatan. Gambar 4.1 data persentase rumah tangga di Desa Pekuwon Kecamatan

Sumberrejo yang memiliki akses terhadap PAMSIMAS pada Tahun 2019 sebanyak 198 rumah tangga ada peningkatan di tahun 2020 sebanyak 206 rumah tangga, tahun 2021 sebanyak 221 rumah tangga, tahun 2022 sebanyak 246 orang dan tahun 2023 sebanyak 286 rumah tangga. Artinya tujuan pencapaian PAMSIMAS di Desa Pekuwon mencapai target yang ditentukan sebelum tahun 2030.

4. KESIMPULAN

1. Sebagian besar masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebanyak 110 responden (66,3%) atau sejumlah 286 sambungan rumah.
2. Sebagian besar pendapatan asli desa meningkat pada pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur tengah di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebanyak 109 responden (65,7%) atau sejumlah Rp. 30.541.000.
3. Ada Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peningkatan PAD dalam pengembangan jaringan PAMSIMAS sumur di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Didapatkan nilai *Asymp sig. (2.tailed)* = 0,000.

5. DAFTAR PUSTAKA

- T. Afriadi and H. Wahyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan," *J. Pembang. Wil. Kota*, vol. 8, no. 4, p. 341, 2012, doi: 10.14710/pwk.v8i4.6489.
- Y. Siti Hajar, Irwan Syari Tanjung, *No Title*. Medan: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH AQLI, 2018.
- W. Septiana, "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Bersih Didukuh Jurugan Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," 2016.
- Isbandi, "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah," *eJournal Adm. Negara*, vol. 1, no. 2, p. 27, 2007, [Online]. Available: [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL DEA \(05-24-13-09-02-30\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL DEA (05-24-13-09-02-30).pdf).
- Sunarti, "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan secara berkelompok," *Tata Kota*, p. 5, 2003, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Partisipasi+Masyarakat+dalam+Pembangunan+Perumahan+Secara+Kelompok&btnG=.
- A. F. Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa," *Manaj. dan Ekon.*, vol. 1, no. 2, pp. 15–29, 2018.
- B. Chatib, "Sistem Penyediaan Air Bersih," 1996, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sistem+Penyediaan+Air+Bersih+Chatib&btnG=.
- J. R. Kodoatie, "Pengantar manajemen infrastruktur," 2005, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?q=Pengantar+Manajemen+Infrastruktur+kodoatie&hl=id&as_sdt=0,5.
- N. G. S, "Water resources management: principles, regulations, and cases," 1996, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Water+Resources+Management%2C+Principles%2C+Regulation%2C+and+Cases&btnG=.
- S. Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- M. Munir, D. Kurnia, Suhartono, N. Safaah, and A. P. Utami, "Metode Penelitian Kesehatan Penerbit,"

Eureka Media Aksara, pp. 1–178, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

K. N. Beni, N. Nursalam, and M. Hasinuddin, “Uji Validitas dan Reliabilitas Leadership Behavior Inventory, Personal Mastery Questionnaire dan Kuesioner Kinerja Perawat di Rumah Sakit,” *J. Penelit. Kesehat. “SUARA FORIKES” (Journal Heal. Res. “Forikes Voice”)*, vol. 11, no. 3, p. 313, 2020, doi: 10.33846/sf11318.